



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERAN LEMBAGA PENDIDIKAN DALAM UPAYA
PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA BAGI
PELAJAR SLTA DI JAKARTA BARAT**

T E S I S

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Sains (M.Si)**

A. KADARMANTA

0906505376

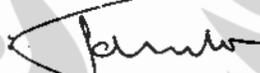
**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI KAJIAN KETAHANAN NASIONAL
PEMINATAN KAJIAN STRATEJIK PENANGANAN NARKOBA
JAKARTA
JULI 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : A. Kadarmananta

NPM : 0906505376

Tanda Tangan : 

Tanggal : 7 Juli 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : A. Kadamanta
N P M : 0906505376
Program Studi : Pengkajian Ketahanan Nasional
Kekhususan : Kajian Stratejik Penanganan Narkoba
Judul Tesis : Peran Lembaga Pendidikan Dalam Upaya Pencegahan
Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pelajar SLTA Di Jakarta Barat.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar **Magister Sains (M.Si)** pada program Studi : Pengkajian Ketahanan Nasional. Kekhususan : Kajian Stratejik Penanganan Narkoba, Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Dr. Chandra Wijaya, M.Si.
Pembimbing : Drs. Nicolaus Eko R. PgD., M.Sc.
Ketua Sidang : Dr. dr.H.Hadiman, SH., M.Sc.
Penguji : Drs. Bambang Abimanyu, MM.
Penguji : Dr. H. Margani M. Mustar



Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 7 Juli 2011

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas bimbingan dan ridonya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akademis hingga selesainya penyusunan Tesis yang berjudul Peran Lembaga Pendidikan Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pelajar SLTA di Jakarta Barat.

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Jakarta Barat terhadap para narasumber atau informan baik pakar maupun praktisi pengembangan tugas di bidang pendidikan, pencegahan penyalahgunaan narkoba, dan komponen pendidikan, serta tokoh masyarakat yang terlibat dalam Dewan Pendidikan maupun Komite Sekolah. Dalam hal ini tentunya dengan berbagai keterbatasannya, namun dapat berjalan dengan lancar hingga mencapai kesimpulan.

Sebagaimana tujuan yang ingin penulis capai melalui penelitian ini maka telah tergambarkan bahwa pada hakekatnya lembaga pendidikan memiliki peran penting dan strategis dalam upaya pencegahan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba bagi pelajar SLTA. Namun demikian dalam implementasinya program pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba bagi pelajar SLTA tersebut masih terus perlu ditingkatkan efektivitasnya, mengingat program yang telah ada dan berjalan selama ini sebagian program masih bersifat sporadis dan belum secara khusus. Untuk itu maka diperlukan analisis kondisi saat ini, kendala-kendala, dan berbagai upaya demi terwujudnya optimalisasi peran lembaga pendidikan tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konstruktif bagi peningkatan efektivitas lembaga pendidikan, Institusi pemerintah terkait lainnya, masyarakat, orang tua siswa, maupun Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai *focal point* (lembaga yang dikedepankan) dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba khususnya bagi pelajar SLTA di masa mendatang.

Selanjutnya penulis menyampaikan terima kasih kepada pimpinan BNN yang telah membuat kebijakan pengembangan sumber daya manusia yang memiliki

kompetensi di bidang penanganan narkoba sehingga penulis mendapatkan kesempatan mengembangkan ilmu pengetahuan melalui kebijakan tersebut. Terima kasih penulis kepada para dosen dan civitas akademika yang telah dengan tulus hati memberikan pelayanan dalam proses perkuliahan. Terima kasih pula kepada Prof. Dr. Chandra Wijaya, M.Si. dan Drs. Nicolaus Eko R, PgD., M.Sc, beliau berdua selaku pembimbing tesis yang dengan penuh dedikasi telah memberikan andil yang sangat berarti dalam proses penulisan tesis ini. Tentunya tak lupa pula terima kasih penulis kepada seluruh teman-teman mahasiswa seperjuangan yang dengan tekun, penuh ketulusan hati, dan keseriusan telah bersama-sama dalam proses perkuliahan, berbagi pengetahuan serta pengalaman guna penyelesaian tugas kuliah hingga berakhirnya tugas akhir penyusunan tesis.

Jakarta, 30 Juni 2011

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademi saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : A. Kadarmananta
N P M : 0906505376
Program Studi : Pengkajian Ketahanan Nasional
Peminatan : Kajian Stratejik Penanganan Narkoba
Program : Pascasarjana Universitas Indonesia
Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : Peran Lembaga Pendidikan Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan narkoba Bagi Pelajar SLTA di Jakarta Barat.

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 7 Juli 2011

Yang menyatakan



A. Kadarmananta

ABSTRAK

Nama : A. Kadamanta
Program Studi : Pengkajian Ketahanan Nasional
Peminatan : Kajian Stratejik Penanganan Narkoba
Judul : Peran Lembaga Pendidikan Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pelajar SLTA di Jakarta Barat.

Tesis ini membahas tentang peran lembaga pendidikan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi pelajar SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas) di Jakarta Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan pengetahuan dan analisis terhadap kondisi saat ini maupun kendala-kendala serta upaya yang perlu dilakukan dalam rangka pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba bagi pelajar SLTA di Jakarta Barat baik yang telah berjalan selama ini untuk masa yang akan datang. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyatakan bahwa lembaga pendidikan memiliki peran yang sangat strategis dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi pelajar SLTA. Untuk mewujudkan peran lembaga pendidikan tersebut diperlukan upaya-upaya yang efektif yang melibatkan komponen pendidikan dan komponen masyarakat. Perlunya melibatkan berbagai institusi terkait tersebut mengingat karakteristik program pencegahan penyalahgunaan narkoba membutuhkan keterlibatan berbagai pihak termasuk BNN sebagai *focal point* serta *institusi terkait* dalam pencegahan narkoba di lingkungan pendidikan. Pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba bagi pelajar perlu dilakukan dengan pendekatan *prevention education*, secara komprehensif, dimuat di dalam kurikulum secara terintegrasi dengan mata pelajaran yang relevan, berkelanjutan, dengan materi dan metode serta evaluasi yang terukur.

Kata kunci :

Peran lembaga pendidikan, pencegahan penyalahgunaan narkoba, pelajar SLTA, peran serta BNN, institusi terkait, dan komponen pendidikan.

ABSTRACT

Name : A. Kadarmanta.
Study Program : National Security Assessment.
Specialisation : Strategic Study on Drugs.
Title : The Role of Educational Institutions In Drug Abuse Prevention for High School Students in West Jakarta.

This thesis discusses the role of educational institutions in efforts to prevent drug abuse for students SLTA (Senior High School) in West Jakarta. The purpose of this study is to gain knowledge and analysis of current conditions and constraints as well as the efforts that need to be done in order to prevent abuse and illicit drugs for senior high school students in West Jakarta which has been running well so far for the foreseeable future. This study is a descriptive qualitative research design. The results state that educational institutions have a very strategic role in drug abuse prevention for high school students. To realize the role of educational institutions is necessary that effective efforts that involve an educational component and community components. The necessity of involving the various relevant institutions are given the characteristics of drug abuse prevention programs requires the involvement of various parties including the BNN as a focal point as well as relevant institutions in drug prevention education in the environment. Prevention of abuse and illicit drug for the student needs to be done with the approach prevention education, comprehensive, contained in an integrated curriculum with relevant subjects. sustainable, with the materials and methods and measurable evaluation.

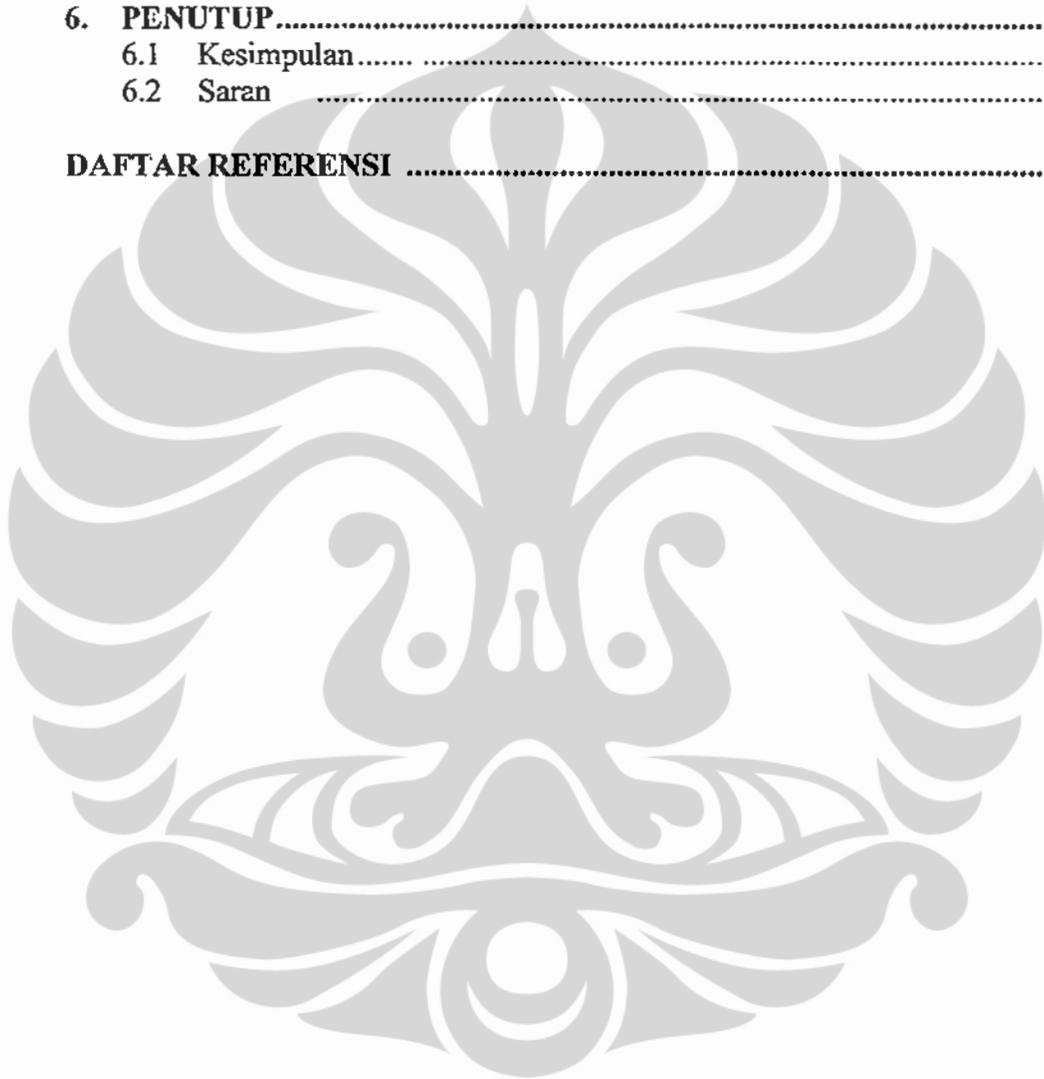
Key words:

The role of educational institutions, drug abuse prevention, high school students, the role of the BNN, institutions, and educational components.

DAFTAR ISI

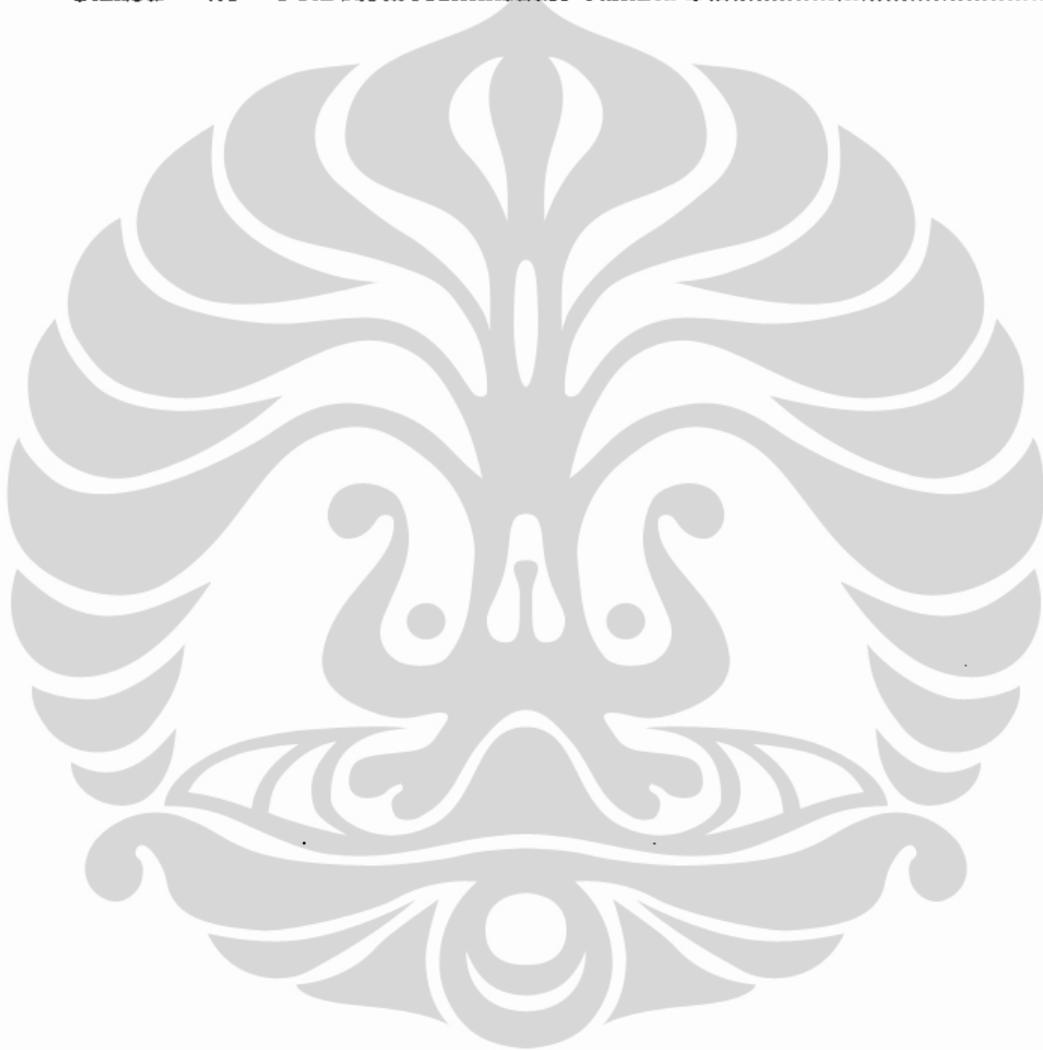
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Pertanyaan Penelitian	16
1.3. Tujuan Penelitian.....	17
1.4. Manfaat Penelitian.....	17
1.2.2 Manfaat akademis.....	17
1.2.3 Manfaat praktis	17
2. TINJAUAN LITERATUR.....	18
2.1 Review Hasil Penelitian Yang Terkait Dengan Penyalahguna Narkoba Oleh Pelajar dan Mahasiswa Maupun Masalah Kenakalan Remaja Lainnya	18
2.2 Pengertian-pengertian	21
2.3 Konsep dan Teori.....	24
3. METODE PENELITIAN.....	39
3.1 Paradigma <i>qualitative riset</i> (riset kualitatif).....	39
3.2 Jenis penelitian	40
3.3 Setting Penelitian.....	40
3.4 Subyek Penelitian	41
3.5 Teknik Pengumpulan data	42
3.6 Tehnik Analisis Data	42
3.7 Tehnik Pengecekan Keabsahan Temuan	43
3.8 Tahap-tahap Penelitian	43
4. GAMBARAN UMUM WILAYAH JAKARTA BARAT.....	44
5. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
5.1 Keterbatasan Penelitian	52

5.2 Hasil Penelitian.....	52
5.3 Pembahasan	76
5.3.1 Kondisi Saat Ini.....	77
5.3.2 Kendala-Kendala Untuk Mewujudkan Kondisi Yang Diharapkan.....	96
5.3.3 Upaya-Upaya Yang Perlu Dilakukan Untuk Mewujudkan Peran	113
6. PENUTUP.....	145
6.1 Kesimpulan.....	145
6.2 Saran	151
DAFTAR REFERENSI	153



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2	Faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkoba	33
Gambar 2.3	Interaksi Tiga Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkoba.....	34
Gambar 3.1	Struktur subyek penelitian (informan)	41
Gambar 4.1	Peta Kota Adminstrasi Jakarta Barat.....	45



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tanda-Tanda Sebelum dan sesudah Menggunakan narkoba	36
Tabel 3.1 Struktur Subyek Penelitian/Informan.....	41
Tabel 4.1 Ekonomi PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto) Daerah Jakarta Barat.....	48
Tabel 5.1 Program mewujudkan cita - cita bersama Indonesia bebas narkoba program bersama tentang drugs free	142
Tabel 5.2 Indikator Kuantitatif	143



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Daftar Nara Sumber/Subyek Penelitian
- Lampiran 3 Pengelompokan hasil wawancara
- Lampiran 4 Pedoman Dinas Pendidikan tentang Penataan Wiyata Mandala
- Lampiran 5 Model Distribusi Nilai-Nilai Utama ke dalam Mata Pelajaran Pendidikan karakter.
- Lampiran 7 Surat Permohonan data dan Wawancara dengan Nara Sumber



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan pesatnya perkembangan jaman dan semakin kompleksnya tantangan dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia maka semakin tinggi pula tuntutan untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas unggul. SDM berkualitas unggul yang diyakini akan mampu eksis dalam menghadapi kemajuan dunia era globalisasi ini. Diperlukan langkah strategis dan konsisten, berkelanjutan, dan senantiasa diaktualisasikan secara terus-menerus dalam kehidupan manusia sehari-hari. Salah satu jawaban terhadap tuntutan tersebut adalah melalui peran lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dan strategis dalam meningkatkan kualitas SDM.

Makna yang terkandung dalam pendidikan adalah terjadinya sebuah proses perubahan untuk membentuk watak serta peradaban manusia yang bermartabat, cerdas, dan berakhlak mulia sehingga mampu menjawab tantangan jaman tersebut. Dalam proses mewujudkan SDM yang berkualitas unggul niscaya akan terhambat bahkan terancam apa bila di tengah-tengah masyarakat dan bangsa kita ini semakin marak terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Lembaga pendidikan merupakan sasaran strategis dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba mengingat melalui peran lembaga pendidikan ini generasi muda usia pelajar di tingkat pendidikan menengah berkumpul melakukan aktivitas dalam program pendidikan. Oleh karenanya lembaga pendidikan tepat bila dijadikan sebagai pusat keunggulan (*centre of excellence*) dalam mempersiapkan sumber daya manusia berkualitas unggul baik melalui pendidikan karakter, transformasi nilai-nilai sosial, budaya, maupun ilmu pengetahuan. Sekolah menengah sebagai lembaga pendidikan menjadi Wawasan Wiyata Mandala yang maknanya merupakan konsepsi atau cara pandang bahwa sekolah adalah lingkungan penyelenggaraan pendidikan.¹

¹. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Menengah Dan Tinggi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 520.1 /2007 tentang Penataan Wiyata Mandala di SMA/SMK dalam lingkungan Dinas Pendidikan menengah dan tinggi Provinsi DKI Jakarta.

Salah satu sasaran strategis dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba adalah lingkungan pendidikan,² yang melingkupi sekolah dan kampus. Sebagai lembaga yang dikedepankan (*focal point*) dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba, BNN telah menjadikan lingkungan pendidikan sebagai sasaran strategis pencegahan penyalahgunaan narkoba tersebut. Lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam mempersiapkan dan membentuk sumber daya manusia yang berkualitas unggul baik dari aspek intelektual maupun perilaku. Sejalan dengan tujuan, visi, dan misi pendidikan nasional yakni dalam aspek pembimbingan dan pembelajaran. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan jaman. Untuk mewujudkan cita-cita ini diperlukan perjuangan dan dukungan seluruh lapisan masyarakat.

Lembaga pendidikan menengah sebagai bagian integral pendidikan nasional. Pada hakekatnya pendidikan nasional merupakan pilar tegaknya bangsa, untuk itu maka melalui pendidikan inilah bangsa akan tegak dan tetap mampu menjaga martabatnya. Pendidikan nasional juga berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi anak didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.³ Visi dan misi pendidikan nasional.⁴

“Visi : terselenggaranya layanan prima pendidikan nasional untuk membentuk insan Indonesia cerdas komprehensif. Misi : Ketersediaan, meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan. Sebagai upaya menyediakan sarana-prasarana dan infra struktur satuan pendidikan (sekolah) dan penunjang lainnya.

² Paulina G Padmohoedojo, Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Reconindo, 2003, hlm. 28.

³ Sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 3 Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

⁴ Sumber diunduh diunduh dari <http://www.kemdiknas.go.id/kementerian/kementerian-pendidikan-nasional/visi-misi.aspx>

Keterjangkauan memperluas keterjangkauan layanan pendidikan. Mengupayakan kebutuhan biaya pendidikan yang terjangkau oleh masyarakat. Kualitas, meningkatkan kualitas/mutu dan relevansi layanan pendidikan. Sebagai upaya mencapai kualitas pendidikan yang berstandar nasional dalam rangka meningkatkan mutu dan daya saing bangsa. Kesetaraan, mewujudkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan. Tanpa membedakan layanan pendidikan antarwilayah, suku, agama, status sosial, negeri dan swasta, serta gender. Kepastian jaminan, menjamin kepastian memperoleh layanan pendidikan. Adanya jaminan bagi lulusan sekolah untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya atau mendapatkan lapangan kerja sesuai kompetensi.”

Sekolah merupakan jalur pendidikan formal, terstruktur, dan berjenjang memiliki peran sebagai lembaga yang membantu lingkungan keluarga untuk mendidik, mengajar, dan memperbaiki serta memperhalus tingkah laku anak didik yang dibawa dari keluarganya.⁵ Dalam pengembangan kepribadian para anak didik sekolah memiliki peran yang sangat penting. Sekolah melalui program kegiatannya yang bersifat mendidik memberikan kesempatan kepada anak didik belajar bergaul dengan sesama anak didik, antara anak didik dengan guru, anak didik dengan karyawan, belajar menaati peraturan sekolah serta mempersiapkan anak didik menjadi anggota masyarakat yang berguna bagi bangsa, agama, dan negara.

Secara faktual sebagian besar pembentukan kecerdasan, sikap, dan minat, sebagai bagian pembentukan kepribadian dilaksanakan di sekolah, untuk itu maka peran sekolah sangat penting dan besar pengaruhnya. Dalam peran pembimbingan melalui berbagai upaya untuk membina pelajar sebagai peserta didik agar memiliki sikap dan perilaku dewasa sebagaimana yang telah dirumuskan dalam tujuan pendidikan. Sedangkan peran lembaga pendidikan di bidang pembelajaran adalah melalui penyelenggaraan program pengajaran sebagaimana penerapan kurikulum yang memuat serangkaian kegiatan pembelajaran dengan tujuan untuk meningkatkan kecerdasan anak didik khususnya dan bangsa pada umumnya. Untuk itu maka

⁵. Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

kegiatan pembelajaran dilakukan di kelas atau di luar kelas dengan acuan kurikulum pendidikan tersebut merupakan bagian dari pendidikan karakter bagi anak didik tersebut.

Terdapat berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan menengah untuk meningkatkan potensi diri, dan pengembangan kepribadian serta mentalitas yang handal para anak didik. Kegiatan tersebut meliputi Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Kepramukaan, Olah Raga dan Seni, Gerakan Pecinta Alam (GPA) dan kegiatan lain yang ditetapkan oleh sekolah sebagai program ekstra kurikuler. Kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di lingkungan pendidikan menengah tersebut bertujuan agar para pelajar SLTA tersebut tumbuh menjadi manusia berkepribadian dewasa dan tangguh untuk menghadapi tuntutan perkembangan jaman. Indikasi kepribadian dewasa adalah kemampuan mengendalikan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan maupun yang menyimpang, antara lain mampu menolak narkoba. Dari berbagai program kegiatan yang dirancang baik yang termasuk dalam kurikulum maupun kegiatan ekstra kurikuler pada hakekatnya memiliki tujuan untuk membentuk kepribadian yang berkarakter unggul. Melalui proses ini maka salah satu tujuannya adalah meningkatkan kematangan individu sehingga mampu mengambil keputusan untuk berperilaku positif dan normatif.

Peran lembaga pendidikan menengah adalah untuk menjawab kebutuhan mewujudkan sumber daya manusia berkualitas melalui pembinaan para pelajar menuju perilaku yang lebih dewasa. Usia dewasa adalah 18 tahun.⁶ Pada umumnya pelajar SLTA adalah antara usia 16 sampai dengan 18 tahun sehingga masih tergolong remaja dengan karakteristik berkepribadian labil dan dalam proses pencarian jati diri, mudah terpengaruh oleh arus lingkungan pergaulan. Adanya kepercayaan masyarakat dan orang tua untuk menyerahkan pendidikan anak-anaknya kepada sekolah sebagai lembaga pendidikan formal yang diyakini mampu berperan membimbing para pelajar. Tuntutan tersebut sekaligus telah menjadi beban sekolah di

⁶. UU no. 30/2004 bahwa setiap orang yang sudah berusia 18th atau sudah menikah, dianggap sudah dewasa, dan berhak untuk bertindak selaku subjek hukum.

bidang pembinaan kepribadian dan pengembangan potensi akademik yang semakin berat. Terlebih dengan kondisi masyarakat yang kurang kondusif seperti halnya adanya kecenderungan mencari jalan pintas, hegemoni, pengaruh kemajuan teknologi informasi, dan semakin suburnya penyakit sosial. Hal tersebut telah berpengaruh terhadap kualitas pendewasaan para pelajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).

Di tengah tumbuhnya peradaban bangsa yang semakin tinggi dewasa ini telah semakin marak pula peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba yang mengancam mengancam kehidupan manusia. Pada kurun waktu tahun 2005—2010 penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia menunjukkan tren peningkatannya.⁷ Hal ini terlihat dengan semakin banyaknya penyalahguna narkoba dari berbagai kalangan dan peredaran narkoba yang terus meningkat. Indonesia yang awalnya menjadi tempat transit perdagangan gelap narkoba kini berubah menjadi produsen dan pasar gelap.

Hal yang lebih memprihatinkan adalah penyalahgunaan narkoba yaitu para pelajar dan mahasiswa. Pelajar sekolah menengah merupakan generasi muda sekaligus aset masa depan bangsa yang akan menjadi penerus dan pemimpin-pemimpin masa depan bangsa. Untuk menghadapi tantangan yang semakin berat dan persaingan yang begitu ketat mutlak diperlukan generasi penerus bangsa berkualitas unggul. Terwujudnya bangsa berkualitas unggul tidak mungkin akan terwujud apabila penyalahgunaan narkoba di negeri ini tak lagi mampu dicegah hingga merusak diri para remaja pelajar tersebut. Dengan melihat kondisi faktual tersebut maka diperlukan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba oleh semua komponen masyarakat dan bangsa. Sebagai bagian integral komponen tersebut lembaga pendidikan menengah memiliki peran yang strategis dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi para pelajarnya. Sebagaimana yang dikatakan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 :

“Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Pendidikan diselenggarakan sebagai

⁷. Sumber data Puslitdatin BNN tahun 2010.

satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.”

Lembaga pendidikan sebagai aspek penting dalam keberhasilan pendidikan karakter. Meskipun demikian dalam implementasi pendidikan karakter tersebut dilaksanakan di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan masyarakat. Hal tersebut terkait dengan keberadaan lembaga pendidikan yang terdiri atas pendidikan formal yang meliputi sekolah dan perguruan tinggi, sedangkan pendidikan informal dan non formal memiliki peran yang sama yakni untuk membentuk kepribadian anak sebagai yang dikelompokkan ke dalam kelompok remaja pelajar termasuk. Di dalam kelompok termasuk pelajar SLTA.

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Adapun pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. Sedangkan pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Kegiatan pendidikan informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri. Ketiga jenis pendidikan di atas perlu bersinergi untuk mendukung terwujudnya pembentukan kepribadian anak didik. Di sinilah peran Dewan Pendidikan maupun Komite Sekolah guna mendukung tujuan tersebut.

Perlunya melakukan langkah optimalisasi peran lembaga pendidikan dengan memberdayakan komponen pembina fungsi pencegahan narkoba yakni BNN sebagai *focal point* (lembaga yang dikedepankan) dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba dan pembina kelembagaan yakni Kemendiknas, Kepala Dinas Pendidikan DKI, Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta barat, Kepala Sekolah sebagai pengeiola sekolah dalam konteks manajemen berbasis sekolah, komponen

pendidikan yang terdiri atas guru Bimbingan dan Konseling (BK), Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, dan pelajar. Peran lembaga pendidikan difokuskan pada peran pembina fungsi kelembagaan, pengelola pendidikan, dan komponen pendidikan tersebut.

BNN di era berlakunya Undang-Undang no 35 tahun 2009 berperan sebagai *focal point* dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Salah satu sasaran strategisnya dalam pemberdayaan masyarakat adalah lingkungan pendidikan baik sekolah maupun kampus. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) adalah bagian dari lingkungan pendidikan menengah. Kemendiknas merupakan institusi yang secara fungsional dan berskala nasional bertanggungjawab melakukan penyelenggaraan seluruh jenjang pendidikan, untuk itu perannya menjadi strategis. Di bidang pencegahan penyalahgunaan narkoba lembaga pendidikan memiliki peran yang sangat strategis. Selain kegiatan pencegahan dilakukan secara terprogram melalui kegiatan-kegiatan pembinaan akhlak maka kebijakan penyiapan materi bahaya penyalahgunaan narkoba dapat diintegrasikan ke dalam beberapa mata pelajaran yang terkait. Selain itu diperlukan kebijakan *prevention education*, yang dilaksanakan secara komprehensif dan berkelanjutan oleh lembaga pendidikan dengan dukungan elemen masyarakat yang memiliki kepedulian untuk membantu.

Dinas Pendidikan memiliki peran sebagai pembuat kebijakan sebagai penjabaran dari kebijakan Kemendiknas. Dinas pendidikan berperan sebagai pembina fungsi pendidikan menengah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Melakukan Koordinasi dengan institusi terkait tentang penyelenggaraan pembinaan mental kepribadian anak didik sebagai langkah strategis dalam menanggulangi kenakalan pelajar misalnya penyalahgunaan narkoba, tawuran antar pelajar, perilaku merokok, dan minum minuman berkadar alkohol tinggi. Suku dinas Pendidikan Menengah menjabarkan kebijakan Dinas Pendidikan yang implementasinya adalah melalui perannya sebagai pembina dan penyelenggara pendidikan Jakarta Barat. Peningkatan kualitas pendidikan merupakan tujuan utamadari setiap kebijakan.

Peran kepala sekolah adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pendidikan dikatakan bermutu apa bila prosentase kelulusan yang tinggi, banyaknya

lulusan yang diterima di perguruan tinggi unggulan, kondisi sekolah yang aman, nyaman, kondusif, bersih, fasilitas pendidikan memadai, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba, tenaga pendidik yang berkompentensi tinggi, adanya umpan balik dalam bentuk kepercayaan masyarakat dan orang tua yang meningkat. Semakin kecil prosentase pelanggaran yang dilakukan oleh anak didik.

Peran Dewan Pendidikan dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan yang berkualitas sangat penting. Dewan Pendidikan berkoordinasi dengan perangkat lembaga pendidikan untuk memberikan masukan pemikiran dan langkah solusi guna mewujudkan perannya membantu lembaga pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan tersebut. Dengan mempelajari gejala-gejala negatif yang dimiliki anak remaja pada umumnya, orangtua dan pendidik akan dapat menyadari dan melakukan upaya perbaikan perlakuan sikap terhadap peserta didik dalam proses pendidikan.

Dewan Pendidikan memberi pertimbangan (*advisory body*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, pendukung (*supporting agency*) baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan, pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi, akuntabilitas penyelenggaraan, keluaran pendidikan, dan mediator antara pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif) dengan masyarakat.

Komite Sekolah berperan sebagai mitra sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan dan meningkatkan mutu pendidikan. Untuk itu maka Komite Sekolah berperan untuk memberikan masukan guna terwujudnya sistem pendidikan baik masukan, proses maupun hasil didik (lulusan) yang berkualitas unggul. Sebagai perangkat pendukung dan mitra sekolah maka Komite Sekolah merupakan representasi atau perwakilan kehadiran pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang berperan secara terus menerus dan mandiri memberikan masukan demi peningkatan kualitas pendidikan tersebut.

Pelajar merupakan bagian komponen pendidikan sehingga memiliki peran dalam pencapaian tujuan pendidikan. Bagi pelajar yang selalu memperhatikan materi pelajaran yang diberikan dalam proses pembelajaran menjadi bagian dinamika yang positif dalam proses pendidikan. Karena di dalam diri pelajar tersebut ada motivasi

intrinsik. Pelajar yang demikian cenderung lebih mudah tumbuh kesadaran dari dalam sendiri untuk memperhatikan penjelasan guru dalam proses pembelajaran. Rasa ingin tahunya lebih banyak terhadap materi pelajaran yang diberikan. Berbagai gangguan yang ada di sekitarnya kurang dapat mempengaruhinya.

Pelajar pada pendidikan menengah merupakan objek sekaligus subyek didik yang secara emosional masih labil, sehingga sangat rentan untuk melakukan kenakalan pelajar salah satunya menjadi penyalahguna narkoba. Mereka perlu dibekali ketahanan diri agar mengendalikan terhadap rasa ingin tahu, ingin mencoba-coba, adanya ajakan teman, rasa solidaritas. Selain itu diperlukan pula ketahanan lingkungan baik lingkungan sekolah, masyarakat dan keluarga.

Dampak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba telah menjadi keprihatinan masyarakat dan bangsa Indonesia. Adanya tren peningkatan prevalensi (penyebarluasan) penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia menunjukkan indikasi ancaman serius. Data prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia mengalami peningkatan dari 1,5 % tahun 2004 meningkat menjadi 1,99 % tahun 2008.⁸ Berdasarkan tren peningkatan prevalensi tersebut hingga tahun 2010 diperkirakan mengalami peningkatan hingga mencapai angka 2,2%. Pada satu dasa warsa terakhir ini dampak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba menjadi perhatian yang lebih serius oleh masyarakat dan bangsa Indonesia bersama bangsa-bangsa beradab lainnya sehingga melahirkan berbagai langkah strategis untuk penanggulangannya. Salah satu upaya di bidang pencegahan penyalahgunaan narkoba adalah melalui peran lembaga pendidikan.

Apa bila dikaitkan dengan fenomena gunung es,⁹ bahwa kasus kejahatan narkoba yang muncul ke permukaan hanyalah sebagian kecil dari yang berada di bawah permukaan dan tidak terdeteksi. Oleh sebab itu maka sangat terbuka kemungkinan bahwa penyalahguna narkoba berjumlah jauh lebih besar dari pada yang terdeteksi saat ini. Fakta telah menunjukkan bahwa dampak negatif penyalahgunaan narkoba sangat merusak berbagai sendi kehidupan, seperti halnya

⁸. Sumber data Puslitbang Info BNN tahun 2009.

⁹. Sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Dadang Hawari, diunduh dari http://koran.republika.co.id/berita/2217/Prof_dr_dadang_hawari_Agama_Mainkan_Peran_Kunci.

kesehatan, sosial, ekonomi, dan perilaku manusia yang bersikap ketergantungan. Karakteristik perilaku pengguna narkoba ilegal adalah timbulnya *addict* yakni sakit akibat kecanduan narkoba yang disertai munculnya perilaku kriminal bagi penyalahguna narkoba tersebut. Kondisi demikian inilah yang akan merusak mental dan fisik penyalahguna narkoba.

Pada tahun 2006, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di kalangan pelajar dan mahasiswa mencapai 1,1 juta orang atau hampir 30 persen dari total pengguna narkoba di Indonesia.¹⁰ Data Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2008 menunjukkan sebanyak 1,99 persen atau sekitar 3,1—3,6 juta penduduk Indonesia diperkirakan telah menjadi penyalahguna narkoba. Menurut hasil penelitian BNN bekerjasama dengan Universitas Indonesia tahun 2009 bahwa jumlah pelajar dan mahasiswa penyalahguna narkoba menunjukkan komposisi untuk pelajar SLTA sebesar 50,08%, pelajar SLTP sebesar 26,83%, dan mahasiswa sebesar 23,08%. Dari data tersebut menggambarkan bahwa dari jumlah penyalahguna narkoba tingkat pelajar dan mahasiswa didominasi oleh pelajar SLTA.

Pelajar SLTA merupakan bagian dari pendidikan formal tingkat menengah. Selain pendidikan formal terdapat pula lembaga pendidikan informal dan lembaga pendidikan non formal. Sebagaimana peran lembaga pendidikan pada umumnya, pendidikan menengah yakni untuk SLTA memiliki peran dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi pelajar. Data dari BNN tahun 2009 menunjukkan provinsi DKI Jakarta menempati urutan pertama sebagai daerah yang tertinggi baik peredaran maupun penyalahguna narkoba dibandingkan dengan seluruh provinsi di Indonesia. Dari jumlah kasus kejahatan narkoba dengan pendidikan tersangka menunjukkan latar belakang pendidikan SLTA lebih menonjol dibandingkan SD, SLTP dan perguruan tinggi. Pada tahun 2008, pendidikan SD sejumlah 2066 orang, SLTP sejumlah 3900 orang, SLTA sejumlah 8435 orang, Perguruan tinggi sejumlah 647 orang. Tahun 2009 pendidikan SD sejumlah 1975 orang, SLTP sejumlah 3883 orang, SLTA sejumlah 7781 orang, perguruan tinggi sejumlah 570 orang. Pada tahun 2010, tersangka pendidikan SD sejumlah 1704 orang, pendidikan SLTP

¹⁰. Sumber data dari Puslitbanginfo BNN tahun 2010.

sejumlah 3403 orang, pendidikan SLTA sejumlah 7184 orang, perguruan tinggi sejumlah 512 orang.¹¹

Pelajar SLTA memiliki karakteristik yang berbeda dengan pelajar Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), maupun dengan mahasiswa (Perguruan Tinggi). Perilaku menentang, keberanian mencoba-coba hal-hal yang baru, masa mencari jati diri yang lebih menonjol, usia yang penuh gejolak adalah di usia pelajar SLTA. Kasus tawuran di kalangan pelajar dan mahasiswa di kota-kota besar seperti Jakarta cenderung didominasi oleh pelajar SLTA. Hal ini terkait dengan usia remaja tingkat SLTA cenderung memiliki kepribadian yang masih labil dan proses mencari jati diri tersebut. Mereka senang melihat permasalahan dan menyelesaikannya dengan caranya sendiri.¹² Perilaku tersebut sangat berisiko, misalnya terhadap masalah kesehatan. Karena itu peran orang tua dan sekolah penting sebagai pengawas dan pembimbing mereka dengan cara yang tepat. Menurut WHO, remaja adalah saat anak mencapai usia 10–19 tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, remaja adalah individu yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum menikah. Sedangkan batasan lain anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹³ Namun demikian yang jelas, pada saat remajalah terjadinya perubahan fisik, mental, dan sosial ekonomi.

Perubahan yang terjadi pada remaja, antara lain perubahan fisik dan biologis, yakni adanya penambahan jumlah hormon pada anak laki-laki dan perempuan. Selain itu, terdapat pula perubahan pada psikoseksualnya yakni dorongan seks atau orientasi seksual. Terjadi pula perubahan kognitif dan kepribadian seperti perkembangan moral, etika, atau masalah kemanusiaan lainnya. Faktor lingkungan inilah yang menjadikan meningkatnya kerawanan pada anak mereka lebih mendengarkan *peer group*-nya (kelompok sebayannya). Masalah remaja dapat digolongkan menjadi masalah fisik dan masalah perilaku (psikososial) di rumah, sekolah, di jalan, atau di

¹¹. Sumber data Puslibanginfo BNN tahun 2010

¹². Sumber pendapat dari Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dr Badriul Hegar SpA (K), diunduh dari <http://ibuprita.suatuHari.com/waspadai-perilaku-remaja-berisiko/>

¹³. Bab I pasal 1, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

tempat-tempat lain. Masalah gangguan fisik yang sering dialami remaja di antaranya masalah gizi seperti anemia atau obesitas, atau masalah pubertas dini atau terlambat. Berdasarkan survei pada 2001 didapatkan sekitar 26 persen remaja mengalami anemia. Hal ini bisa membuat anak memiliki kecerdasan yang rendah, prestasi di sekolah menurun, gangguan perilaku serta gangguan keterampilan dalam memecahkan masalah.

Masalah perilaku berisiko penyimpangan baik perorangan atau kelompok perlu diwaspadai, di antaranya masalah merokok dan narkoba, bahkan aborsi. Terjadinya remaja bermasalah karena beberapa sebab¹⁴ di antaranya keinginan remaja yang tidak sesuai dengan orangtua, guru, teman, aturan hukum, serta moral agama. Sebenarnya hanya sebagian kecil remaja bermasalah, namun mereka dapat memengaruhi remaja lain yang niat dan tekadnya kurang kuat. Dengan kondisi ini bila disertai lemahnya komitmen komponen masyarakat dan bangsa untuk membangun kepedulian maka salah satu dampaknya adalah timbulnya permasalahan peningkatan tren perilaku menyimpang, ingin mencoba-coba berbagai hal. Salah satunya adalah terjadinya kenakalan pelajar untuk penyalahgunaan narkoba ilegal. Peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status. Berbagai peran yang tergabung dan terkait pada satu status dinamakan perangkat peran (*role set*). Lembaga pendidikan memiliki peran mewujudkan pelajar yang berperilaku sebagai manusia yang berkualitas unggul. Dalam keberadaan organisasi di masyarakat, ditentukan oleh hakekat dari peran-peran dan hubungan antara peran-peran tersebut, serta distribusi sumberdaya dari orang-orang yang memainkan peran. Peran lembaga pendidikan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi pelajar SLTA efektif apabila lembaga pendidikan tersebut mampu merubah perilaku peserta didiknya menjadi lebih baik. Dalam perkembangannya dewasa ini lembaga pendidikan telah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan orang tua siswa untuk membimbing dalam proses perubahan perilaku melalui program pendidikan dan pembelajaran.

¹⁴. Sumber : Ketua Divisi Tumbuh Kembang dan Pediatri Sosial FKUI dr Soedjatmiko SpA(K) MSi, diunduh dari <http://ibuprita.suatuahari.co.n/waspadai-perilaku-remaja-berisiko/>

Selain itu salah satu aspek yang dapat dilakukan untuk mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang berkarakter kuat adalah melalui peran lembaga pendidikan. Pendidikan merupakan upaya yang terencana dalam proses pembimbingan dan pembelajaran bagi individu agar tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab, kreatif, berilmu, sehat, dan berakhlak mulia baik dilihat dari aspek jasmani maupun rohani. Manusia yang berakhlak mulia, yang memiliki moralitas tinggi akan berpengaruh pada perilaku kebal terhadap penyalahgunaan narkoba. Dalam konteks ini diperlukan kondisi masyarakat dan dunia pendidikan yang mampu merealisasikan konsep pendidikan dengan cara pembinaan, pelatihan, dan pemberdayaan SDM secara berkelanjutan.

Pencapaian tujuan pendidikan adalah melalui pelaksanaan pendidikan termasuk di dalamnya aspek pengembangan intelektual, pembimbingan, pembinaan guna terjadinya perubahan perilaku manusia yang lebih dewasa. Berdasarkan dokumen jadwal pelajaran sekolah menengah di Jakarta Barat durasi waktu yang digunakan pelajar pada hari-hari belajar dapat diuraikan dalam estimasi penggunaan waktu pada hari senin sampai dengan Jumat sebagai berikut¹⁵ : 8 jam (33%) untuk mengikuti pelajaran dan ekstra kurikuler untuk istirahat (tidur di malam hari) 8 jam (33%), sisanya 4 jam (16,5%), untuk perjalanan pergi dan pulang sekolah (dalam waktu ini sebagian pelajar mengalami interaksi dengan orang tua atau teman), 2 jam (8%) untuk bermain dengan teman-teman dan atau *chatting* menggunakan fasilitas internet atau komunikasi melalui SMS (*short message service*), nonton TV, 2 jam (8%) untuk bertemu orang tua/keluarganya dan atau mengerjakan tugas-tugas yang dibebankan oleh sekolah sebagai bagian proses pembelajaran dan pembimbingan. Khusus untuk hari Sabtu selama 8 jam (33%) untuk kegiatan ekstra, menyelesaikan tugas-tugas sekolah, dan perjalanan menuju tempat kegiatan, 8 jam (33%) untuk bermain dengan teman/ saudara, bertemu dan atau bersama dengan orang tua, *chatting*, berkomunikasi melalui SMS dengan teman, nonton televisi (TV), dan 8 jam (33%) untuk istirahat (tidur). Hari Minggu 17 jam (68%) untuk bermain dengan

¹⁵. Estimasi waktu yang digunakan pelajar tersebut berdasarkan jadwal pelajaran, jadwal ekstra kurikuler, dan kegiatan pelajar di luar sekolah dan hasil wawancara dengan pelajar SMA N 78, dan SMK N 42, SMAK 1 Penabur di Jakarta Barat.

teman/saudara, bertemu dan atau bersama dengan orang tua/saudara, melakukan *chatting* dan saling kirim SMS dengan teman, nonton TV, main *games*, olah raga, 7 jam (32%) untuk istirahat (tidur). Sedangkan karakteristik kehidupan para orang tua di wilayah Jakarta Barat pada umumnya penuh dengan kesibukan sehingga jam bertemu antara anak dengan orang tua semakin berkurang baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

Wilayah provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, sebagai kota metropolitan Indonesia sekaligus telah menjadi indikasi tren penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di kota-kota besar. Di wilayah DKI Jakarta diperkirakan mencapai 278.449 hingga 294.539 orang dari seluruh penduduk DKI Jakarta atau 4,1 persen penduduk pada tahun 2008 menjadi penyalahguna narkoba.¹⁶ Menurut data Badan Narkotika Nasional (BNN)¹⁷ pada tahun 2010, di wilayah DKI diperkirakan ada 316.000 hingga 335.000 jiwa penyalahguna narkoba. Dari jumlah ini penyalahguna narkoba jenis sabu mencapai 24,6 persen atau satu dari empat penyalahguna narkoba di DKI Jakarta adalah penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Jika angka prevalensi tersebut (24,6 persen) dikonversikan ke populasi penduduk DKI Jakarta, 8.513.285 jiwa pada Maret 2009, perkiraan jumlah penyalahguna narkoba jenis sabu di DKI mencapai 0,81 hingga 0,85 persen dari jumlah penduduk sama dengan setiap 1.000 penduduk DKI, 8 orang adalah pencandu jenis sabu. Pada tahun 2009, di DKI Jakarta sebanyak 45 persen dari jumlah total penyalahguna narkoba sebanyak 300.000-an orang. Jakarta merupakan usia pelajar pada tahun 2009. Rata-rata pengguna duduk di bangku Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).¹⁸ Pelajar SLTA yang menjadi penyalahguna narkoba di wilayah DKI Jakarta tahun 2005 sebanyak 151 orang, tahun 2006 sebanyak 189 orang, tahun 2007 sebanyak 195 orang, tahun 2008 sebanyak 160 orang, dan tahun 2009 sebanyak 129 orang.

¹⁶. Sumber diambil dari publikasi Media cetak Kompas tanggal 19 Januari tahun 2010.

¹⁷. Sumber berdasarkan publikasi Media Cetak Kompas tanggal 19 Januari 2010.

¹⁸. Sumber berdasarkan publikasi Kompas tanggal 4 Juni tahun 2010, diunduh dari <http://megapolitan.kompas.com/read/2010/06/04/15080364/Wow..45.Persen.Pengguna.Narkoba.Pelajar>

Jakarta Barat merupakan Kota Administrasi bagian wilayah Provinsi DKI Jakarta, dijadikan sebagai daerah penelitian mengingat dari lima wilayah kota madya di provinsi DKI Jakarta. Jakarta Barat merupakan wilayah yang paling tinggi kasus penyalahgunaan narkoba oleh pelajar SLTA. Data penyalahgunaan narkoba oleh pelajar SLTA di Jakarta Barat menunjukkan tren peningkatannya. Pada tahun 2005 sebanyak 44 orang, tahun 2006 sebanyak 49 orang, tahun 2007 sebanyak 72 Orang, tahun 2008 sebanyak 70 orang, dan tahun 2009 sebanyak 44 orang.¹⁹ Jakarta Barat merupakan tempat peredaran dan penyalahgunaan narkoba tertinggi dibandingkan wilayah lainnya di Provinsi DKI Jakarta. Karakteristik wilayah Jakarta Barat kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar menunjukkan kecenderungan meningkat, dan jumlah kasusnya lebih tinggi di bandingkan wilayah lain Jakarta. Sebagai bagian wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta Barat merupakan wilayah dengan keberadaannya sebagai pusat perekonomian bisnis.

Di wilayah ini pula terdapat Kampung Permata yang oleh penduduk di sekitar Jakarta Barat lebih dikenal sebagai Kampung Ambon. Kampung permata ini memiliki karakteristik sebagai pemukiman yang didominasi oleh warganya hingga sebesar 80% terlibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.²⁰ Mereka masih aktif melakukan transaksi hingga saat ini meski sudah mengalami penurunan.²¹ Badan Narkotika Nasional (BNN) telah menjadikan Kampung Permata ini sebagai proyek *Community Development* (pemberdayaan masyarakat) melalui pembinaan dan pengembangan anggota masyarakat Kampung Permata tersebut dengan tujuan memberikan pandangan dampak negatif bisnis gelap narkoba dan dikembangkan berbagai keterampilan serta pendekatan kemanusiaan sehingga mereka diharapkan tidak melakukan bisnis narkoba di kemudian hari. Berdasarkan Data Statistik Jakarta Barat Dalam Angka 2009, Jakarta barat mempunyai luas 128,47 km² dan menjadi pintu gerbang bagi pendatang dari Sumatera. Merupakan kota perdagangan, industri, dan pertanian. Keragaman etnis antar suku dari Indonesia yang ada

¹⁹. Sumber data dari Bag Litbang Badan narkotika Provinsi DKI Jakarta, tahun 2010.

²⁰. Sumber data dari Kasubdit Masyarakat Kota Direktorat Pemberdayaan Alternatif Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN

²¹. Bulletin P4GN Edidi 01 Januari 2011 halaman 10.

umumnya sulit dibedakan, kecuali antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA). Di Wilayah Jakarta Barat, jumlah WNI keturunan Cina cukup menonjol. Mereka umumnya menguasai sektor perekonomian dengan membuka usaha pertokoan, perbengkelan, dan usaha dagang lainnya. Sebagian penduduk asli Betawi masih bertani secara tradisional di sektor perkebunan dan tanaman hias.

Daerah rawan narkoba di Jakarta Barat sebanyak 25 (dua puluh lima) dari 56 (lima puluh enam) kelurahan yang ada wilayah ini.²² Menurut data Badan Narkotika Kota Jakarta Barat (BNK Jakbar) dari 25 (dua puluh) kelurahan di Jakarta Barat rawan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di tiga kelurahan ditetapkan BNK Jakarta Barat sebagai kelurahan yang paling rawan narkoba yaitu Kelurahan Kota Bambu Selatan Kecamatan Palmerah, Kelurahan Kedaung Kaliangke Kecamatan Cengkareng, dan Kelurahan Tangki Kecamatan Tamansari. Berdasarkan uraian di atas maka lembaga pendidikan menengah memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi pelajar SLTA. Untuk itu maka pokok permasalahannya adalah : “ Bagaimanakah peran lembaga pendidikan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi pelajar di Jakarta Barat?” Guna menjawab permasalahan tersebut maka dirumuskan tiga buah pertanyaan penelitian.

1.2 Pertanyaan Penelitian.

1.2.1 Bagaimanakah peran lembaga pendidikan pada saat ini dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi pelajar SLTA di Jakarta Barat?

1.2.2 Bagaimanakah kendala-kendala yang dihadapi guna mewujudkan kondisi yang diharapkan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi pelajar SLTA di Jakarta Barat?

1.2.3 Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan peran lembaga pendidikan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi pelajar SLTA di Jakarta Barat?

²². Sumber Badan Narkotika Kotamadya Jakarta Barat, diunduh dari <http://www.pelita.or.id/baca.php?id=51353>

1.3 Tujuan Penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan dan analisis terhadap kondisi saat ini, kendala-kendala yang dihadapi, kondisi yang diharapkan maupun upaya yang perlu dilakukan dalam rangka pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba bagi pelajar SLTA di Jakarta Barat.

1.4. Manfaat Penelitian.

1.4.1 Manfaat akademis.

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan kontribusi dalam bentuk kajian ilmiah tentang peran lembaga pendidikan baik pada kondisi faktual saat ini maupun kondisi yang diharapkan serta upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi pelajar SLTA. Kontribusi selanjutnya adalah adanya keterbukaan untuk dikembangkan dalam penelitian lanjutan guna meningkatkan kedalaman hasil penelitian ini.

1.4.2 Manfaat praktis.

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan kontribusi ilmiah kepada : Pertama, BNN sebagai *focal point* (lembaga yang dikedepankan) dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Salah satu sasaran strategis BNN dalam bidang pencegahan penyalahgunaan narkoba adalah lingkungan pendidikan. Kedua, Kemendiknas sebagai pembuat kebijakan di bidang pendidikan mengingat pendekatan *prevention education* memerlukan peran lembaga pendidikan yang mampu mendesain kurikulum bahaya narkoba secara proporsional. Ketiga, Pengelola pendidikan menengah, guna dijadikan sebagai masukan dalam penyusunan maupun pelaksanaan kebijakan tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi pelajar SLTA. Keempat, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah sebagaimana peran organisasi ini yakni sebagai pertimbangan dalam memberikan masukan terkait dengan perannya sebagai mitra sekolah terutama dalam mendukung proses pencapaian tujuan pendidikan yang berkualitas unggul melalui program pembelajaran dan pembinaan perilaku pelajar dengan melibatkan peran serta pemangku kepentingan (*stake holders*). Kelima adalah untuk orang tua siswa, yakni meningkatkan peran orang tua dalam pendidikan anaknya baik melalui komunikasi maupun pengawasannya.

BAB 2

TINJAUAN LITERATUR

2.1 Review Hasil Penelitian Yang Terkait. Dalam kaitan dengan tinjauan literatur maka penulis sajikan beberapa hasil penelitian yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba, masalah kenakalan remaja maupun peran guru bimbingan konseling dalam kegiatan OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah).

2.1.1 Hasil penelitian yang dilaksanakan BNN bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kesehatan (Puslitkes) Universitas Indonesia tahun 2006. Dalam hasil penelitian nasional menggambarkan bahwa secara nasional penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba,²³ penyalahguna narkoba usia di atas 15 tahun sebesar 6%, usia di atas 20 tahun sebesar 14 % dan pada pendidikan SLTA sebesar 16%. Sedangkan hasil penelitian BNN tahun 2009²⁴, penyalahguna narkoba tahun 2009 menunjukkan angka prevalensi sebesar 4,7% (19.610.532 orang) atau 1 dari 20 orang pelajar/mahasiswa pernah menggunakan narkoba. Adapun dari hasil penelitian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut jumlah penyalahguna narkoba pelajar SLTA sebesar 50,08%, pelajar SLTP sebesar 26,83%, dan mahasiswa sebesar 23,08%.

2.1.2 Hasil penelitian penyalahgunaan narkoba bagi pelajar sekolah menengah di Pati, Jawa Tengah tahun 2010.²⁵ Dari hasil penelitian terhadap 300 responden (pelajar sekolah menengah/SLTA) menunjukkan bahwa : Pertama, sebesar 50 responden (16,67 %) mengaku pernah merokok. Pelajar pertama kali merokok terutama didorong oleh faktor internal: rasa ingin tahu, coba-coba dan menghibur diri (54 %). Mereka mengulangi merokok lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu pergaulan kawan. Kedua, sebesar 5,67 % responden mengaku pernah minum minuman keras. Responden pertama kali minum lebih disebabkan karena faktor eksternal yaitu

²³. Jurnal Data P4GN BNN tahun 2008 halaman 3

²⁴. Jurnal Data P4GN BNN tahun 2010 halaman 52

²⁵. Sumber hasil penelitian diunduh dari http://bnk.patikab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=64:penyalahgunaan-narkoba-pelajar-sekolah-menengah-di-pati&catid=48:penelitian-penyalahgunaan-narkoba-pelajar&Itemid=67

sebanyak 9 dari 17 (52.94 %) mengaku minum disebabkan faktor pergaulan. Mereka mengulangi minum minuman keras lagi umumnya juga dikarenakan pergaulan.

2.1.3 Hasil Penelitian tentang Peran Guru Bimbingan dan Konseling (BK) dan kegiatan OSIS.²⁶ Dalam rangka proses pencapaian tujuan pendidikan, peran guru BK memberikan pengaruh positif terhadap kedisiplinan menaati tata tertib sekolah sebesar 12,56%, sedangkan intensitas mengikuti kegiatan OSIS memberikan pengaruh sebesar 14,15%. Artinya masih ada faktor-faktor lain yang besarnya 73,3% yang secara efektif mempengaruhi kedisiplinan menaati tata tertib sekolah. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh positif yang signifikan dari implementasi peran guru bimbingan konseling (BK) dan intensitas mengikuti kegiatan OSIS terhadap kedisiplinan menaati tata tertib sekolah. Oleh karena itu lebih lanjut dapat dikatakan bahwa semakin baik implementasi peran guru bimbingan konseling (BK) dan semakin tinggi intensitas mengikuti kegiatan OSIS, maka akan meningkatkan kedisiplinan menaati tata tertib sekolah, demikian sebaliknya.

2.1.4 Hasil penelitian tentang Kenakalan Remaja Sebagai Perilaku Menyimpang Hubungannya Dengan Keberfungsian Sosial Keluarga. Kasus Di Pondok Pinang Pinggiran Kota Metropolitan Jakarta.²⁷ Bahwa seluruh responden pernah melakukan kenakalan, terutama pada tingkat kenakalan biasa seperti berbohong, pergi ke luar rumah tanpa pamit pada orang tuanya, keluyuran, berkelahi dengan teman, membuang sampah sembarangan, dan jenis kenakalan biasa lainnya. Pada tingkat kenakalan yang menjurus pada pelanggaran dan kejahatan seperti mengendarai kendaraan tanpa SIM, kebut-kebutan, mencuri, minum-minuman keras juga cukup banyak dilakukan oleh responden. Bahkan pada kenakalan khususpun banyak dilakukan oleh responden seperti hubungan seks di luar nikah, menyalahgunakan narkoba, kasus pembunuhan, pemerkosaan, serta menggugurkan kandungan walaupun kecil persentasenya. Kalau hal ini tidak segera ditanggulangi akan membahayakan baik bagi pelaku, keluarga, maupun masyarakat, karena dapat

²⁶. Sumber : hasil penelitian diunduh dari <http://etd.eprints.ums.ac.id/3488/>

²⁷. Sumber : Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Masngudin HMS, peneliti pada Puslitbang UKS, Badan Litbang Sosial Kementerian Sosial RI, diunduh dari <http://www.depsos.go.id/Balatbang/Puslitbang%20UKS/2004/Masngudin.htm>

menimbulkan masalah sosial di kemudian hari yang semakin kompleks. Hubungan antara kenakalan remaja dengan keberfungsian sosial keluarga dalam kerangka konsep telah diuraikan tentang keberfungsian sosial keluarga, diantaranya adalah kemampuan berfungsi sosial secara positif dan adaptif bagi keluarga yaitu jika berhasil dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan, peranan, dan fungsinya serta mampu memeruhi kebutuhannya.

Hubungan antara interaksi keluarga dengan lingkungannya dengan tingkat kenakalan. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat, oleh karena itu mau tidak mau harus berhubungan dengan lingkungan sosialnya. Adapun yang diharapkan dari hubungan tersebut adalah serasi, karena keserasian akan menciptakan kenyamanan dan ketenteraman. Apabila hal itu dapat diciptakan, hal itu merupakan proses sosialisasi yang baik bagi anak-anaknya. Mereka yang berhubungan serasi dengan lingkungan sosialnya berjumlah 8 responden (26,6%), kurang serasi 12 responden (40%), dan tidak serasi 10 responden (33,4%). Dari data yang ada terlihat bagi keluarga yang kurang dan tidak serasi hubungannya dengan tetangga atau lingkungan sosialnya mempunyai kecenderungan anaknya melakukan kenakalan pada tingkat yang lebih berat yaitu kenakalan khusus. Keadaan tersebut dapat dilihat dari 23 responden yang melakukan kenakalan khusus 19 responden dari keluarga yang interaksinya dengan tetangga kurang atau tidak serasi.

Analisis hubungan antara keberfungsian sosial keluarga dengan kenakalan remaja. Berdasarkan data tersebut berarti ada hubungan negatif antara keberfungsian keluarga dengan kenakalan remaja yang dilakukan. Artinya semakin tinggi tingkat berfungsi sosial keluarga, akan semakin rendah tingkat kenakalan remajanya, demikian sebaliknya semakin rendah keberfungsian sosial keluarga maka akan semakin tinggi tingkat kenakalan remajanya.

Keserasian hubungan antara keluarga dengan lingkungan sosialnya juga berpengaruh pada kenakalan anak-anak mereka. Mereka yang hubungan sosialnya dengan lingkungan serasi anak-anaknya walaupun melakukan kenakalan tetapi pada tingkat kenakalan biasa, tetapi mereka yang kurang dan tidak serasi hubungan sosialnya dengan lingkungan anak-anaknya melakukan kenakalan khusus.

Bahwa remaja yang memiliki waktu luang banyak seperti mereka yang tidak bekerja atau menganggur dan masih pelajar kemungkinannya lebih besar untuk melakukan kenakalan atau perilaku menyimpang. Demikian juga dari keluarga yang tingkat keberfungsian sosialnya rendah maka kemungkinan besar anaknya akan melakukan kenakalan pada tingkat yang lebih berat. Sebaliknya bagi keluarga yang tingkat keberfungsian sosialnya tinggi maka kemungkinan anak-anaknya melakukan kenakalan sangat kecil, apalagi kenakalan khusus. Dari analisis statistik (kuantitatif) maupun kualitatif dapat ditarik kesimpulan umum bahwa ada hubungan negatif antara keberfungsian sosial keluarga dengan kenakalan remaja, artinya bahwa semakin tinggi keberfungsian sosial keluarga akan semakin rendah kenakalan yang dilakukan oleh remaja. Sebaliknya semakin tidakberfungsian sosial suatu keluarga maka semakin tinggi tingkat kenakalan anak remajanya.

2.2 Pengertian-pengertian.

2.2.1 Peran. Peran adalah sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama.²⁸ Peran menurut Levinson sebagaimana dikutip oleh Soejono Soekamto, adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat, peran meliputi norma-norma yang dikembangkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat dan merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.²⁹ Menurut Biddle dan Thomas,³⁰ peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Misalnya dalam lembaga pendidikan perilaku orang-orang yang mengawaki lembaga ini diharapkan bisa memberi anjuran, memberi penilaian, memberi sanksi dan lain-lain.

2.2.2. Lembaga. Lembaga adalah badan (organisasi) yang bermaksud melakukan sesuatu penyelidikan keilmuan atau melakukan sesuatu usaha.³¹

²⁸. W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1985), hlm. 735

²⁹. Soejono Soekamto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali Press, 1982), h. 238

³⁰. Diunduh dari <http://arisandi.com/?p=584>

³¹. Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan W.J.S Poerwadarminta, hlm. 582.

2.2.3. Pendidikan.³² Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar anak didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Jadi yang dimaksud lembaga pendidikan adalah badan (organisasi) yang melakukan sesuatu usaha secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar anak didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

2.2.4 Kurikulum. Dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara.

2.2.5 Satuan Pendidikan, adalah bentuk pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan baik pendidikan dasar, menengah maupun tinggi.

2.2.6 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan³³ (KTSP) adalah kurikulum pendidikan yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan.

2.2.7 Kegiatan ekstra kurikuler adalah kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran dan pelayanan konseling untuk membantu pengembangan anak didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka melalui kegiatan yang secara khusus diselenggarakan oleh pendidik dan tenaga kependidikan yang berkemampuan dan berwenang di sekolah / madrasah.³⁴

2.2.8 Pencegahan adalah kegiatan yang dilakukan agar sesuatu yang diprediksi terjadi, tidak terjadi atau melakukan sesuatu sebelum masalah muncul.³⁵

³². Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem pendidikan Nasional.

³³. Diunduh dari <http://www.slideboom.com/presentations/43009/Kurikulum-Tingkat-Satuan-Pendidikan>

³⁴. Diunduh dari <http://ariefyuri.blogspot.com/2009/03/pentingnya-kegiatan-ekstrakurikuler.html>

³⁵. Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Paulina G Padmoheodojo, 2003, hlm.18

2.2.9 Peredaran Narkotika³⁶ meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi yang dimaksudkan dengan peredaran gelap narkotika adalah peredaran narkotika secara melawan hukum.

2.2.10 Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.³⁷ Penyalahgunaan adalah penggunaan kekuasaan dan sebagainya tidak sebagaimana mestinya.³⁸ Yang dimaksudkan dengan penyalahgunaan dalam konteks ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

2.2.11 Narkoba.³⁹ Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika, Psicotropika dan Bahan Adiktif. Terminologi narkoba telah biasa digunakan oleh aparat penegak hukum seperti polisi (termasuk di dalamnya anggota Badan Narkotika Nasional), jaksa, hakim, dan petugas masyarakat. Selain narkoba sebutan lain yang menunjuk ketiga zat tersebut adalah Napza yaitu Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif. Istilah napza lebih lazim dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi.

2.2.12. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.⁴⁰ Pada intinya pemaknaan dari kedua istilah tersebut tetap merujuk pada tiga jenis zat yang sama. Jadi yang dimaksud pencegahan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba adalah seluruh usaha dan kegiatan yang ditujukan untuk mengurangi hingga meniadakan permintaan dan kebutuhan gelap narkoba sehingga tidak terjadi kegiatan oleh orang-orang untuk menggunakan narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum.

³⁶ .Ibid, pasal 35

³⁷ .Ibid, Bab I, pasal 1 ayat 15

³⁸ . Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan W.J.S Poerwadarminta, hlm. 854.

³⁹ . Sumber sebagaimana diunduh dari <http://bnp.acehprov.go.id/book/export/html/21>

⁴⁰ . Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Bab 1 pasal 1

2.2.13 Pelajar SLTA. Pelajar adalah anak sekolah (terutama pada sekolah dasar dan sekolah lanjutan), anak didik, murid, siswa.⁴¹ Yang dimaksud dengan Pelajar SLTA adalah anak didik (murid, siswa) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas pada jalur pendidikan formal menengah yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya. SLTA ini terdiri atas pelajar Sekolah Mengengah Atas (SMA), Sekolah Menengan Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.⁴²

Jadi yang dimaksud peran lembaga pendidikan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi pelajar SLTA adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan menengah guna mencapai tujuan pendidikan dengan membatasi perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan tujuan tersebut agar para pelajar tidak melakukan penyimpangan menjadi penyalahguna narkoba selama proses pembimbingan dan pembelajaran. Lembaga pendidikan dalam proses ini mendorong agar anak didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

2.3 Konsep dan Teori

2.3.1 Konsep Mutu Pendidikan. Mutu dalam konteks hasil pendidikan mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu. Prestasi yang dicapai atau hasil pendidikan (*student achievement*) dapat berupa hasil tes kemampuan akademis, dapat pula prestasi bidang lain seperti olah raga, seni atau keterampilan tertentu (komputer, beragam jenis teknik, jasa). Bahkan prestasi sekolah dapat berupa kondisi yang tidak dapat dipegang (*intangibile*) seperti suasana disiplin, keakraban, saling menghormati, kebersihan, dan sebagainya (Umaedi, 1999:9).

2.3.2 Konsep Pencegahan. Terdapat tiga konsep pencegahan menurut Paulina G. Padmohoedjo (2003), bahwa pencegahan terdiri atas pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Pencegahan primer adalah untuk mencegah seseorang yang sebelumnya

⁴¹. Sumber diunduh dari <http://www.artikata.com/arti-357357-pelajar.html>

⁴². Pasal 18 ayat 3 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional.

tidak pernah memakai narkoba untuk tidak mencoba memakai. Pencegahan sekunder adalah mencegah seseorang yang sudah mencoba menggunakan agar segera menghentikannya agar tidak masuk ke dalam kelompok adiksi. Pencegahan tersier adalah mencegah seseorang yang sudah sembuh agar tidak menjadi pecandu kembali (*relaps*). Secara faktual kondisi ini belum efektif dalam mencegah kasus penyalahgunaan narkoba para pelajar dan mahasiswa. Pencegahan Primer adalah upaya pencegahan yang dilakukan sebelum penyalahgunaan terjadi dan biasanya dalam bentuk pendidikan, kampanye, atau penyebaran pengetahuan mengenai bahaya Narkoba, serta pendekatan dalam keluarga dan lain-lain, cara ini bisa dilakukan oleh berbagai kelompok masyarakat dimanapun seperti: sekolah, tempat tinggal, tempat kerja dan tempat-tempat umum.⁴³

Namun demikian dalam konsep pencegahan yang terkait dengan peran lembaga pendidikan SLTA ini adalah pencegahan primer. Pemaknaan konsep ini yakni kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan lebih bersifat preventif yakni mencegah para pelajar SLTA yang belum pernah menjadi penyalahguna narkoba agar tidak pernah mencoba untuk menjadi penyalahgunaan narkoba. Hal ini terkait dengan peran lembaga pendidikan dalam pembimbingan mewujudkan perilaku untuk hidup sehat dan normatif.

Dalam konsep pre-emptif (prevensi tidak langsung) diberikan makna sebagai pencegahan tidak langsung yaitu, menghilangkan atau mengurangi faktor-faktor yang mendorong timbulnya kesempatan atau peluang untuk melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dengan usaha kegiatan dengan menciptakan kesadaran, kepedulian, kewaspadaan, dan daya tangkal masyarakat, terbinanya kondisi perilaku hidup sehat tanpa narkoba. Pelarangan merokok di lingkungan sekolah dan institusi pemerintah lainnya merupakan salah satu wujud kepedulian untuk melakukan pencegahan melalui strategi pre-emptif. Menurut teori *Broken Windows*, bahwa kriminalitas berasal dari hal-hal kecil yang sekilas tampak remeh, namun berpotensi

⁴³.Sumber diunduh dari <http://destririfhani.blogspot.com/2011/03/peran-guru-dan-orang-tua-terhadap.html>

besar untuk memutar roda interaksi antara individu dan lingkungan yang akhirnya menghasilkan perbuatan-perbuatan jahat atau pelanggaran norma sosial yang serius.

Untuk itu maka perlunya meningkatkan kepedulian masyarakat dan *stake holders* (pemangku kepentingan) guna menciptakan berbagai kegiatan mengisi waktu luang sehingga semakin terhindarnya kelompok pelajar berkumpul tanpa kegiatan yang jelas dan tararah. Dalam kegiatan pre-emptif, yakni memberikan bimbingan dan penyuluhan serta pembinaan untuk taat pada nilai-nilai normatif, taat pada nilai-nilai keagamaan, serta patuh terhadap hukum. Kegiatan ini ditujukan juga kepada semua lapisan masyarakat secara selektif dan prioritas, misalnya kalangan remaja usia sekolah menengah.

2.3.3 Konsep Perkembangan Masa Remaja Usia Pelajar SLTA. Remaja Menurut Hurlock (1981) remaja adalah mereka yang berada pada usia 12-18 tahun. Monks, dkk (2000) memberi batasan usia remaja adalah 12-21 tahun. Menurut Stanley Hall (dalam Santrock, 2003) usia remaja berada pada rentang 12-23 tahun.⁴⁴ Berdasarkan batasan-batasan yang diberikan para ahli, dapat disimpulkan bahwa pelajar SLTA merupakan usia remaja. Remaja adalah masa yang penuh dengan permasalahan. Statemen ini sudah dikemukakan di awal abad ke-20 oleh Stanley Hall. Pendapat Stanley Hall pada saat itu yaitu bahwa masa remaja merupakan masa badai dan tekanan (*storm and stress*) sampai sekarang masih banyak dikutip orang. Menurut Erickson masa remaja adalah masa terjadinya krisis identitas atau pencarian identitas diri. Karakteristik remaja yang sedang berproses untuk mencari identitas diri ini juga sering menimbulkan masalah pada diri remaja. Gunarsa (1989) merangkum beberapa karakteristik remaja yang dapat menimbulkan berbagai permasalahan pada diri remaja, yaitu: kecanggungan dalam pergaulan dan kekakuan dalam gerakan, ketidakstabilan emosi, adanya perasaan kosong akibat perombakan pandangan dan petunjuk hidup, adanya sikap menentang dan menantang orang tua, pertentangan di dalam dirinya sering menjadi pangkal penyebab pertentangan-pertentangan dengan orang tua, kegelisahan karena banyak hal diinginkan tetapi remaja tidak sanggup

⁴⁴.Diunduh dari <http://www.nala-fauziah.co.cc/2010/08/psikologi-remaja-masa-yang-paling-indeh.html>

memenuhi semuanya, senang bereksperimentasi, senang bereksplorasi, mempunyai banyak fantasi, khayalan, bualan, dan kecenderungan membentuk dan melakukan kegiatan berkelompok. Berdasarkan tinjauan teori perkembangan, usia remaja adalah masa saat terjadinya perubahan-perubahan yang cepat, termasuk perubahan fundamental dalam aspek kognitif, emosi, sosial dan pencapaian (Fagan, 2006).⁴⁵ Sebagian remaja mampu mengatasi transisi ini dengan baik, namun beberapa remaja bisa jadi mengalami penurunan pada kondisi psikis, fisiologis, dan sosial. Beberapa permasalahan remaja yang muncul biasanya banyak berhubungan dengan karakteristik yang ada pada diri remaja.

2.3.4 Konsep Ketahanan sekolah adalah upaya pencegahan, antisipasi, dan penanggulangan terhadap perbuatan negatif baik dari pihak dalam maupun pihak luar sekolah yang dapat mengakibatkan bahaya yang bersifat kriminalitas, narkoba, pornografi dan kekerasan di lingkungan sekolah, serta menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban, dan keamanan sekolah.⁴⁶

2.3.5 Teori Peran. Menurut teori Peran bahwa interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya. Harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun manusia untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya sebagai guru, mahasiswa, orang tua, wanita, dan lain sebagainya. Dengan peran tersebut diharapkan mereka mampu berperilaku sesuai dengan perannya masing-masing. Perilaku ditentukan oleh peran sosial. Sosiolog Glen Elder (1975) membantu memperluas penggunaan teori peran. Pendekatannya yang dinamakan *life-course* memaknakan bahwa setiap masyarakat mempunyai harapan kepada setiap anggotanya untuk berperilaku tertentu sesuai dengan kategori-kategori yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Dalam konteks peran lembaga pendidikan

⁴⁵ . Diunduh dari <http://www.eric-soon.web.id/2010/12/psikologi-anak-muda-karakteristik-dan.html>

⁴⁶ . Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Menengah Dan Tinggi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor 520.1 /2007 Tentang Penataan Wiyata Mandala Di SMA/SMK. Dalam Lingkungan Dinas Pendidikan Menengah Dan Tinggi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

maka terkait dengan lembaga yang diawaki oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi untuk berperilaku memerankan lembaga tersebut dalam proses pendidikan, pembimbingan, dan pembelajaran. Yang termasuk di dalamnya adalah peran di bidang pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui berbagai kegiatan yang bersifat mendidik bagi pelajar.

2.3.6 *Teori Broken Window*. Menurut George Kerling and James Wilson dengan sebuah teori baru untuk memahami kriminalitas dengan nama *Broken Windows*. Dalam teori ini tindak kriminal bukan sebagai produk keputusan individu semata, melainkan sebagai produk interaksi dinamis antara individu, lingkungan, dan norma sosial. Kriminalitas, menurut teori *Broken Windows*, berasal dari hal-hal kecil yang sekilas tampak remeh, namun berpotensi besar untuk memutar roda interaksi antara individu dan lingkungan yang akhirnya menghasilkan perbuatan-perbuatan jahat. Kenyataannya mustahil memberantas kejahatan-kejahatan besar jika kejahatan-kejahatan kecil dibiarkan begitu saja. Kejahatan kecil hanyalah awal saja dari kejahatan besar. Psikolog Kess Keizer untuk pertama kalinya menguji teori *Broken Windows* dengan serangkaian eksperimen. Dari studi Keizer ini menunjukkan bahwa pergeseran norma sosial yang satu ternyata merembet ke norma sosial yang lain. Teori *Broken Windows* menjelaskan bahwa para kriminal sebagai individu-individu yang memiliki tendensi dan disposisi untuk berbuat buruk dan melanggar aturan. Teori ini berfokus pada individu sebagai penyebab utama tindak kriminal, serta cenderung mengabaikan peran lingkungan sekitar dan norma sosial. Kriminalitas dan masalah-masalah sosial lainnya adalah topik yang pelik. Bahwa interaksi dinamis antara individu, lingkungan, dan norma sosial mampu melahirkan tindak kriminal, dan bahwa intervensi dini terhadap pelanggaran-pelanggaran kecil akan mencegah terjadinya kriminalitas dalam skala lebih besar.⁴⁷

Hal ini dapat dianalogkan dengan pencegahan terjadinya kasus kejahatan dan penyalahgunaan narkoba melalui peran lembaga pendidikan. Sebelum para pelajar

⁴⁷. Menurut teori *Broken Windows*, teori tersebut diunduh dari http://www.facebook.com/note.php?note_id=46236589474&comments

menjadi penyalahguna narkoba atau terlibat kejahatan narkoba, diperlukan pencegahan yang dimulai pada usia sedini mungkin atau mencegah terjadinya penyebab sekecil apapun. Misalnya saja sebagian besar pecandu narkoba berawal dari merokok pada usia remaja maka kebiasaan merokok tersebut harus dicegah sedini mungkin. Bila dilakukan secara berkelanjutan maka saat menginjak ke dalam usia pelajar SLTA para pelajar akan semakin dewasa untuk menolak narkoba. Selain itu dengan melakukan pencegahan anak sedini mungkin untuk tidak merokok agar tidak menjadi kebiasaan yang cenderung menjadi pengguna narkoba, atau membiarkan anak-anak pelajar SLTA yang duduk bergerombol di pinggir jalan dengan ketidakjelasan kegiatan maka lama-lama akan menjadi kebiasaan dan mudah berkembang ke arah perilaku negatif.

2.3.7 Teori perilaku manusia. Perilaku adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang dapat diamati langsung maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar (Notoatmodjo 2003 hal 114).⁴⁸ Perilaku merupakan respons atau reaksi seseorang terhadap stimulus (rangsangan dari luar). Dilihat dari bentuk respons terhadap stimulus ini, maka perilaku dapat dibedakan menjadi dua yakni : Pertama, Perilaku tertutup (*covert behavior*). Respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk terselubung atau tertutup (*covert*), misalnya : seorang pemuda tahu bahwa HIV/AIDS dapat menular melalui hubungan seks, remaja tahu bahwa penyalahgunaan narkoba membahayakan kesehatan. Kedua, Perilaku terbuka (*overt behavior*). Respons seseorang terhadap stimulus dalam bentuk tindakan nyata atau terbuka, misalnya seorang penyalahguna narkoba melapor ke petugas untuk mendapatkan pemulihan atau rehabilitasi.

2.3.8 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perilaku Menyimpang Pelajar Menjadi Penyalahguna Narkoba. Sebagaimana yang biasa terjadi bahwa penyimpangan seseorang menjadi penyalahguna narkoba dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik

⁴⁸ .Sumber diunduh dari <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/20279/5/Chapter%20I.pdf>

internal maupun eksternal. Memahami faktor-faktor baik internal maupun eksternal tersebut akan bermanfaat dalam melakukan langkah antisipatif guna pencegahannya.

2.3.8.1 Faktor Internal. Dalam faktor-faktor internal ini berbagai hal terjadi dari dalam diri seseorang dengan kondisinya masing-masing yang menyebabkan adanya :

- a. Niat seseorang untuk bertindak sehubungan dengan kesehatan atau perawatan kesehatannya (*behavior intention*). Tumbuhnya niat adalah dari dalam diri seseorang.
- b. Keterbatasan informasi tentang kesehatan (*acessebility of information*)
- c. Otonom pribadi yang bersangkutan dalam hal ini mengambil tindakan atau keputusan (*personal autonomy*), misalnya keputusan tidak merokok dan minum minuman keras.
- d. Tingkah laku anti sosial misalnya berkepribadian ingin melanggar, sifat memberontak, tidak sabar, menolak nilai-nilai tradisional, dan yang berbaur otoritas.
- e. Kecemasan dan depresi karena tidak mampu menyelesaikan kesulitan hidup, menghindari rasa cemas dan depresi maka melarikan diri pada rokok dan narkoba.
- e. Aspek pengetahuan, sikap dan kepercayaan. Keterbatasan pengetahuan, adanya sikap positif terhadap narkoba maka akan cenderung menjadi penyalahguna narkoba.
- f. Keterampilan berkomunikasi yang kurang efektif untuk menolak ajakan teman untuk menggunakan narkoba.
- g. Kondisi keluarga/orang tua. Hubungan anak dengan orang tua kurang harmonis cenderung menjadi penyebab anak mencari kompensasi dan pengganti kepada teman sebaya dan anak mudah mengenal rokok, minuman keras, penyimpangan dan narkoba.
- h. Kepercayaan yang sering diperoleh dari orang tua, kakek atau nenek. Seseorang menerima sesuatu berdasarkan keyakinan yang salah dan tanpa adanya pembuktian terlebih dahulu, misalnya candu tidak membahayakan, namun memberikan semangat asal tidak melebihi ukuran.
- i. Sikap, menggambarkan suka atau tidak suka terhadap objek, sering diperoleh dari pengalaman sendiri atau orang lain misalnya sikap peduli kesehatan.
- j. Perilaku, norma, kebiasaan, nilai-nilai, dan penggunaan sumber-sumber di dalam suatu masyarakat akan menghasilkan suatu pola hidup (*way of life*) yang pada

umumnya disebut kebudayaan, misalnya pola hidup konsumtif mempengaruhi seseorang menjadi konsumtif.

k. Dorongan untuk merasakan kesenangan, efeknya rasa bahagia rohani dan jasmani bagi si pemakai. Misalnya kokain efeknya menimbulkan atau kekuatan percaya diri. Sedangkan efek dari heroin akan merasakan kepuasan dan relaksasi.

l. Keinginan untuk merasakan kondisi yang lebih baik, banyak orang yang menderita kegelisahan dan stress yang berdampak depresi dan menjadi penyalahguna narkoba.

m. Informasi yang salah tentang dampak narkoba. Mengonsumsi narkoba dapat meningkatkan kinerja tubuh merupakan informasi yang salah. Adanya informasi yang salah ini sering kali mejadi penyebab rasa ingin mencoba barkoba yang diduga dapat menjadi perangsang meningkatnya kinerja tubuh, tidak dipahami sisi perusakanya mental dan pisik manusia justru jauh lebih dahsyat dari pada sekedar informasi yang salah.

n. Rasa ingin tahu atau terbawa oleh lingkungan pergaulan biasanya umur remaja sangat rentan dalam hal ini, atau seperti menguji keberanian.

o. Kecerdasan emosi yang rendah. Adanya komponen kecerdasan emosi, Patton, 1997 mengatakan bahwa komponen kecerdasan emosional sebagai berikut : Memahami emosi; Kompetensi; Mengelola emosi; Bersikap kreatif dan memotivasi diri sendiri; Menyelaraskan dengan emosi orang lain.

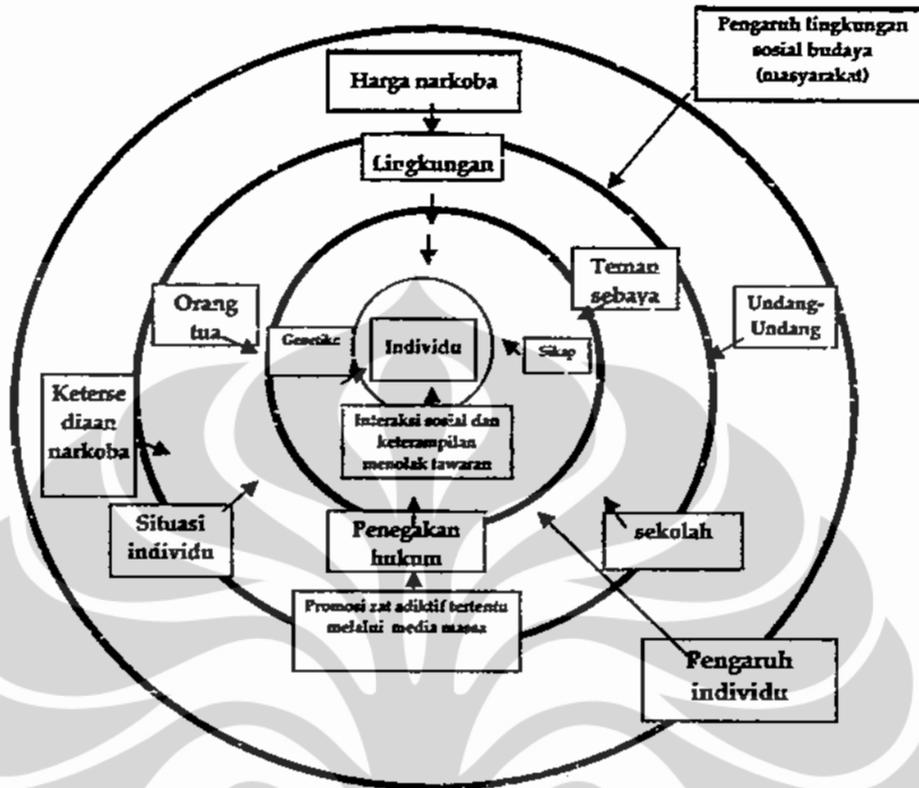
p. Pengaruh faktor emosional. Kadang-kadang suatu bentuk sikap merupakan pernyataan yang didasari oleh emosi yang berfungsi semacam penyaluran frustrasi atau pengalihan bentuk mekanisme pertahanan ego. Chaplin (1981) menegaskan bahwa sumber dari sikap bersifat kultural, familial, dan personal. Artinya kita cenderung beranggapan bahwa sikap – sikap itu akan berlaku dalam suatu kebudayaan tertentu, selaku tempat individu dibesarkan. Sebagian besar dari sikap itu berlangsung dari generasi ke generasi di dalam struktur keluarga.

2.3.9.2 Faktor Eksternal. Dalam faktor-faktor eksternal ini berbagai hal terjadi dari dalam diri seseorang dengan kondisinya masing-masing yang menyebabkan adanya :

a. Kurangnya dukungan sosial dari masyarakat sekitarnya (*social support*).Orang penting sebagai referensi. Perilaku remaja, lebih dipengaruhi oleh orang-orang yang dianggap penting, namun mereka kurang memperhatikan atau kurang peduli.

- b. Situasi yang memungkinkan untuk bertindak menyimpang (*action situation*).
 - c. Waktu luang yang tidak dimanfaatkan untuk kegiatan positif oleh masyarakat cenderung mempengaruhi kelompok-kelompok timbulnya perilaku tidak produktif.
 - d. Pengaruh buruk dalam sosialisasi dengan teman bermainnya atau faktor lingkungan sosial sehingga seseorang tidak mampu mengendalikan dirinya.
 - f. Kebiasaan merokok di masyarakat hingga anak-anak remaja. Rokok termasuk sat adiktif dan menjadi pintu gerbang menuju penyalahgunaan narkoba.
 - g. Keberadaan lingkungan keluarga yang kurang kondusif. Kemungkinan buruk, seorang anak akan dengan mudah terjerat narkoba.
 - h. Pencegahan masih belum melibatkan komponen masyarakat secara luas dan belum bersifat *prevention education* (pencegahan yang bersifat mendidik) namun masih bersifat parsial sehingga masih rendah efektivitasnya.
 - i. Adanya pengaruh teman kelompok sebaya sehingga memungkinkan seseorang remaja jatuh menjadi penyalahguna narkoba.
 - j. Adanya kebijakan yang kurang tegas tentang pemberantasan narkoba di wilayah kampung Permata sehingga berdampak merajalelanya narkoba di Jakarta Barat.
 - k. Pengaruh iklan promosi minuman keras dan rokok berpengaruh pada keinginan mencoba rokok dan minuman keras, yang akan mudah menjadi pengguna narkoba.
 - l. Pengaruh orang lain yang dianggap penting misalnya guru, tokoh masyarakat. Pada umumnya individu cenderung untuk memiliki sikap yang konformis atau searah dengan sikap orang yang dianggapnya penting.
 - m. Adanya tingkat kemudahan untuk mendapatkan jenis-jenis narkoba ilegal.
 - n. Adanya kekurangefektivan kinerja lembaga pendidikan dan lembaga agama sebagai suatu sistem mempunyai pengaruh dalam pembentukan sikap dan perilaku karena keduanya meletakkan dasar pengertian dan konsep moral pada setiap individu.
- Adapun faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkoba dapat digambarkan sebagai berikut:⁴⁹

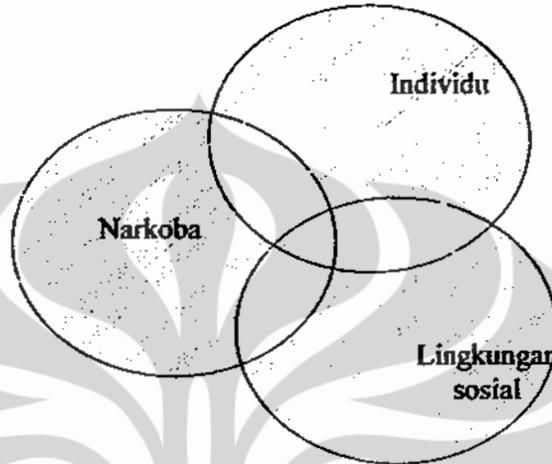
⁴⁹. Sumber dari *Prevention Plus II (Tools for creating and Sustaining Drug Free Communities)*, Office for Substance Abuse Prevention (OSAP) dalam Narkoba Pembunuh Karakter Bangsa, A. Kadamanta, 2008, hlm. 31.



Gambar 2.2 Faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkoba

Gambar di atas menjelaskan bahwa terdapat berbagai faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba. Seorang individu yang tidak memiliki ketahanan mental kepribadian yang kuat akan mudah jatuh akibat faktor-faktor tersebut. Untuk itu maka peran lembaga pendidikan adalah bagaimana memberikan bekal ketahanan diri melalui penanaman pengetahuan, sikap dan perilaku sehingga remaja usia pelajar SLTA dapat dilakukan pencegahan agar tidak menjadi penyalahguna narkoba.

Dari banyaknya faktor penyebab penyalahgunaan narkoba sebagaimana uraian di atas, maka dapat dianalisa dari interaksi tiga faktor yang menjadi penyebab penyalahgunaan narkoba tersebut.



Gambar 2.3 Interaksi Tiga Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkoba⁵⁰

Penyalahgunaan narkoba merupakan permasalahan yang demikian kompleks dan merupakan hasil interaksi tiga faktor yaitu : narkoba, individu, dan lingkungan sosial. Peran lembaga pendidikan adalah untuk mendidik individu sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi manusia berkepribadian kuat dan berperilaku menolak narkoba. Selain itu perlunya komitmen komponen masyarakat dan aparat terkait dengan lembaga pendidikan untuk bersinergi mewujudkan lingkungan sosial yang kondusif guna mencegah penyalahgunaan narkoba.

2.3.10 Konsep Kegiatan Ekstra Kurikuler. Inti dari kegiatan ekstrakurikuler adalah pengembangan kepribadian peserta didik. Pengembangan kepribadian yang matang dalam konteks pengembangan kegiatan ekstrakurikuler tentunya dalam tahap-tahap kemampuan peserta didik. Mereka mampu mengembangkan bakat dan minat, menghargai orang lain, bersikap kritis, terhadap suatu kesenjangan, berani mencoba hal-hal positif yang menantang, peduli terhadap lingkungan, sampai pada melakukan kegiatan-kegiatan intelektual dan ritual keagamaan. Dalam konteks Pendidikan

⁵⁰. Sumber Prof. Paulina G. Padmohoedojo, MA., MPH, Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, hal. 10

Nasional, semua cara, kondisi, dan peristiwa dalam kegiatan ekstrakurikuler sebaiknya diarahkan pada kesadaran nilai-nilai universal agama sekaligus pada upaya pemeliharaan keberagaman. Program ekstrakurikuler dikembangkan secara integral baik dalam pengalaman fisik maupun dalam pengalaman psikis. Model-model pengembangan kegiatan ekstrakurikuler diarahkan secara integral untuk mencapai tahapan-tahapan perkembangan kepribadian anak didik.

2.3.11 Konsep Pembentukan Kepribadian.⁵¹ Karakteristik psikologis yang khas pada remaja pelajar SLTA merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan penyalahgunaan narkoba. Namun demikian, untuk terjadinya hal tersebut masih ada faktor lain yang memainkan peranan penting yaitu faktor lingkungan si pemakai. Faktor lingkungan tersebut memberikan pengaruh pada remaja dan mencetuskan timbulnya motivasi untuk menyalahgunakan narkoba. Di dalam upaya pencegahan, tindakan yang dijalankan dapat diarahkan pada dua sasaran proses. Pertama diarahkan pada upaya untuk menghindarkan remaja dari lingkungan yang tidak baik dan diarahkan ke suatu lingkungan yang lebih membantu proses perkembangan jiwa remaja. Kedua adalah membantu remaja dalam mengembangkan dirinya dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan adanya suatu proses pendampingan kepada pelajar. Selain itu ada pula pengaruh lingkungan pergaulan di luar rumah dan sekolah. Pelajar sesungguhnya berada dalam tiga pengaruh yang sama kuat, yakni sekolah (guru), lingkungan pergaulan, dan rumah (orang tua dan keluarga). Terdapat dua buah proses yakni menghindar dari lingkungan luar yang jelek, dan proses dalam diri si remaja untuk mandiri dan menemukan jati dirinya.

2.3.12 Konsep *Demand reduction*⁵² (pengurangan permintaan), adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi permintaan narkoba ilegal melalui pencegahan. Dengan pendekatan antara lain pendidikan dan informasi kepada masyarakat umum, kaum muda, dan pengguna narkoba demi hidup sehat.

⁵¹. Diunduh dari <http://www.damandiri.or.id/file/ulfahmariaugmbab2.pdf>

⁵². Sumber Buku Narkoba Pembunuh Karakter Bangsa, A. Kadamanta, 2009, Forum Media Utama hlm.45-47

Tabel 2.1 Tanda-tanda Sebelum dan Sesudah Menggunakan Narkoba

Sebelum memakai	Sesudah memakai
Riang. Sehat. Bertenaga. Percaya diri. Sabar. Bersemangat. Hemat. Ada Perhatian kepada orang lain.	Pendiam. Sakit-sakitan. Menjadi Loyo. Ragu. Mudah Putus Asa. Lemah Semangat. Boros dan Suka Mencuri. Acuh.

2.3.13 Konsep Pendidikan Karakter. Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Dalam pendidikan karakter melibatkan komponen-komponen pendidikan yang ada. Guru membantu membentuk watak peserta didik yang mencakup keteladanan, cara berbicara, dan cara bertoleransi. Menurut T. Ramli (2003):⁵³

”Pendidikan karakter memiliki esensi dan makna yang sama dengan pendidikan moral dan pendidikan akhlak. Tujuannya adalah membentuk pribadi anak, supaya menjadi manusia yang baik, warga masyarakat, dan warga negara yang baik. Adapun kriteria manusia yang baik, warga masyarakat yang baik, dan warga negara yang baik bagi suatu masyarakat atau bangsa, secara umum adalah nilai-nilai sosial tertentu, yang banyak dipengaruhi oleh budaya masyarakat dan bangsanya.”

Oleh karena itu, hakikat dari pendidikan karakter dalam konteks pendidikan di Indonesia adalah pendidikan nilai-nilai luhur yang bersumber dari budaya bangsa Indonesia sendiri, dalam rangka membina kepribadian generasi muda. Ciri-ciri karakter manusia unggul adalah menurut A. Kadamanta (2008) yakni :

⁵³.Diunduh dari <http://www.scribd.com/doc/45294714/2-Konsep-pendidikan-karakter>

“Pertama, *Trustworthiness* (memiliki integritas, kejujuran, dan loyalitas). Kedua, *Fairness* (senantiasa terbuka akan kebenaran). Ketiga, *Caring* (berperilaku peduli terhadap lingkungannya). Keempat, *Respectiveness* (menghargai dan menghormati anggota keluarga lainnya). Kelima, *Citizenship* (sadar hukum dan peraturan). Keenam, *Responsibility* (bertanggung jawab, disiplin, dan selalu melakukan kegiatan sebaik mungkin).

Setiap individu, keluarga, dan kelompok masyarakat yang memiliki karakter kuat akan memiliki daya tahan yang lebih kuat dalam membentengi diri dari bahaya narkoba. Individu yang berkarakter unggul adalah seseorang yang berusaha melakukan hal-hal yang terbaik terhadap Tuhannya, dirinya, sesama, lingkungan, bangsa dan negara serta dunia internasional pada umumnya dengan mengoptimalkan potensi (pengetahuan) dirinya dan disertai dengan kesadaran, emosi dan motivasinya.

Karakter mulia berarti individu memiliki pengetahuan tentang potensi dirinya, yang ditandai dengan nilai-nilai seperti reflektif, percaya diri, rasional, logis, kritis, analitis, kreatif dan inovatif, mandiri, hidup sehat, bertanggung jawab, cinta ilmu, sabar, berhati-hati, rela berkorban, pemberani, dapat dipercaya, jujur, menepati janji, adil, rendah hati, malu berbuat salah, pemaaf, berhati lembut, setia, bekerja keras, tekun, ulet/gigih, teliti, berinisiatif, berpikir positif, disiplin, antisipatif, inisiatif, visioner, bersahaja, bersemangat, dinamis, hemat/efisien, menghargai waktu, pengabdian/dedikatif, pengendalian diri, produktif, ramah, cinta keindahan (estetis), sportif, tabah, terbuka, tertib. Menurut Mochtar Buchori (2007)⁵⁴ pendidikan karakter seharusnya membawa anak didik ke pengenalan nilai secara nyata. Tujuan pendidikan karakter ini adalah agar anak didik mampu secara mandiri meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya dan menginternalisasikannya ke dalam nilai-nilai karakter dan ahlak mulia dalam perilaku sehari-hari. Menurut David Elkind & Freddy Sweet Ph.D. (2004), pendidikan karakter dimaknai sebagai berikut:

“Usaha sengaja untuk membantu orang memahami, peduli, dan bertindak atas nilai-nilai etika inti. Ketika kita berpikir tentang jenis karakter yang kita

⁵⁴.Sumber sebagaimana diunduh dari <http://www.scribd.com/doc/49754748/teori-Pendidikan-Karakter>

inginkan bagi anak-anak kita, jelas bahwa kita ingin mereka bisa menilai apa yang benar, sangat peduli tentang apa yang benar, dan kemudian melakukan apa yang mereka yakini benar, bahkan dalam menghadapi tekanan dari luar dan godaan dari dalam”.

2.3.15 **Sistematika Penulisan.** Tesis ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut :

2.3.15.1 **Bab 1 Pendahuluan.** Dalam bab ini diuraikan latar belakang masalah, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

2.3.15.2 **Bab 2 Kajian Kepustakaan.** Dalam bab ini berisi tentang reviu hasil penelitian sebelumnya yang terkait, teori, konsep, dan kerangka berpikir.

2.3.15.3 **Bab 3 Metodologi Penelitian.** Dalam bab ini dikemukakan tentang waktu dan tempat penelitian, metode penelitian, jenis penelitian, setting penelitian, struktur subyek penelitian (informan), pedoman wawancara, pengumpulan dokumen terkait, tehnik pengumpulan data, tehnik analisis data dan tehnik keabsahan data.

2.3.15.4 **Bab 4 Gambaran Umum Wilayah Jakarta Barat.** Dalam bab ini diuraikan secara umum kondisi daerah penelitian yang meliputi luas daerah, kerawanan daerah terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, kondisi lingkungan yang menggambarkan adanya potensi kerawanan.

2.3.15.5 **Bab 5 Hasil Penelitian dan Pembahasan.** Dalam bab ini didiskripsikan tentang hasil penelitian tentang jawaban atas pertanyaan penelitian yang dikaitkan dengan pendapat dan informasi dari para informan dan atau responden, maupun dokumen dan berbagai teori yang relevan sebagaimana diuraikan dalam bab 2. Dalam pendeskripsian dinarasikan hasil pengolahan data wawancara dengan nara sumber atau subyek penelitian.

2.3.15.6 **Bab 6 Kesimpulan dan Saran.** Dalam bab ini disampaikan kesimpulan akhir dari penelitian serta saran-saran.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bahwa dalam rangka penelitian ilmiah diperlukan metode penelitian. Metode penelitian menggambarkan tentang pendekatan dan jenis penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan proses penelitian yang berdasarkan metode yang menyelidiki fenomena sosial dan masalah manusia. Pada penelitian ini peneliti membuat gambaran kompleks melalui kata-kata, laporan terinci dari pandangan informan dan melalui studi pada situasi alami (Creswell, 1998). Sedangkan menurut Sudjarwo (2001)⁵⁵ dalam pendekatan kualitatif peneliti diharapkan mampu melihat suatu fenomena di lapangan secara struktural dan fungsional. Yang dimaksud dengan struktural adalah peneliti harus melihat fenomena sosial dalam kaitannya dengan struktur lainnya. Sedangkan fungsional dimaknai sebagai kemampuan peneliti untuk memahami fenomena dari pandangan fungsinya dengan fenomena lainnya.

Dalam rangka penelitian untuk mendapatkan gambaran mendalam tentang peran lembaga pendidikan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi pelajar SLTA di wilayah Jakarta Barat baik kondisi saat ini, kondisi ideal yang diharapkan maupun upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mencapai harapan tersebut, maka perlu pendekatan yang relevan. Untuk itu penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif guna mencapai hasil penelitian yang berkualitas sehingga mampu menggambarkan kondisi yang seobyektif mungkin sehingga kebenarannya melalui interpretasi yang akan disusun dalam narasi kualitatif yang kebenarannya dapat diterima oleh khalayak sesuai kaidah normatif penelitian kualitatif. Unsur-unsur penting yang diperlukan dalam penelitian kualitatif adalah mencakup :

3.1 Paradigma *qualitative riset* (riset kualitatif). Dalam paradigma riset kualitatif tersebut menggunakan paradigma penelitian sebagai berikut :

3.1.1 Dalam riset kwalitatif (*qualitative riset*) terjadi pengaturan alami, yakni sebagaimana yang terjadi sehingga bukan melakukan rekayasa.

⁵⁵. Dr. Iskandar, M, Pd, Metodologi Penelitian Kualitatif, 2009, GP Press, hlm.49.

3.1.2 Dalam riset kualitatif (*Qualitative riset*) didasarkan pada asumsi yang sangat berbeda dari kuantitatif. Dalam riset kualitatif tidak menggunakan hipotesis.

3.1.3 Dalam riset kualitatif peneliti adalah instrumen utama pengumpulan data, sehingga perlu kemampuan pengumpulan, pendiskripsian, dan penganalisisan data.

3.1.4 Data yang muncul dan terkumpul dari suatu studi atau penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif adalah deskriptif atau deskriptif analisis.

3.1.5 Dalam pelaksanaan riset kualitatif yang menjadi fokusnya adalah pada persepsi peserta dan pengalaman hidup mereka.

3.1.6 Dalam riset kualitatif (*Qualitative riset*) memusat pada proses yang sedang terjadi seperti halnya sebuah produk, terjadinya produk sangat terkait dengan masukan dan prosesnya, sehingga serangkaian sistemnya akan tergambar.

3.1.7 Data dari hasil penelitian yang telah terkumpul kemudian ditafsirkan dalam hubungan dengan obyek tertentu untuk suatu kasus bukannya penyamarataan.

3.1.8 Dalam pelaksanaan riset kualitatif (*Qualitative riset*) suatu disain muncul dalam hasil yang dirundingkan dengan obyek riset.

3.1.9 Kehadiran peneliti. Peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Instrumen selain manusia dapat pula digunakan namun fungsinya sebagai pendukung tugas peneliti sebagai instrumen. Kehadiran peneliti di lapangan dilukiskan secara eksplisit. Penulis dalam penelitian ini sebagai pengamat partisipan, sehingga kehadiran peneliti perlu diketahui statusnya sebagai peneliti oleh informan.

3.1.10 Pelaksanaan riset yang menerapkan tradisi riset yang bersandar pada pemanfaatan pengetahuan dan intuisi, maka perlu pengetahuan yang memadai.

3.1.11 Objektivitas dan keadaan yang sebenarnya menjadi perhatian dalam riset.

3.2 Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah *grounded theory* dan dipadukan dengan triangulasi. Pendekatan *grounded theory* (*Grounded Theory Approach*) adalah metode penelitian kualitatif yang menggunakan sejumlah prosedur sistematis guna mengembangkan teori dari kancah penelitian.

3.3 *Setting* Penelitian. Penentuan lokasi penelitian yakni di Jakarta Barat mengingat wilayah ini merupakan bagian Provinsi DKI Jakarta yang rawan terhadap

penyalahgunaan dan peredaran gelap. Waktu yang tersedia adalah mulai Maret 2011 melakukan penelitian pendahuluan dengan mencari data awal. Penelitian di lapangan dilakukan selama bulan Mei dan Juni 2011.

3.4 Subyek Penelitian. Untuk mendapatkan data empirik dari praktisi maupun pakar yang dikategorikan sebagai subyek penelitian/informan diperlukan guna mempertajam analisa data yang ada sehingga terjawablah pertanyaan penelitian tersebut. Subjek penelitian atau informan adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Subjek penelitian juga membahas karakteristik subjek yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini subyek Penelitian terdiri atas pakar pendidikan yang bertugas di Kementerian Pendidikan Nasional; pakar/pejabat dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta; Pakar di bidang pemberdayaan masyarakat dari BNN; Anggota Dewan Pendidikan, Anggota Komite Sekolah SLTA di Jakarta Barat; Kepala SLTA di Jakarta Barat; Guru Bimbingan dan konseling SLTA di Jakarta Barat; Pelajar SLTA dari DKI Jakarta. Struktur Subyek Penelitian adalah sebagaimana di dalam tabel di bawah ini.

Pembina Fungsi kelembagaan	Pengelola lembaga pendidikan	Komponen Pendidikan	Keterangan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pakar / konsultan ahli BNN di bidang pencegahan narkoba 2. Pejabat/Pakar pendidikan dari Kemendiknas 3. Kepala Dinas Pendidikan DKI dan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat 	Kepala sekolah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru Bimbingan dan Konseling 2. Dewan Pendidikan 3. Komite Sekolah 4. Peserta didik (Pelajar) 	Terdiri atas <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelajar SMA 2. Pelajar SMK

Tabel 3.1 Struktur subyek penelitian (*informan*)

3.5. Teknik Pengumpulan data. Teknik pengumpulan dengan pengumpulan dokumentasi dan wawancara mendalam. Kabsahan data dengan pendekatan triangulasi yakni dilengkapi dengan berbagai pendekatan lain yang relevan baik dengan teori, pendapat pakar lain maupun melalui berbagai sumber lain terkait.

3.6 Teknik Analisis Data. Menganalisis data yang berasal dari pengumpulan data dari dokumen-dokumen yang terkait dengan kebijakan yang mengatur peran lembaga pendidikan, program-program pembinaan perilaku pelajar dan kurikulum pendidikan, serta dokumen lain terkait. Melakukan analisis hasil wawancara setelah dilakukan proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga peneliti dapat menyajikan temuannya. Dalam analisis ini melibatkan pengerjaan, pengorganisasian, pemecahan, dan sintesis, pencarian pola, pengungkapan hal penting, dan penentuan apa yang dilaporkan. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan selama dan setelah pengumpulan data dengan teknik analisis komponensial dan analisis tema. Dalam konteks ini peneliti dapat menggunakan statistik nonparametrik,⁵⁶ logika, dan etika. Statistik nonparametrik adalah statistik yang tidak memerlukan adanya syarat-syarat tertentu (asumsi-asumsi) tentang variabel random atau populasi yang memerlukan sumber sampel penelitian. Logika adalah proses berpikir, menggunakan prinsip-prinsip hubungan baik secara penalaran deduktif maupun induktif. Penalaran deduktif, menarik kesimpulan dari umum ke khusus. Dalam penalaran deduktif, bila premisnya benar maka kesimpulannya otomatis benar. Logika deduktif dapat mengidentifikasi hubungan-hubungan baru dalam pengetahuan yang ada. Dalam penalaran induktif, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan hasil sejumlah pengamatan kasus-kasus (individual, situasi, dan peristiwa), kemudian peneliti membuat kesimpulan yang bersifat umum.

Etika dalam ranah kegiatan penelitian dijadikan ukuran kepatutan tentang boleh atau tidaknya, baik atau buruknya sebuah aspek-aspek tertentu dalam kegiatan

⁵⁶. Sebagaimana definisi statistik non parametrik yang diunduh dari <http://igbondan.files.wordpress.com/2006/12/modul-1.pdf>

penelitian. Hal ini diperlukan karena bagaimanapun juga esensi penelitian adalah untuk mencari kebenaran dari sebuah gejala yang muncul. Kebenaran yang dihasilkan dalam sebuah penelitian adalah kebenaran empirik dan kebenaran logis.

3.7 Tehnik Pengecekan Keabsahan Temuan. Guna memperoleh keabsahan temuan dan interpretasi maka perlu diteliti kredibilitasnya dengan tehnik kehadiran peneliti di lapangan, observasi yang diperdalam, triangulasi (menggunakan beberapa sumber, metode, peneliti, teori) analisis kasus negatif, pelacakan kesesuaian hasil, dikonfirmasi kepada sumbernya. Peneliti menggunakan triangulasi sebagai tehnik untuk mengecek keabsahan data. Dimana dalam pengertiannya triangulasi adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian (Moleong, 2004:330).Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan tehnik yang berbeda (Nasution, 2003:115) yaitu wawancara, observasi, dan dokumen. Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data. Menurut Nasution, selain itu triangulasi juga dapat berguna untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data, karena itu triangulasi bersifat reflektif.

3.8 Tahap-tahap Penelitian. Melakukan penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, serta penulisan laporan.

BAB 4

GAMBARAN UMUM WILAYAH JAKARTA BARAT

Dasar Hukum Pembentukan Kota Administrasi Jakarta Barat. Bahwa berdasarkan UU No.29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan RI. Dalam Pasal 7 ayat (1) :“Wilayah Provinsi DKI Jakarta dibagi dalam kota administrasi dan kabupaten administrasi.”⁵⁷

Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.164 Tahun 2007 tanggal 27 Nopember 2007 tentang Perubahan Sebutan Kotamadya dan Walikotamadya. Pasal 1 : “Mengubah sebutan Kotamadya menjadi Kota Administrasi dan sebutan Walikotamadya menjadi Walikota.” Penulis menggunakan istilah Jakarta Barat yang dimaksudkan adalah Kota Administrasi Jakarta Barat.

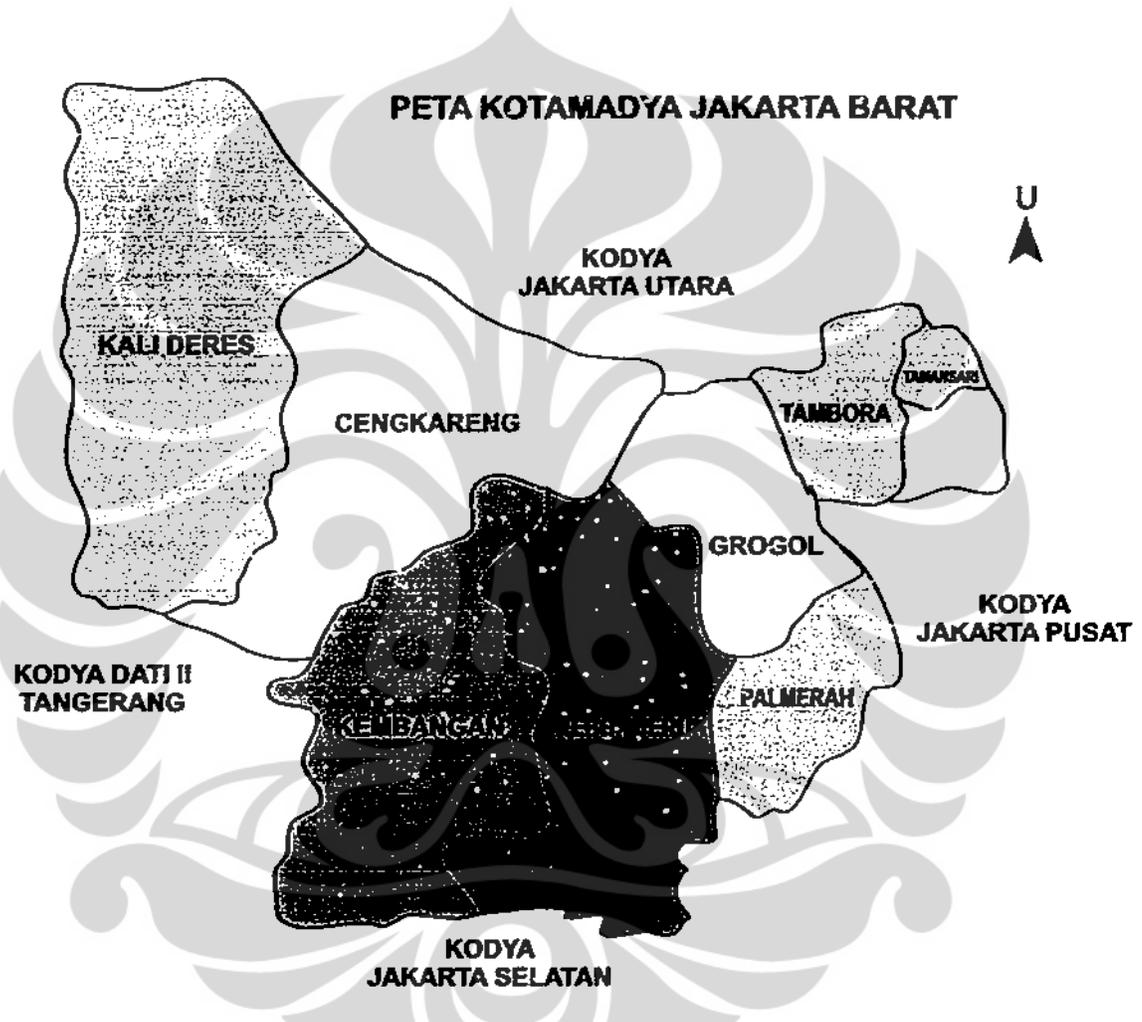
Gambaran Umum Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat. Dari aspek geografi, Kotamadya Jakarta Barat terletak antara 106⁰22'42" BT sampai 106⁰58'18" dan 50⁰19'12" LS sampai 60⁰23'54" LS. Permukaan tanahnya relatif datar, terletak sekitar 7 m di atas permukaan laut dan luas wilayahnya 128,19 km². Jakarta Barat merupakan bagian dari Wilayah Ibukota Jakarta yang mempunyai kekhususan, diantaranya Jakarta Barat sebagai kota tua dan kota metropolitan yang serba megah. Julukan ini didasarkan pada kenyataan bahwa Jakarta Barat terdapat bangunan-bangunan kuno dan gedung mewah seperti hotel, plaza, apartement dan sebagainya.

Batas Wilayah Jakarta Barat adalah sebagai berikut : Sebelah utara adalah wilayah Jakarta Utara, sebelah timur adalah wilayah Jakarta Pusat, sebelah selatan adalah wilayah Jakarta Selatan, serta sebelah barat yakni wilayah Banten. Dari gambaran geografi di atas menjelaskan bahwa Jakarta Barat merupakan bagian integral wilayah provinsi DKI Jakarta yang saat ini menjadi daerah paling rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Secara lebih rinci batas-batas wilayahnya yakni sebelah utara adalah batas DKI Jakarta dengan Tangerang Pantai Laut Jawa; sebelah timur meliputi, muara alur-

⁵⁷. Data dari kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, diunduh dari http://www.bpndki.org/jakbar/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=35&limit=1&limitstart=1

kali Muara Angke Jl. Angke rel kereta api dari barat ke timur dan dari barat ke timur rel kereta api dari utara ke selatan Jl. Ketapang sampai Banjir Kanal Jl. Jati Petamburan Pal Merah; Sebelah selatan adalah batas DKI Jakarta dengan Tangerang-Kali Pesanggrahan-batas Kecamatan Kebon Jeruk sampai Kali Grogol; Sebelah barat adalah batas DKI Jakarta dengan Tangerang.⁵⁸



Gambar 4.1 Peta Kotamadya Jakarta Barat

⁵⁸ . <http://maxima-hm.tripod.com/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/ProspektusJakBar.pdf>

Penduduk Jakarta Barat Barat.⁵⁹ Berdasarkan hasil pencacahan Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk adalah 2.278.825 orang, yang terdiri atas 1.162.379 laki-laki dan 1.116.446 perempuan. Dari hasil SP2010 tersebut tampak bahwa penyebaran penduduk Jakarta Barat bertumpu di Kecamatan Cengkareng yakni sebesar 22,41 persen, kemudian diikuti oleh Kecamatan Kalideres sebesar 17,30 persen, dan Kecamatan Kebon Jeruk sebesar 14,63 persen. Kecamatan Palmerah, Grogol Petamburan, dan Taman Sari adalah 3 kecamatan yang memiliki tingkat penyebaran penduduk di bawah 10 persen yang masing-masing berjumlah 198.975 orang (8,73 persen), 223.256 orang (9,80 persen), dan 109.686 orang (4,81 persen). Dengan luas wilayah Jakarta Barat sekitar 129,54 kilo meter persegi yang didiami oleh 2.278.825 orang maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Jakarta Barat adalah 17.592 orang per kilo meter persegi. Kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Tambora sebesar 43.776 orang per kilo meter persegi sedangkan yang paling rendah adalah Kecamatan Kembangan sebesar 11.262 orang per kilo meter persegi.

Laju pertumbuhan penduduk Jakarta Barat. Laju pertumbuhan penduduk Jakarta Barat per tahun selama sepuluh tahun terakhir yakni dari tahun 2000-2010 sebesar 1,81 persen. Laju pertumbuhan penduduk Kecamatan Kembangan adalah yang tertinggi dibandingkan kecamatan-kecamatan lain di Jakarta Barat yakni sebesar 2,90 persen, sedangkan yang terendah di Kecamatan Taman Sari yakni sebesar 0,19 persen. Kecamatan Kembangan menempati urutan keempat dalam jumlah penduduk namun dari sisi laju pertumbuhan penduduk adalah yang paling tinggi di Jakarta Barat. Kecamatan Cengkareng walaupun menempati urutan pertama dalam jumlah penduduk, namun dari sisi laju pertumbuhan penduduk masih menempati urutan ketiga yakni sebesar 2,29 persen dan berada di atas laju pertumbuhan Penduduk Jakarta Barat.

Berdasarkan Data Statistik Jakarta Barat Dalam Angka 2010, wilayah ini mempunyai luas 128,47 km² dan menjadi pintu gerbang bagi pendatang dari

⁵⁹. Sumber diunduh dari <http://www.bps.go.id/hasilSP2010/dki/3174.pdf>

Sumatera. Wilayah ini juga merupakan kota perdagangan, industri, dan pertanian dengan pemukiman yang teratur walau masih banyak tanah kosong. Keragaman etnis antar suku dari Indonesia yang ada umumnya sulit dibedakan, kecuali antara WNI dan WNA. Di Wilayah Jakarta Barat, jumlah WNI keturunan Cina cukup menonjol. Mereka umumnya menguasai sektor perekonomian dengan membuka usaha pertokoan, perbengkelan, dan usaha dagang lainnya. Penduduk Betawi masih bertani secara tradisional di sektor perkebunan dan tanaman hias.

Daerah rawan narkoba di Jakarta Barat. Terdapat 25 Kelurahan di Jakarta Barat Rawan Narkoba.⁶⁰ Menurut Badan Narkotika Kotamadya Jakarta Barat (BNK Jakarta Barat) dari 25 (dua puluh) kelurahan di Jakarta Barat rawan terhadap peredaran narkoba tiga kelurahan ditetapkan oleh BNK Jakarta Barat sebagai kelurahan yang paling rawan narkoba yakni Kelurahan Kota Bambu Selatan Kecamatan Palmerah, Kelurahan Kedaung Kaliangke Kecamatan Cengkareng, dan Kelurahan Tangki Kecamatan Tamansari adalah kelurahan yang rawan narkoba. Namun, hal ini tak menutup kawasan lain menjadi target selanjutnya para bandar narkoba dan untuk mengantisipasinya, BNK Jakarta Barat telah membentuk Satgas Antinarkoba di tingkat Rukun Warga (RW). Kampung permata di kelurahan Kedaung Kaliangke terdapat 7 RT dengan jumlah warga 4.301 jiwa. RT terawan adalah RT 01 s/d 06 dengan jumlah warga 1278 jiwa. Di enam RT inilah warganya terlibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba hingga kini mencapai 80%.⁶¹

Di Jakarta Barat dari tahun ke tahun pengedar, pemakai, dan produsen narkoba yang tertangkap di wilayah ini terus meningkat. Pada 2004 tersangka yang tertangkap sebanyak 1.031 orang, 2005 (1.431), 2006 (1.888), dan 2007 (2.100). Dari 6.450 tersangka yang tertangkap selama 2004-2007, terdiri dari 2.832 pengedar, 3.612 pemakai dan enam produsen. Sedangkan untuk tahun 2008-2010 diduga kuat mengalami tren peningkatan. Berdasarkan data yang dimiliki BNK Jakarta Barat ada potensi bahwa 40 persen dari 56 kelurahan di Jakbar perlu pengawasan. Untuk itu, perlu adanya satgas antinarkoba di tiap RW.

⁶⁰.Sumber Badan Narkotika Kotamadya Jakarta Barat, diunduh dari <http://www.pelita.or.id/baca.php?id=51353>

⁶¹.Sumber Data dari Kasubdit masyarakat Kota, Direktorat Pemberdayaan Alternatif, BNN.

Tabel 4.1. Ekonomi PDRB (*Pendapatan Domestik Regional Bruto Daerah*)
(*Harga Konstant*) Kota Jakarta Barat⁶²

Sektor	Tahun							
	2007		2006		2005		2004	
	Rupiah (Juta)	%	Rupiah (Juta)	%	Rupiah (Juta)	%	Rupiah (Juta)	%
Pertanian	46	0,09	47	0,10	49	0,11	53	0,13
Pertambangan	-	-	-	-	-	-	-	-
Industri Pengolahan	4.481	9,01	4.278	9,14	4.122	9,33	3.943	9,46
Listrik dan Air Bersih	397	0,80	373	0,80	351	0,79	324	0,78
Bangunan	5.618	11,29	5.156	11,02	4.785	10,83	4.447	10,67
Perdagangan, Hotel, Restoran	14.016	28,17	13.170	28,14	12.428	28,13	11.717	28,13
Angkutan/ Komunikasi	6.063	12,18	5.303	11,33	4.689	10,61	4.153	9,97
Bank/Keu/Perum	13.118	26,36	12.698	27,13	12.249	27,73	11.774	28,26
Jasa	6.022	12,10	5.773	12,33	5.506	12,46	5.248	12,60
Total	49.763	100	46.799	100	44.178	100	41.659	100
Laju Pertumbuhan		6		6		6		-

Buktinya, terungkap dan tertangkapnya para tersangka pengedar, pemakai, dan produsen barang haram tersebut berkat adanya laporan dari masyarakat. Peran dan partisipasi masyarakat sangat tinggi. Ini sinyal positif dalam pemberantasan narkoba di lingkungan warga. Adanya gerakan sosialisasi tentang bahaya narkoba di tiap kelurahan perlu terus ditingkatkan. Sosialisasi tentang bahaya narkoba sangat perlu dilakukan karena masih banyak warga yang belum mengetahui dan memahami benar tentang bahaya narkoba. Agar pemberantasan narkoba berlangsung di seluruh lingkungan warga maka terdapat himbuan oleh pemimpin wilayah ini kepada semua pihak termasuk pemuka masyarakat, LSM, dan organisasi kepemudaan berpartisipasi menanggulangi bahaya narkoba tersebut, dengan target akhir 2011, seluruh RW di 56 kelurahan telah terbentuk Satgas Anti Narkoba.

Profil Institusi Kepolisian sebagai Institusi penegak hukum yang berperan dalam penanggulangan narkoba di Wilayah Jajaran Kepolisian Resort (Polres) Metro Jakarta Barat.⁶³ Polres Metro Jakarta Barat tergolong aktif membentuk Forum

⁶². Sumber data : Jakarta Barat Dalam Angka 2010. Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Barat. Diupdate (diperbaharui) pada tanggal 04-3-2011.

⁶³. Sumber Profil Kepolisian Resort Jakarta Barat diunduh dari <http://www.metro.polri.web.id/profil-wilayah-jajaran-pmj/restro-jakarta-utara/sektro-koja/107?task=view>

Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM). Saat ini jumlahnya sudah 36 FKPM dengan jumlah anggota 537 orang. Forum ini diarahkan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban yang kondusif, dengan pola menciptakan kerjasama dan rasa persahabatan dengan masyarakat. Prinsip kemitraan yang dibangun Polres Jakarta Barat bersifat proaktif, patnership, dan pemecahan masalah. Target utamanya untuk memberantas peredaran narkoba, perjudian, dan premanisme bersama-sama masyarakat dan secara proporsional.

Dengan adanya FKPM ini jajaran Polres Jakarta Barat semakin mampu secara cepat merespon laporan masyarakat. Setelah terbentuknya sejumlah FKPM, ke depan Polres Jakarta Barat berencana membuat Polisi RW. Artinya di setiap Rukun Warga (RW) akan ditempatkan satu petugas polisi sebagai ujung tombak petugas Polmas. Polisi RW diarahkan menjadi polisi sipil yang beradab. Untuk melindungi masyarakatnya dari ancaman kamtibmas Polres Jakarta Barat didukung dengan 8 polsek dan 36 pos pol, yaitu Polsek Taman Sari, Kembangan, Cengkareng, Kebon Jeruk, Tanjung Duren, Tambora, Palmerah, dan Kalideres. Sedangkan jumlah polisi mencapai 2.094 orang, dengan rasio 1 : 748,2.

Wilayah hukum Polres Jakarta Barat memiliki luas 12.615,14 ha, dengan jumlah penduduk 1.566.752 jiwa. Kepadatan penduduk di Jakarta Barat 151,27 jiwa perhektar, dengan iaju pertumbuhan penduduk 0,4 %. Jakarta Barat sendiri merupakan kawasan pusat kegiatan pariwisata dan hiburan malam di ibukota. Selain itu merupakan titik kumpul para pendatang dari berbagai suku, ras, dan agama, terutama kalangan keturunan Cina. Situasi ini membuat wilayah Jakarta Barat sangat rawan terhadap konflik SARA maupun perdagangan gelap narkoba.

Meski demikian *crime total* (jumlah kejahatan) di wilayah ini menunjukkan trend penurunan. Tahun 2006 misalnya *crime total* mencapai 6.839 dan di tahun 2007 turun menjadi 2.309 kasus. Dalam *crime* indek 2006 terlihat kasus yang menonjol di Jakarta Barat adalah pencurian kendaraan bermotor roda dua 2.176 kasus, narkoba 1.370 kasus, pencurian pemberatan 1.093 kasus, dan premanisme 796 kasus. Sedangkan wilayah Jakarta Barat yang paling rawan kejahatan adalah Kecamatan

Tajungduren. Posisi kedua berada di Kecamatan Kebonjeruk, Cengkareng, Tambora 921 kasus, dan Tamansari.

Dalam menjalankan tugasnya jajaran Polres Jakarta Barat masih dihadapkan pada keterbatasan jumlah personel, keterbatasan sarana prasarana, kemampuan anggota untuk mengungkapkan kasus masih rendah, sementara kesadaran masyarakat dalam memberikan informasi juga masih rendah. Polres Metro Jakarta Barat membawahi Polsek-Polsek Jajarannya yakni Polsek Metro Taman Sari, Polsek Metro Tambora, Polsek Metro Tanjung Duren, Polsek Metro Palmerah, Polsek Metro Cengkareng, Polsek Metro Kebon Jeruk, Polsek Metro Kalideres, dan Polsek Metro Kembangan. Langkah-langkah Polres Metro Jakarta Barat tersebut setidaknya telah menjadi upaya nyata dalam mendukung peran lembaga pendidikan untuk mencegah narkoba dengan membangun kemitraan kepolisian dan masyarakat. Secara proporsional forum tersebut dapat bermanfaat untuk melakukan pencegahan narkoba.

Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat berhasil mengungkap 128 kasus penyalahgunaan narkoba. 144 Orang menjadi tersangka dalam kasus narkoba sejak 22 Oktober hingga 9 November 2010.⁶⁴ Tertinggi shabu-shabu dengan 66 kasus dengan barang bukti 117,25 gram, kedua 33 kasus ganja dengan barang bukti sekitar 16 kilogram, ketiga, 18 kasus ecstasy dengan barang bukti sebanyak 1.032 butir. Keempat, 9 kasus heroin, kelima, Miras dengan barang bukti 516 botol kemudian 1 kasus narkoba golongan IV dengan barang bukti berupa 20 butir lexotan dan kasus bahan berbahaya usus berformalin. Keseluruhan kasus tersebut beromset hingga ratusan juta bahkan milyaran rupiah. Beberapa kasus yang menonjol diantaranya, penangkapan tersangka berinisial AM (25) di Cimone, Karawaci, Tangerang. Dari tangan tersangka, polisi menyita sebungkus ganja seberat 832 gram. Selain itu, tersangka IB (29) juga berhasil ditangkap di Jatake, Tangerang 19 November lalu dengan barang bukti ganja seberat 1.800 gram. Kemudian MI (24) ditangkap di Kembangan Utara, Kembangan, Jakarta Barat Pada 22 November 2010 lalu bersama barang bukti berupa seperangkat alat cetak pil, 15 butir extacy, bahan baku extacy dan satu paket shabu seberat 0,2 gram. Menurut pengakuannya, ia telah satu bulan

⁶⁴. Sumber diunduh dari <http://www.detiknews.com/read/2010/12/09/185125/1514819/10/ratusan-orang-ditangkap-karena-kasus-narkoba>

beroperasi, di mana setiap hari bisa memproduksi 100 butir pil yang dijual Rp 50 ribu per butir. Sedangkan pada bulan Januari—Juni 2011 data pengungkapan kasus

Adanya Kebijakan Dinas Pendidikan yang diterapkan di lingkungan Sudin Dikmen, Jakarta Barat. Ada empat kompetensi yang harus dilakukan oleh para guru dan Kepala Sekolah agar siswa di sekolahnya lulus seperti yang diharapkan. Empat kompetensi yang perlu dilakukan yakni cara mengajar hingga dapat dengan mudah dipahami siswa, profesionalitas para guru untuk lebih meningkatkan kapasitas belajar. Selain itu memberikan bimbingan siswa agar dapat melakukan interaksi positif dengan lingkungannya dan dapat membentuk karakter positif para siswa. Kepada seluruh perangkat sekolah mulai dari Kepala Sekolah, guru, bagian administrasi dan pihak terkait lainnya secara rutin melalui kegiatan kerohanian sehingga tercipta iman yang teguh dan bertanggung jawab. Berbagai kegiatan yang dilakukan antara lain pendalaman materi dengan melakukan penambahan materi pelajaran, kegiatan introspeksi diri siswa atas kekurangan sejak dari semester satu, melakukan *tryout* (uji coba) dan kegiatan ibadah pada malam hari yang dilakukan setiap dua minggu satu kali.

BNN terus melakukan upaya persuasif terhadap mereka yang termasuk golongan⁶⁵ beresiko tinggi, melalui program pemberdayaan masyarakat perkotaan dan pedesaan. Untuk wilayah perkotaan, Kampung Permata Jakarta Barat menjadi *pilot project* dari program ini. Upaya yang dilakukan antara lain dengan memberikan keterampilan seperti menjahit dan membordir, memasak, tata rias kecantikan, pelatihan computer, olahraga, dan kesenian.

Selanjutnya data hasil pengungkapan kasus narkoba di wilayah Polres Metro Jakarta Barat dan jajarannya terungkap 124 kasus dan 172 tersangka dengan barang bukti 219,66 gr ganja, 3,18 gr heroin, 16,25 gr shabu, dan 23 butir ekstasi.⁶⁶

⁶⁵. Sumber diunduh dari http://www.bnn.go.id/portalbaru/portal/konten.php?nama=PressRelease&op=detail_press_release&id=94&mn=2&smn=e

⁶⁶. Sumber data dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat.

BAB 5

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif dengan lokasi di Kota Administrasi Jakarta Barat. Bahwa untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang peran lembaga pendidikan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi pelajar SLTA di Jakarta Barat pada saat ini, yang diharapkan serta upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mewujudkan peran lembaga pendidikan tersebut dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi pelajar SLTA di Jakarta Barat telah dilakukan sebagaimana pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan pengumpulan dokumen. Hasil penelitian dan pembahasan telah disajikan dalam tesis ini. Namun demikian penelitian ini tidak terlepas dari beberapa faktor kelemahan serta keterbatasan diantaranya adalah keterbatasan waktu.

Diperlukan waktu untuk mendalami yang sebenar-benarnya karakteristik lembaga pendidikan menengah di Jakarta Barat melalui metode pengamatan yang efektif guna pengelompokannya menjadi kelompok atas yang dikategorikan sekolah unggulan, kelompok menengah yang kategorikan sedang keunggulannya, dan kelompok bawah yakni yang dikategorikan kurang unggul diperlukan waktu yang lebih lama untuk mampu menghasilkan jawaban pertanyaan penelitian yang lebih tajam. Untuk itu maka dalam penulisan tesis ini belum sampai menggali guna pengelompokan sekolah dalam kriteria kualitas dan karakteristik dengan solusi yang kemungkinan berbeda tiap kelompok karakteristiknya. Dalam tesis ini upaya yang dilakukan masih bersifat umum yakni untuk pendidikan menengah namun demikian dalam narasi kualitatifnya jawaban pertanyaan penelitian telah dijawab melalui penelitian dan implementasi kerangka teori maupun konsep serta *review* penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait.

5.2 Hasil Penelitian.

Dalam penelitian ini telah dilakukan wawancara mendalam kepada berbagai nara sumber terkait dengan subyek penelitian atau informan yang dirumuskan dalam

struktur subyek penelitian. Dalam struktur subyek penelitian tersebut meliputi elemen penting yang mendukung peran lembaga pendidikan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi pelajar SLTA. Unsur-unsur tersebut meliputi kelompok pembina fungsi kelembagaan dan kebijakan, pengelola sekoiah (Kepala Sekolah), kelompok komponen pendidikan yang terdiri atas guru BK, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, serta pelajar sebagai obyek dan subyek didik. Penekanan-penekanan penting yang terkait dengan peran lembaga pendidikan tersebut telah dikemukakan oleh subyek penelitian (informan) serta dilakukan analisis.

5.2.1 Peran BNN Dalam Mendukung Terwujudnya Peran Lembaga Pendidikan dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pelajar SLTA. Sebagaimana dikemukakan oleh Konsultan Ahli BNN bidang pencegahan penyalahgunaan narkoba, Prof. Paulina G. Padmohoedjo, MA., MPH.

5.2.1.1 Kondisi saat ini BNN sebagai *focal point* (yang dikedepankan) dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba telah berperan mengeluarkan kebijakan khususnya di bidang pemberdayaan masyarakat lingkungan pendidikan. Kebijakan ini tentunya menjadi dukungan bagi peran lembaga pendidikan untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi kalangan pelajar SLTA.

a. Dalam implementasi kebijakan tersebut BNN telah membuat kesepakatan bersama (*MoU/Memorandum of Understanding*) antara BNN dengan Kementerian Pendidikan nasional, dan juga dengan institusi pemerintah terkait lainnya demikian juga dengan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) namun demikian dalam pelaksanaannya masih belum efektif. Pada umumnya pelaksanaan kegiatan belum terencana secara khusus sebagai program pencegahan narkoba dalam bentuk ceramah atau penyuluhan di sekolah-sekolah yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan namun masih bersifat sporadis dan belum merata.

b. Peran BNN dalam bentuk kebijakan dan perencanaan masih belum sepenuhnya melibatkan institusi terkait, sehingga pelaksanaannya kurang efektif. Dalam implementasi kebijakan masih berhenti pada tahap pemberian informasi (seperti

penyuluhan dan penerangan) yang seharusnya didukung penuh dengan partisipasi warga sekolah, keluarga, dan masyarakat.

c. Lingkungan sekolah tingkat menengah (SLTA) secara faktual rawan dengan penyalahgunaan narkoba. Usia pelajar SLTA yang masih labil perilaku dan kepribadiannya, mereka sedang mencari jati diri. Salah satu keinginan mencoba-coba sesuatu yang baru, bila lingkungan pergaulan dengan teman sebaya di sekolah kurang kondusif maka pemberdayaan lingkungan pendidikan formal tidak akan pernah optimal. Dalam implementasinya berbagai program pemberdayaan lingkungan pendidikan memang masih dilakukan secara sporadis, belum terprogram, berkelanjutan, dievaluasi secara terukur, periodik dan masih *project oriented* belum sampai pada *outcome oriented*.

5.2.1.2 Kendala-kendala yang terjadi dalam mewujudkan kondisi yang diharapkan dari dukungan BNN terhadap peran lembaga pendidikan.

Pertama, Kendala-kendala.

- a. Kurang efektifnya komunikasi, koordinasi, dan kesepakatan seluruh komponen pencegahan penyalahgunaan narkoba secara terprogram, teratur, dan berkelanjutan.
- b. Kurangnya keterlibatan dalam penyusunan program pencegahan dari institusi terkait dan kurang disosialisasikan program pencegahan.
- c. Belum terwujudnya peran BNN dalam mendukung sistem pencegahan sejak usia dini.
- d. Belum bersinerginya lembaga pemerintah terkait seperti Kemendiknas, Kemenpora, Kemensos, Kemenkes, Kepolisian, LSM, dan BNN dengan lembaga pendidikan.
- e. Masih lemahnya dukungan baik materi maupun teknis yang efektif dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi pelajar SLTA. Dukungan tersebut dalam bentuk kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan kader anti narkoba di lingkungan sekolah. Salah satu sasaran bidang pemberdayaan masyarakat adalah pemberdayaan lingkungan pendidikan.
- f. Masih bersifat sporadisnya penanganan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) sebagai lingkungan pendidikan formal, salah satu lingkungan yang strategis untuk melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Kedua, Kondisi Yang Diharapkan.

- a. Adanya komunikasi, koordinasi, dan kesepakatan seluruh komponen pencegahan penyalahgunaan narkoba secara terprogram, teratur, dan dilakukan berkelanjutan.
- b. Adanya penyusunan program pencegahan yang melibatkan institusi terkait dan disosialisasikan. Peran BNN menjadi nara sumber dan tentunya sebagai *focal point*.
- c. Terwujudnya peran BNN dalam mendukung sistem pencegahan sejak usia dini.
- d. Bersinerginya lembaga pemerintah terkait seperti Kemendiknas, Kemenpora, Kemensos, Kemenkes, Kepolisian, LSM, dan BNN dengan lembaga pendidikan.
- e. BNN lebih meningkatkan kualitas dukungan baik materi maupun teknis yang efektif dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi pelajar SLTA. Dukungan tersebut dalam bentuk kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan kader anti narkoba di lingkungan sekolah. Salah satu sasaran bidang pemberdayaan masyarakat adalah pemberdayaan lingkungan pendidikan.
- f. BNN melakukan program penanganan SLTA sebagai lingkungan pendidikan formal, salah satu lingkungan yang strategis untuk melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba, lebih efektif dan baik dari sisi waktu, biaya dan tempat.
- g. Lingkungan sekolah tingkat menengah (SLTA) diharapkan menurun tingkat kerawannya dampak dari implementasi pencegahan sejak usia dini tersebut.
- h. Program pemberdayaan lingkungan pendidikan tidak lagi dilakukan secara sporadis, namun berkelanjutan, ada evaluasi yang terukur dan secara periodik tidak lagi *project oriented* namun harus terwujud *outcome oriented program*.

5.2.1.3 Upaya-upaya yang perlu dilakukan BNN untuk mendukung peran lembaga pendidikan dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi pelajar SLTA.

Dalam rangka mendukung peran lembaga pendidikan menengah dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba maka BNN melakukan berbagai upaya sebagai berikut :

- a. Sebagai lembaga yang dikedepankan BNN menjadi nara sumber penerapan kebijakan dan strategi P4GN di bidang pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi pelajar SLTA. Dalam implementasinya BNN melakukan kerja sama dengan Kemendiknas secara jelas koordinasinya dan jelas fungsi-fungsi terkaitnya.

b. Memberikan penyuluhan kepada tenaga pendidik dan kependidikan di lingkungan lembaga pendidikan agar lembaga pendidikan lebih meningkat perannya. BNN menyiapkan modul pencegahan narkoba bagi pelajar SLTA. Seperti dituturkan oleh nara sumber Prof Paulina G. Padmohoedojo, MA., MPH. sebagai berikut :

“Memang program pencegahan narkoba di lembaga pendidikan itu harus ya pak dilakukan secara berkelanjutan dan dapat dilakukan dengan mengintegrasikan dengan materi pelajaran yang relevan. Misalnya mata pelajaran Biologi, PKN (Pendidikan Kewarganegaraan), Pelajaran Agama. Sebagai sasaran yang strategis BNN, lingkungan pendidikan menengah perlu diwujudkan dalam program kegiatan yang meliputi ada pemberian informasi (pengetahuan) yang cukup mengenai bahaya narkoba, ada pendidikan hidup sehat, ada juga menciptakan situasi lingkungan pendidikan yang kondusif dan harmonis. Yang diindikasikan : Perangkat pendidikan (guru, karyawan, siswa) penuh kedisiplinan, kepedulian, kasih sayang, ketegasan. Dilakukan (*social skill development*) pengembangan keterampilan sosial bagi siswa dan perangkat pendidikan yang meliputi : Keterampilan menolak narkoba, Keterampilan berkomunikasi untuk mengkomunikasikan hal-hal yang terkait dengan program pembimbingan dan pembelajaran agar tumbuh menjadi siswa berkepribadian luhur, juga Keterampilan mengatasi masalah”.

c. Melakukan (*social skill development*) pengembangan keterampilan sosial bagi siswa dan perangkat pendidikan yang meliputi : Keterampilan menolak narkoba; Keterampilan berkomunikasi untuk mengkomunikasikan hal-hal yang terkait dengan program pembimbingan dan pembelajaran agar tumbuh menjadi siswa berkepribadian luhur; Keterampilan mengatasi masalah; Keterampilan membuat keputusan yang terbaik bagi masa depan siswa yang bersangkutan; Keterampilan mengelola stress.

d. Membentuk kader anti narkoba di lingkungan pendidikan menengah dengan melibatkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dengan materi, metode, dan dukungan sarana yang tepat serta proporsional.

5.2.2 Peran Kemendiknas Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba bagi pelajar SLTA di Jakarta Barat, menurut Pakar pendidikan dari Kemendiknas Dr. Edison Panjaitan.

5.2.2.1 Kondisi saat ini.

- a. Peran Kemendiknas dalam mendukung lembaga pendidikan melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba secara nasional adalah melalui berbagai kebijakan yang terkait dengan peningkatan mutu pendidikan.
- b. Kemendiknas telah mengeluarkan kebijakan penanggulangan kenakalan pelajar baik terkait dengan masalah tawuran antar pelajar, kejahatan narkoba maupun kejahatan lainnya. Setiap tahun kebijakan dievaluasi melalui Rakernas (Rapat Kerja Nasional) jajaran Kemendiknas sebagai upaya peningkatan efektivitas penanggulangan kenakalan pelajar di tahun-tahun berikutnya.
- c. Pada saat ini belum ada kebijakan khusus mengenai pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi pelajar SLTA namun kebijakan tersebut selain bersifat umum kenakalan pelajar, secara khususnya diserahkan kepada kebijakan sekolah masing-masing. Hal ini berkaitan dengan implementasi kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah.
- d. Juga adanya kebijakan sekolah sebagai wiyata mandala, yakni setiap sekolah memiliki kewenangan mengelola sekolahnya dengan melakukan pendekatan bahwa sekolah adalah tempat yang hanya menangani masalah pendidikan, pendewasaan perilaku dan menjadikan siswanya memiliki daya tahan yang handal menghadapi kemungkinan-kemungkinan negatif yang terjadi.

5.2.2.2 Kendala-kendala dalam mewujudkan kondisi yang diharapkan terhadap peran Kemendiknas guna pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi pelajar SLTA.

Pertama, Kendala-kendala.

- a. Belum tegasnya kebijakan Kemendiknas tentang pencegahan narkoba bagi pelajar.
- b. Masih lemahnya komitmen seluruh institusi pemerintah terkait dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di kalangan pelajar.

Kedua, Kondisi yang diharapkan

- a. Lebih efektifnya penerapan kebijakan Kemendiknas tentang Penanggulangan kenakalan pelajar baik terkait dengan masalah tawuran antar pelajar, kejahatan narkoba maupun kejahatan lainnya untuk dijadikan sebagai acuan dalam pembinaan pelajar.
- b. Setiap lembaga pendidikan menengah memiliki peran mengelola lembaga pendidikannya sejalan dengan kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah. Setiap Kepala Sekolah mampu mengelola secara efektif bidang kesiswaan, bidang kurikulum, dan bidang ekstrakurikuler secara optimal.
- c. Diharapkan peran Kemendiknas dalam mendukung peran lembaga pendidikan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi pelajar SLTA semakin meningkat kualitasnya. Misalnya dengan adanya aturan khusus pencegahan penyalahgunaan narkoba berikut fasilitas dan dana pendukungnya.
- d. Meningkatnya kualitas komitmen seluruh institusi pemerintah terkait. Pelajar juga diberi pengetahuan tentang bahaya narkoba dan penyakit AIDS. Dalam pencegahan tidak hanya dibebankan kepada Kemendiknas namun sebagai yang dikedepankan di bidang peningkatan pendidikan Kemendiknas perlu kerja sama dengan BNN dan Kepolisian untuk mencegah narkoba. Dukungan Kemendiknas kepada lembaga pendidikan menengah (sekolah menengah tingkat atas) lebih efektif.
- e. Terselenggaranya operasionalisasi dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Daerah yang melekat di sekolah untuk membantu menanggapi masalah di sekolah. Siswa melaksanakan kegiatan yang bersifat membentengi diri dari bahaya narkoba. Untuk itu kalau kepala sekolah masih membutuhkan dana tambahan maka dana tambahan tersebut diharapkan dapat dibicarakan dengan orang tua siswa melalui Komite Sekolah dan atau Dewan Pendidikan. Misalnya untuk menambah fasilitas-fasilitas kegiatan olah raga di lingkungan sekolah.

5.2.2.3 Upaya-upaya yang perlu dilakukan Kemendiknas. Guna mendukung peran lembaga pendidikan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi pelajar SLTA.

- a. Kemendiknas mengeluarkan kebijakan dan mengevaluasinya program penanganan kenakalan pelajar. Di dalam program tersebut salah satunya adalah program pencegahan penyalahgunaan narkoba, selain penanggulangan masalah tawuran antar pelajar, penyalahgunaan narkoba, dan tindak kejahatan lainnya.
- b. Kementerian Pendidikan Nasional mengadakan MoU dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) tentang Pelaksanaan Pencegahan Bahaya Narkoba melalui Kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)⁶⁷ dan program *Anti Drugs Campaign Goes to School*. (program kampanye antinarkoba ke sekolah).
- d. Meningkatkan efektivitas Satgas UKS dan Satgas Anti Narkoba. Satgas tersebut melakukan tindakan-tindakan terprogram tentang pencegahan narkoba. Melalui UKS dilakukan kegiatan mencegah penyalahgunaan narkoba.
- e. Terwujudnya model pencegahan sebagai satu-satunya solusi terbaik untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba. Pencegahan kepada pelajar agar tidak mencoba, tidak mengulang menggunakan, apa lagi ketagihan narkoba.
- f. Membangun model kurikulum yang terintegrasikan dengan mata pelajaran Agama, biologi, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan yang terukur dan terstruktur.
- g. Memberdayakan lembaga pendidikan juga memberdayakan lingkungan. Lingkungan harus bersih dari narkoba, jangan hanya lingkungan pendidikan sekolah, tapi ya lingkungan masyarakatnya juga. Selain guru BK, juga diberikan pengetahuan para orang tua, tokoh agama, tokoh masyarakat. Pencegahan narkoba memang bukan hanya dilakukan di lingkungan pendidikan SLTA tapi di semua jenjang. Muatan dalam kurikulum telah diberikan secara tepat sejak SD dan SLTP bukan SLTA saja.
- h. Memberikan pelatihan para guru sebagai pelatih di bidang pencegahan narkoba. Pemberian pelatihan kepada para guru dan guru Bimbingan dan Konseling tentang wawasan yang cukup untuk mampu mendeteksi gejala penyalahgunaan narkoba. Memberikan bantuan kepada sekolah fasilitas-fasilitas untuk mencegah narkoba.
- i. Menyusun modul anti narkoba untuk sekolah, menyelenggarakan kegiatan yang cocok untuk pelajar SLTA seperti lomba cerdas cermat tentang bahaya narkoba.

⁶⁷. Dokumen MoU antara BNN dengan Kemendiknas tahun 2008 tentang Kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah.

j. Menciptakan lingkungan sekolah dan masyarakat yang bersih dari peredaran gelap narkoba, pelaksanaannya dengan kerja sama lintas institusi.

5.2.3 Peran Dinas Pendidikan Menengah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana yang disampaikan oleh nara sumber yakni Kepala Bidang Standarisasi Pendidikan Dan Pendidikan Tinggi Dr. Hj. Istaryatiningtias, M.Si.

5.2.3.1 Kondisi Saat ini.

a. Tentang Kebijakan Dinas Pendidikan sebagaimana disampaikan oleh nara sumber tersebut kepada penulis sebagai berikut : ” Untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba telah ada kebijakan di Dinas Pendidikan secara menyeluruh dan komprehensif, pelaksanaan di sekolah dengan membentuk Satgas, juga kerjasama dengan BNP, LSM yang konsen, dan koordinasi dengan BNN, kepolisian setempat.”

b. Dengan menerapkan sanksi yang tegas dan keras di sekolah kepada pelajar yang terbukti menjadi penyalahguna narkoba.

c. Kebijakannya bahwa siswa itu aset masa depan bangsa sehingga harus didukung lingkungan bersih dari narkoba, tidak ada gangguan mental. Kebijakan Dinas Pendidikan sudah lama ada hanya implementasinya diserahkan kepada pihak sekolah.

d. Adanya kebijakan Manajemen Berbasis sekolah yang mengacu kepada Undang-Undang tentang sistem pendidikan nasional. Implementasinya setiap kepala sekolah dengan otonomi pengelolaannya termasuk pencegahan narkoba bagi para pelajarnya.

Mengenai pelaksanaan pencegahan narkoba dan pendanaannya menurut Kepala Dinas Olah Raga dan Pemuda DKI Jakarta, Drs. Ratiyono M.M.Si. sebagaimana dituturkan kepada penulis sebagai berikut :

” Kalau dana khusus *include* dalam pembinaan kesiswaan, tidak ada khusus untuk dana pencegahan narkoba. Di sekolah juga gitu, pencegahan narkoba cari nara sumber. Ada juga dari *volunteer*, sering sekali ada dari LSM, kepolisian. Waktu itu juga ada kebijakan dari gubernur. Di sekolah-sekolah juga ada kerja sama antara orang tua murid dan komite, dengan tes urine dijelaskan dengan baik bahwa ini untuk melindungi mereka. Diserahkan ke

orang tua kalau ada yang positif, tidak langsung dikeluarkan. Langkah-langkah edukatif yang penting.”

5.2.3.2 Kendala-kendala dalam mewujudkan kondisi yang diharapkan dari peran Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Pertama, Kendala-kendala.

- a. Belum adanya kebijakan khusus tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba.
- b. Padatnya kegiatan pelajar dengan kurikulum yang telah didesain pada saat ini.
- c. Pendidikan yang terjadi selama ini cenderung verbalisme belum sampai pada taraf pemahaman dan penghayatan nilai-nilai, dampaknya penyimpangan perilaku.
- d. Kerjasama dengan institusi terkait dalam pencegahan masih bersifat sporadis.

Kedua, Kondisi yang diharapkan

- a. Adanya penyelenggaraan pelatihan kepada guru-guru sehingga mampu melakukan pencegahan narkoba melalui kegiatan ekstra kurikuler.
- b. Adanya kebijakan pembinaan pemahaman bahaya narkoba. Guru-guru diberikan pembinaan di sekolah-sekolah dengan pendekatan keagamaan sesuai dengan misi sekolah dan manajemen berbasis sekolah.
- c. Adanya pembinaan akhlak bagi seluruh anak didik dan adanya dukungan kepada Dinas pendidikan dari orang tua dan *stakeholders* agar anak-anak tidak jadi korban penyalahguna narkoba. Harus ada pengawasan orang tua yang baik.
- d. Adanya kerjasama antara sekolah dengan orang tua dan ahli. Melakukan langkah-langkah edukatif yang penting, melalui antara lain implementasi kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan secara profesional oleh penanggungjawab kegiatan, pengawasan harus ketat.
- e. Adanya pencegahan penyalahgunaan narkoba di sekolah melalui tersedianya model kurikulum bahaya narkoba, modul, metode, dan guru yang berkompetensi.

5.2.3.3 Upaya-Upaya Yang Dilakukan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

- a. Melakukan kerjasama dengan Kepolisian agar para pelajar tidak terkena narkoba.
- b. Menjaga kebersihan lingkungan supaya tidak terkontaminasi dengan narkoba tersebut. Berbagai program pencegahan mengacu kepada BNP dan BNN.

- c. Menerapkan manajemen berbasis sekolah mulai dari APBS (Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah) dari masing-masing sekolah ada usaha kesehatan sekolah. hal ini juga dilaksanakan secara nasional, provinsi, dan kecamatan untuk meningkatkan motivasi komponen pendidikan secara komprehensif.
- d. Membentuk satgas pencegahan narkoba di lingkungan pendidikan menengah. Selain itu perlu juga ditetapkan kebijakan pembentukan Satgas pencegahan penyalahgunaan narkoba yang berbasis sekolah mulai TK, SD, SMP dan SMA dan sekolah sederajat sampai perguruan tinggi pelaksanaannya secara kesinambungan.
- e. Mengadakan lomba kesehatan sekolah, guru-guru diberi pembimbingan dan pentingnya kemitraan. Diadakan lomba sekolah sehat bekerjasama dengan Kemenkes, BKKBN, dan BNN.
- f. Pelatihan guru-guru sebagai TOT (*Training of Trainer*) atau pelatihan pelatih.
- g. Mengoperasionalkan dana BOS untuk mendukung program UKS, pembinaan kesiswaan, dan manajemen sekolah secara efektif. Pengembangan program pencegahan bahaya narkoba harus melekat dalam pembinaan kesiswaan.

5.2.4 Peran Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Seksi SMA Drs. Yusen Hardiman M.Pd.

5.2.4.1 Kondisi saat ini. Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat pada saat ini telah berperan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi pelajar SLTA.

- a. Sudin Dikmen telah mengeluarkan kebijakan terkait dengan tugas dan fungsinya yakni sebagai pembina dan penyelenggara pendidikan menengah negeri serta sebagai pembina pendidikan menengah swasta. Sudin Dikmen sebagai kepanjangan tangan Dinas Pendidikan di bidang kurikulum, kesiswaan, manajemen, dan mutasi pelajar.
- b. Kebijakan di bidang mutu dan pelayanan pendidikan telah ditetapkannya prinsip tidak boleh ada anak usia pelajar SLTA yang tidak sekolah. Seluruh anak Jakarta Barat harus sekolah setidaknya hingga di pendidikan menengah.
- c. Adanya kebijakan pembinaan ahlak para pelajar agar mampu membentengi diri.

5.2.4.2 Kendala-kendala dalam mewujudkan kondisi yang diharapkan bagi peran Sudin Dikmen dalam mendukung lembaga pendidikan guna mencegah penyalahgunaan narkoba bagi pelajar SLTA.

Pertama, Kendala-kendala.

- a. Masih rendahnya komitmen masyarakat dan komponen terkait di Jakarta Barat untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dari peredaran gelap narkoba.
- b. Penghayatan akan nilai-nilai keagamaan sebagai masyarakat agamis masih dalam taraf pengetahuan belum sampai pada penghayatan dan penerapan secara benar.

Kedua, Kondisi yang diharapkan

- a. Sudin Dikmen Jakarta Barat telah mampu meningkatkan mutu pendidikan, mutu pelayanan, pemberian kesempatan, dan kebijakan tidak boleh ada siswa dari keluarga yang tidak mampu tidak dapat mengikuti sekolah lanjutan tingkat atas.
- b. Merealisasi kebijakan seluruh anak Jakarta Barat harus sekolah hingga SLTA.
- c. *Output/lulusan* pendidikan SLTA diharapkan berkualitas mental kepribadian dan intelektualnya. Untuk itu tiap sekolah diharapkan ada program kegiatan yang diarahkan untuk olah pikir, olah rasa, olah raga, dan olah hati.

5.2.4.3 Upaya-upaya yang dilakukan.

Peran Dinas pendidikan guna mendukung terwujudnya peran lembaga pendidikan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi pelajar SLTA :

- a. Melaksanakan pembinaan pelajar melalui pendekatan olah pikir, olah rasa, olah raga, dan olah hati bagi seluruh pelajar SLTA. Sebagaimana yang dituturkan oleh Kasi SMA Sudin Dikmen Jakarta Barat, Drs. Yusen Hardiman M.Pd. :

"Sudin ini sebagai pembina regulasi, tiap sekolah kan sudah ada manajemen berbasis sekolah, silakan saja mereka ada kegiatan seni, olah raga bahkan ada juga kepemimpinan OSIS siswa SMA/SMK dengan nomenklatur No. DPA-SKPD 1.01.023.10.003.52. Tujuannya agar siswa/i Sudin Dikmen Kota Administrasi Jakarta Barat mampu sedini mungkin mengenal jiwa kepemimpinan, pembekalan akan bahaya narkoba, tawuran pelajar, sehingga

dari itu harapan dari semua kegiatan bertujuan agar siswa/i terhindar dari kenakalan remaja yang ada saat ini dan masih ada program lain.”

- b. Menyelenggarakan Program Sudin Dikmen Kota Administrasi Jakarta Barat yakni lomba MTQ pelajar SLTA se Jakarta Barat dengan nomenklatur kegiatan No. DPA-SKPD : 1.01.023.10.003.5.2, tujuannya agar siswa/i di lingkungan Sudin Dikmen Kota Jakarta Barat dapat menumbuhkan sikap *akhlaqul kharimah*, menambah keimanan dan ketaqwaan diri siswa, dapat memahami makna serta isi *Al Qur'an* sehingga siswa/i dapat membentengi diri dari hal-hal negatif.
- c. Melakukan pembinaan kepramukaan tingkat penegak dengan nomenklatur No. DPA-SKPD 1.01.023.10.003.52. kegiatan ini bertujuan agar siswa/i di lingkungan Sudin Dikmen Jakarta Barat dapat bersosialisasi hidup mandiri dan bermasyarakat.
- d. Menyelenggarakan latihan kepemimpinan OSIS siswa SMA/SMK dengan No. DPA-SKPD 1.01.023.10.003.52, tujuannya agar siswa/i Sudin Dikmen Kota Administrasi Jakarta Barat mampu sedini mungkin mengenal jiwa kepemimpinan, pembekalan akan bahaya narkoba, tawuran pelajar, sehingga dari itu semua harapan dari semua kegiatan bertujuan agar siswa/i terhindar dari kenakalan remaja yang ada saat ini.
- e. Menyelenggarakan kegiatan pelatihan jurnalistik, untuk menanamkan kecintaan pada kegiatan tulis menulis tujuannya untuk meningkatkan keterampilan menulis.
- f. Membangun kerja sama dengan institusi lain dengan KPA untuk mengadakan sosialisasi bahaya AIDS, dengan Polres Jakbar tentang sopan santun dalam berlalu lintas di jalan raya, dan bahaya narkoba.

5.2.5 Peran Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.

5.2.5.1 Kondisi saat ini. Kepala Sekolah telah berperan aktif dalam mewujudkan peran lembaga pendidikan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi pelajar SLTA. Dalam kaitan implementasi kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah maka setiap Kepala Sekolah telah melaksanakan perannya.

- a. Sebagai *manager*. Dalam mengelola tenaga kependidikan salah satu tugas yang harus dilakukan kepala sekolah adalah melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan pengembangan profesi para tenaga pendidik dan kependidikan.

- b. Sebagai *educator* (pendidik). Kegiatan belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan dan guru merupakan pelaksana dan pengembang utama kurikulum di sekolah. Kepala sekolah yang menunjukkan komitmen tinggi dan fokus terhadap pengembangan kurikulum dan kegiatan belajar mengajar di sekolahnya.
- c. Sebagai *administrator*, khususnya berkenaan dengan pengelolaan keuangan, bahwa untuk tercapainya peningkatan kompetensi guru tidak lepas dari faktor biaya. Seberapa besar sekolah dapat mengalokasikan anggaran peningkatan kompetensi guru tentunya akan mempengaruhi terhadap tingkat kompetensi para gurunya.
- d. Sebagai *supervisor*. Untuk mengetahui sejauh mana guru mampu melaksanakan pembelajaran, secara berkala kepala sekolah perlu melaksanakan kegiatan supervisi, melalui kunjungan ke kelas untuk mengamati proses pembelajaran secara langsung.
- e. Sebagai *leader* (pemimpin). Gaya kepemimpinan kepala sekolah seperti apakah yang dapat menumbuh-suburkan kreativitas sekaligus dapat mendorong terhadap peningkatan kompetensi guru. Secara konsisten menerapkan gaya kepemimpinan yang berorientasi pada tugas dan kepemimpinan yang berorientasi pada manusia.
- f. Sebagai pencipta iklim kerja. Budaya dan iklim kerja yang kondusif akan memungkinkan setiap guru lebih termotivasi untuk menunjukkan kinerjanya secara unggul, yang disertai usaha untuk meningkatkan kompetensinya.
- g. Sebagai penanggungjawab penyelenggaraan pendidikan di sekolah, maka Kepala Sekolah memiliki peran untuk membuat steril lingkungan sekolah dari pengaruh peredaran gelap narkoba. Untuk itu pada kondisi saat ini tiap sekolah menengah di Jakarta Barat telah membuat aturan dan tata tertib sekolah. Sebagaimana yang telah diturkan oleh Kepala Sekolah SMAK I Penabur Bapak Satijan MPd. :

“Waktu siswa masuk pada masa orientasi sekolah, mereka disuruh mengisi formulir pernyataan sewaktu-waktu ada tes urine. Waktu orientasi diperkenalkan / penjelasan tentang NAPZA. Ada juga satuan tugas yang dikelola yayasan untuk semua sekolah dikoordinasi Pokja NAPZA. Selama ini di SMAK I ini sudah koordinasi dengan BNN. Penyuluhan-penyuluhan koordinasi dengan Pokja NAPZA, semua yang mengkoordinasikan juga dilengkapi regulasi misalnya ada SOP Pokja NAPZA. Semua sudah ada

prosedurnya. Sekolah udah ada aturannya, kesiswaan, guru BK, guru agama, guru agama di belakang layar yang berperan di depan orang-orang yang terlibat dilaksanakan secara rutin tapi siswa tak diberi tahu apa namanya hari-hari tertentu ya dan ini khusus secara random dibawah ke ruang aula, diwawancara, deteksi nikotin jadi tak sekedar NAPZA tapi juga rokok konsen banget kita.”

h. Melakukan penyuluhan-penyuluhan pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan koordinasi dengan Pokja Narkoba/NAPZA. Semua pihak yang mengkoordinasikan juga dilengkapi regulasi. Sekolah sudah ada aturan yang menyangkut tentang pemeriksaan siswa yakni, guru, guru BK, serta petugas lain yang ditunjuk untuk tugas khusus ini dan dilaksanakan secara rutin tapi siswa tak diberi tahu sebelumnya, bila terkait dengan pemeriksaan urin misalnya. Sebagaimana dituturkan oleh Kepala Sekolah SMA N 78 Jakarta Barat sebagai berikut :

“Jadi ya preventif, pelayanan kalau terkena sebelumnya. Gini pak, pendidikan menengah yang penting tahu mana baik mana buruk, mana benar dan mana salah, kalau kesehatan mana sehat dan tidak itu sudah membekali anak. Ada peluang korupsi misalnya kalo tau korupsi tak baik ya tak akan korupsi. Narkoba itu bahaya, tahu, maka akan menjauhi. Untuk pandai Matematika bukan mengerjakan jutaan soal, mengerti prinsipnya maka akan tahu akurasi model soal lain. Tahu narkoba banyak, malah akan jadi Bandar, jadi ya kembali pendidikan yang mencegah gitu. Pendidikan bagaimana membangun mentalitas. Kalau orang itu bisa amar ma'ruf nahi munkar (menahan diri untuk tak ikut hawa nafsu, tak bullying, mengerjakan yang baik-baik).

5.2.5.2 Kendala-Kendala dalam mewujudkan kondisi yang diharapkan bagi berperannya Kepala Sekolah dalam pemcegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Pertama, Kendala-kendala.

a. Belum sinerginya sekolah, masyarakat dan orang tua dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba bagi pelajar SLTA.

- b. Pandangan masyarakat bahwa segala urusan pendidikan pelajar diserahkan sepenuhnya kepada sekolah.
- c. Penerapan sekolah sebagai wiyata mandala belum sepenuhnya menjamin keberadaan pelajar aman selama di sekolah.
- d. Terjadinya kesenjangan antara lembaga pendidikan tertentu yang peminatnya sangat banyak sedangkan lembaga pendidikan tertentu kurang peminatnya. Hal ini berdampak pada penerapan proses pembinaan dan pendidikan.

Kedua, Kondisi yang diharapkan

- a. Lembaga pendidikan diharapkan dapat menerapkan peran strategisnya dalam mencegah narkoba bagi pelajar SLTA.
 - a. Adanya program *prevention education* dalam kurikulum bahaya narkoba yang mencakup muatan materi ajaran, pengajar yang berkompentensi, silabus, modul, dan metodenya yang telah ditetapkan.
 - b. Lembaga Pendidikan Menengah diharapkan mampu membangun mentalitas hasil didik yang berkualitas unggul dengan indikasi perilaku menolak narkoba.

C. Terwujudnya Sekolah sebagai wiyata mandala dalam pelayanan pendidikan yang berkualitas. Sebagaimana dituturkan kepada peneliti oleh Kepala Sekolah SMK N 42 Jakarta Barat Drs. Uju Juhiwa, M.Pd., sebagai berikut :

”Idealnya, seorang guru memberi contoh, tidak acuh saja. Harus tahu cikal bakal narkoba dan masalahnya. Dari Dinas memberi pamflet. Pembina OSIS melakukan sidak (inspeksi mendadak) pada hari Jumat karena Sabtu nya libur, tiap hari Jumat menggunakan baju koko, hampir semua sekolah kalau mereka jalani seragam koko tawuran yang malu orang muslim kok tawuran.”

5.2.5.3 Upaya-upaya yang dilakukan. Lembaga pendidikan tingkat menengah melakukan program kegiatan guna mendukung terwujudnya peran lembaga pendidikan dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi pelajar SLTA.

- a. Melakukan pendidikan karakter, karena mental kuat akan sangat membantu pencegahan penyalahgunaan narkoba.
- b. Mendesain kurikulum sedemikian rupa sehingga program-program pendidikan mampu membangun sikap dan perilaku yang akhirnya terbentuk karakter siswa.

- c. Menanamkan kesadaran pentingnya mengendalikan diri, etika, dan moralitas.
- d. Menerapkan kebijakan kawasan sekolah bersih dari rokok berlaku bagi semua.
- e. Membangun model *peer educator* yang anggotanya para siswa yang dipilih dan dilatih hingga mampu untuk memberikan penyuluhan di antara sesama siswa.
- d. Melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler. Fungsi kegiatan ekstrakurikuler adalah untuk pengembangan kemampuan dan kreativitas anak didik sesuai dengan potensi, bakat, dan minat mereka. Pengembangan kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial anak didik bersifat menyenangkan anak didik yang menunjang proses perkembangan.

5.2.6 Peran Guru Bimbingan dan Konseling (BK)

Sebagai komponen pendidikan, guru BK berperan dalam pencegahan narkoba yakni:

5.2.6.1 Kondisi saat ini. Guru BK telah berperan secara aktif dalam mendukung peran lembaga pendidikan guna mencegah penyalahgunaan narkoba bagi pelajar.

- a. Dukungan tersebut meliputi penyelenggaraan program-program yang hingga saat ini telah didukung oleh sekolah guna pencegahan penyalahgunaan narkoba.
- b. Guru BK juga menjelaskan tentang dampak jenis-jenis narkoba yang umum seperti ekstasi, heroin, shabu dan yang sifatnya bahaya namun umum di kelas.
- c. Selain guru BK juga ada di mata pelajaran lain dengan cara diselipkan topik yang menyangkut bahaya narkoba seperti mata pelajaran PKN, olah raga, dan agama.

5.2.6.2 Kendala-Kendala dalam mewujudkan kondisi yang diharapkan guna berperannya Guru Bimbingan dan Konseling (BK) dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba bagi pelajar SLTA.

Pertama, Kendala-kendala.

- a. Belum ada kebijakan khusus mengenai pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di lembaga pendidikan menengah yang terstruktur dalam kurikulum sehingga program pencegahan tidak pernah tertangani secara efektif.
- b. Program kerja sama Kemenkes dan BNK, serta Polres sifatnya sporadis, tergantung pihak lain, kurang efektif.

Kedua, Kondisi yang diharapkan

- a. Adanya program-program yang diharapkan mendukung peran lembaga pendidikan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba bagi pelajar SLTA.
- b. Adanya program dari Kemenkes kerja sama dengan Kemendiknas yang sifatnya rutin untuk melakukan pencegahan bahaya narkoba ke sekolah.
- c. Mengadakan program kunjungan pelajar ke panti terapi rehabilitasi untuk melihat langsung dampak negatif penyalahgunaan narkoba oleh para residen.
- d. Kemenkes dan BNN memberikan penyuluhan, seminar atau kegiatan sosialisasi kepada pelajar secara terprogram untuk seluruh Indonesia.
- e. Adanya program dari kemenkes kerja sama dengan kemendiknas tentang pencegahan narkoba dan melibatkan sekolah.

5.2.6.3. Upaya-upaya yang perlu dilakukan oleh guru Bimbingan Konseling dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi pelajar SLTA yakni :

- a. Membimbing para pelajar yang bermasalah agar tidak menjadi penyalahguna narkoba. Bila terdapat pelajar penyalahguna narkoba merekomendasikan kepada kepala sekolah untuk mengembalikan pelajar tersebut kepada orang tuanya.
- b. Menyusun kurikulum program khusus bersama dengan guru-guru yang didesain sedemikian rupa dan menarik bukan hanya model ceramah. Seperti kunjungan jika mendampingi anak-anak untuk melihat tempat rehabilitasi.
- c. Membangun suasana yang harmonis serta kedekatan dengan para siswa guna mempermudah proses pembimbingan bila para pelajar mengalami masalah.
- d. Menyelenggarakan seminar tentang narkoba yang dikemas secara menarik.
- e. Merekomendasi pelajar yang berkualitas unggul kepada kepala sekolah untuk dilibatkan sebagai duta pelajar dalam model *peer educator* bagi teman-temannya.

5.2.7 Peran Dewan Pendidikan.

Dewan Pendidikan berperan mendukung peningkatan kualitas pendidikan.

5.2.7.1 Kondisi saat Ini. Peran Dewan Pendidikan sebagaimana disampaikan oleh nara sumber Dr. Margani, anggota Dewan Pendidikan DKI Jakarta. Dewan Pendidikan sebagai mitra lembaga pendidikan memiliki peran dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi pelajar SLTA.

- a. Dewan Pendidikan dibentuk berdasarkan Kepmendiknas No. 044/U/2002. Sekolah merupakan dimensi yang strategis terutama bagi anak didik. Dalam upaya pencegahan narkoba adalah untuk menyelamatkan penduduk di negara Indonesia yang belum terkena narkoba populasinya di atas 90%.⁶⁸
- b. Dewan Pendidikan telah berperan mendukung program-program yang saat ini dilakukan oleh sekolah dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi pelajar SLTA yakni setiap sekolah memiliki kewenangan mengelola sekolahnya sejalan dengan kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah. Setiap Kepala Sekolah membuat tata tertib sekolah yang bertujuan meningkatkan kedisiplinan siswa dalam proses pembelajaran dan pembinaan mental kepribadian.
- c. Sekolah telah mengembangkan komponen pembinaan yang mencakup bidang kurikulum, kesiswaan, dan ekstrakurikuler. Mengutip yang dituturkan anggota Dewan Pendidikan Dr Margani sebagai berikut :

“Saya *appreciate* kepada bapak Anton Kadarmanta ini atas tema penelitiannya. Kita perlu samakan perspektifnya. Menurut saya lingkup penelitian sudah sangat fokus preventif, jangan bicara yang sudah terkena, tapi preventif itu. Salah satu kelemahan bangsa kita sering mengabaikan masalah preventif. Lihat saja lebih baik bayar berobat daripada jaga kebersihan jaga kesehatan. Kalau sudah sakit bayar banyak mau tapi ketika menciptakan sistem-sistem ah gak usah ah. Ini juga bisa dianalogkan dengan mencegah narkoba. Institusinya sekolah, institusi yang berkarater khusus. Sekolah berperan sangat strategis. Jam 7 – 15 siswa ada di sekolah belum lagi kalo ada ekstra kurikuler, kalo guru yang ngomong siswa lebih perhatian daripada orangtua.”

5.2.7.2 Kendala-kendala dalam mewujudkan Kondisi yang diharapkan guna berperannya lembaga pendidikan menengah dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Pertama, Kendala-kendala

⁶⁸. Sumber Data : Hasil penelitian BNN bekerjasama dengan Puslitkes Universitas Indonesia tahun 2008.

a. Kebijakan wiyata mandala belum diimplementasikan sebagai upaya mengkondisikan lembaga pendidikan steril dari ancaman bahaya narkoba.

b. Belum adanya kurikulum bahaya narkoba untuk didukung oleh Dewan Pendidikan.

Kedua, Kondisi yang diharapkan

a. Dewan Pendidikan diharapkan lebih optimal dalam mendukung peran lembaga pendidikan untuk melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi pelajar SLTA. Setiap sekolah mampu membuat lingkungan sekolahnya steril dari perilaku kriminal dan penyimpangan baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Masalah narkoba menjadi bagian penting yang harus dilakukan pencegahannya dengan melibatkan komponen pendidikan dan unsur terkait lainnya.

b. Dilakukan sistem yang tertutup yakni tak ada yang boleh masuk di luar urusan pendidikan. Walaupun alumni yang akan berperanserta dalam pembinaan harus memberikan programnya ke sekolah untuk sosialisasi.

c. Sekolah harus dijadikan sebagai Wiyata Mandala. Kepala sekolah sebagai *leader* memiliki hak dan wewenang untuk mengatur sekolah sehingga setidaknya selama lebih kurang 8 jam berada di sekolah siswa aman dari bahaya.

5.2.7.3 Upaya-upaya yang perlu dilakukan.

a. Meningkatkan efektivitas peran lembaga pendidikan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi pelajar SLTA. Upayanya adalah menjadikan siswa selama berada di sekolah memiliki nilai tambah melalui pemahaman penyadaran bahaya narkoba yang diberikan oleh sekolah. Dengan harapan dampaknya lebih menjadikan siswa kebal terhadap narkoba.

b. Mengoptimalkan Dewan Pendidikan melalui perannya sebagai pemberi pertimbangan (*advisory body*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, pendukung (*supporting agency*) baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan, pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi, akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan, mediator antara pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif) dengan masyarakat.

5.2.8. Peran Komite Sekolah.

Peran Komite Sekolah dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba sebagaimana yang disampaikan oleh ketua Komite Sekolah DKI Jakarta, Drs.H. Bambang Sutomo, MBA adalah sebagai berikut :

5.2.8.1 Kondisi saat ini.

a. Peran Komite Sekolah dalam mendukung pencegahan penyalahgunaan narkoba Bagi Pelajar SLTA adalah sebagai mitra sekolah. Komite Sekolah dibentuk berdasarkan Kepmendiknas No. 044/U/2002.

b. Komite Sekolah merupakan representasi *stakeholders*, alumni, LSM, orang tua. Komite Sekolah berada di Satuan Pendidikan. Program-program yang dilakukan oleh Komite Sekolah dalam mendukung sekolah dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi pelajar SLTA pada saat ini. Sebagai mitra sekolah yang bersifat mandiri maka Komite Sekolah melakukan upaya mendukung kebijakan sekolah yakni dengan memberikan masukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

c. Di setiap sekolah sudah ada kebijakan dilarang merokok untuk semua orang termasuk tamu sekolah. Komposisi Komite Sekolah diserahkan kepada masyarakat, ada yang berlatar belakang purnawirawan, PNS, pengusaha dan warga masyarakat lain yang peduli terhadap pendidikan. Menurut Ketua Forum Komite Sekolah, Drs. H. Bambang Sutomo, MBA. :

“Masalahnya pak, peredaran bukan dengan satu tempat transit, jadi banyak pabrik bahkan dibuat di ruko-ruko apalagi barang dekat di sekolah. Kalau boleh usul aparat polisi, BNN lakukan razia untuk mensterilkan, pedagang-pedagang khususnya di Jakarta Barat. Ini menjadi efek kalau barang mudah didapat ya hukum ekonomi. Lakukan upaya sterilkan khususnya di Jakarta Barat memang lebih rawan. Sebetulnya dari forum Komite belum melangkah ke sana untuk membuat strategi pencegahan. Kalau BNN mengajak kami ingin juga. BNN mungkin punya *mapping*. Kami tak punya. Kecuali kalau ada kasus. Siswa tak masuk 1,2 hari ada protapnya, hubungi orang tua. Ini kultur sering orang tua menutupi bukannya diekspos kerja sama menangani ternyata tidak masuk dan pindah karena narkoba, dan ya tak menyelesaikan masalah, gitu lho pak.”

5.2.8.2 Kendala-kendala dalam mewujudkan kondisi yang diharapkan bagi berperannya Komite Sekolah dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pelajar SLTA.

Pertama, Kendala-kendala

- a. Kebijakan wiyata mandala belum diimplementasikan sebagai upaya mengkondisikan lembaga pendidikan steril dari ancaman bahaya narkoba.
- b. Belum adanya kurikulum bahaya narkoba untuk didukung pelaksanaannya oleh Komite Sekolah.

Kedua, Kondisi yang diharapkan

- a. Adanya program-program yang diharapkan dalam mendukung peran lembaga pendidikan dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- b. Komite sekolah membantu memproteksi pelajar mengingat adalah usia rentan karena karakteristiknya yang ingin coba-coba dan kepribadiannya masih labil.
- c. Adanya masukan yang diberikan kepada sekolah secara periodik yang bersifat membangun kualitas pendidikan.

5.2.8.3. Upaya-upaya yang perlu dilakukan agar peran lembaga pendidikan efektif dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi pelajar SLTA.

- a. Komite Sekolah melakukan rencana aksi (*action plan*) dalam memberikan dukungan peningkatan mutu pendidikan, tak ada hierarki. Pendanaan kegiatan Komite Sekolah murni swadaya dari kepedulian *stake holders*.
- b. Membantu sekolah dalam memenuhi kebutuhan operasional pendidikan. Pihak sekolah yang memiliki program untuk sosialisasi bahaya narkoba dan dibuat RAPBS dengan dari dana stakeholder ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Ketua Komite.
- c. Memberikan masukan yang bersifat mendorong sekolah untuk melibatkan pelajar SLTA untuk berperan membentengi diri guna menjauhkan diri dari bahaya narkoba.

5.2.9 Peran Pelajar.

Dalam kerangka mewujudkan peran lembaga pendidikan, maka pelajar berperan sebagaimana yang dikemukakan oleh pelajar SLTA (Triani Aji Saputra siswa SMKN

42 kelas XI, Mardiana siswa SMAN -78 kelas XI -IPS, David Yobel siswa SMAK 1 Penabur kelas X-9, Frances Widjaya siswa SMAK 1 Penabur kelas X-9).

5.2.9.1 Kondisi saat ini.

a. David Yobel seorang siswa SMAK 1 Penabur kelas X-9 dia menuturkan kepada penulis sebagai berikut :

”Bahwa program-program sekolah menengah untuk mencegah Napza udah ada tapi pada umumnya ada di peraturan dan tata tertib sekolah. Ada dalam muatan beberapa mata pelajaran seperti biologi, Agama, PKN, dan Penjaskes; Pelajar telah berperan untuk mengembangkan kreativitas dan aktivitas mengisi majalah dinding tentang bahaya narkoba. Tapiya sih sekolah masih kurang memprioritaskan melalui program-program khusus pencegahan”.

b. Peran pelajar adalah mengembangkan diri dari aspek ilmu pengetahuan melalui pelajaran dan kepribadian melalui kegiatan pembinaan siswa. Dengan peran ini pelajar akan tumbuh menjadi pribadi yang semakin matang.

5.2.9.2 Kendala-kendala dalam mewujudkan kondisi yang diharapkan berperannya pelajar dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Pertama, Kendala-kendala

a. Belum adanya kurikulum bahaya narkoba yang menjadi arah bagi pendidikan pelajar agar berperilaku menolak narkoba.

b. Adanya asumsi bahaya narkoba warga sekolah dan masyarakat bahwa dengan tata tertib sekolah dapat mengatasi masalah narkoba pelajar.

Kedua, Kondisi yang diharapkan

a. Adanya program-program sekolah dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi pelajar. Program yang dikemas secara menarik untuk kalangan pelajar baik isi materi maupun tampilan.

b. Adanya program pencegahan diharapkan melibatkan para pelajar untuk berkreasi. Perlu diwujudkan dalam program kreativitas seperti mengisi Majalah Dinding tentang informasi mengenai bahaya narkoba oleh para pelajar di bawah bimbingan dan arahan para guru yang berkompetensi di bidang pencegahan.

c. Adanya program kegiatan keagamaan misalnya ditekankan bahwa narkoba itu haram; Adanya berbagai kegiatan ekstra kurikuler sehingga para pelajar tidak sempat memikirkan narkoba.

d. Adanya waktu orientasinya juga diberikan tentang bahaya narkoba, maka kebijakan sekolah hendaknya yang memprioritaskan kegiatan pencegahan narkoba melalui ekstra kurikuler.

e. Sekolah menampung aspirasi dari para pelajar perlu tentang model pencegahan. Terlaksananya pendidikan pencegahan narkoba oleh sesama pelajar yang terpilih menggunakan model program pencegahan oleh *peer educator*.

d. Diharapkan BNN mengadakan seminar-seminar, lomba-lomba untuk memperingati hari anti narkoba dunia dengan melibatkan pelajar. Mengutip apa yang dituturkan pelajar siswa SMA N 78 Mardiana, Kelas XI – IPS B sebagai berikut :

“Saya sih lebih berasa dari acara-acara keagamaan, misalnya ditekankan narkoba itu haram. Banyak –banyak in kegiatan gitu di sekolah jadinya kita-kita ini tidak mikirin itu narkoba. Soalnya saya belum pernah lihat seperti apa narkoba, tapi om saya itu tahu, kata om saya kalo makenya narkoba itu tak akan kecanduan kalo kita tak depresi. Kakak saya juga bilang kalo di kampusnya itu wah udah seperti negaranya mahasiswa aja, peredaran narkoba itu bebas, polisi pun tak boleh ikut campur. Mereka yang ngendaliin.”

Melihat pernyataan tersebut kiranya masih memprihatinkan apa bila orang-orang yang ada di sekeliling mereka memiliki pemahaman yang salah terhadap bahaya narkoba, di sinilah pentingnya peran lembaga pendidikan sebagai pusat transformasi nilai-nilai kebenaran dan perubahan perilaku selama proses pendidikan.

5.2.9.3 Upaya-upaya yang perlu dilakukan.

a. Menyelenggarakan kegiatan ekstra, pendekatan model ini adalah bermakna bila siswa disibukkan dengan kegiatan yang positif dan berkualitas maka mereka akan berpikir positif, sehingga tidak sempat lagi menyimpang.

b. Mengadakan tes *urine* untuk pelajar. Program mengacu pada prinsip pencegahan oleh *peer educator* dengan cara sosialisasi ke teman-teman sekolah dan teman-teman yang telah mendapatkan informasi tersebut membubuhkan tanda tangan di buku

tentang isi yang disampaikan. Tujuannya untuk mengecek dan mengevaluasi dampak informasi tersebut.

c. Memberikan pengalaman siswa anggota *peer educator* merasakan adanya tanggung jawab bersama untuk mencegah narkoba. Untuk membentuk *peer educator* dilakukan proses seleksi oleh tim kepada pelajar yang memiliki kemampuan berelasi baik, berkarakter baik guna menjadi pendidik bahaya narkoba bagi teman-temannya.

5.3 Pembahasan

Dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi pelajar SLTA di Jakarta Barat maka peran lembaga pendidikan menjadi strategis, karena pelajar merupakan aset masa depan bangsa yang harus dilindungi dari ancaman bahaya narkoba. Untuk melakukan perubahan perilaku diperlukan pendidikan dan tersedianya lingkungan yang kondusif.

Berbagai kegiatan yang diselenggarakan di lingkungan sekolah secara terprogram, terukur dan bersifat mendidik maka akan memberikan kontribusi dalam membentuk hasil didik yang memiliki perilaku sebagai manusia berkualitas unggul. Tersedianya tata tertib yang tegas, konsisten, bersifat edukatif. Adanya kebijakan pemberian penghargaan kepada pelajar yang berprestasi sebaliknya pemberian hukuman kepada pelajar yang melanggar.

Oleh karena itu perlu mengoptimalkan peran lembaga pendidikan melalui bersinerginya elemen sekolah, orang tua, dan masyarakat mewujudkan kondisi keteraturan. Menurut James Q. Wilson dan George Kelling,⁶⁹ bahwa kriminalitas di suatu lokasi terjadi akibat adanya ketidakteraturan lingkungan. Dalam studinya, mereka melakukan pengamatan terhadap jendela yang pecah. Sebuah jendela yang pecah dan dibiarkan saja, mendorong orang sekitar untuk memecahkan kaca jendela yang lainnya dan berkembang dengan munculnya coretan-coretan di tembok, tempat yang menjadi kumuh, berkumpulnya pengangguran dan kriminal di lokasi tersebut.

Pencapaian tujuan pendidikan sebagaimana yang telah ditetapkan melalui peran lembaga pendidikan akan menjadi terhambat bahkan mengalami kegagalan

⁶⁹. Sumber diunduh dari <http://edukasi.kompasiana.com/2010/01/23/jendela-pecah/>

apabila peserta didiknya terjerumus dalam perilaku sebagai penyalahguna atau korban penyalahguna narkoba. Untuk itu salah satu peran yang sangat penting dalam lembaga pendidikan ini adalah melakukan pencegahan sedini mungkin agar para pelajar terhindar dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Mencegah penyalahgunaan narkoba bagi pelajar tidak bisa hanya dilakukan oleh institusi pendidikan namun membutuhkan kerja sama, koordinasi, dan dukungan komitmen yang kuat serta berkelanjutan dari berbagai komponen masyarakat yang secara terus menerus melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Peran lembaga pendidikan menengah dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi pelajar memerlukan keterlibatan pembina fungsi kelembagaan yang terkait dengan pencegahan narkoba. BNN sebagai lembaga yang dikedepankan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, Kemendiknas dan jajarannya sebagai pengemban kebijakan di bidang pendidikan, pengelola sekolah (Kepala Sekolah) memiliki peran sebagai manajer sekolah dalam implementasi kebijakan manajemen Berbasis Sekolah, Komponen Pendidikan lain yang terdiri atas Guru Bimbingan dan Konseling, Dewan Pendidikan, dan Komite Sekolah serta pelajar.

5.3.1 Kondisi Saat ini.

Lembaga Pendidikan pada saat ini sudah berperan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pelajar SLTA di Jakarta Barat lembaga pendidikan telah melakukan perannya dengan membangun kerja sama dengan berbagai pihak terkait. Telah melakukan sinergi dengan elemen-elemen pendidikan lainnya. Elemen pendidikan yang terkait dengan pencegahan narkoba adalah elemen pembina fungsi yang terdiri atas Kemendiknas sebagai sentral kebijakan di bidang pendidikan.

BNN, telah menetapkan lingkungan pendidikan sebagai salah satu sasaran strategis pencegahan penyalahgunaan narkoba.⁷⁰ Selain itu komponen lain yang termasuk dalam struktur subyek penelitian yakni Dinas Pendidikan dan Suku Dinas

⁷⁰. BNN telah menetapkan lingkungan pendidikan sebagai sasaran strategis pencegahan penyalahgunaan narkoba pada Rencana Strategi BNN tahun 2010 - 2014.

Pendidikan, pengelola lembaga pendidikan (Kepala Sekolah SLTA) serta komponen lembaga pendidikan yang mencakup guru BK, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, dan Pelajar.

Pencegahan penyalahgunaan narkoba di lembaga pendidikan menengah di Jakarta Barat menggunakan model pendekatan sebagai berikut : Pertama, Mengintegrasikan materi bahaya penyalahgunaan narkoba ke dalam mata pelajaran yang relevan yakni mata pelajaran biologi, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan jasmani dan kesehatan, Agama, serta ekstra kurikuler yang memacu para pelajar untuk mengembangkan kreasi. Kedua, Menyelenggarakan pendidikan karakter yakni dalam bentuk penanaman nilai-nilai kedisiplinan yang ditanamkan sejak masa orientasi siswa, membuat kontrak atau persetujuan resmi tertulis melalui formulir yang ditandatangani sebagai bentuk persetujuan anak dan orang tua yang berisi bersedia mengikuti tata tertib sekolah dengan segala konsekuensinya. Ketiga, Menerapkan peraturan dan tata tertib sekolah secara konsisten dengan prosedur tetap yang telah ditetapkan bila ada pelajar atau siswa yang melakukan pelanggaran tetatertib tersebut. Keempat, Mengembangkan pola kegiatan ekstra kurikuler kepada pelajar untuk mengembangkan potensi, minat dan bakat setiap peserta didik atau pelajar. Model Pencegahan penyalahgunaan narkoba berdasarkan karakteristik lembaga pendidikan menengah. Kelima, Menerapkan model yang telah diprogramkan oleh Suku Dinas pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta barat dalam bentuk kegiatan yang diikuti oleh seluruh sekolah di wilayah jakarta Barat yakni Lomba MTQ, Pelatihan Kepramukaan tingkat Penegak, dan Pelatihan Kepemimpinan.

5.3.1.1 Peran BNN.

Sebagai *focal point* dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, BNN memiliki peran sebagai lembaga yang dikedepankan melakukan pencegahan narkoba bersama komponen bangsa lainnya. Pengalaman negara-negara maju dunia dalam menanggulangi bahaya narkoba melakukan kerja sama baik secara internal maupun eksternal serta melibatkan seluruh komponen bangsanya. Demikian pula

dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi pelajar, lembaga pendidikan mutlak perlu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak.

a. BNN, melalui paradigma barunya berperan lebih humanis dalam menangani penyalahguna dan korban penyalahguna narkoba. Selain itu menjadikan lingkungan pendidikan sebagai salah satu sasaran strategis pencegahan dan pemberdayaannya. Hal tersebut telah didukung dengan lahirnya Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 dan Peraturan Presiden nomor 23 tahun 2010 sebagai wujud bahwa bangsa Indonesia telah memiliki payung hukum dan komitmen untuk menanggulangi bahaya narkoba. Dikaitkan dengan pentingnya peran lembaga pendidikan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi pelajar SLTA maka hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam penetapan maupun penerapan kebijakan BNN di bidang pencegahan serta seluruh perangkat yang diperlukannya.

b. BNN menjadi pusat rujukan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi pelajar SLTA. Menjadi penting adanya BNN sebagai pusat rujukan mengingat pencegahan penyalahgunaan narkoba harus ditangani secara profesional dan membutuhkan pusat rujukan yang didukung komitmen dan konsistensi yang tinggi.

5.3.1.2 Peran Kemendiknas

Untuk Mewujudkan Peran Lembaga Pendidikan Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi pelajar SLTA.

a. Kemendiknas telah mengeluarkan kebijakan tentang penanggulangan kenakalan pelajar, mengevaluasinya setiap tahun guna meningkatkan efektivitasnya. Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kemendiknas dan telah menjadi acuan bagi seluruh pelaksanaan pendidikan pada umumnya belum ekspisit mengenai pencegahan narkoba. Salah satu elemen dalam kebijakan tersebut adalah pencegahan bahaya narkoba selain penggulangan masalah tawuran antar pelajar dan penanggulangan penyimpangan perilaku kriminal pelajar.

b. Membangun kerjasama dengan BNN dan BNNP serta institusi pemerintah terkait dan LSM untuk mencegah bahaya narkoba di lingkungan pendidikan. Adanya kebijakan Menteri Pendidikan Nasional dalam bentuk peraturan yakni Peraturan

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan. Peraturan tersebut menjadi acuan operasional pendidikan.

c. Mewujudkan tujuan pendidikan nasional yakni untuk berkembangnya potensi anak didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Mengacu pada tujuan tersebut maka lembaga pendidikan telah berperan melakukan pembelajaran dan pembimbingan guna mewujudkan perubahan perilaku peserta didik. Kondisi ini bila tidak ditangani melalui program pencegahan akan menjadi gangguan dan hambatan, bahkan ancaman serius dalam mencapai tujuan pendidikan nasional.

d. Mendorong lembaga pendidikan telah melakukan perannya di bidang pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah masing-masing. Berbagai kegiatan telah dibangun guna mencegah penyalahgunaan narkoba melalui program yang termasuk kurikulum maupun kegiatan ekstra kurikuler. Kemendiknas mengeluarkan kebijakan tentang program penanganan kenakalan pelajar. Di dalam program tersebut salah satunya adalah program pencegahan penyalahgunaan narkoba, selain penanggulangan masalah tawuran antar pelajar, tindak kejahatan lainnya. Sebagai contoh adanya MoU (*Memorandum of Understanding/Nota Kesepahaman*) antara Kemendiknas dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tanggal 14 April tahun 2008 yang berisi tentang upaya pencegahan bahaya narkoba dilakukan melalui kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).⁷¹ Selain itu juga melaksanakan program *Anti Drugs Campaign 2008 Goes to School*. Mendiknas melantik Satgas UKS dan Satgas Anti Narkoba. Satgas tersebut melakukan tindakan-tindakan terprogram tentang pencegahan narkoba untuk itu apa yang dicanangkan menteri kesehatan tersebut perlu mendapat dukungan yang lebih intensif. Mencegah penyalahgunaan narkoba melalui UKS.⁷² UKS merupakan salah satu program yang telah ditetapkan

⁷¹. Dokumen MoU antara BNN dengan Kemendiknas tahun 2008 tentang Kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah.

⁷². Diunduh dari <http://pkkaptapin.blogspot.com/2011/03/membasmi-penyalahgunaan-narkoba-oleh.html>

Standar Pelayanan Minimalnya, melalui Kepmenkes No. 1457 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kotamadya. Ini berarti UKS merupakan program yang wajib dilaksanakan oleh Kotamadya. Terkait dengan ini maka Pemerintah Daerah wajib menyiapkan anggaran untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam standar pelayanan minimal. Dengan demikian, adanya kepastian ini memberikan kekuatan bagi setiap sekolah untuk melaksanakan kegiatan UKS secara lebih optimal, khususnya untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba pelajar. Pencegahan adalah satu-satunya solusi terbaik untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba. Pencegahan kepada pelajar agar tidak mencoba narkoba, tidak mengulang menggunakan narkoba, apa lagi ketagihan narkoba. Pengguna Narkoba akan membutuhkan waktu yang panjang untuk pemulihan kondisinya, baik fisik, psikis maupun sosial. Memberikan pembekalan Kepada Pelajar tentang bahaya Narkoba. Pelajar sebagai bagian integral generasi muda dibekali pengetahuan, sekaligus kecakapan untuk menghindari penyalahgunaan narkoba. Informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba harus tersampaikan dengan sangat jelas dan gamblang kepada seluruh generasi muda, bahkan ketika mereka tidak dengan sengaja bermaksud mencari informasi tersebut. Mereka harus mendapatkan informasi yang benar, mudah dipahami, serta mudah diakses. Mereka telah dikondisikan untuk menolak setiap tawaran menggunakan narkoba sehingga mampu berkata "tidak" pada narkoba, memiliki alasan yang tegas dan lugas untuk menolak, dan dapat mengalihkan pembicaraan jika mereka dalam situasi tersudutkan. Di sinilah peran sekolah melalui UKS untuk menghambil bagian membasmi penyalahgunaan narkoba di lingkungan pelajar. UKS adalah segala usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan anak usia sekolah pada setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan mulai dari TK, SD sampai tingkat SLTA. Ruang lingkup UKS adalah ruang lingkup yang tercermin dalam Tiga Program Pokok Usaha Kesehatan Sekolah, diistilahkan sebagai Trias UKS, yaitu pertama penyelenggaraan pendidikan kesehatan, kedua, penyelenggaraan pelayanan kesehatan, dan ketiga pembinaan lingkungan kehidupan sekolah sehat. Sesuai dengan kebijaksanaan umum UKS, maka penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan dilakukan secara menyeluruh, baik yang meliputi upaya

promotif (peningkatan kesehatan), preventif (pencegahan), dan kuratif (pengobatan) maupun rehabilitatif (pemulihan), namun lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif yang dilakukan secara terpadu dibawah koordinasi dan bimbingan teknis langsung dari puskesmas setempat; Melakukan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan yang ditujukan kepada pelajar. Merupakan mata rantai yang penting dalam meningkatkan kualitas fisik penduduk. Penduduk adalah modal dasar pembangunan nasional. Ia harus sehat secara fisik, mental maupun sosial serta mempunyai produktivitas yang optimal. Kewaspadaan lembaga pendidikan beserta komponen terkait lainnya harus berlipat ganda, karena para pelajar (anak didik) sebagai bagian dari penduduk, merupakan kelompok yang rawan. Hal ini disebabkan karena mereka sedang berada dalam periode pertumbuhan dan perkembangan. Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu masalah yang berkaitan dengan faktor berisiko pada masalah kesehatan anak usia sekolah. Dengan demikian, salah satu tujuan khusus UKS ialah untuk memupuk kebiasaan hidup sehat dan mempertinggi derajat kesehatan peserta didik yang di dalamnya juga mencakup daya hayat dan daya tangkal terhadap pengaruh buruk, penyalahgunaan narkoba, alkohol, dan kebiasaan merokok, serta hal-hal yang berkaitan dengan masalah pornografi dan masalah sosial lainnya. Melalui UKS dapat disampaikan materi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba secara bertahap sesuai dengan tingkat pendidikan peserta didik. Sebagai contoh pada tingkat SLTA dapat disampaikan materi pendidikan kesehatan tentang analisis bahaya penggunaan narkoba serta berbagai peraturan perundang-undangan tentang narkoba. Selain itu, lembaga pendidikan dalam hal ini pihak sekolah dapat lebih menggiatkan kegiatan ekstrakurikuler yang berkaitan dengan pendidikan bahaya penyalahgunaan narkoba, seperti melalui kegiatan kepramukaan, ceramah, diskusi, dan lomba antar kelas maupun antar sekolah.

Dapat pula dilaksanakan kegiatan ekstrakurikuler yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan, kader kesehatan remaja, palang merah remaja, dan saka bakti husada. Untuk kegiatan ekstrakurikuler yang berkaitan dengan pembinaan lingkungan, pihak sekolah dapat menginisiasikan dan mengembangkan kehidupan sekolah sehat, seperti pemantauan di lingkungan sekolah, baik secara khusus kepada

penjaja makanan maupun kepada masyarakat umum yang berada di sekitar sekolah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam landasan teori pengaruh lingkungan sangat signifikan terhadap pembentukan kepribadian sehingga mampu menioiak narkoba.

Mengingat pentingnya peran lembaga pendidikan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi pelajar SLTA maka hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh Kemendiknas untuk melakukan kajian tentang kebijakan yang relevan dan efektif dalam mendukung pelaksanaan lembaga pendidikan menengah dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi pelajar SLTA tersebut.

5.3.1.3 Peran Dinas Pendidikan.

a. Sebagai pembina fungsi lembaga pendidikan menengah maka Dinas Pendidikan DKI Jakarta berperan meningkatkan mutu pendidikan menengah. Hal ini merupakan implementasi UU No.22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah. Dalam aturan ini terdapat kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri sesuai aspirasi masyarakat.

b. Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di DKI Jakarta maka telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan diantaranya melalui pemberian penyuluhan, pembinaan, dan pelatihan serta menyediakan sarana dan prasarana pendukung kepada setiap sekolah mengenai kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah pusat mengenai sistem pendidikan. Dengan sistem pendidikan pada saat ini dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan setiap proses administrasi pada institusi pemerintahan daerah merupakan salah satu target yang harus dicapai dalam program pengembangan kapasitas (efektifitas dan efisiensi) akan tetapi kegiatan pengembangan kapasitas yang targetnya di daerah harus betul-betul memperhatikan kondisi dan kebutuhan daerah.

c. Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerjanya Dinas Pendidikan DKI Jakarta telah memberikan kesempatan pegawainya untuk mengikuti diklat (pendidikan dan pelatihan) serta studi banding, di samping itu sarana dan prasarana untuk kegiatan sudah tersedia dengan jumlah yang cukup memadai. Berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta adalah kebijakan yang sangat

strategis dalam mendukung upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi pendidikan.⁷³

d. Membuat produk peraturan. Peraturan-peraturan tersebut secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada upaya meningkatkan peran lembaga pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Hasil didik yang bermutu akan mampu berperilaku kebal terhadap bahaya narkoba. Peraturan-peraturan tersebut meliputi antara lain : Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta, Tahun 2010 tentang Pindahan dan Penempatan Tugas. Adanya kebijakan tentang Penetapan Hasil Test Penulisan dan Paparan Makalah Peserta Calon Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Tingkat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010 Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada satuan Pendidikan Formal. Sebagai implementasi Manajemen Berbasis Sekolah membutuhkan kometensi Kepala Sekolah, tenaga pendidik, dan kependidikan. Kualitas komonen pendidikan inilah salah satu pendukung kebijakan peningkatan kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan diindikasikan selain adanya komponen pendidikan yang berkualitas sebagai input, juga dalam proses serta hasil didik yang berkualitas. Telah diterbitkannya Instruksi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 698 tahun 2010 tentang Penyerahan dan Pengumpulan Data Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan. Melalui instruksi ini maka dapat dilakukan pemantauan kemajuan pendidikan sehingga menjadi sistem pengendalian operasional pendidikan. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 21 Tahun 2010 tentang Hari dan Jam Kerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pendidikan dan perpustakaan. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Pendidikan mempunyai fungsi sebagai : Pertama, Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan. Kedua, Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendidikan. Ketiga, Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang pendidikan. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

⁷³. Sumber diambil dari <http://disdikdki.net/topic.php?id=10>

Untuk melaksanakan fungsi di atas maka Dinas Pendidikan berkewenangan melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penetapan kebijakan operasional pendidikan di Jakarta Barat sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi. Membuat perencanaan operasional program pendidikan menengah sesuai dengan perencanaan strategis tingkat nasional dan provinsi. Melakukan sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat kota administrasi. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan menengah yang berbasis keunggulan lokal menjadi bagian kebijakan Sudin Dikmen Jakarta Barat.

Pendidikan memiliki peran penting bagi penyiapan sebuah kekuatan bangsa khususnya dalam proses pembangunan nasional. Sesuai taraf keragaman yang begitu tinggi, Indonesia memiliki karakter yang kaya dengan perbedaan, sekaligus memiliki toleransi yang tinggi, dalam menciptakan semangat persatuan yang kokoh. Melalui pembangunan pendidikan nasional, telah tumbuh semangat persatuan yang menjiwai keanekaragaman kepentingan budaya, sosial bahkan politik. Pembangunan pendidikan yang memahami keragaman ini dapat menjadi sumber kekuatan untuk melebur perbedaan-perbedaan di dalam mewujudkan rasa kebangsaan yang kokoh.

e. Mengeluarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Menengah Dan Tinggi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 520.1/2007, tentang Penataan Wiyata Mandala di SMA/SMK dalam lingkungan Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Untuk mendukung mutu pendidikan nasional, pemerintah memprioritaskan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan termasuk melakukan rehabilitasi sekolah-sekolah yang dianggap tidak layak lagi untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing dalam pembangunan pendidikan nasional akan memberikan dampak luas pada terwujudnya eksistensi insan-insan Indonesia yang lebih mandiri dan mampu bersaing di dalam konteks pergaulan yang semakin global. Untuk itu maka setelah menyimak betapa penting dan strategisnya peran lembaga dalam mendukung pencapaian tujuan pendidikan dengan lingkungan sekolah yang bebas dari penyalahgunaan narkoba Dinas Pendidikan DKI dapat memanfaatkan hasil penelitian

ini sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pencegahan narkoba di kalangan sekolah menengah.

5.3.1.4 Peran Suku Dinas Pendidikan Menengah (Sudin Dikmen) Jakarta Barat.

Suku Dinas Pendidikan Menengah memiliki fungsi (jabatan/pekerjaan yang dilakukan) sebagai pembina dan penyelenggara pendidikan menengah negeri dan pembina bagi pendidikan menengah swasta. Sudin Dikmen Jakarta Barat juga memiliki peran di bidang pengawasan guna meningkatkan kualitas pendidikan. Selain itu peran Suku Dinas Pendidikan juga melakukan pembinaan kreativitas guna mengembangkan nilai-nilai potensi pelajar sebagaimana program kegiatan yang dilakukan dalam berbagai kegiatan yang bersifat memacu kreativitas pelajar.

5.3.1.5 Peran Kepala Sekolah selaku Pengelola Lembaga pendidikan. selaku pengelola sekolah Kepala Sekolah dapat memainkan peran di bidang pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi pelajar melalui peran sebagai berikut :

- a. Kepala Sekolah berperan meningkatkan mutu pendidikan menerapkan kebijakan manajemen berbasis sekolah. Pendidikan dikatakan bermutu apa bila prosentase kelulusan yang tinggi, banyaknya lulusan yang diterima di perguruan tinggi, kondisi sekolah yang aman, nyaman dan kondusif, bersih dan bebas dari penyalahgunaan narkoba, tenaga pendidik yang berkualitas, adanya umpan balik dalam bentuk kepercayaan masyarakat dan orang tua meningkat. Semakin kecil prosentase pelanggaran peserta didiknya. Dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional (Depdiknas, 2006) selain sebagai manajer peran utama Kepala Sekolah yaitu :
- b. Sebagai *educator* (pendidik). Kegiatan belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan dan guru merupakan pelaksana dan pengembang utama kurikulum di sekolah. Kepala sekolah yang menunjukkan komitmen tinggi dan fokus terhadap pengembangan kurikulum dan kegiatan belajar mengajar di sekolahnya tentu saja akan sangat memperhatikan tingkat kompetensi yang dimiliki gurunya, sekaligus juga akan senantiasa berusaha memfasilitasi dan mendorong agar para guru dapat secara terus menerus meningkatkan kompetensinya, sehingga kegiatan belajar mengajar

dapat berjalan efektif dan efisien. Sebagai educator (pendidik) maka sikap tegas namun manusiawi diperankan oleh kepala sekolah. Misalnya dalam kasus terjadinya penyalahgunaan narkoba bagi anak didiknya pendekatan yang manusiawi adalah dengan menempuh cara yakni mengembalikan siswa tersebut kepada orang tuanya guna pemulihan/penyembuhannya dan setelah dinyatakan pulih oleh ahli maka siswa tersebut diterima kembali oleh sekolah tersebut untuk melanjutkan pendidikan.

c. Sebagai manajer. Dalam mengelola tenaga kependidikan salah satu tugas yang harus dilakukan kepala sekolah adalah melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan pengembangan profesi para guru. Dalam hal ini, kepala sekolah seyogyanya dapat memfasilitasi dan memberikan kesempatan yang luas kepada para guru untuk dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan, baik yang dilaksanakan di sekolah, *in house training*, diskusi profesional dan sebagainya, atau melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan di luar sekolah, seperti kesempatan melanjutkan pendidikan atau mengikuti berbagai kegiatan pelatihan yang diselenggarakan pihak lain.

d. Sebagai administrator. Khususnya berkenaan dengan pengelolaan keuangan, bahwa untuk tercapainya peningkatan kompetensi guru tidak lepas dari faktor biaya. Seberapa besar sekolah dapat mengalokasikan anggaran peningkatan kompetensi guru tentunya akan mempengaruhi terhadap tingkat kompetensi para gurunya. Oleh karena itu kepala sekolah dapat mengalokasikan anggaran yang memadai bagi upaya peningkatan kompetensi guru.

e. Sebagai supervisor. Untuk mengetahui sejauh mana guru mampu melaksanakan pembelajaran, secara berkala kepala sekolah perlu melaksanakan kegiatan supervisi, yang dapat dilakukan melalui kegiatan kunjungan kelas untuk mengamati proses pembelajaran secara langsung, terutama dalam pemilihan dan penggunaan metode, media yang digunakan dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran (E. Mulyasa, 2004). Dari hasil supervisi ini, dapat diketahui kelemahan sekaligus keunggulan guru dalam melaksanakan pembelajaran, tingkat penguasaan kompetensi guru yang bersangkutan selanjutnya diupayakan solusi, pembinaan, dan tindak lanjut

tertentu sehingga guru dapat memperbaiki kekurangan yang ada sekaligus mempertahankan keunggulannya dalam melaksanakan pembelajaran.

f. Sebagai *leader* (pemimpin). Gaya kepemimpinan kepala sekolah seperti apakah yang dapat menumbuh-suburkan kreativitas sekaligus dapat mendorong terhadap peningkatan kompetensi guru. Secara konsisten menerapkan gaya kepemimpinan yang berorientasi pada tugas dan kepemimpinan yang berorientasi pada manusia. Dalam rangka meningkatkan kompetensi guru, seorang kepala sekolah dapat menerapkan kedua gaya kepemimpinan tersebut secara tepat dan fleksibel, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan yang ada. Kepemimpinan seseorang sangat berkaitan dengan kepribadian dan kepribadian kepala sekolah sebagai pemimpin akan tercermin dalam sifat-sifat sebagai berikut yakni jujur; percaya diri; tanggung jawab; berani mengambil resiko dan keputusan; berjiwa besar; emosi yang stabil, dan teladan (E. Mulyasa, 2003).

g. Sebagai pencipta iklim kerja. Budaya dan iklim kerja yang kondusif akan memungkinkan setiap guru lebih termotivasi untuk menunjukkan kinerjanya secara unggul, yang disertai usaha untuk meningkatkan kompetensinya. Oleh karena itu, dalam upaya menciptakan budaya dan iklim kerja yang kondusif, kepala sekolah hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip yakni para guru akan bekerja lebih giat apabila kegiatan yang dilakukannya menarik dan menyenangkan. Tujuan kegiatan perlu disusun dengan dengan jelas dan diinformasikan kepada para guru sehingga mereka mengetahui tujuan dia bekerja, para guru juga dapat dilibatkan dalam penyusunan tujuan tersebut. Para guru harus selalu diberitahu tentang dari setiap pekerjaannya; pemberian hadiah lebih baik dari hukuman, namun sewaktu-waktu hukuman juga diperlukan; usahakan untuk memenuhi kebutuhan sosio-psiko-fisik guru, sehingga memperoleh kepuasan (modifikasi dari pemikiran E. Mulyasa tentang Kepala Sekolah sebagai Motivator, E. Mulyasa, 2003).

h. Selanjutnya sebagai penanggungjawab penyelenggaraan pendidikan di sekolah, maka Kepala Sekolah memiliki peran untuk membuat steril lingkungan sekolah dari pengaruh peredaran gelap narkoba. Untuk itu pada kondisi saat ini tiap sekolah

menengah di Jakarta Barat telah membuat aturan dan tata tertib sekolah dalam proses pembelajaran untuk seluruh pelajar.

i. Menyelenggarakan kegiatan ekstra kurikuler. Fungsi kegiatan ekstra kurikuler adalah untuk : pertama, Pengembangan, kemampuan dan kreativitas peserta didik sesuai dengan potensi, bakat, dan minat mereka. Kedua, Pengembangan kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial peserta didik. Ketiga, Pengembangan suasana rileks, menggembirakan dan menyenangkan bagi peserta didik yang menunjang proses perkembangan. Keempat, Persiapan karir, yaitu fungsi kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan kesiapan karir peserta didik. Menurut Taylor⁷⁴ kegiatan ekstrakurikuler dapat diartikulasikan kedalam 3 lingkup pendidikan nilai yaitu : pertama, Pendidikan nilai sebagai cara terencana yang melibatkan sejumlah pertimbangan nilai-nilai edukatif, baik yang tercakup dalam manajemen pendidikan maupun dalam kurikulum pendidikan. Untuk pengembangan nilai, moral, etika, dan estetika sebagai keseluruhan dimensi pendidikan sampai pada tindakan guru dalam melakukan penyadaran nilai-nilai pada peserta didik. Kedua, Pendidikan nilai yang berpengaruh terhadap perkembangan pengalaman dan kesadaran nilai pada peserta didik. Situasi dapat berupa suasana yang nyaman, harmonis, teratur, akrab dan tenang. Sebaliknya, situasi dapat berupa suasana yang kurang mendukung bagi perkembangan peserta didik, misalnya suasana bermusuhan, semrawut, acuh tak acuh, dsb. Semua situasi pendidikan tersebut berpengaruh terhadap pengembangan kesadaran moral siswa, karena hal itu melibatkan pertimbangan-pertimbangan psikologis seperti persepsi, sikap, kesadaran dan keyakinan mereka. Ketiga, Pendidikan nilai sebagai peristiwa seketika yang dialami peserta didik. Artinya pendidikan nilai berlangsung melalui sejumlah kejadian yang tidak terduga, seketika, sukarela, dan spontanitas. Semua tidak direncanakan sebelumnya, tidak dikondisikan secara sengaja dan dapat terjadi kapan saja. Penggalan-penggalan peristiwa seperti itu merupakan *hidden curriculum* yang dalam kasus pengalaman tertentu dapat berupa suatu kejadian kritis (*critical incident*) yang mampu mengubah tatanan nilai dan

⁷⁴ .Sumber diunduh dari <http://bimbingankarir.wordpress.com/2009/06/16/konsep-pengembangan-diri-siswa-melalui-kegiatan-ekstrakurikuler/>

perilaku seseorang (peserta didik). Karena itu, peserta didik membutuhkan keterlibatan langsung di luar jam tatap muka di kelas atau sering disebut dengan kegiatan ekstra kurikuler.

5.3.1.6 Peran Komponen Pendidikan. Komponen pendidikan dengan kompetensinya dan tugasnya masing-masing mewujudkan peran melalui berbagai kegiatan yang bersifat edukatif di bidang pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi anak didiknya. Untuk komponen ini melakukan pencegahan sedini mungkin dan secara kerja sama dengan institusi terkait. Mengacu pada teori tindak kriminal bukan sebagai produk keputusan individu semata, melainkan sebagai produk interaksi dinamis antara individu, lingkungan, dan norma sosial. Sedangkan menurut teori *Broken Windows* sebagai berikut : Bahwa kejahatan berasal dari hal-hal kecil yang sekilas tampak remeh, namun berpotensi besar untuk memutar roda interaksi antara individu dan lingkungan yang akhirnya menghasilkan perbuatan-perbuatan jahat. Untuk itulah mustahil mencegah peredaran gelap narkoba bila tidak dimulai dari lembaga pendidikan dan didukung seluruh komponen bangsa kita

5.3.1.7 Peran Guru Bimbingan dan Konseling.⁷⁵

a. Guru BK memiliki peran penting dalam membantu pemecahan masalah siswa SLTA mengingat usia remaja SLTA ini sangat rawan dengan berbagai masalah yang berkaitan dengan karakteristik usia pelajar. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian tentang peran guru BK. Yakni peran guru (BK) memberikan pengaruh positif terhadap kedisiplinan menaati tata tertib sekolah sebesar 12,56%, sedangkan intensitas mengikuti kegiatan OSIS memberikan pengaruh sebesar 14,15%. Artinya masih ada faktor-faktor lain yang besarnya 73,3% yang secara efektif mempengaruhi kedisiplinan menaati tata tertib sekolah.

b. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh positif yang signifikan dari implementasi peran guru bimbingan konseling (BK) dan intensitas mengikuti kegiatan OSIS terhadap kedisiplinan menaati tata tertib sekolah. Oleh karena itu lebih lanjut dapat dikatakan bahwa semakin baik implementasi peran guru bimbingan

⁷⁵. Sumber diunduh dari <http://etd.eprints.ums.ac.id/3488/>

konseling (BK) dan semakin tinggi intensitas mengikuti kegiatan OSIS, maka akan meningkatkan kedisiplinan mentaati tata tertib sekolah, demikian sebaliknya.

5.3.1.8 Dewan Pendidikan.

- a. Dewan Pendidikan adalah badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di kabupaten/kota.
- b. Dewan Pendidikan merupakan badan yang bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hirarki dengan dinas pendidikan kabupaten/kotamadya maupun dengan lembaga-lembaga pemerintah lainnya.
- c. Posisi Dewan Pendidikan maupun Dinas Pendidikan maupun lembaga-lembaga pemerintah lainnya mengacu pada kewenangan (otonomi) masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dewan Pendidikan dibentuk berdasarkan kesepakatan yang tumbuh dari akar budaya, sosio demografis dan nilai-nilai daerah setempat, sehingga lembaga tersebut bersifat otonom yang menganut asas kebersamaan menuju ke arah peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan di daerah yang diatur oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Kondisi ini hendaknya dijadikan dasar pertimbangan oleh masing-masing pihak atau stakeholder pendidikan di daerah agar tidak terjadi adanya pelanggaran hukum administrasi negara yang mengakibatkan adanya konsekuensi hukum baik perdata maupun pidana.
- d. Dewan Pendidikan merupakan organisasi masyarakat pendidikan yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas pendidikan di daerah setempat. Dewan Pendidikan yang dibentuk dapat dikembangkan secara khas dan berakar dari budaya, demografis, ekologis, nilai kesepakatan, serta kepercayaan yang dibangun sesuai potensi daerah setempat. Oleh karena itu, Dewan Pendidikan yang dibangun harus merupakan pengembangan kekayaan filosofis masyarakat. Dewan Pendidikan mengembangkan konsep yang berorientasi kepada pengguna (*client model*), berbagai kewenangan (*power sharing and advocacy model*) dan kemitraan (*partnership model*) yang difokuskan pada peningkatan mutu pendidikan.

e. Tujuan Dewan Pendidikan adalah : Pertama, Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan. Kedua, Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Ketiga, Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu.

f. Dewan Pendidikan merupakan mitra sekolah yang dibentuk berdasarkan Surat keputusan Kepala Daerah. Dewan pendidikan bersama perangkat lembaga pendidikan SLTA memberikan masukan pemikiran dan langkah solusi guna mewujudkan perannya membantu lembaga pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan tersebut. Dengan mempelajari gejala-gejala negatif yang dimiliki anak remaja pada umumnya, orangtua dan pendidik akan dapat menyadari dan melakukan upaya perbaikan perlakuan sikap terhadap anak dalam proses pendidikan.

g. Dewan Pendidikan memiliki peran memberi pertimbangan (*advisory body*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, pendukung (*supporting agency*) baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan, pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi, akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan. Dewan Pendidikan dibentuk Kepmendiknas No. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

h. Dewan Pendidikan memiliki peran yang strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan. Untuk itu maka pemikiran, pertimbangan, saran, dan kontrol yang dilakukan oleh Dewan Pendidikan perlu mendapatkan respons bukan hanya dianggap sebagai pelengkap saja oleh pengambil kebijakan. Melalui peran lembaga pendidikan yang melibatkan komponen lembaga pendidikan yakni kepala sekolah, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, Dewan Pendidikan, dan Komite Sekolah serta peran serta aktif peserta didik dalam proses pendidikan maka terwujudnya perilaku pelajar SLTA yang berkualitas unggul diharapkan dapat tercapai.

Berdasarkan prinsip desentralisasi pendidikan, sekolah mendapat kewenangan untuk menyusun program yang akan diterapkan.⁷⁶ Di samping itu sekolah juga memperoleh kewenangan untuk mengelola segala sarana dan prasarana yang tersedia, mengelola SDM yang dimiliki, serta melibatkan kepedulian *stakeholder* dalam pelaksanaan pendidikan. Untuk merealisasikan pasal 31 UUD 1945 setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran yang bermutu, dan juga untuk mencapai tujuan diserahkannya pengelolaan pendidikan dasar dan menengah kepada pemerintah daerah seperti yang tertuang dalam konsideran Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan pendidikan memerlukan dukungan masyarakat yang memadai. Sebagai langkah alternatif dalam mengupayakan perolehan dukungan masyarakat untuk sektor pendidikan ini adalah dengan menumbuhkan keberpihakan konkret dari semua lapisan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, mulai dari pemimpin negara sampai aparat yang paling rendah, termasuk masyarakat yang bergerak dalam sektor swasta dan industri. Keberpihakan yang konkret tersebut perlu disalurkan menjadi suatu gerakan bersama (*collective action*) yang diwadahi Dewan Pendidikan yang berkedudukan di kabupaten/kotamadya. Dalam kondisi dan kebutuhan tertentu, misalnya untuk pelaksanaan otonomi khusus, atau pertimbangan lain, Dewan Pendidikan dapat dibentuk di tingkat propinsi.

5.3.1.9 Peran Komite Sekolah.

a. Konsep Dasar Komite Sekolah adalah sebuah pemikiran bagaimana upaya pengoptimalan peran serta masyarakat dalam mendukung dan mewujudkan mutu pendidikan. Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan di luar sekolah. .

⁷⁶. Sumber pendapat M. Asrori Ardiansyah, M.Pd., diunduh dari <http://kabar-pendidikan.blogspot.com/2011/04/konsep-dan-tujuan-dewan-pendidikan.html>

b. Secara kontekstual, peran Komite Sekolah sebagai: pertama, Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan. Kedua, Pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Ketiga, Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. Keempat, Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan (Kepmendiknas nomor: 044/U/2002). Depdiknas dalam bukunya Partisipasi Masyarakat, menguraikan tujuh peranan Komite Sekolah terhadap penyelenggaraan sekolah, yakni :

“Pertama, Membantu meningkatkan kelancaran penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar di sekolah baik sarana, prasarana maupun teknis pendidikan. Kedua, Melakukan pembinaan sikap dan perilaku siswa. Membantu usaha pemantapan sekolah dalam mewujudkan pembinaan dan pengembangan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pendidikan demokrasi sejak dini (kehidupan berbangsa dan bernegara, pendidikan pendahuluan bela negara, kewarganegaraan, berorganisasi, dan kepemimpinan), keterampilan dan kewirausahaan, kesegaran jasmani dan berolah raga, daya kreasi dan cipta, serta apresiasi seni dan budaya. ketiga, Mencari sumber pendanaan untuk membantu siswa yang tidak mampu. Keempat, Melakukan penilaian sekolah untuk pengembangan pelaksanaan kurikulum, baik intra maupun ekstrakurikuler dan pelaksanaan manajemen sekolah, kepala/wakil kepala sekolah, para guru, para siswa, dan tentunya para karyawan. Kelima, Memberikan model-model penghargaan atas keberhasilan manajemen sekolah. Keenam, Melakukan pembahasan tentang usulan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Ketujuh, Meminta sekolah agar mengadakan pertemuan untuk kepentingan tertentu (Depdiknas, 2001:17).

Hubungan Sekolah dengan Komite Sekolah, bahwa sekolah merupakan lembaga yang bekerja dalam konteks sosial. Sekolah mengambil siswanya dari

masyarakat setempat, sehingga keberadaannya tergantung dari dukungan sosial dan finansial masyarakat. Oleh karena itu, hubungan sekolah dan masyarakat merupakan salah satu komponen penting dalam keseluruhan kerangka penyelenggaraan pendidikan. Adanya hubungan yang harmonis antar sekolah dan masyarakat yang diwadahi dalam organisasi Komite Sekolah, akan mendukung optimalisasi peran serta orang tua dan masyarakat dalam memajukan program pendidikan. Kondisi demikian ini dapat diwujudkan dalam bentuk : Pertama, Orang tua dan masyarakat membantu menyediakan fasilitas pendidikan, memberikan bantuan dana serta pemikiran atau saran yang diperlukan sekolah. Kedua, Orang tua memberikan informasi kepada sekolah tentang potensi yang dimiliki anaknya. Ketiga, Orang tua menciptakan rumah tangga yang edukatif bagi anak (Depdiknas, 2001:19).

Berkenaan dengan peningkatan hubungan sekolah dengan masyarakat, substansi pembinaannya diarahkan kepada meningkatkan kemampuan seluruh personil sekolah dalam memupuk pengertian orang tua tentang : pengetahuan pertumbuhan anak, cara mendidik anak yang baik dengan harapan mereka mampu memberikan bimbingan yang tepat bagi anak-anaknya dalam mengikuti pelajaran.

5.3.1.10 Peran Peiajar.

a. Pelajar bukan hanya sebagai obyek didik tetapi juga subyek didik, untuk itu maka peran pelajar adalah melakukan aktivitas mengoptimalkan potensi yang dimiliki secara sungguh-sungguh sebagaimana program pendidikan yang telah ditetapkan dalam kurikulum pendidikan. Berperan aktif mengembangkan diri baik aspek kognitif, afektif maupun psikomotoriknya.

b. Membentengi diri sehingga mampu menolak ajakan teman mengonsumsi narkoba. Pada umumnya seseorang mengenal dan menggunakan narkoba awalnya karena tawaran teman dekat. Sering terasa sulit menolak ajakan teman dekat apabila kalau dia itu pacarnya sendiri. Untuk itu maka para pelajar harus siap bila mereka mencap dengan julukan tertentu (seperti banci, ayam sayur, lembek, nggak macho, norak dan lain-lain). Oleh karenanya perlu pembinaan secara berkelanjutan kepada pelajar sehingga mampu tumbuh sebagai pribadi yang berperilaku menolak narkoba.

c. Menyediakan diri sebagai tempat curahan hati bagi teman sebayanya di sekolah sehingga dapat meringankan masalah dan mencegahnya untuk menggunakan narkoba. Menjadi tempat curhat yang baik dengan menciptakan suasana yang bebas dari rasa kekhawatiran, untuk peran inilah maka guru pembimbing memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan.

d. Mendengarkan hingga tuntas apa yang disampaikan tanpa memotong pembicaraan, sebaiknya tidak memberi nasehat kalau tidak diminta, namun sebaliknya terampil memberikan saran pemecahan sebagai masukan, dan jangan memaksakan kehendak, tidak menyalahkan namun justru bersifat mengembangkan potensi diri. Salah satu hal yang dapat mencegah penyalahgunaan narkoba adalah dengan cara mengenali kekuatan dan kelemahan diri atau disebut juga potensi diri. Setiap orang memiliki potensi yang berbeda yang dapat dikembangkan. Beberapa cara yang bisa ditempuh untuk mengembangkan potensi diri yaitu mengembangkan hobi yang ada pada diri kita, misalnya olah raga, musik, melukis, menari, menyanyi, memanjat tebing, pecinta alam dll. Mencoba untuk menajalan hobi/kegiatan tertentu secara terus menerus, membentuk kelompok teman atas dasar minat yang sama dan kegiatan yang positif, bahkan tidak jarang aspek positif dari hobi yang menonjol dapat dijadikan modal hidup dimasa yang akan datang.

5.3.2 Kendala-Kendala Untuk Mewujudkan Kondisi Yang Diharapkan dari BNN.

Terdapat berbagai kendala dalam mewujudkan kondisi yang diharapkan bagi komponen pengambil kebijakan, pengelola pendidikan menengah, dan komponen pendidikan dapat memanfaatkan hasil penelitian terkait dengan peran lembaga pendidikan yang penting dalam pencegahan penyalahguna narkoba.

5.3.2.1 Kendala-kendala guna mewujudkan kondisi yang diharapkan dari peran BNN dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi pelajar.

a. Program BNN dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di sekolah menengah masih belum berkesinambungan dan terukur.

b. Pemberdayaan lingkungan pendidikan masih sporadis dan *project oriented*.

c. Adanya kebijakan Community Development di Kampung Permata Jakarta Barat belum menjadi solusi efektif dalam mencegah peredaran gelap narkoba.

5.3.2.2 Kondisi yang diharapkan. Sebagai *focal point* dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba, BNN diharapkan meningkatkan perannya dalam mendukung lembaga pendidikan untuk melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar SLTA.

a. Meningkatnya peran Badan Narkotika Nasional (BNN) menjadi nara sumber bagi institusi baik pemerintah maupun LSM dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

b. Pemberdayaan lingkungan pendidikan tidak lagi dilakukan secara sporadic namun terprogram dan berkelanjutan, ada evaluasi yang terukur secara periodik. Peran BNN dalam bentuk kebijakan dan perencanaan telah sepenuhnya melibatkan institusi terkait. Kebijakan dan Strategi P4GN menjadi acuan seluruh institusi.

c. BNN menjadi pusat rujukan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi pelajar SLTA. Menjadi penting adanya BNN sebagai pusat rujukan mengingat pencegahan penyalahgunaan narkoba harus ditangani secara profesional dan membutuhkan pusat rujukan yang didukung komitmen untuk kontinuitasnya.

d. Mengingat peran lembaga strategis dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi pelajar maka penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh BNN untuk meningkatkan efektivitasnya dalam menerapkan kebijakan pencegahan narkoba di pendidikan menengah umumnya dan Jakarta Barat pada khususnya.

5.3.3. Kendala-kendala dan kondisi yang diharapkan terhadap peran Kemendiknas dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

5.3.3.1 Kendala-kendala

a. Belum adanya kebijakan khusus tentang pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dari Kemendiknas sehingga pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing sekolah, untuk itu sulit mengevaluasinya.

b. Masih rendahnya kesadaran untuk melakukan pencegahan, namun akan menjadi serius ketika permasalahan telah munsul ke permukaan.

c. Masih mengandalkan program penyuluhan dan seminar yang kurang efektif serta kurang terukur keberhasilannya.

5.3.3.2 Kondisi yang diharapkan

a. Kemendiknas diharapkan berperan mengeluarkan kebijakan secara eksplisit mengenai pencegahan narkoba.

b. Adanya kebijakan tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba di sekolah menengah yang meliputi menyangkut program sterilisasi lingkungan sekolah dari pengaruh luar baik pendidikan dasar maupun pendidikan tinggi.

c. Kebijakan yang melibatkan fungsi kontrol masyarakat. Membangun sinergi dengan orang tua, stakeholders, dewan pendidikan dan Komite sekolah untuk mengembangkan pencegahan yang bersifat mendidik. Dewasa ini banyak pihak menuntut peningkatan intensitas dan kualitas pelaksanaan pendidikan karakter pada lembaga pendidikan formal. Tuntutan tersebut didasarkan pada fenomena sosial yang berkembang, yakni meningkatnya kenakalan remaja dalam masyarakat, seperti perkelahian massal dan berbagai kasus dekadensi moral lainnya. Bahkan di kota-kota besar tertentu, gejala tersebut telah sampai pada taraf yang sangat meresahkan. Oleh karena itu, lembaga pendidikan formal sebagai wadah resmi pembinaan generasi muda diharapkan dapat meningkatkan peranannya dalam pembentukan kepribadian peserta didik melalui peningkatan pendidikan karakter.

d. Terwujudnya pendidikan karakter. Para pakar pendidikan pada umumnya sependapat tentang pentingnya upaya peningkatan pendidikan karakter pada jalur pendidikan formal. Namun demikian, ada perbedaan-perbedaan pendapat di antara mereka tentang pendekatan dan modus pendidikannya.

e. Ditetapkannya kebijakan tentang pendidikan karakter dengan dukungan kurikulum dan tenaga pendidik yang berkarakter. Berdasarkan *grand design* yang dikembangkan Kemendiknas (2010),⁷⁷ secara psikologis dan sosial kultural pembentukan karakter dalam diri individu merupakan fungsi dari seluruh potensi individu manusia (kognitif, afektif, konatif, dan psikomotorik) dalam konteks interaksi sosial kultural (dalam

⁷⁷. Sumber diunduh dari <http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2010/09/15/konsep-pendidikan-karakter/>

keluarga, sekolah, dan masyarakat) dan berlangsung sepanjang hayat. Konfigurasi karakter dalam konteks totalitas proses psikologis dan sosial-kultural tersebut dapat dikelompokkan dalam: Olah Hati (*Spiritual and emotional development*), Olah Pikir (*intellectual development*), Olah Raga dan Kinestetik (*Physical and kinesthetic development*), dan Olah Rasa dan Karsa (*Affective and Creativity development*).

f. Diterapkannya pendidikan moral. Para pakar telah mengemukakan berbagai teori tentang pendidikan moral. Menurut Hersh, et. al. (1980),⁷⁸ di antara berbagai teori yang berkembang, ada enam teori yang banyak digunakan; yaitu: pendekatan pengembangan rasional, pendekatan pertimbangan, pendekatan klarifikasi nilai, pendekatan pengembangan moral kognitif, dan pendekatan perilaku sosial. Berbeda dengan klasifikasi tersebut, Elias (1989) mengklasifikasikan berbagai teori yang berkembang menjadi tiga, yakni pendekatan kognitif, pendekatan afektif, dan pendekatan perilaku. Klasifikasi didasarkan pada tiga unsur moralitas yang biasa menjadi tumpuan kajian psikologi yakni perilaku, kognisi, dan afeksi. Berdasarkan pembahasan di atas dapat ditegaskan bahwa pendidikan karakter merupakan upaya yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis untuk membantu peserta didik memahami nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan nilai-nilai spiritual dan mampu berbuat yang seharusnya kepada diri sendiri, sesama manusia, lingkungan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat.

5.3.4 Kendala-kendala dalam mewujudkan Kondisi yang diharapkan dari Peran Dinas Pendidikan guna pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

5.3.4.1 Kendala-kendala

- a. Rendahnya kepedulian masyarakat dalam mewujudkan lingkungan bersih narkoba.
- b. Tingkat pendidikan masyarakat yang masih dalam tarap pengetahuan, belum sampai pada pemahaman dan penghayatan nilai-nilai moralitas dan keagamaan.

5.3.4.2 Kondisi yang diharapkan

⁷⁸ .Sumber diunduh dari <http://www.library.ohiou.edu/indopubs/2001/08/31/0141.html>

- a. Terwujudnya kebijakan mengintegrasikan materi bahaya penyalahgunaan narkoba ke dalam mata pelajaran yang relevan seperti mata pelajaran Biologi, Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, dan Agama.
- b. Terlaksananya pendidikan karakter. Melalui pendidikan karakter yakni dalam bentuk penanaman nilai-nilai kedisiplinan yang ditanamkan sejak masa orientasi siswa, membuat kontrak atau persetujuan resmi tertulis melalui formulir yang ditandatangani sebagai bentuk persetujuan anak dan orang tua yang berisi bersedia mengikuti tata tertib sekolah dengan segala konsekuensinya. Menurut Mochtar Buchori (2007)⁷⁹ pendidikan karakter seharusnya membawa anak didik ke pengenalan nilai secara nyata mengungat tujuan pendidikan karakter adalah agar anak didik mampu secara mandiri meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya dan menginternalisasikannya ke dalam nilai-nilai karakter dan aklak mulia dalam perilaku sehari-hari. Selain pengembangan intelektual, lembaga pendidikan ini berperan menyelenggarakan pendidikan karakter tersebut. Kondisi lembaga pendidikan formal, non formal, dan informal harus bersinergi sehingga guna pembentukan pribadi anak didik. Seringkali terjadi anak bersikap baik di rumah karena model perilaku orang tuanya, namun ketika keluar rumah atau berada di sekolah ia berkata-kata kotor, terlibat dalam perkelahian antarpelajar, memiliki ketertarikan untuk bergaul dengan kelompok yang berperilaku jahat atau menyimpang dari norma sosial, dan ada pula yang menjadi penyalahguna narkoba. Hal tersebut mengindikasikan betapa besar pengaruh lingkungan sosial. Penyimpangan norma moral dan perilaku sosial pelajar SLTA yang bila tidak dilakukan pencegahan maka akan menjadi masalah serius dalam pencapaian tujuan pendidikan.
- c. Diterapkannya kebijakan penataan sekolah sebagai wiyata mandala sehingga perlindungan anak didik lebih terjamin, peluang mengembangkan kemampuan anak didik lebih optimal mengingat sekolah secara khusus hanya diperuntukkan untuk pelayanan pendidikan.
- d. Meningkatnya Efektivitas Peran Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat. Suku Dinas Pendidikan berperan menyelenggarakan dan membina pendidikan

⁷⁹. Sumber sebagaimana diunduh dari <http://www.scribd.com/doc/49754748/teori-Pendidikan-Karakter>

menengah sehingga terwujudnya Pelaksanaan Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, terjadinya sinergi ketiga komponen perangkat sekolah, masyarakat dan orang tua siswa.

e. Terlaksananya program sosialisasi dan komunikasi yang efektif guna membangun sinergi untuk meningkatkan kualitas pendidikan menengah, dan terselenggaranya metode pencegahan penyalahgunaan narkoba yang efektif.

f. Terselenggaranya pendidikan karakter yang berbasis kompetensi, tenaga pendidik berkarakter serta dukungan kurikulum dan komponen pendidikan lainnya.

g. Ditetapkannya metode pencegahan narkoba yang efektif. Dengan ditetapkannya metode pencegahan oleh Suku Dinas Pendidikan diharapkan setiap sekolah menengah dapat melakukan pencegahan secara terprogram khusus untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Selama ini pelaksanaan pencegahan narkoba sebagaimana langkah antisipasi meluasnya ancaman bahaya narkoba maka melalui berbagai kegiatan setiap sekolah menengah telah melakukan pembimbingan dan pembelajaran melalui pembuatan tata tertib sekolah yang diharapkan bermuara kepada berkembangnya potensi intelektual dan kepribadian para pelajarnya.

h. Terlaksananya secara optimal Peran Elemen Pendidikan yakni pertama, Peran perangkat sekolah memberikan pelayanan kepada peserta didik (pelajar) baik dalam pemberian informasi bahaya narkoba maupun meningkatkan kepedulian untuk membangun kondisi yang harmonis di lingkungan sekolah. Kedua, Peran masyarakat sebagai bagian integral komponen pencegahan narkoba maka peran masyarakat perlu ditingkatkan melalui keterlibatan institusi pemerintah untuk memotivasi agar bangkit dan semangat bagi para pelajar dan lembaga pendidikan. Ketiga, Peran Orang tua. Orang tua merupakan orang yang lebih tua atau orang yang dituakan. Namun umumnya di masyarakat pengertian orang tua itu adalah orang yang telah melahirkan anak-anak yaitu ibu dan bapak. Ibu dan bapak selain telah melahirkan para pelajar ke dunia ini, mereka juga yang mengasuh dan membimbing anaknya dengan cara memberikan contoh yang baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari, selain itu orang tua juga telah memperkenalkan anaknya ke dalam hal-hal yang terdapat di dunia dan menjawab secara jelas tentang sesuatu yang tidak dimengerti oleh anak.

5.3.4. Kendala-kendala dalam mewujudkan kondisi yang diharapkan bagi Peran Kepala Sekolah guna pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

5.3.4.1 Kendala-kendala

- a. Sekolah tidak disiapkan tenaga ahli narkoba sehingga anggapan terintegrasinya bahaya narkoba merupakan wacana yang dibebankan kepada sekolah.
- b. Sekolah telah sangat sarat dengan serangkaian kegiatan yang ada dalam kurikulum sebagai tuntutan tercapainya program pendidikan yang telah digariskan.

5.3.4.2 Kondisi Yang diharapkan.

- a. Sebagai Pengelola Sekolah Menengah Kepala Sekolah diharapkan berperan. Meningkatkan kualitas peran Kepala Sekolah Sebagai Manajer Dalam Implementasi Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah.
- b. Kepala Sekolah memiliki peran meningkatkan mutu pendidikan. Pendidikan dikatakan bermutu apa bila prosentase kelulusan yang tinggi, banyaknya lulusan yang diterima di perguruan tinggi, kondisi sekolah yang aman, nyaman, dan kondusif, bersih dan bebas dari penyalahgunaan narkoba, tenaga pendidik yang berkualitas, adanya umpan balik dalam bentuk kepercayaan masyarakat dan orang tua meningkat. Semakin kecil prosentase pelanggaran peserta didiknya.
- c. Kepala Sekolah sebagai *educator* (pendidik). Kegiatan belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan dan guru merupakan pelaksana dan pengembang utama kurikulum di sekolah. Kepala sekolah yang menunjukkan komitmen tinggi dan fokus terhadap pengembangan kurikulum dan kegiatan belajar mengajar di sekolahnya tentu saja akan sangat memperhatikan tingkat kompetensi yang dimiliki gurunya, sekaligus juga akan senantiasa berusaha memfasilitasi dan mendorong agar para guru dapat secara terus menerus meningkatkan kompetensinya, sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berjalan efektif dan efisien. Melalui pendidikan penanaman nilai-nilai mengarahkan kepada perilaku manusia dewasa dan mampu berpikir sehat sehingga hasil didiknya akan berperilaku menjauhkan diri dari bahaya narkoba.
- d. Kepala Sekolah Sebagai manajer. Dalam mengelola tenaga kependidikan, salah satu tugas yang harus dilakukan kepala sekolah adalah melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan pengembangan profesi para guru. Dalam hal ini, kepala sekolah

seyogyanya dapat memfasilitasi dan memberikan kesempatan yang luas kepada para guru untuk dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan, baik yang dilaksanakan di sekolah, *in house training*, diskusi profesional dan sebagainya, atau melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan di luar sekolah, seperti kesempatan melanjutkan pendidikan atau mengikuti berbagai kegiatan pelatihan yang diselenggarakan pihak lain.

e. Kepala Sekolah sebagai administrator. Khususnya berkenaan dengan pengelolaan keuangan, bahwa untuk tercapainya peningkatan kompetensi guru tidak lepas dari faktor biaya. Seberapa besar sekolah dapat mengalokasikan anggaran peningkatan kompetensi guru tentunya akan mempengaruhi terhadap tingkat kompetensi para gurunya. Oleh karena itu kepala sekolah dapat mengalokasikan anggaran yang memadai bagi upaya peningkatan kompetensi guru.

f. Kepala Sekolah sebagai *supervisor*. Untuk mengetahui sejauh mana guru mampu melaksanakan pembelajaran, secara berkala kepala sekolah perlu melaksanakan kegiatan supervisi, yang dapat dilakukan melalui kegiatan kunjungan kelas untuk mengamati proses pembelajaran secara langsung, terutama dalam pemilihan dan penggunaan metode, media yang digunakan dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran (E. Mulyasa, 2004). Dari hasil supervisi ini, dapat diketahui kelemahan sekaligus keunggulan guru dalam melaksanakan pembelajaran, tingkat penguasaan kompetensi guru yang bersangkutan selanjutnya diupayakan solusi, pembinaan, dan tindak lanjut tertentu sehingga guru dapat memperbaiki kekurangan yang ada sekaligus mempertahankan keunggulannya dalam melaksanakan pembelajaran. Jones dkk. sebagaimana disampaikan oleh Sudarwan Danim (2002) mengemukakan bahwa menghadapi kurikulum yang berisi perubahan-perubahan yang cukup besar dalam tujuan, isi, metode, dan evaluasi pengajarannya, sudah sewajarnya kalau para guru mengharapkan saran dan bimbingan dari kepala sekolah mereka". Dari ungkapan ini mengandung makna bahwa kepala sekolah harus menguasai kurikulum sekolah.

g. Kepala Sekolah sebagai *leader* (pemimpin). Gaya kepemimpinan kepala sekolah yang dapat menumbuh-suburkan kreativitas sekaligus dapat mendorong terhadap peningkatan kompetensi guru. Dalam rangka meningkatkan kompetensi guru kepala

sekolah dapat menerapkan kedua gaya kepemimpinan tersebut secara tepat dan fleksibel, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan yang ada. Kepemimpinan seseorang sangat berkaitan dengan kepribadian dan kepribadian kepala sekolah sebagai pemimpin akan tercermin dalam sifat-sifat sebagai berikut : jujur; percaya diri; tanggung jawab; berani mengambil resiko dan keputusan; berjiwa besar; emosi yang stabil, dan bisa menjadi teladan (E. Mulyasa, 2003).

h. Kepala Sekolah sebagai pencipta iklim kerja. Budaya dan iklim kerja yang kondusif akan memungkinkan setiap guru lebih termotivasi untuk menunjukkan kinerjanya secara unggul, yang disertai usaha untuk meningkatkan kompetensinya. Oleh karena itu, dalam upaya menciptakan budaya dan iklim kerja yang kondusif, kepala sekolah hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip : para guru akan bekerja lebih giat apabila kegiatan yang dilakukannya menarik dan menyenangkan; tujuan kegiatan perlu disusun dengan dengan jelas dan diinformasikan kepada para guru sehingga mereka mengetahui tujuan dia bekerja, para guru juga dapat dilibatkan dalam penyusunan tujuan tersebut; para guru harus selalu diberitahu tentang pekerjaannya; pemberian hadiah lebih baik dari hukuman, namun sewaktu-waktu hukuman juga diperlukan; usahakan untuk memenuhi kebutuhan sosio-psiko-fisik guru, sehingga memperoleh kepuasan (modifikasi dari pemikiran E. Mulyasa tentang Kepala Sekolah sebagai Motivator, E. Mulyasa, 2003).

i. Kepala Sekolah sebagai pengelola kegiatan ekstra kurikuler optimal perannya. Kegiatan ekstrakurikuler mendukung terwujudnya lingkungan pendidikan yang mendidik. Selain menyalurkan bakat maupun kegiatan wajib dimaksudkan untuk menanamkan nilai-nilai kebudayaan. Menurut Edwin H. Sutherland, perilaku menyimpang bersumber pada pergaulan-pergaulan yang cenderung menyimpang. Muatan kegiatan ekstrakurikuler dapat dirancang oleh guru pembina dengan muatan pertama, Program Pembinaan Keagamaan. Program ini bermanfaat bagi peningkatan kesadaran moral beragama peserta didik. Dalam konteks Pendidikan Nasional hal itu dapat dikembangkan sesuai dengan jenis kegiatan⁸⁰ antara lain: pesantren kilat.

⁸⁰. Sebagaimana yang terdapat dalam lampiran Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 125 /U/ 2002.

tadarus, shalat berjamaah, shalat tharawih, latihan dakwah, baca tulis *Al-Qur'an*, pengumpulan zakat, dll, atau melalui program keagamaan yang secara terintegrasi dengan kegiatan lain, misalnya: latihan pengendalian diri dan seminar tentang bahaya narkoba. Kedua, Program Pelatihan Profesional. Pelatihan profesional dimaksudkan sebagai kegiatan yang ditujukan pada pengembangan kemampuan nilai tertentu yang bermanfaat bagi peserta didik dalam pengembangan keahlian khusus. Jenis kegiatan ini misalnya: aktivitas jurnalistik, kaderisasi kepemimpinan, pelatihan manajemen, dan kegiatan sejenis yang membekali anak didik. Ketiga, Program Organisasi Siswa. Organisasi siswa dapat menyediakan sejumlah program dan tanggung jawab yang dapat mengarahkan siswa pada pembiasaan hidup berorganisasi. Seperti halnya yang berlaku saat ini : OSIS, PMR, Pramuka, kelompok pecinta alam, paduan suara, dan olah raga, merupakan jenis organisasi yang dapat lebih diefektifkan fungsinya sebagai wahana pembelajaran nilai dalam berorganisasi. Keempat, Kegiatan pembinaan kultur/ budaya. Kegiatan pembinaan kultur adalah kegiatan yang berhubungan dengan kesadaran peserta didik terhadap nilai-nilai budaya. Kegiatan orasi seni, kursus seni, kunjungan ke museum, kunjungan tempat-tempat bersejarah lainnya merupakan program kegiatan ekstrakurikuler yang dapat dikembangkan. Kegiatan-kegiatan inipun sebaiknya disiapkan secara matang sehingga dapat menumbuhkan kecintaan terhadap budaya sendiri. Kelima, Program Perkemahan. Kegiatan ini mendekatkan peserta didik dengan alam. Karena itu agar kegiatan ini tidak hanya sekedar hiburan atau menginap di alam terbuka, sejumlah kegiatan seperti perlombaan olahraga, kegiatan intelektual, uji ketahanan, keberanian, dan kesadaran nilai-nilai spiritual. Diberikan pula materi tentang bahaya narkoba oleh pembina yang memiliki kompetensi tentang bahaya narkoba. Dengan tumbuhnya mental kepribadian melalui program ini diharapkan para pelajar memiliki ketahanan mental dan fisik yang handal sehingga mampu menolak narkoba.

j. Terselenggaranya program pendidikan karakter secara efektif. Pendidikan karakter adalah segala sesuatu yang dilakukan guru, yang mampu mempengaruhi karakter peserta didik. Guru membantu membentuk watak peserta didik. Hal ini mencakup keteladanan bagaimana perilaku guru, cara guru berbicara atau menyampaikan

materi, bagaimana guru bertoleransi, dan berbagai hal terkait lainnya. Menurut T. Ramli (2003), pendidikan karakter memiliki esensi dan makna yang sama dengan pendidikan moral dan pendidikan akhlak. Tujuannya adalah membentuk pribadi anak, supaya menjadi manusia yang baik, warga masyarakat, dan warga negara yang baik. Sebagaimana ciri-ciri karakter manusia unggul adalah : a. *Trustworthiness* (memiliki integritas, kejujuran, dan loyalitas). b. *Fairness* (senantiasa terbuka akan kebenaran). c. *Caring* (berperilaku peduli terhadap lingkungannya). d. *Respectiveness* (menghargai dan menghormati anggota keluarga lainnya). e. *Citizenship* (sadar hukum dan peraturan). f. *Responsibility* (bertanggung jawab, disiplin, dan selalu melakukan kegiatan sebaik mungkin) (A.Kadarmanta, 2008 : 74). Individu yang berkarakter unggul adalah seseorang yang berusaha melakukan hal-hal yang terbaik terhadap Tuhannya, diri, sesama, dan lingkungan alam semestinya dengan mengoptimalkan potensi diri dan disertai dengan kesadaran, emosi, dan motivasinya. Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Menurut David Elkind & Freddy Sweet Ph.D. (2004), pendidikan karakter dimaknai sebagai usaha sengaja untuk membantu orang memahami, peduli, dan bertindak atas nilai-nilai etika inti. Mengingat strategisnya peran lembaga pendidikan menengah dalam mencegah narkoba maka kepala sekolah perlu memanfaatkan hasil penelitian ini guna mengembangkan konsep kurikulum pendidikan karakter dan mengintegrasikan bahaya narkoba ke dalam pembinaan ahlak para anak didiknya.

5.3.5 Kendala-kendala untuk mewujudkan Peran Guru BK dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

5.3.5.1 Kendala-kendala

- a. Belum adanya kurikulum pencegahan narkoba bagi pelajar SLTA di Jakarta Barat.
- b. Program penyuluhan dilakukan kerja sama dengan institusi terkait maupun oleh LSM cenderung bersifat sporadis, kurang berkesinambungan dan belum merata.

5.3.5.2 Kondisi yang diharapkan

a. Bimbingan dan Konseling memiliki peran dalam proses pendewasaan anak didik. Kepada para peserta didik yang mengalami masalah atau untuk membantu mencegah agar masalah tidak menimpa kepada para pelajarnya. Melakukan konsultasi dan kerjasama dengan guru khususnya guru BK diperlukan sebagai bentuk kepedulian orang tua siswa terhadap pendidikan anaknya. Sebab selama berada di sekolah, gurulah yang menjadi pendidik, dan pengawas anak. Guru adalah sebagai pengganti orangtua di sekolah. Dari pagi hingga siang anak dalam pengawasan guru di sekolah. Guru akan mengetahui anak yang terlibat masalah dan membantu mereka untuk menyelesaikannya.

b. Guru BK berperan untuk menjadi tempat curahan hati bagi anak didik/siswa yang mempunyai masalah, baik masalah di rumah maupun di tempat lain, dengan begitu guru bisa mengetahui dan membantu sang anak tersebut untuk akhirnya bisa menyelesaikan masalahnya. Kerjasama yang baik antara orangtua dan guru pada umumnya dan guru BK pada khususnya didalam upaya penanggulangan masalah narkoba sangat diperlukan karena anak merupakan tanggungjawab orangtua dan gurunya. Untuk itu konsultasi secara berkala antara orangtua dan guru bermanfaat bagi pemantauan anak agar sedini mungkin dapat diketahui gejala-gejala awal manakala seorang anak berperilaku menyimpang seperti halnya terlibat penyalahgunaan narkoba. Hal ini merupakan substansi pencegahan yang mendidik.

c. Terkait dengan peran ini maka guru BK perlu memahami gejala penyalahgunaan narkoba sedini mungkin. Bila seorang anak dicurigai menyalahgunakan narkoba yaitu dari pemantauan perubahan perilaku dan prestasi belajar yang merosot dan absensi yang tinggi, sebaiknya orang tua berkonsultasi dengan guru dan bila diperlukan tes urine. Apabila positif, maka si anak harus segera diberi perawatan demi pemulihannya. Terwujudnya pendidikan karakter melalui peran guru BK. Goleman (1995) mengungkapkan lima wilayah kecerdasan emosional yang dapat menjadi pedoman bagi individu untuk mencapai kesuksesan dalam kehidupan sehari-hari yaitu mengenali emosi diri yaitu kesadaran diri dalam mengenali perasaan sewaktu perasaan itu terjadi merupakan dasar kecerdasan emosional. Pada tahap ini diperlukan adanya pemantauan perasaan dari waktu ke waktu agar timbul wawasan psikologi dan

pemahaman tentang diri. Ketidakmampuan untuk mencermati perasaan yang sesungguhnya membuat diri seseorang berada dalam kekuasaan perasaan. Hal tersebut membuat ketidakpekaan akan perasaan yang sesungguhnya yang berakibat buruk bagi pengambilan keputusan.

d. Mengelola emosi yaitu mengelola emosi berarti menangani perasaan agar perasaan dapat terungkap dengan tepat, hal ini merupakan kecakapan yang sangat bergantung pada kesadaran diri. Emosi dikatakan berhasil dikelola apabila mampu menghibur diri ketika ditimpa kesedihan, dapat melepas kecemasan, kemurungan atau ketersinggungan dan bangkit kembali dengan cepat dari semua itu. Sebaliknya orang yang buruk kemampuannya dalam mengelola emosi akan terus menerus bertarung melawan perasaan murung atau melarikan diri pada hal-hal yang merugikan dirinya.

e. Memotivasi diri yaitu kemampuan seseorang memotivasi diri dapat ditelusuri melalui hal-hal sebagai berikut : cara mengendalikan dorongan hati; derajat kecemasan yang berpengaruh terhadap unjuk kerja seseorang; kekuatan berfikir positif; optimisme; dan keadaan *flow* (mengikuti aliran) yaitu keadaan ketika perhatian seseorang sepenuhnya tercurah ke dalam apa yang sedang terjadi, pekerjaannya hanya terfokus pada satu objek. Dengan kemampuan memotivasi diri yang dimilikinya maka seseorang akan cenderung memiliki pandangan yang positif dalam menilai segala sesuatu yang terjadi dalam dirinya.

f. Mengenali emosi orang lain yaitu empati atau mengenal emosi orang lain dibangun berdasarkan pada kesadaran diri. Jika seseorang terbuka pada emosi sendiri, maka dapat dipastikan bahwa ia akan terampil membaca perasaan orang lain. Sebaliknya orang yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan emosinya sendiri dapat dipastikan tidak akan mampu menghormati perasaan orang lain;

g. Membina hubungan dengan orang lain. Seni dalam membina hubungan dengan orang lain merupakan keterampilan sosial yang mendukung keberhasilan dalam pergaulan dengan orang lain. Tanpa memiliki keterampilan seseorang akan mengalami kesulitan dalam pergaulan sosial. Sesungguhnya karena tidak dimilikinya keterampilan-keterampilan semacam inilah yang menyebabkan seseorang seringkali dianggap angkuh, mengganggu atau tidak berperasaan. Stenly dalam Stein, 2002

menyebutkan bahwa beberapa ciri yang paling dianggap berperan dalam keberhasilan adalah jujur pada semua orang, menerapkan disiplin, bergaul baik dengan orang lain, memiliki teman yang mendukung, dan bekerja lebih giat daripada kebanyakan orang. Setiap guru BK dapat memanfaatkan dengan berkontribusi untuk membina anak didiknya sesuai dengan peran lembaga pendidikan dalam mencegah narkoba di sekolah menengah.

5.3.6 Kendala-kendala untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan bagi Dewan Pendidikan dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

5.3.6.1 Kendala-kendala

- a. Belum adanya kurikulum pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba bagi pelajar SLTA di Jakarta Barat.
- b. Program penyuluhan dilakukan kerja sama dengan institusi terkait maupun oleh LSM cenderung bersifat sporadis, kurang berkesinambungan dan belum merata.
- b. Dewan Pendidikan merupakan mitra sekolah yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah.

5.3.6.2 Kondisi yang diharapkan

- a. Dewan pendidikan bersama perangkat lembaga pendidikan SLTA memberikan masukan pemikiran dan langkah solusi guna mewujudkan perannya membantu lembaga pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan tersebut. Dengan mempelajari gejala-gejala negatif yang dimiliki anak remaja pada umumnya, orangtua dan pendidik akan dapat menyadari dan melakukan upaya perbaikan perlakuan sikap terhadap anak dalam proses pendidikan.
- b. Dewan Pendidikan memiliki peran memberi pertimbangan (*advisory body*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, pendukung (*supporting agency*) baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan, pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi, akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan, mediator antara pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif) dengan masyarakat.

- c. Dewan Pendidikan memiliki peran yang strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan. Untuk itu maka pemikiran, pertimbangan, saran, dan kontrol yang telah dilakukan oleh Dewan Pendidikan perlu mendapatkan respons bukan hanya dianggap sebagai pelengkap saja oleh pengambil kebijakan. Melalui peran lembaga pendidikan yang melibatkan komponen lembaga pendidikan yakni kepala sekolah, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, Dewan Pendidikan, dan Komite Sekolah serta peran serta aktif peserta didik dalam proses pendidikan maka harapan terwujudnya perilaku pelajar SLTA yang berkualitas unggul dapat tercapai.
- d. Berperanserta aktif memberikan masukan tentang penyelenggaraan pendidikan karakter manusia yang efektif. Sebagai mitra lembaga pendidikan perlu meningkatkan kualitas pendidikan seiring perubahan masyarakatnya. Teori sosiologi ditegaskan bahwa setiap masyarakat manusia selama hidup pasti mengalami perubahan-perubahan. Membangun masyarakat melalui pendidikan adalah keharusan yang sangat mendesak dan tidak boleh ditawar-tawar. Bastian (2002:13).
- e. Dewan pendidikan dapat mengembangkan berbagai gagasan sejalan dengan perannya sebagai mitra lembaga pendidikan, berpijak dari penting dan strategisnya peran lembaga pendidikan dalam mencegah narkoba.

5.3.7 Kendala-kendala dalam mewujudkan Peran Komite Sekolah yang diharapkan guna mendukung pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

5.3.7.1 Kendala-kendala.

- a. Masukan-masukan dari Komite Sekolah sebagai mitra sekolah tidak selalui direspon positif, keberadaan komite sekolah masih belum efektif.
- b. Kemandirian Komite Sekolah sangat tergantung kepedulian masyarakat dalam mendukung kebijakan sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan.
- c. Program pencegahan narkoba bagi pelajar SLTA yang dilakukan secara kerja sama dengan institusi terkait dan LSM masih bersifat sporadis, belum efektif.

5.3.7.2 Kondisi yang diharapkan

- a. Sebagai mitra sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan maka Komite Sekolah berperan untuk memberikan masukan guna terwujudnya sistem pendidikan yang

mencakup input (masukan) peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan, proses pendidikan maupun hasil didik (lulusan) yang diharapkan berkualitas unggul. Sebagai perangkat pendukung dan mitra sekolah maka Komite Sekolah merupakan representasi atau perwakilan kehadiran pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang berperan secara terus menerus secara mandiri memberikan kontribusi melalui saran, pemikiran dan pengawasan demi peningkatan kualitas pendidikan tersebut.

b. Diharapkan peran Komite Sekolah mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan sekolah guna menghasilkan pemikiran, masukan program dan pengawasan operasional sekolah sehingga kualitas sekolah meningkat kualitas intelektualitas dan mentalitas anak didik dan elemen pendidikan lainnya.

c. Komite sekolah mendukung terwujudnya peran serta orang tua dan masyarakat dalam mewujudkan kondisi yang kondusif para remajanya sehingga mendukung keberhasilan proses pendidikan di sekolah. Melalui Komite sekolah disosialisasikan hal-hal terkait dengan peran keberfungsian orang tua tersebut.

Mengingat penting dan strategisnya peran lembaga pendidikan dalam mencegah narkoba maka penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh komite sekolah melalui perannya sebagai mitra sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui kebijakan pembinaan karakter.

5.3.8 Kendala-kendala yang dihadapi dalam mewujudkan kondisi yang diharapkan bagi Pelajar guna pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

5.3.8.1 Kendala-kendala.

a. Masih adanya pandangan bahwa pelajar hanya sebagai obyek didik bukan subyek didik sehingga kurang dikembangkan potensi sebagai subyek dalam mencegah penyalahgunaan narkoba.

b. Tidak semua anak didik berasal dari keluarga harmonis, hal ini berdampak pada perilaku negatif yang menular ke teman sebayanya.

5.3.8.2 Kondisi yang diharapkan

a. Pelajar bukan hanya sebagai obyek didik, namun juga sebagai subyek didik. Untuk itu maka peran pelajar adalah melakukan aktivitas secara sungguh-sungguh

sebagaimana program pendidikan yang telah ditetapkan dalam kurikulum pendidikan.

b. Berperan aktif mengembangkan diri baik aspek kognitif, afektif maupun psikomotoriknya.

c. Berperan membentengi diri dengan kemampuan menolaki ajakan teman mengonsumsi narkoba. Pada umumnya seseorang mengenal dan menggunakan narkoba awalnya karena tawaran teman dekat. Sering terasa sulit menolak ajakan teman dekat apalagi kalau yang menawarkan pacarnya sendiri. Untuk itu maka para pelajar harus siap bila mereka memberi cap dengan julukan tertentu (seperti banci, ayam sayur, lembek, nggak *mucho*, *norak* dan lain-lain). Oleh karenanya perlu pembinaan secara berkelanjutan kepada pelajar sehingga mampu tumbuh sebagai pribadi yang berperilaku menolak narkoba. Membentengi diri dan menyediakan diri sebagai tempat mencurahkan hati (curhat) bagi teman, sehingga dapat meringankan masalah dan mencegahnya untuk menggunakan narkoba. Menjadi tempat curhat yang baik dengan menciptakan suasana yang bebas dari rasa kekhawatiran.

d. Berperannya pelajar sebagai *peer educator* bagi teman sebaya sekolahnya. Menjadi pendengar yang baik teman sebayanya guna menerapkan *peer educator*. Mendengarkan hingga tuntas apa yang disampaikan tanpa memotong pembicaraan, sebaiknya tidak memberi nasehat kalau tidak diminta, namun sebaliknya terampil memberikan saran pemecahan sebagai masukan, dan jangan memaksakan kehendak. Tidak menyalahkan. Mengembangkan potensi diri. Salah satu hal yang dapat mencegah kita menggunakan narkoba adalah dengan cara mengenali kekuatan dan kelemahan diri atau disebut juga potensi diri. Setiap orang memiliki potensi yang berbeda yang dapat dikembangkan. Beberapa cara yang bisa ditempuh untuk mengembangkan potensi diri yaitu mengembangkan hobi yang ada pada diri kita, misalnya olah raga, musik, melukis, menari, menyanyi, panjat tebing, pecinta alam dll. Mencoba untuk menjalankan hobi/kegiatan tertentu secara terus menerus, Bentuk kelompok teman atas dasar minat yang sama dan kegiatan yang positif. Seringkali hobi yang menonjol dapat dijadikan modal hidup dimasa yang akan datang. Berperan sebagai penolong dirinya sendiri, sebagai *peer educator* (pembimbing bagi teman sebayanya) dan bagi orang lain.

e. Dalam proses pendidikan dan pembinaan karakter oleh lembaga pendidikan maka pelajar diharapkan mampu berperan mengembangkan diri menjadi manusia berkarakter. Indikasi manusia berkarakter menurut David Elkind & Freddy Sweet Ph.D. (2004) adalah memiliki kepedulian dan bertindak atas nilai-nilai etika inti. Mereka bisa menilai apa yang benar, sangat peduli tentang apa yang benar, dan kemudian melakukan apa yang mereka yakini benar, bahkan dalam menghadapi tekanan dari luar dan godaan dari dalam." Keberhasilan pendidikan karakter membutuhkan peranserta pelajar untuk aktif mengembangkan diri mengikuti seluruh program yang tepat sebagaimana diselenggarakan oleh sekolah. Pelajar berperanserta aktif mengembangkan karakternya sebagai pelajar yang berkualitas dan berkarakter unggul. Untuk itu maka pencegahan penyalahgunaan narkoba harus dilakukan sedini mungkin dan harus berkesinambungan. Pencegahan bukan semata-mata informasi mengenai bahaya narkoba, tetapi lebih menekankan pemberian keterampilan psikososial kepada mahasiswa untuk bersikap dan berperilaku positif. Informasi mengenai bahaya narkoba kepada mahasiswa tanpa ada usaha untuk mengubah perilakunya dengan memberikan keterampilan yang diperlukan, kurang bermanfaat. Bahkan, dikhawatirkan terjadi efek paradoks, yaitu meningkatnya keingintahuan atau keinginan mencoba narkoba pada para pelajar.

5.3.3 Upaya-Upaya Yang Perlu Dilakukan.

Untuk Mewujudkan Peran Lembaga Pendidikan Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pelajar SLTA Di Jakarta Barat. Membangun kemitraan dan sinergi antara sekolah, orang tua dan lingkungan masyarakat tentang pentingnya pencegahan penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu langkah membangun sinergi. Melakukan program kegiatan kreativitas siswa baik di bidang seni, sastra, maupun sains yang muaranya adalah untuk melakukan pencegahan narkoba di lingkungan pendidikan menengah. Perlu adanya sosialisasi bahwa berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009. Ancaman hukuman bagi pengedar sangat keras yakni hukuman mati. Namun lebih humanis kepada penyalahguna atau kurban penyalahguna. Namun demikian bagi penyalahguna dan atau kurban penyalahguna akan menghancurkan

masa depannya. Model pencegahan yang bersinergi antara sekolah, orang tua dan lingkungan masyarakat sangat sejalan dengan pendapat Stephen R. Covey (1989) ada tiga teori determinisme (paham yang menganggap setiap kejadian atau tindakan, baik yang menyangkut jasmani maupun rohani, merupakan konsekuensi kejadian sebelumnya dan ada di luar kemauan) meliputi : Pertama, Determinisme genetik yang berpandangan bahwa sikap individu merupakan gen yang diturunkan orang tuanya. Kedua, Determinisme positif, berpandangan bahwa sikap individu merupakan hasil dari perlakuan, pola asuh atau pendidikan orang tua yang diberikan anaknya. Ketiga, Determinisme lingkungan, berpandangan bahwa perkembangan sikap seseorang sangat dipengaruhi lingkungan tempat individu tersebut tinggal dan bagaimana lingkungan memperlakukan individu tersebut. Sikap merupakan salah satu aspek psikologis yang sangat penting karena sikap merupakan kecenderungan untuk berperilaku sehingga akan banyak mewarnai perilaku seseorang.

- a. Fungsi Pengambilan Keputusan yang dapat memberi manfaat untuk kepentingan bersama memerlukan keberanian mengambil resiko & mampu mengkomunikasikan.
- b. Fungsi Instruktif merupakan wewenang untuk memerintah agar anggotanya melakukan sesuatu sesuai dgn tugas dan tanggung jawabnya.
- c. Membangun Komunikasi : Mau mendengar semua masukan yang berasal dari siswa, guru, karyawan, orang tua ataupun seluruh *stake holder* sekolah; Tidak memaksakan kehendak pribadi yang membuat semua keputusan jadi subjektif, oleh sebab itu gunakan musyawarah untuk menentukan keputusan dan pemecahan masalah. Melakukan *check and recheck* pada setiap keputusan yang sudah diambil dan kegiatan yang sudah dilaksanakan, sehingga menjadi tolok ukur dan pengalaman berharga untuk kegiatan selanjutnya. Melakukan semua kegiatan dan komunikasi secara dua arah sehingga data-data dan kesimpulan yang diambil merupakan kesimpulan bersama dengan kualitas yang lebih baik. Untuk memenuhi semua kebutuhan organisasi perlu dilakukan pembinaan ketakwaan terhadap Tuhan YME, kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan awal untuk bela Negara. Kepribadian dan budi pekerti luhur. Berorganisasi, pendidikan politik dan kepemimpinan. Keterampilan dan wirausaha. Kesegaran jasmani dan daya kreasi,

Apresiasi dan kreasi seni. Alur pembinaan siswa yang harus diikuti seluruh siswa dalam kegiatan mos (masa orientasi siswa), dan secara bertahap dapat dilanjutkan pada tingkat berikutnya, yang biasanya diikuti oleh sebagian siswa (dalam kegiatan latihan dasar kepemimpinan siswa), alur pembinaan ini dapat berupa : organisasi kesiswaan, latihan kepemimpinan, penataan sekolah sebagai wiyatamandala, dan kegiatan ekstrakurikuler. Meningkatkan efektivitas kebijakan penataan sekolah sebagai wiyata mandala. Dengan memperhatikan kondisi sekolah dan masyarakat dewasa ini yang umumnya masih dalam taraf perkembangan, maka upaya pembinaan kesiswaan perlu diselenggarakan untuk menunjang perwujudan sekolah sebagai Wawasan Wiyatamandala. Kebijakan ini telah dirintis tahun 1984,⁸¹ dan dilanjutkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Menengah Dan Tinggi Provinsi DKI Jakarta Nomor 520.1 /2007 Tentang Penataan Wiyata Mandala Di SMA/SMK di lingkungan Provinsi DKI Jakarta. Dalam rangka usaha meningkatkan pembinaan ketahanan sekolah bagi sekolah-sekolah di lingkungan pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen pendidikan dan kebudayaan, menerapkan Wawasan Wiyatamandala yang merupakan konsepsi yang mengandung berbagai harapan tentang efektifnya sekolah.

Kepala Sekolah mengoptimalkan penerapan peran Sekolah sebagai Wiyatamandala (lingkungan pendidikan) sehingga tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan diluar bidang pendidikan. Kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh untuk menyelenggarakan seluruh proses pendidikan dalam lingkungan sekolahnya, yang harus berdasarkan Pancasila dan bertujuan untuk : Pertama, meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, meningkatkan kecerdasan dan keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian, mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Antara guru dengan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama yang baik untuk mengemban tugas pendidikan. Para guru, di dalam maupun di luar lingkungan sekolah, harus senantiasa menjunjung tinggi martabat dan citra guru sebagai manusia

⁸¹ Berdasarkan surat Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah nomor :13096/CI.84 tanggal 1 Oktober 1984 perihal Wawasan Wiyata mandala sebagai sarana ketahanan sekolah.

yang dapat digugu (dipercaya) dan ditiru, betapapun sulitnya keadaan yang melingkunginya. Sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya, namun harus mencegah masuknya sikap dan perbuatan yang sadar atau tidak, dapat menimbulkan pertentangan antara kita sama kita. Untuk mengimplementasikan wawasan Wiyata mandala perlu diciptakan suatu situasi di mana siswa dapat menikmati suasana yang harmonis dan menimbulkan kecintaan terhadap sekolahnya, sehingga proses belajar mengajar, kegiatan kurikuler, dan ekstrakurikuler dapat berlangsung dengan mantap.

Upaya untuk mewujudkan wawasan Wiyatamandala antara lain dengan menciptakan sekolah sebagai masyarakat belajar, pembinaan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), kegiatan kurikuler (bersangkutan dengan kurikulum), dan ekstrakurikuler, serta menciptakan suatu kondisi kemampuan dan ketangguhan yakni memiliki tingkat keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, dan kekeluargaan yang mantap. Dalam struktur kepengurusan OSIS memiliki beberapa pengurus yang bertugas khusus mengkoordinasikan masing-masing kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah.

5.3.3.1 Upaya Mewujudkan Peran BNN.

Dalam memberikan dukungan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di lingkungan pendidikan menengah perlu upaya-upaya :

- a. Melakukan sosialisasi bahwa BNN merupakan *focal point* dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba menjadi pusat rujukan dalam membangun dan implementasi Kebijakan dan Strategi Nasional di bidang pencegahan penyalahgunaan narkoba khususnya di lingkungan pendidikan. Dalam konteks ini seluruh institusi terkait menjabarkannya ke dalam program kegiatannya masing-masing, melaksanakannya dengan *action plan*, dan mengevaluasinya guna efektivitas kegiatan selanjutnya.
- b. Meningkatkan efektivitas kebijakan untuk mewujudkan sekolah SLTA yang bersih dari narkoba melalui tujuh jalur yaitu : pertama, Keluarga, dengan sasaran orang tua, anak, pemuda, remaja dan anggota keluarga lainnya. Sasaran ini untuk mendukung terwujudnya elemen masyarakat yang bermentalitas unggul untuk membangun sinergi dengan lembaga pendidikan. kedua, Pendidikan, sekolah maupun luar sekolah dengan kelompok sasarannya adalah guru, tenaga kependidikan, dan pelajar (anak

didik). Ketiga, Lembaga keagamaan, dengan sasaran pemuka-pemuka agama dan umatnya. Keempat, Organisasi sosial kemasyarakatan dengan sasaran remaja pemuda dan masyarakat. Organisasi Wilayah Pemukiman mulai dengan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), dengan sasaran pemuka masyarakat dan remaja setempat. Kelima, Unit-unit kerja, dengan sasaran Pimpinan, Karyawan dan keluarganya. Keenam, Mas Media baik elektronik, cetak maupun Media Interpersonal (*Talk show* dan dialog interaktif), dengan sasaran masyarakat luas maupun individu. Ketujuh, Melakukan evaluasi kebijakan pembinaan Kampung Permata dengan mengubah kebijakan melalui penindakan kepada pengedar dan bandar narkoba dengan keras.

5.3.3.2 Upaya Mewujudkan Peran Kemendiknas.

Diperlukan upaya untuk meningkatkan efektivitas Kemendiknas dalam mendukung pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pendidikan menengah.

- a. Melakukan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, membangun kebijakan untuk membuat program pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi kalangan pelajar SLTA.
- b. Membuat kebijakan tentang pendidikan karakter bagi seluruh pelajar SLTA.
- c. Membuat kebijakan tentang program pelatihan bagi pelajar penyuluh narkoba dan pendidik narkoba serta program kepemimpinan. Program *peer counseling* (remaja penyuluh). Sasarannya adalah pelajar yang cukup dikenal dan disukai guna dilatih teknik konseling secara sederhana dengan outputnya adalah kemampuan menjernihkan dan membuka pikiran untuk berbuat positif.
- d. Membuat Program *Peer Educator* yakni pelajar pendidik teman sebayanya. Mereka diberikan pelatihan bagaimana pengetahuan faktual dan akibat dan bahaya penyalahgunaan narkoba. pelatihan ini untuk membantu pencarian identitas dan memperkuat yang bersangkutan untuk menghadapi tekanan kelompok.
- e. Membangun program kepemimpinan (*peer leadership*) Program ini memberikan pelatihan kepemimpinan misalnya sebagai contoh latihan menolak narkoba. Para pemimpin teman sebaya ini diberikan pelatihan agar bisa berkomunikasi secara efektif alasan-alasan mengapa mereka memilih untuk tidak menyalahgunakan

narkoba. Sejalan dengan pentingnya peran lembaga pendidikan menengah dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia dan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. f. Untuk itu maka pemerintah telah berupaya mewujudkan amanat tersebut melalui berbagai usaha pembangunan pendidikan yang lebih berkualitas melalui pengembangan dan perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi, perbaikan sarana pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi ajar, serta pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya.

5.3.3.3 Upaya Mewujudkan Peran Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Meningkatkan Efektivitasnya. Dinas Pendidikan Provinsi membina terselenggaranya kerja sama dengan institusi terkait guna meningkatkan kualitas lembaga pendidikan menengah. Selain itu membangun sinergi dan komitmen yang kuat antara lembaga pendidikan, masyarakat, dan para orang tua untuk melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba secara dini.

a. Pemberdayaan masyarakat lingkungan sekolah. Mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkoba dengan mengutamakan pencegahan primer yaitu upaya pencegahan yang dilakukan sebelum penyalahgunaan terjadi. Adapun kegiatannya meliputi pendidikan, kampanye, atau penyebaran pengetahuan mengenai bahaya Narkoba, serta pendekatan dalam keluarga dan lain-lain, cara ini bisa dilakukan oleh berbagai kelompok masyarakat dimanapun seperti: sekolah, tempat tinggal, tempat kerja dan tempat-tempat umum.

b. Melaksanakan bimbingan serta menyalurkan kegiatan masyarakat terutama generasi muda yang ada kepada kegiatan positif seperti olahraga, kesenian dan lain-lain. Pelaksanaannya dengan cara bersinergi antara lembaga pendidikan BNN, Kemendiknas, Kemenkes, dan Kemenpora melalui kegiatan sebagai berikut : melaksanakan kegiatan preventif edukatif dengan sasaran menghilangkan faktor-faktor peluang, pola hidup bebas Narkoba dan penerangan secara dini terhadap penyalahgunaan Narkoba. Dalam teori perubahan perilaku bahwa perilaku manusia dapat berubah menjadi normatif bila diberikan pendidikan secara tepat guna.

c. Melakukan upaya preventif, yakni melalui pencegahan sedini dan sekecil mungkin. Hal ini telah dilakukan oleh lembaga pendidikan menengah di Jakarta Barat tentang kebijakan kawasan bebas asap rokok di lingkungan sekolah menengah. Dalam *teori broken windows*, bahwa peduli untuk meniadakan embrio kejahatan dan penyimpangan dari yang sekecil mungkin akan mampu menghindarkan kejahatan yang lebih besar. Untuk menjauhkan dari bahaya narkoba sangat tepat jika sedini mungkin menyadari dan mampu menjauhkan diri dari merokok. Upaya menjauhkan rokok dan minuman berkadar alkohol tinggi perlu mendapatkan dukungan dan komitmen kuat dari komponen masyarakat.

d. Melaksanakan pengawasan secara berjenjang oleh orang tua maupun tenaga pendidik terhadap putra-putri dan keluarga baik di lingkungan rumah sampai lingkungan yang lebih luas untuk tidak merokok; Mengadakan penertiban/lokalisir pengguna minuman keras pada tempat keramaian termasuk pada izin penjualan guna meminimalisir ketersediaannya; Memperketat pengawasan melalui patroli pada tempat rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, serta jalur peredaran secara ilegal ke Jakarta, pelaksanaannya bekerjasama dengan kepolisian setempat.

e. Mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba dengan meningkatkan kapasitas kelembagaan lintas bidang terkait, meningkatkan kualitas individu aparat, serta menumbuhkan kesadaran, kepedulian dan peran serta aktif seluruh komponen masyarakat melalui lembaga swadaya masyarakat (LSM), lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat untuk bersama-sama mendukung pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi pelajar; Mencegah terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap, dengan upaya-upaya yang berbasis masyarakat, mendorong dan menggugah kesadaran, kepedulian dan peran serta aktif seluruh komponen masyarakat dengan motto yang menjadi pendorong semangat adalah “Mencegah Lebih Baik Daripada Mengobati.”

f. Membangun kinerja yang bersinergi antara seluruh komponen institusi pemerintah terkait dan seluruh masyarakat. Membangun jaringan yang seluas-luasnya dalam bidang pencegahan. Pencegahan seharusnya dilakukan sedini mungkin melalui cara menghindarkan dari narkoba. Ditanamkan sejak dari rumah.

Keluarga merupakan pertahanan utama agar seseorang bisa terhindar dari jeratan narkoba. Ada dua penyebab seseorang mengkonsumsi narkoba yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi ketidakmatangan emosi seseorang, yang telah dibawa sejak lahir, eksternal adalah akibat faktor lingkungan.

g. Pencegahan berbasis kekuatan masyarakat (*people power*). Melakukan pencegahan kepada anak-anak untuk tidak merokok. Merokok adalah pintu gerbang menuju narkoba. Dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat. Masyarakat setempat ikut terlibat dalam program yang mereka buat dan kembangkan sendiri. Di manapun masyarakat yang sehat akan membutuhkan lingkungan yang sehat. Unsur pemerintah melalui seluruh aparatnya untuk melindungi dari ancaman bahaya narkoba. Hal ini ditanamkan di sekolah tentang pentingnya strategi tersebut.

h. Pencegahan berbasis pembinaan kecerdasan emosional dan spiritual. Di seluruh lapisan masyarakat. Mulai dari keluarga, lembaga pendidikan, tempat kerja serta masyarakat. Sasarannya adalah mewujudkan manusia cerdas secara emosi. Indikasinya adalah mampu menyadari dirinya sendiri; mampu mengendalikan diri, mampu memotivasi diri secara efektif; memiliki kepekaan terhadap orang lain; serta memiliki keterampilan sosial. Membantu lebih mengenal diri dan menjaga keseimbangan antara kebutuhan pribadi dan kebutuhan orang lain. Langkah pencegahan, dengan memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai emosional dan spiritual melalui latihan pengendalian diri dan memperkuat nilai-nilai keimanan.

i. Membuat program pencegahan yang bersifat *prevention education*. Bentuknya adalah kurikulum tentang bahaya narkoba. Merupakan program jangka panjang. Pelaksanaannya melalui pendekatan kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum sesuai dengan tuntutan kebutuhan peserta didik, yang mencakup silabus, metode, kompetensi pendidik, sistem evaluasi yang memadai, terukur, berkelanjutan dan dilakukan secara komprehensif oleh seluruh komponen pendidikan di seluruh tingkatan. Dengan penanaman kesadaran dan pemahaman dampak bahaya narkoba. *Output*-nya adalah sadar dan paham tentang bahaya narkoba. Sedangkan *outcome*-nya adalah ketika menginjak usia remaja belasan tahun hingga dewasa mereka mampu mengatakan tidak pada narkoba. Program ini harus ditangani secara profesional. Pendekatan kurikulum yang didesain dengan model

prevention education dan memadukannya dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.

j. Mengoptimalkan Peran Pembina Fungsi Kelembagaan dan Kebijakan. Sebagai pembina fungsi kelembagaan memiliki peran yang sangat strategis, mengingat seluruh arahan dapat dijadikan acuan pelaksanaan pendidikan khususnya dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba.

k. Menyelenggarakan pendidikan karakter. Melalui Kemendiknas sebagai institusi yang berperan memberikan payung hukum mengeluarkan kebijakan tentang Pendidikan Karakter bagi seluruh jenjang pendidikan. Karakter yang kuat akan mendukung terwujudnya kemampuan membentengi diri dari godaan termasuk menjadi penyalahguna narkoba. Dengan kebijakan ini maka seluruh penyelenggara dan pembinan pendidikan menengah melakukan program Pendidikan karakter yakni program yang dirancang untuk menanamkan nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Dalam pendidikan karakter di sekolah, semua komponen (pemangku pendidikan) harus dilibatkan, termasuk komponen-komponen pendidikan itu lainnya yang meliputi isi kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian, penanganan atau pengelolaan mata pelajaran, pengelolaan sekolah, pelaksanaan aktivitas atau kegiatan ko-kurikuler, pemberdayaan sarana prasarana, pembiayaan, dan ethos kerja seluruh warga sekolah/lingkungan. Pendidikan karakter dimaknai sebagai suatu perilaku warga sekolah yang dalam menyelenggarakan pendidikan harus berkarakter pula. Pendidikan karakter adalah segala sesuatu yang dilakukan guru, yang mampu mempengaruhi karakter peserta didik. Guru membantu membentuk watak peserta didik. Hal ini mencakup keteladanan bagaimana perilaku guru, cara guru berbicara atau menyampaikan materi, bagaimana guru bertoleransi, dan berbagai hal terkait lainnya. Tujuannya adalah membentuk pribadi anak, supaya menjadi manusia yang baik, warga masyarakat, dan warga negara yang baik. Adapun kriteria manusia yang baik, warga masyarakat yang baik, dan warga negara yang baik bagi suatu masyarakat atau bangsa, secara umum adalah nilai-nilai sosial tertentu, yang banyak dipengaruhi oleh

budaya masyarakat dan bangsanya. Oleh karena itu, hakikat dari pendidikan karakter dalam konteks pendidikan di Indonesia adalah pendidikan nilai, yakni pendidikan nilai-nilai luhur yang bersumber dari budaya bangsa Indonesia sendiri, dalam rangka membina kepribadian generasi muda. Sebagaimana dikatakan oleh T. Ramli (2003)⁸² bahwa : "Pendidikan karakter memiliki esensi dan makna yang sama dengan pendidikan moral dan pendidikan akhlak. Tujuannya adalah membentuk pribadi anak, supaya menjadi manusia yang baik, warga masyarakat, dan warga negara yang baik. Peran Kemendiknas dalam pendidikan karakter adalah mengeluarkan kebijakan yang efektif terkait dengan tujuan pendidikan tersebut guna dijadikan pedoman pelaksanaannya secara nasional, melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan serta hasilnya dalam periode tertentu.

5.3.3.4 Upaya Mewujudkan Peran Dinas Pendidikan Meningkatkan Efektivitasnya.

Sebagai elemen penting dalam penyelenggaraan pendidikan menengah maka peran Dinas Pendidikan pun strategis pula. Terdapat beberapa peran Dinas Pendidikan yakni : Menambah Piranti Telekomunikasi Mutakhir dalam Taman Pintar di lingkungan pendidikan menengah. Dengan menempatkan perangkat komunikasi tercanggih. Dengan piranti komunikasi ini diharapkan bisa membantu pengunjung taman pintar agar bisa mengikuti perkembangan terbaru. Teknologi telekomunikasi dan informasi begitu cepat berkembang, setiap tahun pasti ada saja yang baru dan langsung bisa diterapkan dalam layanan telekomunikasi. Dalam pembangunan Taman Pintar di lingkungan pendidikan menengah bisa memungkinkan pengunjung melakukan *video call*, *chatting*, *email*, *browsing*, dan *edugames*. Teknologi telekomunikasi dan informasi sudah mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dari pejabat, pengusaha, pedagang, dan anak-anak sekolah. Mereka menggunakan ponsel sebagai media telekomunikasi.

a. Meningkatkan Peran Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat.

Dalam rangka menjabarkan kebijakan Kemendiknas maupun Dinas Pendidikan maka peran Suku Dinas Pendidikan wilayah Jakarta Barat memiliki peran yang penting

⁸².Diunduh dari <http://www.scribd.com/doc/45294714/2-Konsep-pendidikan-karakter>

dalam meningkatkan mutu pendidikan. Guna mendukung peran tersebut maka ditetapkan keputusan Kepala Sudin Pendidikan untuk diimplementasikan oleh sekolah-sekolah.

b. Usaha Promotif. Usaha-usaha promotif dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan pembinaan dan pengembangan lingkungan sekolah bebas narkoba, pembinaan dan pengembangan pola hidup sehat, beriman, kegiatan positif, produktif, konstruktif dan kreatif.

c. Membangun komunikasi, Informasi dan Pendidikan Pencegahan. Pencegahan penyalahgunaan narkoba terutama diarahkan kepada generasi muda pelajar. Penyalahgunaan sebagai hasil interaksi individu yang kompleks dengan berbagai elemen dari lingkungannya, terutama dengan orang tua, sekolah, lingkungan masyarakat dan pelajar serta kaum muda lainnya, karena itu informasi dan pendidikan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap dilaksanakan.

5.3.3.5 Upaya Mewujudkan Peran Kepala Sekolah Lebih Optimal Sebagai Pengelola Lembaga pendidikan. Dalam konteks Manajemen Berbasis sekolah maka Kepala Sekolah memiliki otonomi dalam pengelolaan sekolah. Perlunya Kepala Sekolah membangun kapasitas warga sekolah baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan. Dengan kapasitas tambahan keterampilan melakukan pencegahan narkoba bagi pelajar maka pencegahan narkoba di lingkungan pendidikan akan lebih efektif. Peran kepala sekolah adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pendidikan dikatakan bermutu apa bila prosentase kelulusan yang tinggi, banyaknya lulusan yang diterima di perguruan tinggi, kondisi sekolah yang aman, nyaman dan kondusif, bersih dan bebas dari penyalahgunaan narkoba, tenaga pendidik yang berkualitas, adanya umpan balik dalam bentuk kepercayaan masyarakat dan orang tua meningkat. Semakin kecil prosentase pelanggaran peserta didiknya. Dalam (Depdiknas, 2006) terdapat tujuh peran utama Kepala Sekolah yaitu :

a. Sebagai *educator* (pendidik). Kegiatan belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan dan guru merupakan pelaksana dan pengembang utama kurikulum di sekolah. Kepala sekolah yang menunjukkan komitmen tinggi dan fokus terhadap

pengembangan kurikulum dan kegiatan belajar mengajar di sekolahnya tentu saja akan sangat memperhatikan tingkat kompetensi yang dimiliki gurunya, sekaligus juga akan senantiasa berusaha memfasilitasi dan mendorong agar para guru dapat secara terus menerus meningkatkan kompetensinya, sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berjalan efektif dan efisien.

b. Sebagai manajer. Dalam mengelola tenaga kependidikan, salah satu tugas yang harus dilakukan kepala sekolah adalah melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan pengembangan profesi para guru. Dalam hal ini, kepala sekolah seyogyanya dapat memfasilitasi dan memberikan kesempatan yang luas kepada para guru untuk dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan, baik yang dilaksanakan di sekolah, *in house training*, diskusi profesional dan sebagainya, atau melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan di luar sekolah, seperti kesempatan melanjutkan pendidikan atau mengikuti berbagai kegiatan pelatihan yang diselenggarakan pihak lain.

c. Sebagai administrator. Khususnya berkenaan dengan pengelolaan keuangan, bahwa untuk tercapainya peningkatan kompetensi guru tidak lepas dari faktor biaya. Seberapa besar sekolah dapat mengalokasikan anggaran peningkatan kompetensi guru tentunya akan mempengaruhi terhadap tingkat kompetensi para gurunya.

d. Sebagai supervisor. Untuk mengetahui sejauh mana guru mampu melaksanakan pembelajaran, secara berkala kepala sekolah perlu melaksanakan kegiatan supervisi, yang dapat dilakukan melalui kegiatan kunjungan kelas untuk mengamati proses pembelajaran secara langsung, terutama dalam pemilihan dan penggunaan metode, media yang digunakan dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran (E. Mulyasa, 2004). Dari hasil supervisi ini, dapat diketahui kelemahan sekaligus keunggulan guru dalam melaksanakan pembelajaran, tingkat penguasaan kompetensi guru yang bersangkutan selanjutnya diupayakan solusi, pembinaan, dan tindak lanjut tertentu sehingga guru dapat memperbaiki kekurangan yang ada sekaligus mempertahankan keunggulannya dalam melaksanakan pembelajaran. Jones dkk. Sebagaimana disampaikan oleh Sudarwan Danim (2002) bahwa menghadapi kurikulum yang berisi perubahan-perubahan yang cukup besar dalam tujuan, isi,

metode, dan evaluasi pengajarannya, sudah sewajarnya kalau para guru mengharapkan saran dan bimbingan dari Kepala Sekolah mereka.

e. Sebagai *leader* (pemimpin). Gaya kepemimpinan kepala sekolah seperti apakah yang dapat menumbuh-suburkan kreativitas sekaligus dapat mendorong terhadap peningkatan kompetensi guru. Dalam teori kepemimpinan setidaknya kita mengenal dua gaya kepemimpinan yaitu kepemimpinan yang berorientasi pada tugas dan yang berorientasi pada manusia. Dalam rangka meningkatkan kompetensi guru, seorang kepala sekolah dapat menerapkan kedua gaya kepemimpinan tersebut secara tepat dan fleksibel, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan yang ada. Kepemimpinan seseorang sangat berkaitan dengan kepribadian dan kepribadian kepala sekolah sebagai pemimpin akan tercermin dalam sifat-sifat sebagai berikut : jujur; percaya diri; tanggung jawab; berani mengambil resiko dan keputusan; berjiwa besar; emosi yang stabil, dan teladan (E. Mulyasa, 2003).

f. Sebagai pencipta iklim kerja. Budaya dan iklim kerja yang kondusif akan memungkinkan setiap guru lebih termotivasi untuk menunjukkan kinerjanya secara unggul, yang disertai usaha untuk meningkatkan kompetensinya. Oleh karena itu, dalam upaya menciptakan budaya dan iklim kerja yang kondusif, kepala sekolah hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut : para guru akan bekerja lebih giat apabila kegiatan yang dilakukannya menarik dan menyenangkan; tujuan kegiatan perlu disusun dengan dengan jelas dan diinformasikan kepada para guru sehingga mereka mengetahui tujuan dia bekerja, para guru juga dapat dilibatkan dalam penyusunan tujuan tersebut; para guru harus selalu diberitahu tentang dari setiap pekerjaannya; pemberian hadiah lebih baik dari hukuman, namun sewaktu-waktu hukuman juga diperlukan; usahakan untuk memenuhi kebutuhan sosio-psiko-fisik guru, sehingga memperoleh kepuasan (modifikasi dari pemikiran E. Mulyasa tentang Kepala Sekolah sebagai Motivator, E. Mulyasa, 2003).

g. Kepala Sekolah merevitalisasi peran sekolah sebagai *wiyatamandala*. Sekolah benar-benar diposisikan sebagai tempat pendidikan selain itu tidak ada artinya sekolah menjadi steril dari kegiatan non kependidikan kegiatan.

h. Mengoptimalkan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah. Dalam pelaksanaannya Kepala Sekolah : pertama, Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Penanggulangan Narkoba. penetapan kebijakan yang jelas, tegas, dan konsisten di sekolah sangat penting. Hal ini untuk menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba di sekolah tidak dibenarkan, dan berlaku kepada semua pelajar serta personil di sekolah. Kedua, Menetapkan Kurikulum pendidikan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Muatan kurikulum ini berisi materi sebagai berikut : penyalahgunaan narkoba membahayakan semua orang; tidak menggunakan gambar yang merangsang orang untuk memperoleh dan menggunakan narkoba ilegal; materi ilmiah dan *up to date* (terbaru); materi pencegahan disesuaikan dengan umur, minat, dan kebutuhan siswa; materi pencegahan bersifat memberikan keterampilan yang dapat memperbaiki kualitas kesehatan. Ketiga, Memberikan pelatihan kepada para guru tentang pencegahan narkoba dengan tujuan untuk : Menguasai materi penyalahgunaan narkoba; memiliki keterampilan menggunakan tehnik dan metode belajar mengajar yang menarik untuk materi penyalahgunaan narkoba; mengetahui gejala-gejala penyalahguna narkoba dan mampu memberikan bimbingan dan tindakan yang benar seperti memberikan rujukan kepada pelajar yang menunjukkan tanda-tanda penyalahgunaan narkoba. Keempat, Menumbuhkan kesadaran para orang tua siswa/pelajar untuk berperanserta aktif membantu melakukan bimbingan dan pengawasan secara efektif. Kelima, Melakukan pendekatan terpadu antara sekolah dengan masyarakat dalam kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba dalam panitia pencegahan penyalahgunaan narkoba. Contoh susunan panitia pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan anggotanya meliputi unsur : Kepala sekolah, guru, Lurah, Ketua RW, Ketua RT, para siswa (ketua dan pengurus OSIS), para orang tua, Kapolsck, dokter Puskesmas, dan pengusaha. Contoh Forum Komunikasi Sekolah dan Masyarakat (FKSM) untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan anggotanta terdiri atas : Camat Kecamatan Kembangan, Kapolsek Kembangan, Danramil Kembangan, Lurah Kelurahan Kembangan, Ketaa RW. kembangan, Ketua RT 1, dan Ketua Komite Sekolah. Adapun kegiatannya meliputi : mengadakan pertemuan secara berkala, saling memberikan informasi baik lisan maupun tertulis,

mengadakan kerja sama dengan rumah sakit, mengadakan razia secara berkala, dan mengadakan penyuluhan.

Dalam konteks lembaga pendidikan, sekolah sebagai salah satu sarana pendidikan formal memerlukan dukungan dari berbagai pihak baik dari kepala sekolah dan guru, peran Dinas Pendidikan, pengawas sekolah, orangtua, dan peran aktif masyarakat sekitar sekolah. Orang tua juga tidak dapat menyerahkan sepenuhnya pendidikan anak kepada sekolah. Pendidikan anak dimulai dari pendidikan orang tua di rumah dan orang tua yang mempunyai tanggung jawab utama terhadap masa depan anak-anak mereka, sekolah hanyalah merupakan lembaga yang membantu proses tersebut. Sehingga peran aktif dari orang tua sangat diperlukan bagi keberhasilan anak-anak di sekolah. Abin Syamsuddin (2003) mengemukakan bahwa dalam pengertian pendidikan secara luas perlu didukung oleh ketersediaan guru yang ideal yang mampu berperan sebagai : pertama, Konservator (pemelihara) sistem nilai yang merupakan sumber norma kedewasaan. Inovator (pengembang) sistem nilai ilmu pengetahuan. Kedua, Transmisor (penerus) sistem-sistem nilai tersebut kepada peserta didik. Ketiga, Transformator (penterjemah) sistem-sistem nilai tersebut melalui penjelmaan dalam pribadinya dan perilakunya, dalam proses interaksi dengan sasaran didik. Keempat, Organisator (penyelenggara) terciptanya proses edukatif yang dapat dipertanggungjawabkan, baik secara formal (kepada pihak yang mengangkat dan menugaskannya) maupun secara moral (kepada sasaran didik, serta Tuhan yang menciptakannya). Kelima, Guru sebagai motivator. Peran guru dalam membangkitkan motivasi sehingga terjadi pembelajaran efektif, bukan membuat peserta didik pusing, akan tetapi bagaimana tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan mudah dan menyenangkan (M. Sobry Sutikno). Motivasi dapat diartikan sebagai daya penggerak yang ada di dalam diri seseorang untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi tercapainya suatu tujuan. Menurut Mc. Donald, motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya *feeling* dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Motivasi merupakan kondisi psikologis yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu.

Dalam kegiatan belajar, motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan, menjamin kelangsungan dan memberikan arah kegiatan belajar, sehingga diharapkan tujuan dapat tercapai. Dalam kegiatan belajar, motivasi sangat diperlukan, sebab seseorang yang tidak mempunyai motivasi dalam belajar, tidak akan mungkin melakukan aktivitas belajar. Motivasi ada dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi Intrinsik adalah jenis motivasi yang timbul dari dalam diri individu sendiri tanpa ada paksaan dorongan orang lain, tetapi atas dasar kemauan sendiri. Motivasi Ekstrinsik adalah jenis motivasi yang timbul sebagai akibat pengaruh dari luar individu, apakah karena adanya ajakan, suruhan, atau paksaan dari orang lain sehingga dengan keadaan demikian siswa mau melakukan sesuatu atau belajar.

i. Mengintegrasikan materi bahaya narkoba ke dalam implementasi manajemen pembinaan kesiswaan. Manajemen pembinaan kesiswaan merupakan bagian yang sangat penting dalam terselenggaranya pelaksanaan pendidikan. Hal ini dimaksudkan agar siswa dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia Indonesia seutuhnya sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Adapun tujuannya adalah untuk : pertama, Meningkatkan peran serta para siswa agar terlaksana pembinaan dengan baik. Kedua, Menjaga dan membina sekolah sebagai wawasan wiyata mandala adalah pandangan tentang segala sesuatu terkait dengan pendidikan di lingkungan sekolah. Ketiga, Menumbuhkan daya tangkal yang mampu menyaring pengaruh buruk yang banyak terjadi apalagi banyak sekali media yang bisa memberikan dampak negatif siswa. Keempat, Memantapkan usaha pendidikan di sekolah yang materi pembinaannya belum secara rinci tertampung di dalam kurikulum yang diselenggarakan di sekolah. Kelima, Meningkatkan apresiasi seni untuk pencapaian keselarasan hidup sebagai dasar pembentukan budi pekerti luhur. Keenam, Menumbuhkan dan membina anak didik hidup berbangsa dan bernegara. Ketujuh, Mengembangkan jiwa, semangat, serta nilai-nilai perjuangan bangsa. Kedelapan, Meningkatkan kesegaran jasmani dan daya kreasi siswa untuk memantapkan keseimbangan jasmani dan rohani. Kesembilan, Mengintegrasikan materi bahaya narkoba ke dalam Kepemimpinan OSIS. Kepemimpinan OSIS

merupakan salah satu fungsi manajemen dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dalam kerangka manajemen berfungsi sebagai motor penggerak & motivator sumber daya untuk mendinamisasikan organisasi.

j. Meningkatkan efektivitas Kegiatan Ekstrakurikuler. Kegiatan Ekstrakurikuler dilaksanakan di luar jam belajar efektif dan pada waktu libur sekolah. Pelaksanakan ekstrakurikuler ini bisa bertempat di sekolah atau di luar sekolah, secara rutin dan berkala pada waktu-waktu tertentu dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh pihak sekolah. Dan apabila diperlukan bisa menggunakan pelatih dari tenaga ahli baik dari dalam/luar sekolah. Fungsi ekstra kurikuler adalah untuk aktualisasi diri, penyaluran bakat dan minat (hobi). Pengembangan kreativitas, pengembangan dan penguasaan ilmu pengetahuan, penanaman nilai-nilai kebangsaan sebagai salah satu persyaratan kenaikan kelas. Adapun Struktur ekstrakurikuler: Wajib (Rohani Islam, Rohani Katolik, Rohani Kristen Protestan, Rohani Hindu, dan Rohani Budha). Pilihan (Palang Merah Remaja, Paskibra, dan Pramuka) Hobi (olahraga, kesenian, dan pecinta alam, dll)

k. Menerapkan kombinasi antara model pendidikan dan penegakan asturan hukum (*rule of law enforcement*). Kombinasi kedua pendekatan yakni upaya mendidik dan memberikan hukuman terhadap anak didik yang melakukan pelanggaran diterapkan bagi pelajar SLTA. Dalam proses pendidikan sekolah perlu menegakkan aturan hukum (disiplin) sebagai upaya menciptakan kondisi yang menyenangkan untuk belajar.⁸³ Disiplin diartikan sebagai pengendalian diri sehubungan dengan proses penyesuaian diri dan sosialisasi. Hal ini merupakan faktor positif dalam hidup, sebagai perkembangan pengawasan dari dalam yang menuntut seseorang ke arah pola perilaku yang normatif. Disiplin anak didik merupakan suatu keadaan sikap, penampilan dan tingkah laku anak didik sesuai dengan tatanan nilai, norma dan ketentuan yang berlaku di sekolah. Proses sosialisasi dibutuhkan anak didik untuk membawa kearah pemenuhan apa yang dihadapkan oleh lingkungannya dari dirinya

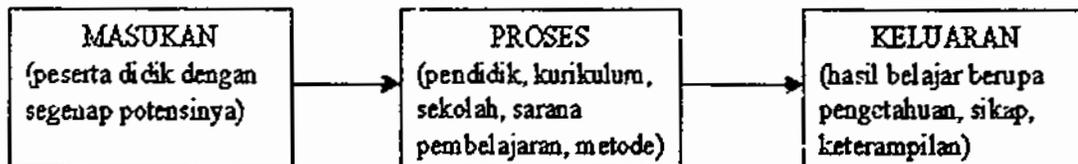
⁸³.Pembinaan dalam menanamkan Kedisiplinan dan Pemberian Hukuman pada Anak Didik oleh Tina Rahmawati, M.Pd, diunduh dari <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/Pembinaan%20dalam%20kedisiplinan.pdf>

yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat. Sekolah harus bertindak tegas untuk bisa mengkondisikan lingkungan sekolah menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak didik. Tujuan aturan disiplin anak didik adalah untuk mengontrol tingkah laku anak didik seperti yang dikehendaki, agar tugas-tugas di sekolah dapat berjalan dengan optimal. Selain itu anak didik belajar hidup dengan pembiasaan yang baik, positif dan bermanfaat bagi diri dan lingkungannya, sehingga kualitas pertumbuhan anak didik meningkat. Menurut Utami Munandar (2002:104) cara yang bisa pendidik lakukan adalah dengan cara proses imitasi (peniruan), identifikasi (keteledanan) dan internalisasi (penyerapan) anak secara berangsur-angsur belajar mengenai nilai-nilai sosial dan susila sebagai pedoman tingkah laku.

Pembentukan perilaku anak yang dilandasi pengetahuan yang cukup dan nilai-nilai moralitas yang kuat maka akan berdampak pada perilaku berdaya tahan kuat menghadapi permasalahan hidup. Salah satu permasalahan adalah menghadapi ancaman bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Pendidikan⁸⁴ pada hakekatnya berlangsung seumur hidup (*lifelong education*), keluarga, masyarakat, dan pemerintah bertanggungjawab atas pendidikan, dan pendidikan merupakan keharusan. Pendidikan pada hakekatnya mencakup kegiatan mendidik, mengajar, dan melatih. Pendidikan merupakan kegiatan mengolah hati anak didik sedangkan pengajaran adalah kegiatan mengolah otak anak didik. Dalam pelatihan berisi kegiatan mengolah keterampilan aspek psiko-motorik. Kegiatan mentransformasikan nilai-nilai mencakup nilai-nilai religi, budaya, pengetahuan, teknologi, dan keterampilan.

Lembaga pendidikan memiliki peran untuk mempengaruhi anak didik agar berperilaku sesuai dengan tujuan pendidikan. Dalam implementasinya lembaga pendidikan membimbing, dan membantu secara terprogram agar mereka menjadi lebih dewasa, bertanggungjawab, dan mandiri. Sebagai suatu sub-sistem pendidikan dapat digambarkan sebagai berikut:

⁸⁴.Menurut Munib, Achmad. 2009. *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Semarang: Unnes Press diunduh dari http://moshimoshi.netne.net/materi/ilmu_pendidikan/bab_2.htm



Unsur-unsur pendidikan yakni peserta didik, pendidik, dan tujuan. Menurut Langeveld,⁸⁵ pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju kepada pendewasaan anak itu, atau lebih tepat membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Pengaruh itu datangnya dari orang dewasa atau melalui sekolah, buku, pengalaman hidup sehari-hari, dan sebagainya, dan ditujukan kepada orang yang belum dewasa. Tujuan yang berakar dari tujuan hidup yaitu membentuk manusia yang dewasa, bersusila, mandiri, dan bertanggungjawab.

Dalam pembentukan karakter diri setiap anak, maka belajar adalah suatu bagian dari pengalaman kehidupan yang secara berkumulatif menyerap ke dalam sifat-sifat karakter. Pendidikan sangat mempengaruhi terhadap mental dan karakter anak, baik itu berdampak pada kepatuhan ataupun perlawanan anak. Untuk itu yang perlu dipertimbangkan oleh lembaga pendidikan adalah adanya kebutuhan bio-fisik guna penyesuaian jasmani yang sehat, seperti kebutuhan terhadap udara yang bersih, kebutuhan terhadap gerakan, aktivitas, dan istirahat. Di sinilah letak fungsi strategis sekolah sebagai wiyata mandala, tempat memberikan pelayanan anak didik untuk mendapatkan kematangan jasmani dan psikologis anak dalam proses transformasi nilai-nilai serta ilmu pengetahuan.

Maka dari itu seseorang memerlukan motivasi dan penggerak untuk melakukan suatu pekerjaan hingga berlanjut pada masa tertentu. Sekolah dengan dukungan komponennya menjadikan metode dan teknik pendidikannya sebagai penggerak bagi motivasi-motivasi anak didiknya sehingga dapat menggali dan mengembangkan potensi diri anak didik dan mengaktualisasikannya. Lembaga

⁸⁵. Diunduh dari http://id.wikipedia.org/wiki/Dasar_Pendidikan#Langeveld

pendidikan dituntut untuk mampu menjaga perubahan sesuai dengan tuntutan yang berlaku dalam tatanan sosial dengan mengambil manfaat dari fasilitas dan peluang-peluang yang ada didalamnya dengan didasari atas metode pendidikan yang tepat.

Sebagaimana dituangkan dalam penataan sekolah sebagai wiyata mandala :

” Siswa SMA/SMK sebagai kelompok masyarakat usia muda memiliki idealisme tinggi dan semangat dinamis yang apabila tidak diarahkan dengan baik dapat menjurus ke hal-hal yang negatif. Pada kondisi tersebut siswa SMA/SMK dapat menjadi sasaran pemanfaatan dan sasaran pembinaan oleh unsur-unsur tertentu dalam rangka menciptakan situasi yang menguntungkan mereka, dengan demikian sekolah akan dihadapkan pada sejumlah ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar.”⁸⁶

Suasana nyaman bisa terwujud apabila guru mampu menerapkan pengelolaan anak didik yang baik. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan tersebut menurut Arief Rachman (2002:138) adalah : Partisipasi aktif dalam kelas; Manajemen sekolah; Adanya suasana kompetisi yang sehat; Menghargai kerja keras; Kemandirian akademis; Merasa sama kedudukan antar siswa; Menghormati sesama teman; Suasana demokratis harus muncul dalam kelas; Hubungan guru-murid adalah hubungan akademis, tetapi memperhatikan kaidah-kaidah, dan sopan santun. Semua kegiatan ini bermuara untuk memperbaiki martabat diri, keluarga dan masyarakat.

Penegakan aturan hukum dan disiplin dilakukan oleh lembaga pendidikan secara tegas, konsisten, adil, dan bertanggungjawab untuk menanamkan karakter anak didik. Semua warga sekolah menjalankan aturan normatif atau melakukan dengan mendasarkan diri pada norma aturan yang berlaku di sekolah. Menurut Utami Munandar (2002:103) pemberian hukuman perlu dipertimbangkan kemungkinan-kemungkinan dampak negatifnya yaitu :

⁸⁶.Keputusan kepala dinas pendidikan menengah dan tinggi Provinsi DKI Jakarta Nomor 520.1 /2007 Tentang Penataan Wiyata Mandala di SMA/SMK dalam lingkungan dinas pendidikan menengah dan tinggi Provinsi DKI Jakarta.

“1. Pemberian hukuman tidak menunjang perkembangan dan kendali diri pada anak, karena bisa jadi anak tidak belajar dari kesalahannya dan tidak belajar memikul tanggung jawab sendiri untuk mengendalikan diri. 2. Pemberian hukuman dapat memberikan model yang negatif, penerimaan suatu perilaku dapat diterima anak tergantung dari siapa yang melakukannya. 3. Pemberian hukuman dapat menimbulkan *agresivitas* jika seseorang disakiti, baik secara fisik atau mental maka ia akan memberontak. 4. Pemberian hukuman dapat menimbulkan *aversi* (menentang) terhadap orangtua atau terhadap sekolah dan belajar. Keuntungan dengan adanya penghukuman pada anak didik antara lain dapat menghentikan dengan segera tingkah laku anak didik yang menyimpang, memberi petunjuk kepada anak didik mengenai tingkah laku yang dapat diterima.”

Pemberian hukuman diberikan bagi anak didik yang berperilaku menyimpang dari ketentuan dan bila tidak dapat dihindarkan lagi setelah dengan cara-cara mendidik telah ditembus. Hukuman dimaknai sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan yang harus diterima atau dikerjakan anak didik karena bertingkah laku tidak pada tempatnya. Hukuman sebagai salah satu penunjang untuk tegaknya aturan disiplin. Teori perubahan perilaku melalui penggunaan perangsang yang tidak menyenangkan disebut penghukuman. Pendekatan penghukuman ini dianggap bermanfaat bila segera untuk menghentikan, menghilangkan penampilan tingkah laku yang tidak disukai untuk segera dan sambil melaksanakan sistem penguatan yang tepat bagi kelayakan penampilan perilaku tertentu yang disukai. Menurut Drost (1997: 45) para penganut pendekatan ini yakin bahwa tindakan tersebut efektif untuk membina tingkah laku anak didik dalam lingkungan sekolah, memperlihatkan persetujuan atas tingkah laku yang disukai merupakan kunci dalam pengelolaan lingkungan sekolah melalui perubahan perilaku.

Pemberian hukuman harus mampu memperbaiki diri anak menjadi lebih baik, bertanggung jawab, dan kesadaran diri terbentuk dalam benak anak. Hukuman yang dilakukan secara tidak tepat akan merugikan anak didik anak didik antara lain menyebabkan anak didik menarik diri sama sekali, menyebabkan anak didik agresif,

menimbulkan reaksi negatif pada diri anak atau terhadap suasana di luar dirinya. Bentuk hukuman yang mendidik dapat diberikan antara lain pengurangan nilai, misalnya dikenakan kepada anak didik yang terlambat, tidak melengkapi/mengerjakan tugas. Pencabutan hak anak didik, denda, mengurangi nilai bisa diberikan agar anak bisa lebih disiplin. Apabila ada pelanggaran yang sifatnya lebih serius maka guru dapat menyerahkan masalahnya kepada kepala sekolah.

Dengan uraian diatas menjadi jelaslah bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan aturan sebagai pedoman perilaku dalam bagi seluruh warga sekolah yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh sekolah untuk menjamin berfungsinya aturan-aturan tersebut.

Bila ditinjau dari karakteristik pelajar SLTA di Jakarta Barat dalam pencegahan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba maka diperlukan kombinasi penerapan pendidikan dan penegakan aturan. Dalam pendewasaan perilaku pelajar yang mengedepankan nilai-nilai koqnitif, afektif, dan psiko-motorik diperlukan penerapan aturan hukum secara tegas, konsisten, adil dan bersifat mendidik memotivasi perubahan perilaku. Pelanggaran sekecil apapun harus diberikan sanksi secara tepat dan mendidik. Misalnya pelanggaran disiplin terlambat masuk kelas, tertangkap merokok di lingkungan sekolah, menyontek, melakukan tawuran dengan sesama pelajar, terlibat perkelaian dengan teman sekolah, dan menjadi penyalahgunaan narkoba. Penindakan tegas dan konsisten akan membawa pengaruh yang efektif dalam menanamkan nilai-nilai perilaku dewasa, kepatuhan, dan bertanggungjawab.

5.3.3.6 Upaya Mewujudkan Peran Guru BK Meningkatkan Efektivitasnya.

a. Memberikan pembimbingan kepada pelajar yang bermasalah hingga mampu menemukan jati dirinya sehingga menjadi pelajar yang terarah kembali. Melakukan kerjasama dengan institusi terkait untuk melakukan sosialisasi tentang Bahaya narkoba dan upaya penanggulannya. Memahami permasalahan secara garis besar tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dapat dibagi dalam 2 kelompok, yaitu

dampak khusus dan dampak umum. Pada dampak khusus, misalnya dampak dalam penggunaan ganja. Dampak fisik meliputi denyut nadi meningkat, mata merah dan kering, mengantuk, radang paru-paru, sesak nafas, menimbulkan penyakit kanker. Dampak psikis : perasaan tertekan, agresif, rasa gembira berlebihan (*euphoria*), halusinasi, berkurangnya daya ingat, terjadi gangguan persepsi tentang ruang dan waktu, menurunnya kemampuan berfikir serta bersosialisasi. Sementara dampak umumnya adalah terhadap individu, terhadap orang tua dan keluarga dan terhadap masyarakat dan bangsa. Dampak terhadap individu dapat menimbulkan gangguan terhadap kesehatan fisik (keracunan, gejala putus obat/sakauw, kerusakan otak, jantung, paru-paru, hati, ginjal, organ reproduksi sampai kematian yang sia-sia, menimbulkan gangguan psikis (gelisah, cemas, takut, curiga dan waspada berlebihan, paranoid, depresi, euphoria, agresif dan gangguan daya ingat, menimbulkan gangguan bersosialisasi dan tidak punya semangat belajar/bekerja, menimbulkan gangguan ketenangan dan ketentraman dalam keluarga dan masyarakat dan penggunaan narkotika dengan jarum suntik dapat menimbulkan resiko tertular HIV/AIDS, Hepatitis B, C maupun penyakit infeksi lainnya. Dampak terhadap orang tua dan keluarga dapat menghancurkan ekonomi orang tua/keluarga dan menimbulkan beban psikologis/sosial yang sangat berat bagi orang tua dan keluarga. Dampak terhadap masyarakat dan bangsa dapat menurunkan kualitas SDM, menambah beban biaya negara dalam rangka untuk membiayai program penanggulangan bahaya narkotika dan menimbulkan gangguan terhadap ketertiban maupun keamanan masyarakat dan bangsa.

b. Melakukan Pembimbingan Kepada pelajar. Dalam rangka membimbing dan mengarahkan perkembangan remaja perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut : Pertama, Sikap dan tingkah laku. Tujuan dari suatu perkembangan remaja pelajar secara umum adalah merubah sikap dan tingkah lakunya, dari cara yang kekanak-kanakan menjadi cara yang lebih dewasa. Sikap kekanak-kanakan seperti mementingkan diri sendiri (egosentrik), selalu menggantungkan diri pada orang lain, menginginkan pemuasan segera, dan belum mampu mengontrol perbuatannya, diproses melalui pembinaan agar menjadi mampu memperhatikan orang lain, berdiri

sendiri, menyesuaikan keinginan dengan kenyataan yang ada dan mengontrol perbuatannya sehingga tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Untuk itu dibutuhkan perhatian dan bimbingan orang tua dalam bentuk penghargaan dan bukan kritik dan celaan. Kedua, Emosional. Untuk mendapatkan kebebasan emosional, remaja mencoba merenggangkan hubungan emosionalnya dengan orang tua, mereka harus dilatih dan dibimbing untuk memilih dan menentukan keputusannya sendiri. Usaha ini biasanya disertai tingkah laku memberontak atau membangkang. Dalam hal ini diharapkan pengertian orang tua untuk tidak melakukan tindakan yang bersifat menindas, akan tetapi berusaha membimbingnya secara bertahap. Bila suasana lingkungan tersebut kurang educatif maka dapat menjerumuskannya ke dalam kenakalan, tumbuhnya jiwa pemberontak termasuk menjadi penyalahguna narkoba. Ketiga, Mental - intelektual. Dalam perkembangannya mental - intelektual diharapkan remaja dapat menerima emosionalnya dengan memahami mengenai kelebihan dan kekurangan dirinya. Dengan begitu ia dapat membedakan antara cita-cita dan angan-angan dengan kenyataan sesungguhnya. Pada mulanya daya pikir remaja banyak dipengaruhi oleh fantasi, sejalan dengan meningkatnya kemampuan berpikir secara abstrak. Pikiran yang abstrak ini seringkali tidak sesuai dengan kenyataan yang ada dan dapat menimbulkan kekecewaan dan keputusasaan. Untuk mengatasi hal ini dibutuhkan bantuan guru, orang tua, dan teman sebaya dalam menumbuhkan pemahaman diri tentang kemampuan yang dimilikinya berdasarkan kemampuan yang dimilikinya tersebut. Keempat, Sosial. Untuk mencapai tujuan perkembangan, remaja harus belajar bergaul dengan semua orang, baik teman sebaya atau tidak sebaya, maupun yang sejenis atau berlainan jenis. Adanya hambatan dalam hal ini dapat menyebabkan ia memilih satu lingkungan pergaulan saja misalnya suatu kelompok tertentu dan ini dapat menjurus ke tindakan penyalahgunaan zat. Sebagaimana kita ketahui bahwa ciri khas remaja adalah adanya ikatan yang erat dengan kelompoknya. Hal ini menimbulkan ide, bagaimana caranya agar remaja memiliki sifat dan sikap serta rasa (Citra: disiplin dan loyalitas terhadap teman, orang tua dan cita-citanya. Selain itu juga kita sebagai orang tua dan guru, harus mampu menumbuhkan suatu Budi Pekerti/Akhlak yang luhur dan mulia; suatu keberanian

untuk berbuat yang mulia dan menolong orang lain dan menjadi teladan yang baik. Kelima, Pembentukan identitas diri. Akhir suatu perkembangan remaja adalah pembentukan identitas diri. Pada saat ini segala norma dan nilai sebelumnya merupakan sesuatu yang datang dari luar dirinya dan harus dipatuhi agar tidak mendapat hukuman, berubah menjadi suatu bagian dari dirinya dan merupakan pegangan atau falsafah hidup yang menjadi pengendali bagi dirinya. Untuk mendapatkan nilai dan norma tersebut diperlukan tokoh identifikasi yang menurut penilaian remaja cukup di dalam kehidupannya. Keenam, Mendorong para orang tua pelajar untuk meningkatkan peranan pentingnya dalam proses identifikasi ini, karena mereka dapat membantu remajanya dengan menjelaskan secara lebih mendalam mengenai peranan agama dalam kehidupan dewasa, sehingga penyadaran ini memberikan arti yang baru pada keyakinan agama yang telah diperolehnya. Untuk itu maka apa yang diharapkan dari remaja harus dapat dilaksanakan terlebih dahulu oleh orang tua dan guru, seperti beribadah dan mengunjungi tempat ibadah sesuai dengan iman dan kepercayaannya. Ketujuh, Guru BK memberikan pelatihan dengan disertai contoh agar pelajar bimbingannya memiliki keterampilan untuk dengan tegas dan bijaksana menolaknya. Misalnya dengan mengatakan : “Maaf saya tidak tertarik”, “Untuk yang satu ini... *sorry* deh, aku nggak bisa.” Dengan menatap matanya, bersikap tenang, cepat berlalu dan katakan: “Aku ada urusan lain”, “Maaf aku harus les dulu”, “Aku ditunggu Ibu/Bapa”. Selain itu perlunya keterampilan pelajar untuk mengganti topik pembicaraan sehingga fokus pembicaraan beralih bukan membicarakan narkoba lagi.

5.3.3.7 Upaya Mewujudkan Peran Dewan Pendidikan Optimal. Memberdayakan Dewan Pendidikan dalam perannya sebagai mitra sekolah. Dewan pendidikan bersama perangkat lembaga pendidikan SLTA memberikan masukan pemikiran dan langkah solusi guna mewujudkan perannya membantu lembaga pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan tersebut.

a. Dengan mempelajari gejala-gejala negatif yang dimiliki anak remaja pada umumnya, orang tua dan pendidik akan dapat menyadari dan melakukan upaya

perbaikan perlakuan sikap terhadap anak dalam proses pendidikan formal, non formal dan informal. Dewan Pendidikan memiliki peran memberi pertimbangan (*advisory body*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, pendukung (*supporting agency*) baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan, pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi, akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan.

a. Memberikan masukan sebagai pertimbangan, saran, dan kontrol yang telah dilakukan oleh Dewan Pendidikan perlu mendapatkan respons bukan hanya dianggap sebagai pelengkap saja oleh pengambil kebijakan. Pemahaman tentang kebijakan kriminal (*criminal policy*), upaya penanggulangan dan pencegahan kejahatan perlu digunakan pendekatan integral, yaitu perpaduan antara sarana penal dan non penal. Sarana penal adalah hukum pidana melalui kebijakan hukum pidana. Sementara non penal adalah sarana non hukum pidana, yang dapat berupa kebijakan ekonomi, sosial, budaya, agama, pendidikan, teknologi, dan lain-lain.

b. Melakukan pencegahan kejahatan narkoba ini memerlukan pendekatan integral dikarenakan hukum pidana tidak akan mampu menjadi satu-satunya sarana dalam upaya penanggulangan kejahatan narkoba yang begitu kompleks dan terjadi di masyarakat. Pemahaman ini diperlukan oleh Dewan pendidikan sebagai advisor lembaga pendidikan. Berbagai upaya preventif dengan pendekatan agama, pendidikan, sosial budaya dan ekonomi perlu dioptimalkan dibandingkan pendekatan hukum karena lebih bersifat represif.

Melalui peran lembaga pendidikan yang melibatkan komponen lembaga pendidikan yakni kepala sekolah, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, Dewan Pendidikan, dan Komite Sekolah serta peran serta aktif peserta didik dalam proses pendidikan maka harapan terwujudnya perilaku pelajar SLTA yang berkualitas unggul dapat tercapai.

5.3.3.8 Upaya Mewujudkan Peran Komite Sekolah Optimal.⁸⁷ Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia

⁸⁷. Sumber diunduh dari <http://sutamto.wordpress.com/2010/04/21/peranan-komite-sekolah-dalam-meningkatkan-mutu-pendidikan/>

dan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri.

a. Membangkitkan kesadaran para orang tua dan *stake holders* untuk menyadari pentingnya proses peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka Pemerintah telah berupaya mewujudkan amanat tersebut melalui berbagai usaha pembangunan pendidikan yang lebih berkualitas melalui pengembangan dan perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi, perbaikan sarana pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi ajar, serta pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya. Tetapi kenyataan belum cukup dalam meningkatkan kualitas pendidikan (Depdiknas, 2001:2). Komite Sekolah memberi masukan yang berisi gagasan-gagasan inovatif kepada sekolah demi kemajuan pendidikan.

b. Mendukung penyelenggaraan pekan kreativitas pelajar. *Student Day 2* yang diadakan Musyawarah Guru Bimbingan Konseling (MGBK) dan Suku Dinas Pendidikan Menengah (Sudin Dikmen) Jakarta Barat.⁸⁸ Dalam kegiatan ini ditekankan tentang makna sekolah merupakan wahana pendidikan yang merupakan aspek pokok dalam membentuk skill, wawasan dan *attitude* positif anak didik agar menjadi generasi muda yang bermanfaat bagi bangsa. Kegiatan seperti ini merupakan kegiatan rutin tahunan yang telah dimulai pada tahun 2009. Kegiatan tahunan ini dihadiri hingga enam ribu pelajar SMA dan SMK di Jakarta Barat, dengan tujuan untuk mengasah kreatifitas pelajar.

c. Mendukung penyelenggaraan pertandingan olah raga dan perlombaan seni serta karya kreativitas pelajar. Sejumlah perlombaan digelar dalam pergelaran *Student Day 2* ini. Di antaranya adalah lomba majalah dinding (Mading) dan Paduan Suara. Selain itu siswa juga diberikan kesempatan menampilkan berbagai kreativitas lain.

d. Membangun partisipasi Masyarakat. Upaya pencegahan narkoba berbasis masyarakat, sebagai upaya untuk menggugah, mendorong dan menggerakkan masyarakat untuk sadar, peduli, dan aktif dalam melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Terciptanya lingkungan sehat dan

⁸⁸. Sumber data diunduh dari http://www.tempointeraktif.com/hg/layanan_publik/2010/02/24/brk,20100224-228163.id.html

bersih dari peredaran gelap narkoba akan berdampak positif bagi pencegahan narkoba bagi pelajar. Suksesnya strategi ini sangat tergantung pada partisipasi masyarakat dalam usaha-usaha promotif, edukasi preventif, dan penanganan golongan beresiko tinggi. Kekuatan-kekuatan didalam masyarakat dimobilisir untuk secara aktif menyelenggarakan program-program di bidang-bidang tersebut di atas.

5.3.3.9 Upaya Mewujudkan Peran Pelajar Meningkatkan Efektivitasnya.

Dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar selain aturan-aturan terhadap penyalahguna maupun pengedar, maka diperlukan pula adanya pembinaan mental pelajar. Untuk itu peran pendidik di lingkungan sekolah sangat penting dan sentral, di samping peran keluarga dan masyarakat.

a. Pelajar merupakan bagian integral masa depan komponen bangsa yang potensial dalam penyiapan kader-kader pemimpin masa depan bangsa. Untuk itu para pelajar di lingkungan pendidikan menengah dioptimalkan perannya dalam mencegah penyalahgunaan narkoba melalui kegiatan dan aktivitas. Proses pendidikan sangat membuka kemungkinan terjadinya perubahan perilaku. Mengutip pernyataan guru BK SMAK I Penabur :

“Pembentukan manusia ke tahap dewasa, mereka ini masih labil kalau di sekolah dididik, diberi nilai-nilai positif untuk mereka yang sudah bagus harapannya jadi lebih bagus, dan itu bisa. Ada juga di rumah kurang bagus di sekolah bisa menjadi lebih bagus. Mudah-mudahan memberi pengaruh yang baik bagi keluarga.”

b. Mengoptimalkan Unit Kegiatan Pelajar (UKP) Antinarkoba baik pada tataran ilmiah maupun pada tataran praktik di lapangan, membentuk kelompok-kelompok pendidik sebaya yang bertugas membantu mensosialisasikan bahaya penyalahgunaan narkoba dan mendorong terbentuknya aktifitas dalam lingkungan pendidikan sebagai latihan tanggung jawab. Pengembangan pusat informasi dan konseling masalah penyalahgunaan narkoba bagi pelajar.

- c. Mengoptimalkan para pelajar dalam perannya melalui berkomunikasi efektif, karena para pelajar pun mampu menjadi penyuluh yang baik bagi teman sebayanya, akan mampu memahami intelektual dan emosi dalam waktu yang bersamaan.
- d. Melakukan pembentukan kader anti narkoba di lingkungan pendidik sekolah menengah. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung peran pelajar membentengi diri dari penyalahgunaan narkoba, menumbuhkan komitmen agar peduli terhadap permasalahan penyalahgunaan narkoba di lingkungannya. Selain itu dapat memberikan pengetahuan dan informasi bagi para pendidik dan pelajar untuk mewaspadaai penyalahgunaan narkoba. Guna mewujudkan pelajar berperanserta aktif melalui kegiatan pembelajaran seoptimal mungkin, mengembangkan seluruh potensi yang mereka miliki. Mengikuti berbagai program kegiatan ekstra kurikuler sesuai minatnya masing-masing. Optimalisasi potensi pelajar dengan di bawah bimbingan guru pengawas akan berdampak pada kualitas kepribadian sehingga akan menjauhkan diri dari bahaya narkoba.
- e. Melakukan pembinaan keterampilan. Kegiatan di dilakukan dalam upaya pembinaan keterampilan dan ahlak pelajar melalui : Pertama, Lomba MTQ (Musabaqoh Tilawatil Qur'an) pelajar tingkat kota madya hingga provinsi. Lomba ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan nilai-nilai keagamaan dengan harapan semakin tinggi pemahaman dan penghayatan nilai-nilai akan semakin tinggi daya tahan terhadap bahaya narkoba. Kedua, Pertandingan olah raga, lomba seni, dan bahasa pelajar SLTA. Tujuan yang hendak dicapai adalah meningkatkan kesadaran, sikap dan perilaku hidup sehat, berjiwa seni dan berkemampuan bahasa. Dengan demikian waktu luang yang ada dapat dimanfaatkan untuk melakukan persiapan sehingga mental kepribadian akan tumbuh ketahanan individu terhadap narkoba.
- f. Peran Komponen Pemerintah, Bangsa, dan masyarakat sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.1

**PROGRAM MEWUJUDKAN CITA-CITA BERSAMA INDONESIA BEBAS
NARKOBA⁸⁹ PROGRAM BERSAMA TENTANG DRUGS FREE SESUAI
KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG INDONESIA BEBAS NARKOBA TAHUN
2015.**

TAHAP	TAHUN	STATUS	INDIKATOR KUALITATIF	KETERANGAN
1	2003-2005	<i>Drugs free family</i> (keluarga bebas narkoba)	Orang tua tahu gejala dini dan jenis-jenis yang tergolong narkoba	Kemenneg PPPA. Kemendiknas, Kemendagri, dan Kemennag.
2	2006-2008	<i>Drugs free school</i> (sekolah bebas narkoba)	Sekolah bebas rokok, seluruh siswa hasil tes urine negatif, adanya kurikulum tentang narkoba, pendidikan usia dini tentang bahaya narkoba (melalui budi pekerti, agama, biologi, penjasken, pendidikan kewarganegaraan)	Kemendiknas, Kemendepkes, dan Kemennag
3	2009-2011	<i>Drug free work place.</i> (tempat kerja bebas narkoba)	Hasil tes urine karyawan dan staf negatif dari narkoba, tidak ada lagi yang merokok.	Kemenaker, Kemenkumham
4	2012-2014	<i>Drugs free community</i> (masyarakat bebas narkoba)	Tumbuhnya budaya malu, malu menggunakan narkoba, malu kalau ketahuan merokok, dan tes urine negatif dari narkoba.	Multi sektor publik dan swasta
5	2015	Indonesia bebas narkoba (mengatakan tidak pada narkoba) Telah terjadi bahan sikap dan perilaku menolak narkoba	Narkoba sebagai barang haram bagi bangsa Indonesia	Semua sektor publik dan suwasta.

⁸⁹.Sumber diambil dari materi Kuliah yang diberikan oleh Dr. dr. H. Hadiman. M.S.c kepada mahasiswa program Pascasarjana Kajian Strategik Penanganan Narkoba tahun 2010.

Dari tabel di atas maka untuk mendukung upaya mewujudkan peran lembaga pendidikan dalam pencegahan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba bagi pelajar SLTA maka seluruh komponen terkait harus melakukan evaluasi tahapan yang telah berjalan guna memacu terwujudnya Indonesia bebas dari peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba.

Tabel 5.2
INDIKATOR KUANTITATIF

TAHAP	TAHUN	STATUS	INDIKATOR	KETERANGAN
1	2003-2005	<i>Black Area</i> (daerah hitam)	3,9 %	
2	2006-2008		2,5%	
3	2009-2011			
4	2012-2014	<i>Grey Area</i> (daerah abu-abu)	2%	Sesuai dengan analisa SWOT, hukum dan pendidikan sudah berjalan sebagaimana tahapan dalam program yang dicanangkan Pemerintah bersama komponen bangsa Indonesia
5.	2015	<i>White Area</i> <i>Drugs Free</i> (daerah putih bebas narkoba)	1%	Dilakukan perhitungan sesuai dengan kebutuhan medis (narkotika, psikotropika, precursor narkotika, berapa kebutuhan yang diperlukan untuk kepentingan legal tersebut.

Institusi pemerintah bersama BNN sebagai lembaga yang dikedepankan serta seluruh institusi pemerintah dan komponen bangsa terkait serta LSM melakukan evaluasi terhadap indikator kualitatif tersebut. Melakukan tindak lanjut secara efektif guna mewujudkan Indonesia bebas dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Hal ini sangat terkait dengan peran lembaga pendidikan dalam pencegahan narkoba. apa bila tidak didukung dengan kondisi eksternal sebagaimana dalam perencanaan di atas maka lembaga pendidikan akan menghadapi beban berat.

g. Peran Serta masyarakat. Untuk mendukung program pemerintah guna terwujudnya Indonesia bebas dari narkoba maka diperlukan peran serta masyarakat dalam penanggulangan narkoba sebagaimana dikemukakan oleh Dr.dr. H Hadiman dalam kuliah Kejahatan Narkoba merupakan ancaman bagi keberadaan bangsa Indonesia sebagai berikut :

- “1. Upaya Taktis yakni : Pertama, Membangun kepedulian bahwa narkoba adalah suatu ancaman sehingga setiap anggota masyarakat harus berbuat sesuatu untuk mencegahnya. Kedua, Membuat pusat informasi guna menemukan, bertindak, melapor, dan menolong sesamanya yang menjadi penyalahguna narkoba. Ketiga, Melakukan pengawasan ketat dalam hal penyaringan, pendidikan, penempatan, dan perawatan bagi karyawan maupun pendidikan/sekolah-sekolah. Keempat, membentuk Satuan Siswa Anti Narkoba di setiap sekolah untuk membuat bola salju, membersihkan lingkungan dengan pola pengawasan berantai. Kelima, menerapkan *community development* bagi masyarakat yang telah menjadi pengedar dan penyalahguna narkoba. Keenam, mendorong terwujudnya aparat penegak hukum bersih baik dari narkoba maupun dari perbuatan menyimpang lainnya sebagai bagian gerakan masyarakat. Ketujuh, membangun dan menerapkan dalil : Kita tidak mungkin membuat dunia ini aman bagi anak-anak kita tetapi kita dapat membekali anan-anak kita keterampilan dan pengetahuan serta norma-norma sehingga akhirnya mereka dapat hidup aman di dunia ini.
2. Upaya Strategis yakni : pertama, Menyiapkan dan melatih kader-kader yang mampu membuat perencanaan strategis penanggulangan narkoba mulai dari tingkat pusat, prpvinsi, kabupaten/kota madya. Selanjutnya merekrut kader-kader dari masyarakat yang bergerak di bidang penanggulangan narkoba. Sumber daya manusia disiapkan kompetensinya setara dengan magister (S2). Kedua, Membangun program strategis melalui pendidikan sejak usia dini guna menanamkan sikap dan perilaku bahwa melakukan pelanggaran adalah sesuatu yang haram, pelanggaran merupakan cap sebagai orang asosial, orang tidak tahu adat, dan orang yang tak tahu aturan”.

BAB 6

P E N U T U P

6.1 Kesimpulan

6.1.1 Kondisi Saat Ini. Lembaga pendidikan pada saat ini telah berperan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi pelajar SLTA di Jakarta Barat, namun demikian peran tersebut belum dilakukan secara efektif mengingat masih adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di kalangan pelajar SLTA di Jakarta Barat. Dalam implementasi peran lembaga pendidikan menengah tersebut telah didukung oleh peran dari pembina fungsi kelembagaan maupun komponen pendidikan baik dalam bentuk kebijakan maupun program-program pencegahan.

6.1.1.1 BNN sebagai lembaga yang dikedepankan dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, telah menetapkan lingkungan pendidikan sebagai sasaran strategis pencegahan penyalahgunaan narkoba. Namun demikian pelaksanaannya baik melalui penyuluhan, seminar-seminar maupun pembentukan kader anti narkoba di lingkungan lembaga pendidikan menengah masih belum menyentuh keseluruhan, terprogram, dan berkelanjutan, pelaksanaan program cenderung masih bersifat sporadis.

6.1.1.2 Kemendiknas sebagai pembina fungsi kelembagaan telah berperan menetapkan kebijakan penanggulangan kenakalan pelajar yang di dalamnya termasuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Dalam hal ini kebijakan yang ada belum secara khusus tentang pencegahan narkoba dan implementasinya diserahkan kepada masing-masing lembaga pendidikan menengah melalui kebijakan pembangunan UKS, OSIS, dan penerapan manajemen berbasis sekolah.

6.1.1.3 Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Dinas Pendidikan DKI telah berperan mendukung pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi lembaga pendidikan menengah melalui kebijakan tentang Penataan Wiyata Mandala. Pelaksanaan kebijakan ini diserahkan kepada masing-masing sekolah yakni dengan membangun ketahanan sekolah. Dengan kondisi ini maka pelajar akan aman dari penyalahgunaan

narkoba selama berada di sekolah. Pembentukan Satgas Antinarkoba secara bekerjasama dengan institusi terkait.

6.1.1.4 Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat. Di dalam lembaga pendidikan telah diciptakan terjadinya proses transformasi nilai-nilai baik nilai sosial, budaya, moralitas, dan ilmu pengetahuan dilakukan secara efektif sehingga memungkinkan tumbuhkembangnya daya tahan dan kepribadian anak didik tersebut.

Dalam rangka mewujudkan kualitas hasil didik pendidikan menengah Sudin Dikmen Kota Administrasi Jakarta Barat telah melakukan perannya baik sebagai pembina maupun sebagai penyelenggara pendidikan, melalui berbagai kebijakan yang telah dituangkan dalam program yang menjadi acuan bagi operasionalisasi seluruh Sekolah Menengah Tingkat Atas. Sudin Dikmen Jakarta Barat telah menetapkan kebijakan pembinaan pelajar melalui program kegiatan pelatihan kepemimpinan OSIS, kepramukaan, dan keagamaan.

6.1.1.5 Kepala Sekolah. Program-program pembinaan kesiswaan dengan yang telah dilakukan oleh pendidikan SLTA sebagai implementasi kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah telah memacu para anak didik, tenaga pendidik dan kependidikan untuk mengembangkan potensi diri baik dari aspek olah pikir, olah rasa, olah raga dan olah hati.

6.1.1.6 Komponen Pendidikan.

a. Guru BK. Telah berperan memberikan informasi tentang bahaya narkoba bagi pelajar namun masih secara terbatas. Memberikan pembimbingan dan konseling kepada para pelajar yang bermasalah dan yang membutuhkan guna meningkatkan rasa percaya dirinya.

b. Dewan Pendidikan. telah memberikan kontribusinya sebagai mitra lembaga pendidikan menengah melalui dukungan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui perannya sebagai : pemberi pertimbangan (*advisory body*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan; pendukung (*supporting agency*) baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan; pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi, akuntabilitas penyelenggaraan serta mediator dengan *stake holder* lainnya.

c. Komite Sekolah. Sebagai mitra lembaga pendidikan menengah yang bersifat mandiri telah berperan telah memberikan kontribusinya sebagai mitra lembaga pendidikan menengah melalui dukungan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui perannya sebagai : pemberi pertimbangan (*advisory body*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan; pendukung (*supporting agency*) baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan; pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi, akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan.

d. Pelajar. Pada saat ini para pelajar telah berperan mengikuti seluruh program kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah berdasarkan proses pembelajaran dan pendidikan para pelajar telah melakukan kreativitas dan berprestasi baik di bidang sains, olah raga, dan seni, serta keagamaan.

6.1.2. Kondisi Yang Diharapkan. Kondisi yang diharapkan adalah terwujudnya peran yang optimal dari lembaga pembina fungsi, pengelola pendidikan menengah, dan komponen pendidikan. Secara bersinergi mendukung peran lembaga pendidikan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi pelajar SLTA di Jakarta Barat.

6.1.1.1 Institusi BNN sebagai lembaga yang dikedepankan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba, lebih efektif dalam melaksanakan kebijakan penetapan lingkungan pendidikan sebagai sasaran strategis pencegahan penyalahgunaan narkoba. Pelaksanaannya baik melalui penyuluhan, seminar-seminar maupun pembentukan kader anti narkoba di lingkungan lembaga pendidikan menengah harus terprogram dan mampu menyentuh sasaran dengan berorientasi kepada hasil (*outcome oriented*) melalui kepanjangan tangannya BNN Kota Jakarta Barat.

6.1.1.2 Kemendiknas sebagai pembina fungsi kelembagaan diharapkan berperan menetapkan kebijakan yang lebih khusus tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi pelajar SLTA. Adanya Kebijakan membangun kurikulum pencegahan narkoba yang terintegrasikan ke dalam mata pelajaran agama, penjaskes, biologi dan pendidikan kewarganegaraan. Meningkatnya efektivitas kebijakan UKS, OSIS, dan penerapan manajemen berbasis sekolah.

6.1.1.3 Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Dinas Pendidikan DKI diharapkan lebih efektif dalam perannya di bidang pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi lembaga pendidikan menengah melalui monitoring dan evaluasi kebijakan tentang Penataan Wiyata Mandala. Terwujudnya kinerja Satgas Antinarkoba dan terjalinnya kerja sama dengan institusi terkait dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di lembaga pendidikan menengah. Dinas Pendidikan bekerjasama dengan institusi terkait merumuskan materi pendidikan karakter yang efektif untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi anak didik. Melalui pelaksanaan pendidikan karakter yang berbasis kompetensi karakter maka akan berdampak lahirnya manusia berkarakter unggul sehingga akan memiliki daya kebal dalam menolak narkoba. Pendidikan karakter lebih berorientasi kepada aspek mental kepribadian, pengendalian diri, kejujuran, dan penanaman nilai-nilai moralitas kepada pelajar.

6.1.1.4 Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat. Lebih berperannya lembaga pendidikan dalam meningkatkan kualitas proses transformasi nilai-nilai baik nilai sosial, budaya, moralitas, dan ilmu pengetahuan, sehingga tumbuhkembangnya daya tahan dan kepribadian anak didik. Meningkatnya kualitas hasil didik pendidikan menengah di jajaran Sudin Dikmen Kota Administrasi Jakarta Barat. Terwujudnya program pembinaan karakter melalui program kegiatan pelatihan kepemimpinan OSIS, kepramukaan, dan keagamaan (lomba MTQ). Dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba seiring dengan meningkatnya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di lingkungan Jakarta Barat khususnya dan DKI Jakarta umumnya maka diharapkan ditetapkannya aturan dan program khusus dengan dukungan anggaran dan sarana prasarana yang memadai untuk melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba.

6.1.1.5 Peran Kepala Sekolah Sebagai Pengelola Pendidikan Menengah. Meningkatnya kualitas peran kepala sekolah dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui program-program pembinaan kesiswaan sebagai implementasi kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah. Kepala Sekolah mengoptimalkan perannya sebagai *manager*, *educator* (pendidik), *administrator*, *supervisor*, *leader* (pemimpin) dan efektif dalam mendorong peningkatan kompetensi guru agar mampu berorientasi

pada tugas pada manusia, sebagai pencipta iklim kerja. penanggungjawab dalam membuat steril lingkungan sekolah.

6.1.1.6 Komponen Pendidikan

- a. Guru BK. Lebih meningkatnya peran guru BK dalam memberikan informasi tentang bahaya narkoba bagi pelajar namun masih secara terbatas. Memberikan pembimbingan dan konseling kepada para pelajar yang bermasalah dan yang membutuhkan guna meningkatkan rasa percaya dirinya. Tercukupinya guru BK baik kuantitas maupun kualitasnya.
- b. Dewan Pendidikan. Adanya kontribusinya Dewan Pendidikan sebagai mitra lembaga pendidikan menengah melalui pertimbangan (*advisory body*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan; pendukung (*supporting agency*) baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan; pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi, akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan, mediator antara pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif) dengan masyarakat.
- c. Komite Sekolah. Sebagai mitra lembaga pendidikan menengah yang bersifat mandiri meningkat perannya melalui dukungan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui perannya sebagai : pemberi pertimbangan (*advisory body*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan; pendukung (*supporting agency*) baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan; pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi, akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan.
- d. Pelajar. Diharapkan pelajar lebih berperan mengikuti seluruh program pembelajaran dan kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah. Meningkatnya produk pelajar dalam mencapai prestasi baik di bidang sains, olah raga, dan seni, serta keagamaan.

6.1.3 Upaya-Upaya Yang Perlu Dilakukan. Guna mewujudkan peran lembaga pendidikan sebagaimana yang diharapkan maka perlu dilakukan berbagai upaya yang melibatkan baik kelompok pembina fungsi kelembagaan, pengelola sekolah maupun komponen pendidikan.

6.1.3.1 Institusi BNN sebagai lembaga yang dikedepankan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba perlu melakukan pembentukan kader anti narkoba di setiap sekolah, memonitor dan mengevaluasi kinerjanya. BNN memberdayakan kader-kader tersebut dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi pelajar SLTA di Jakarta Barat. Mendukung pembangunan kebijakan prevention education dan implementasi program pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui cara mengintegrasikan materi bahaya narkoba ke dalam mata pelajaran agama, penjaskes, biologi, dan pendidikan kewarganegaraan.

6.1.3.2 Kemendiknas. Melakukan evaluasi program pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi pelajar SLTA di Jakarta barat guna penentuan kebijakan selanjutnya yang relevan dan meningkatkan kualitas hasil didik hingga ke tingkat pemahaman.

6.1.3.3 Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Melakukan evaluasi kinerja Satgas anti narkoba, membangun kerja sama dan mewujudkannya dalam program kegiatan yang dilaksanakan di setiap lembaga pendidikan menengah di wilayah DKI Jakarta.

6.1.3.4 Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat.

Dalam rangka mewujudkan kualitas hasil didik pendidikan menengah Sudin Dikmen Jakarta Barat melakukan pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan melalui program pendidikan karakter bagi seluruh sekolah menengah di Jakarta Barat. Membuat kebijakan seluruh usia pelajar SLTA harus bersekolah dan berkualitas hasil didiknya. Meningkatkan efektivitas pembinaan pelajar melalui program kegiatan pelatihan kepemimpinan OSIS, kepramukaan, dan keagamaan.

6.1.3.5 Kepala Sekolah. Membuat program-program pembinaan kesiswaan yang efektif dalam mencegah penyalahgunaan narkoba sebagai implementasi kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah dan penataan sekolah sebagai wiyata mandala serta mengembangkan potensi diri seluruh warga sekolah baik aspek olah pikir, olah rasa, olah raga, dan olah hati.

6.1.3.6 Komponen Pendidikan yang terdiri atas : Guru BK perlu melakukan inovasi terhadap metode pencegahan penyalahgunaan narkoba sehingga memudahkan pemahaman dan perubahan perilaku yang efektif ; Dewan Pendidikan memberikan masukan secara efektif dan konstruktif sehingga pendidikan hingga mencapai tingkat

pemahaman ;Komite Sekolah memberikan masukan yang relevan dengan peningkatan kualitas pendidikan dengan lulusan yang berkualitas unggul ; Pelajar, melakukan usaha belajar mandiri, berkelompok, berorganisasi serta membangun kreativitas pelajar guna mengembangkan potensi diri melalui berbagai program yang disediakan di sekolah

6.2. Saran

6.2.1 Disarankan kepada Kementerian Pendidikan Nasional untuk menetapkan kebijakan tentang pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba bagi pelajar SLTA melalui :

- a. Pembentukan ketahanan individu anak didik dengan pembentukan perilaku melalui kombinasi antara pendidikan dan penerapan disiplin, pemberian hukuman yang tepat, adil, konsisten serta edukatif.
- b. Ketahanan lingkungan, dengan membangun lingkungan pendidikan menengah yang steril dari berbagai pengaruh negatif yang tak terkait dengan pendidikan.

6.2.2 Disarankan kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat untuk membuat kebijakan penerapan kurikulum bahaya narkoba secara terintegrasi ke dalam mata pelajaran Agama, Penjaskes, Biologi, dan Pendidikan Kewarganegaraan.

6.2.3 Disarankan kepada BNN agar melakukan pemberdayaan masyarakat melalui komponen pendidikan, masyarakat, dan orang tua agar mampu bersinergi dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba secara dini. Pemberdayaan ini melalui program pelatihan yang dilakukan secara berkelanjutan dengan sistem evaluasi yang efektif serta dilakukan tindak lanjut, dengan sasaran terukur yakni meningkatnya daya kehal masyarakat terhadap narkoba.

6.2.4 Disarankan kepada Kepala SLTA untuk bekerjasama dengan BNN, Kementerian Pemuda dan Olah Raga, serta Kepolisian melakukan pendekatan dan implementasi pemberdayaan masyarakat melalui model kemitraan dengan masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Pertama, Membekali para guru dan orang tua siswa untuk mengenali gejala awal perilaku pengguna narkoba. Kedua,

Membangun forum komunikasi dalam rangka kemitraan antara sekolah, dengan *stake holders* untuk melakukan pencegahan narkoba di lingkungan sekolahnya.

6.2.5 Disarankan kepada Dinas Pendidikan DKI Jakarta dengan melibatkan Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, dan Kepala Sekolah SLTA untuk mendesain dan menerapkan kurikulum bahaya narkoba secara terintegrasi ke dalam mata pelajaran Agama, Biologi, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, serta Pendidikan Kewarganegaraan untuk diterapkan di Jakarta Barat sebagai proyek percontohan.

6.2.6 Dalam rangka mendukung terciptanya lingkungan masyarakat yang bersih dari narkoba di Jakarta Barat melalui pengurangan pemasokan (*supply reduction*) disarankan kepada BNN dan Kepolisian dan institusi terkait agar meninjau kembali kebijakan penanganan kasus kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kampung Permata Kelurahan Kedaung Kaliangke, Cengkareng agar lebih efektif dan tidak berlarut-larut sehingga melahirkan efek jera kepada pengedar narkoba.



DAFTAR REFERENSI

1. Buku-Buku :

- Arikunto, Suharsimi, 1990, *Manajemen Penelitian*, penerbit Rika Cipta, Yogyakarta.
- Ary Ginanjar Agustain, 1997, *Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual*, Penerbit Arga, Bandung.
- Badan Narkotika Nasional, 2004, *Komunikasi Penyuluhan, Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*.
- Bush Tony dan Marianne Coleman, 2008, *Manajemen Strategis Kepemimpinan Pendidikan*, Banguntapan, Yogyakarta, Penerbit Ircisod.
- Colondam, Veronica, 2007, *Raising Drugs-Free Children*, Yayasan Cinta Anak Bangsa, Jakarta.
- Depdiknas. 2006. *Standar Kompetensi Kepala Sekolah TK,SD, SMP, SMA, SMK & SLB*, Jakarta : BP. Cipta Karya
- , 2006. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan*.
- Efendy, A. Prilaku Sehat, *Kebiasaan Merokok dan Minuman Keras di Kalangan Remaja Bali*, PT. Reneka Cipta, Jakarta, 2000.
- FKM-UI (Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia), 2005, *National Surveillance of Drug Abuse in Indonesia*.
- Gunarsa Singgih D at al, 1988, *Psikologi Remaja*, BPK Gunung Mulya, Jakarta.
- Goleman Daniel, 1996, *Kecerdasan Emosi Untuk Mencapai Puncak Prestasi* (Terjemahan : Alex Tri Kuntjono Widodo), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Gunarsa, S. D. (1989). *Psikologi Perkembangan: Anak dan Remaja*. Jakarta: BPK. Gunung Mulia.
- Hurlock, E.B. (1991). *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan* (Terjemahan oleh Istiwidayanti dan Soedjarwo). Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Hawari, Dadang, 2004, *Terapi (Detoksifikasi) dan Rehabilitasi (Pesantren) Mutakhir (Sistem Terpadu) Pasien Naza (Narkotik, Alkohol, dan Zat Adiktif lain)*, UI-Press, Jakarta.
- , 2006, *Penyalahgunaan dan ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol, dan Zat Adiktif)*, Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta.
- Hadiwardoyo, P.AI, MSF, 1990, *Moral dan Masalahnya*, Kanisius, Yogyakarta.
- Iskandar, Dr., M.Pd, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, penerbit GP Press.

- Isjoni. (2003, 4 November), *SMK dan Permasalahannya*, Artikel Pendidikan Network (*online*), halaman 1. Diunduh dari <http://re-searchengines.com/isjoni3.html>. (8 Desember 2007)
- James R. Rush, *Opium To Java*, 2000, penerbit Mata Bangsa
- John W. Creswell, *Research design qualitative, quantitative, and mixed approaches, second edition, printed in the USA, 2003.*
- Kartini Kartono, 1986, *Psikologi Sosial 2, Kenakalan Remaja*, Rajawali, Jakarta
- Kaufman, James, M, 1989, *Characteristics of Behaviour Disorders of Children and Youth*, Merrill Publishing Company, Columbus, London, Toronto
- Kadarmanta, A, 2008, *Antisipasi Disintegrasi Negeri Ini*, Penerbit PT. Forum Media Utama, Jakarta.
- Louise Moqvist. 2003. *The Competency Dimension of Leadership: Findings from a Study of Self-Image among Top Managers in the Changing Swedish Public Administration. Centre for Studies of Humans, Technology and Organisation, Linköping University.*
- Mongks, F. J. , Knoers, A. M. P., & Haditono, S. R. (2000). *Psikologi Perkembangan: Pengantar dalam berbagai bagiannya*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mary E. Dilworth & David G. Imig, 1995, *Professional Teacher Development and the Reform Agenda*. ERIC Digest. . (Accessed 31 Oct 2002).
- Marwansyah, & Mukaram. (2000). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Pusat Penerbit Administrasi Niaga Politeknik Negeri Bandung.
- Moleong, Ixxy J. 2004, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Rosda.
- Munib, Achmad. 2009. *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Semarang: Unnes Press
- Notoatmodjo, Soekidjo, 2003, *Prinsip-Prinsip Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Cet. ke-2, Jakarta, Rineka Cipta.
- Nasution, Prof. Dr. S. 2003, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung : Tarsito
- National Board for Professional Teaching Standards. 2002 . Five Core Propositions. NBPTS HomePage. (Accessed, 31 Oct 2002).*
- Oakley Ray and Charles Ksir, *Drugs, Society, & Human Behavior, second edition.*
- Oxford University, 2003, *Oxford Learner's Pocket Dictionary, Third Edition.* Oxford: Oxford University Press.
- Paulina G. Padmohoedjo, MA., MPH, 2003, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Apa Yang Bisa Anda lakukan?*, Yayasan Research Consultants Indonesia (Recon-Indo), Jakarta.

- Pesat Dukungan Pencegahan Lakhar BNN, 2005, *Modul Pelatihan Guru (SD, SMP, dan SMA) Sebagai fasilitator Penyuluh Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*.
- Robert R Pinger dkk, 1995, *Drugs Issues For Today, Mosby Year Book*.
- Robert J. Starratt, 2007, *Menghadirkan Pemimpin Visioner Kiat Menegaskan Peran Sekolah*, kanisius, Jakarta.
- Robbin, Stephen P. 2001, *Orgazizational Behaviour*. New Jersey: Pearson Educational International.
- Santrok, J. W. (2003), *Adolescence (Perkembangan Remaja)*, Terjemahan, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Setiono, L.H. (2002), *Beberapa Permasalahan Remaja*, Diakses dari www.e-psikologi.com pada tanggal 22 April 2006.
- Sugiyono, 2002, *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung.
- Sukmadinata, Nana. S. (2002). *Pengendalian Mutu Sekolah Menengah: Konsep, Prinsip, dan Instrumen*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Sudarwan Danim, 2002, *Inovasi Pendidikan : Dalam Upaya Meningkatkan Profesionalisme Tenaga Kependidikan*, Bandung : Pustaka Setia.
- Suyanto dan Djihad Hisyam, 2000, *Refleksi dan Reformasi Pendidikan Indonesia Memasuki Millenium III*, Yogyakarta : Adi Cita.
- Siregar, Sondang Susan, et all, 2006, *Prosedur Standar Penanganan dan Pencegahan Keterlibatan Siswa Dalam Perdagangan Narkoba di Sekolah*, Jakarta : YKAI dan ILO.
- Soemarno Soedarsono, 2002, *Character Building membentuk watak*, Elex Media Computindo, Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Sugito, M.Si, Drs, 2005, *Narkoba dan Permasalahannya*, Dinas Pendidikan Prop. DIY, Yogyakarta.
- Visimedia, 2006, *Mengenal Jenis & Efek buruk Narkoba*, Praninta Offset, Tangerang

2. Dokumen-Dokumen

- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2006, *Kamus Narkoba istilah-istilah Narkoba dan Bahaya Penyalahgunaannya*.
- , 2003, *Pedoman Terapi Pasien Ketergantungan Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya*.
- , 2006, *Hasil Penelitian Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Indonesia*, Puslitbang info BNN.
- , 2005, *Penelitian Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Indonesia, tahun 2003 dan 2004*.

- , 2006, *Comprehensive Multidisciplinary Outline (CMO) (Garis Besar Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Secara Komprehensif dan Multi disiplin)*, dialihbahasakan dan disunting khusus untuk BNN oleh Holil Soelaiman (Konsultan Ahli BNN).
- , 2003, *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Remaja*, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
- , 2005, *Modul Pelatihan Guru (SD, SMP, SMA), sebagai Fasilitator, Penyuluh, Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*.
- , 2006, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di lingkungan Pendidikan*.
- , 2006, *Kamus Narkoba, istilah-istilah narkoba dan bahaya penyalahgunaannya*.
- Direktorat IV/TP. Narkoba dan K.T-Bareskrim Polri, 2009, *Tindak Pidana Narkoba Dalam Angka dan Gambar Tahun 2004-2009*.
- Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang *Psikotropika*.
- , Nomor 22 Tahun 1997 tentang *Narkotika*.
- , Nomor 5 Tahun 1997 tentang *Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffict in Narcotic, Drugs and Psychotropic Substances 1988*.
- , Nomor 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika*.
- Jurnal Data Badan Narkotika Nasional Tahun 2008.
- Jurnal BNN *Aware and Care*, Edisi 01/2009, *Narkoba Skenario Kehancuran Indonesia*.
- , Edisi 02/2009, *Menuju Indonesia Bebas Narkoba 2015*.
- Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang *Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/ Kotamadya*.
- Keputusan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang *Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Lainnya*.
- , 2003, tentang *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Remaja*.
- , 2005, tentang *Modul Pelatihan Keluarga & Orang Tua Sebagai Fasilitator, Penyuluh, Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*.
- , 2004, tentang *Strategi Nasional P4GN Tahun 2005-2009*.
- Badan Narkotika Provinsi DIY dan Upaya Pencegahan P4GN Tahun 2008.
- BPS. *Indonesia Young Adult Reproductive Health Survey 2002-2003*, Jakarta, 2003.

Kebijakan dan Strategi BNN di bidang P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) dalam Renstra BNN 2010—2014.

Data dari *United Nations Office on Drugs and Crime (UODC)* atau Badan PBB yang menangani obat-obatan terlarang dan kejahatannya, tahun 2009.

Badan Narkotika Nasional, 2007, *Modul Pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi pelajar*.

Puslitbang Info BNN tahun 2009.

Media cetak Kompas tanggal 19 Januari tahun 2010.

Sumber Kompas tanggal 19 Januari 2010.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang *Program Pembangunan Nasional / Propenas*

-----nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia*.

3. Publikasi Elektronik

Wow.. 45 Persen Pengguna Narkoba Pelajar <<http://megapolitan.kompas.com/read/2010/06/04/15080364/>>

..... <<http://etd.eprints.ums.ac.id/4224/>>

.....<http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=65>

Refleksi hari anti narkoba sedunia <http://waspadamedan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2805>

116 metode penelitian kualitatif <<http://www.penalaran-unm.org/index.php/artikel-nalar/penelitian/>>

Peran kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan <<http://sarjoni.wordpress.com/2009/12/09/>>

Pengertian komponen pendidikan <<http://www.muniryusuf.com/search/>>

<http://sutanto.wordpress.com/2010/04/21/peranan-komite-sekolah-dalam-meningkatkan-mutu-pendidikan/>

Bab VIII Bidang Pendidikan dan Kesehatan <<http://www.mypdfsearchengine.com/>>

..... <<http://www.depdiknas.go.id/> inlink, accessed 9 Feb 2003>

Psikologi remaja karakteristik dan permasalahannya <http://netsains.com/2009/04/>

RIWAYAT HIDUP

Nama : **A.Kadarmanta**
Tempat / Tanggal Lahir : Yogyakarta, 19 Pebruari 1961
Alamat Rumah : Kompleks Selapa Polri No. 18 Rt 1/09, Pondok Pinang, Jakarta Selatan, 12310
Pekerjaan : Anggota Polri berpangkat Komisariss Besar Polisi, sebagai widyaiswara Diklat BNN
Instansi : BNN
Status : Menikah
Nama Isteri : Lidya Sri Harmini
Anak (3 orang) : 1. Yohanes Christ H. 2. Yulius Christian H. 3. Yosephine Christya Putri H.

Riwayat Pendidikan

Pendidikan Umum :

1. Sekolah Dasar, lulus tahun 1973
2. Sekolah Menengah Pertama, lulus tahun 1976.
3. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, lulus tahun 1980
4. Diploma III, lulus tahun 1983
5. Strata 1, lulus 1997

Pendidikan Kepolisian : Sekolah Perwira Polri Sumber Sarjana, tahun 1984 dan Sekolah Lanjutan perwira, tahun 1995.

Riwayat Pekerjaan :

1. Tahun 1984-1999, staf personalia di Markas Besar Polri.
2. Tahun 2000-2008, Bagian Opnal Diklat Polri (Sekolah Lanjutan Perwira Polri).
3. Tahun 2009-sekarang, Widyaiswara Diklat BNN.

Menulis Buku :

“Membangun Kultur Kepolisian,” diterbitkan pada tahun 2007; “Antisipasi Disintegrasi Negeri Ini” diterbitkan pada tahun 2008; “Pendidikan Polisi Berbasis Kompetensi” diterbitkan pada tahun 2008; “Narkoba Pembunuh Karakter Bangsa” diterbitkan pada tahun 2010; “Perpolisian Masyarakat Dalam *Trust Building*” diterbitkan tahun 2010, dan “*Just Three Words an Inspiration Book*” diterbitkan pada tahun 2010, Buku P4GN Bidang Pemberdayaan Masyarakat (anggota tim penulis), diterbitkan oleh BNN tahun 2010.

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara dengan Informan**PEDOMAN WAWANCARA DENGAN INFORMAN DALAM RANGKA PENELITIAN DENGAN JUDUL PERAN LEMBAGA PENDIDIKAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA BAGI PELAJAR SLTA DI JAKARTA BARAT****1. Kelompok Pembina fungsi, Kebijakan, dan kelembagaan.**

1.1. Pakar/Konsultan ahli BNN di bidang pencegahan penyalahgunaan narkoba Prof. Paulina G. Padmoehoedjo, dengan daftar pertanyaan sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah kondisi saat ini peran BNN sebagai *focal point* dalam pencegahan narkoba terhadap peran lembaga pendidikan dalam rangka mendukung terwujudnya peran lembaga pendidikan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi pelajar SLTA?
- b. Bagaimanakah kendala-kendala yang dihadapi dalam mewujudkan peran BNN yang diharapkan untuk mendukung peran lembaga pendidikan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi pelajar SLTA dikaitkan dengan pembentukan kader anti narkoba di lingkungan Sekolah?
- c. Apakah upaya-upaya yang perlu dilakukan oleh BNN dalam mendukung peran lembaga pendidikan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi pelajar SLTA?

1.2. Pejabat/Pakar pendidikan dari Kemendiknas (Kementerian Pendidikan Nasional) Dr. Edison Panjaitan.

- a. Bagaimanakah kondisi saat ini tentang peran Kemendiknas dalam mendukung peran lembaga pendidikan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi pelajar SLTA?
- b. Bagaimanakah kendala-kendala yang dihadapi dalam mewujudkan peran yang diharapkan dari Kemendiknas dalam mendukung peran lembaga pendidikan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi pelajar SLTA?
- c. Apakah upaya-upaya yang perlu dilakukan oleh Kemendiknas guna mewujudkan peran lembaga pendidikan dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi pelajar SLTA?

1.3. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

- a. Bagaimanakah peran Dinas Pendidikan DKI Jakarta pada saat ini terkait dengan peran lembaga pendidikan untuk mendukung terwujudnya peran lembaga pendidikan dalam upaya mencegah penyalahgunaan narkoba bagi pelajar SLTA pada saat ini?

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara dengan Informan (Lanjutan)

b. Bagaimanakah kendala-kendala yang dihadapi dalam mewujudkan peran Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang diharapkan untuk mendukung terwujudnya peran lembaga pendidikan dalam upaya mencegah penyalahgunaan narkoba bagi pelajar SLTA?

c. Apakah upaya-upaya yang perlu dilakukan Dinas pendidikan guna mendukung terwujudnya peran lembaga pendidikan dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi pelajar SLTA.

1.4. Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat.

a. Bagaimanakah kondisi kebijakan Dinas Pendidikan Menengah pada saat ini terkait dengan peran lembaga pendidikan dalam rangka mendukung terwujudnya peran lembaga pendidikan dalam upaya mencegah penyalahgunaan narkoba bagi pelajar SLTA?

b. Bagaimanakah kendala-kendala yang dihadapi dalam mewujudkan kondisi yang diharapkan dari peran lembaga pendidikan guna mencegah penyalahgunaan narkoba bagi pelajar SLTA?

c. Apakah upaya-upaya yang perlu dilakukan Dinas pendidikan guna mendukung terwujudnya peran lembaga pendidikan dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi pelajar SLTA?

2. Kepala Sekolah SLTA (sebagai pengelola sekolah) di Jakarta Barat.

a. Bagaimanakah kondisi saat ini tentang peran lembaga pendidikan guna mendukung terwujudnya peran lembaga pendidikan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi pelajar SLTA?

b. Bagaimanakah kendala-kendala yang dihadapi dalam mewujudkan kondisi yang diharapkan dari peran lembaga pendidikan dalam upaya mencegah penyalahgunaan narkoba bagi pelajar SLTA?

c. Apakah upaya-upaya yang perlu dilakukan oleh lembaga pendidikan tingkat menengah (SMA, SMK) guna mendukung terwujudnya peran lembaga pendidikan dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi pelajar SLTA?

3. Komponen Perangkat Pendidikan SLTA.

3.1. Guru Bimbingan dan Konseling (BK).

a. Bagaimanakah program-program yang dilakukan oleh Sekolah dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi pelajar SLTA pada saat ini?

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara dengan Informan (Lanjutan)

b. Bagaimanakah kendala-kendala yang dihadapi dalam mewujudkan program-program yang diharapkan dalam mendukung peran lembaga pendidikan guna mencegah penyalahgunaan narkoba bagi pelajar SLTA?

c. Upaya-upaya apakah yang perlu dilakukan oleh guru Bimbingan Konseling (BK) dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi pelajar SLTA?

3.2. Anggota Dewan Pendidikan.

a. Bagaimanakah program-program yang dilakukan oleh Sekolah dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi pelajar SLTA pada saat ini?

b. Bagaimanakah kendala-kendala yang dihadapi dalam mewujudkan peran program-program yang diharapkan dalam mendukung lembaga pendidikan guna mencegah penyalahgunaan narkoba bagi pelajar SLTA?

c. Bagaimanakah upaya-upaya yang perlu dilakukan agar peran lembaga pendidikan efektif dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi pelajar SLTA?

3.3. Anggota Komite Sekolah

a. Bagaimanakah program-program yang dilakukan oleh Sekolah dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi pelajar SLTA pada saat ini?

b. Bagaimanakah kendala-kendala yang dihadapi dalam mewujudkan peran program-program yang diharapkan dalam mendukung peran lembaga pendidikan guna mencegah penyalahgunaan narkoba bagi pelajar SLTA?

c. Bagaimanakah upaya-upaya yang perlu dilakukan agar peran lembaga pendidikan efektif dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi pelajar SLTA?

3.4. Pelajar SMA dan pelajar SMK.

a. Bagaimanakah pendapat Anda mengenai program-program Sekolah SMA/SMK dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba yang ada pada saat ini?

b. Bagaimanakah kendala-kendala yang dihadapi dalam mewujudkan peran program-program Sekolah yang diharapkan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi pelajar?

c. Menurut Anda, upaya-upaya apakah yang perlu dilakukan oleh sekolah dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi pelajar SLTA?

Lampiran 2 : Daftar Nara Sumber/Informan Dalam Penelitian

1. Dr. Edison Panjaitan, Kabag Sistem Informasi Biro Perencanaan Dan Kerjasama Luar Negeri Kemendiknas. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2011
2. Dr. Hj. Istaryatiningtias, M.Si., Kabid Standarisasi Pendidikan Dan Pendidikan Tinggi. Wawancara pada tanggal 31 Mei 2011
3. Prof. Paulina G. Padmohoedojo, Konsultan Ahli BNN Bidang Pencegahan. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2011
4. Drs. Uju Juhiwa, M.Pd. Kepala Sekolah SMK N 42 Jakarta Barat. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2011
5. Triyan Aji Saputra, Siswa Kelas Xi Smk N 42 Jakarta Barat. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2011.
6. Drs. Ratiyono M.M.Si., Kadisorda DKI Jakarta. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2011.
7. Drs. Yusen Hardiman, M.Pd., Kasi SMA Sudin Dikmen Jakarta Barat. Wawancara dilaksanakan pada Tanggal 1 Juni 2011.
8. Drs. Endang Hidayat Mpd., Kepala Sekolah SMA N 78 Jakarta Barat. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2011.
9. Mardiana, Siswa Kelas Xi – Ips B, SMA N 78. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2011.
10. Dra. Rita Helena, Guru BK SMA N 78 Jakarta Barat. Wawancara pada tanggal 6 Juni 2011.
10. David Yobel & Eri, Kelas X-9, Siswa SMAK I Penabur. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2011.
11. Satijan, M.Pd., Kepala SMAK I Penabur. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2011.
12. Novi Christina, S.Psi., Guru BK SMAK I Penabur. Wawancara pada tanggal 7 Juni 2011.
13. Dr. Margani M. Mustar, Anggota Dewan Pendidikan DKI Jakarta. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2011.
14. Drs. H. Bambang Sutomo, MBA., Ketua Forum Komite Sekolah DKI Jakarta. Wawancara dilaksanakan Tanggal 1 Juni 2011.

2. Sekolah merupakan lingkungan bebas rokok bagi semua pihak.
3. Penyebaran aliran sesat atau penyebarluasan aliran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang.
4. Propaganda politik/kampanye.
5. Shooting film dan atau sinetron tanpa seijin Pemerintah Daerah.
6. Kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan, dan perselisihan, sehingga menjadikan suasana sekolah tidak kondusif.

F. PENATAAN WIYATA MANDALA DALAM UPAYA KETAHANAN SEKOLAH

1. Ketahanan sekolah lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang bersifat preventif. Upaya represif dilakukan apabila upaya-upaya lain sekolah tidak memungkinkan.
2. Untuk menjadikan sekolah sesuai dengan tujuan dan fungsinya, perlu dilakukan penataan Wiyata Mandala di sekolah melalui langkah-langkah :
 - a. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi sesama warga sekolah untuk dapat mencegah sedini mungkin adanya kegiatan dan tindakan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar.
 - b. Melaksanakan tata tertib sekolah secara konsisten dan berkelanjutan.
 - c. Melakukan koordinasi dengan Komite sekolah dan pihak keamanan setempat untuk terselenggaranya ketahanan sekolah.
 - d. Mengadakan penyuluhan bagi orangtua dan siswa yang bermasalah
 - e. Mengadakan penyuluhan dan pembinaan kesadaran hukum bagi siswa.
 - f. Pembinaan dan pengembangan keimanan, ketaqwaan, etika bermoral Pancasila, kepribadian sopan santun dan berdisiplin.
 - g. Pengembangan logika para siswa, rajin belajar, gairah menulis, gemar membaca/ informasi/penemuan para ahli.
 - h. Mengikutsertakan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri.
 - i. Mengadakan karya wisata dalam rangka pengembangan iptek.

G. TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB KEPALA SEKOLAH DALAM HAL PELAKSANAAN WIYATA MANDALA

Kepala Sekolah sebagai pimpinan utama, bertugas dan bertanggung jawab memimpin penyelenggaraan belajar mengajar serta membina pendidik dan tenaga kependidikan serta membina hubungan kerja sama dan peran serta masyarakat. Kepala Sekolah dalam melaksanakan penataan Wiyata Mandala di sekolah, dengan melakukan kegiatan-kegiatan :

1. Melaksanakan program-program yang telah disusun bersama Komite Sekolah.
2. Menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, Komite Sekolah, tokoh masyarakat serta pihak keamanan setempat.
3. Menertibkan lingkungan sekolah baik yang berbentuk perangkat keras (sarana prasarana) dan perangkat lunak (peraturan- peraturan, tata tertib, tata upacara dan lain lain).
4. Mengadakan pertemuan baik rutin maupun insidental yang bersifat intern sekolah (kepala sekolah, pendidik, orangtua siswa, siswa).
5. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang ketahanan sekolah seperti PKS, Pramuka, PMR, Paskibraka, kesenian dan sebagainya.



Lampiran 3, Pengelompokan Hasil Penelitian Melalui Wawancara Dengan Subyek Penelitian/Informan

**PENGELOMPOKAN HASIL PENELITIAN
MELALUI WAWANCARA DENGAN SUBYEK PENELITIAN/INFORMAN**

NO	ASPEK YANG DIJAWAB	PEMILAH FUNGSI KEBIJAKAN & KELEMBAGAAN				PENGELOLA SEKOLAH		KOMPONEN PENDIDIKAN			PELAJAR
		BNN	KEMENDIKNAS	DINAS DIK DKI DAN SUDIN DIKEMEN JAKBAR	KEPALA SEKOLAH	GURU BK	DEWAN PENDIDIKAN DKI	KOMITE SEKOLAH DKI	PELAJAR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	<p>Kondisi saat ini sangat penting lembaga pendidikan dalam upaya pencegahan narkoba di lingkungan sekolah SLTA).</p> <p>Pencegahan narkoba di sekolah-sekolah masih bersifat sporadis, dengan model ceramah, penyuluhan.</p> <p>Peran BNN dalam bentuk kebijakan dan perencanaan masih belum sepenuhnya melibatkan institusi terkait. Dalam implementasi kebijakan masih berhenti pada tahap pemberian</p>	<p>Mengeluarkan Kebijakan penanganan kenakalan pelajar, yang meliputi penanganan tawuran, dan salah satunya adalah pencegahan penyalahgunaan narkoba.</p> <p>Koordinasi dengan institusi terkait (BNN, Kemenkes).</p> <p>Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah, dan juga ada kebijakan penataan wiyata mandala.</p> <p>Pada saat ini belum ada kebijakan khusus</p>	<p>Dinas Pendidikan DKI Jakarta.</p> <p>sebagai pembina fungsi meningkatkan kualitas pendidikan.</p> <p>Melakukan koordinasi dengan BNN, BNNP, kepolisian, dan Kemenkes untuk pencegahan narkoba.</p> <p>Kebijakan Dinas Pendidikan bersifat komprehensif</p> <p>Pelaksanaan pencegahan narkoba oleh Satgas.</p> <p>menerapkan sanksi yang tegas dan keras kepada penyalahguna narkoba.</p> <p>Kebijakannya lingkungan bersih dari narkoba</p>	<p>Menerapkan Manajemen berbasis sekolah dalam operasional pendidikan.</p> <p>Kepala Sekolah berperan Mengoperasikan kurikulum pendidikan.</p> <p>Menyusun tata tertib sekolah.</p> <p>Membuat kebijakan penerimaan siswa baru</p> <p>Kepala Sekolah</p>	<p>Menjadi guru pendamping pelajar dalam memecahkan masalah siswa.</p> <p>Memberikan pengaruh positif dalam menaati kedisiplinan.</p> <p>Guru BK dalam mendukung peran lembaga pendidikan guna mencegah penyalahgunaan narkoba bagi pelajar.</p> <p>Menyelenggara</p>	<p>Lembaga pendidikan memiliki peran yang strategis.</p> <p>Memberi pertimbangan kebijakan pendidikan.</p> <p>Memberi dukungan kebijakan.</p> <p>Pengawasan.</p> <p>Dewan Pendidikan dibentuk Kemendiknas No. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.</p> <p>Setiap sekolah</p>	<p>Lembaga pendidikan memiliki peran yang strategis.</p> <p>Komite Sekolah :</p> <p>Memberi pertimbangan kebijakan pendidikan.</p> <p>Memberi dukungan kebijakan.</p> <p>Melakukan Pengawasan</p> <p>membantu meningkatkan kelancaran proses pembelajaran.</p>	<p>-Siswa Telah dibekali tata tertib sekolah.</p> <p>-Program pencegahan terkandung dalam peraturan dan tata tertib sekolah.</p> <p>-Ada dalam muatan beberapa mata pelajaran seperti biologi, Agama, PKN, dan Penjaskes.</p> <p>-Pelajar telah</p>			

<p>informasi (seperti penyuluhan dan pencerangan) yang mestinya didukung pemih partisipasi sekolah, keluarga, dan masyarakat.</p> <p>-Pemberdayaan lingkungan pendidikan formal masih belum optimal mengingat dalam implementasinya berbagai belum ada evaluasi yang terukur secara periodik dan masih <i>project oriented</i> belum sampai pada <i>outcome oriented</i>.</p>	<p>mengenai pencegahan penyalahgunaan narkoba.</p> <p>-Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah sudah ada.</p> <p>-Sekolah adalah tempat yang menangani masalah pendidikan, pendewasaan perilaku dan menjadikan siswanya memiliki daya tahan yang handal.</p> <p>-Dana BOS dapat menjadi dukungan operasional sekolah termasuk pencegahan narkoba dan pembangunan fasilitas pendukung kegiatan pendidikan.</p>	<p>Suku Dinas Dikmen Jakarta Barat</p> <p>- sebagai pembina dan penyelenggara pendidikan SLTA negeri dan pembina SLTA Swasta.</p> <p>- Meningkatkan kualitas pendidikan</p> <p>- Kebijakan Ssudin Dikmen Sudin Dikmen merupakan bidang kurikulum, kesiswaan, dan manajemen serta mutasi pelajar.</p> <p>- Kebijakan di bidang mutu dan pelayanan pendidikan dengan prinsip tidak boleh ada anak usia pelajar SLTA yang tidak sekolah.</p> <p>- Kebijakan pembinaan akhlak para pelajar agar mampu membentengi diri.</p>	<p>Berperan sebagai <i>Manager, evaluator, administrator, Supervisor, dan leader</i>, pencipta iklim kerja, dan penanggung jawab penyelenggaraan pendidikan</p> <p>-Menyenggarakan penyuluhan-pencegahan narkoba kerjasama dengan institusi terkait.</p> <p>-Meningkatkan mutu hasil didik.</p> <p>-Menyelenggarakan pendidikan karakter.</p> <p>-Menjadikan sekolah sebagai wiyata mandala.</p>	<p>kan program-program hingga saat ini telah didukung oleh sekolah dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi pelajar SLTA.</p> <p>-Menjelaskan tentang dampak jenis-jenis narkoba yang ekstasi, heroin, shabu yang umum-umum di kelas.</p> <p>-Selain guru BK juga ada di mata pelajaran lain dengan cara diselip topik yang menyangkut bahaya narkoba seperti mata pelajaran PKN, olah raga.</p>	<p>memiliki kewenangan mengelola sekolahnya sejalan dengan kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah.</p> <p>-Setiap Kepala Sekolah membuat literatur sekolah yang bertujuan meningkatkan kedisiplinan siswa dalam proses pembelajaran dan pembinaan kepribadiannya.</p> <p>-Telat mengembangkan komponen pembinaan yang mencakup bidang kurikulum, kesiswaan, dan ekstrakurikuler.</p>	<p>Melakukan pembinaan perilaku siswa.</p> <p>-Membantu mencari dana bagi siswa tidak mampu.</p> <p>Melakukan penghargaan keberhasilan sekolah.</p> <p>-Membahas usulan RAPBS.</p> <p>-Komite Sekolah dibentuk.</p> <p>-Kepmendiknas No. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.</p> <p>-Komite Sekolah representasi stake holders yang ahmini, LSM, orang tua.</p> <p>-Komite Sekolah itu ada di Satuan Pendidikan.</p>	<p>berperan sebagai obyek sekali gus konteks ini mereka diberikan kesempatan untuk mengembangkan kreativitas dan aktivitas guna membentengi diri dari kenakalan pelajar.</p> <p>-Sekolah masih kurang memprioritaskan pencegahan melalui program-program khusus yang berkelanjutan.</p> <p>Sekolah perlu mengadakan seminar-seminar yang melibatkan pelajar sebagai peserta dan bekejasama dengan ahli dari luar sekolah.</p>
---	--	---	--	---	--	--	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Kondisi yang diharapkan peran lembaga pendidikan dalam pencegahan narkoba	BNN berperan lebih optimal dalam pencegahan narkoba	Adanya Peranserta aktif komponen masyarakat dan bangsa dalam mencegah narkoba	Dinas Pendidikan DKI Jakarta	Terselenggara nya pelatihan peningkatkan kualitas pendidik.	Membuat program yang cocok dengan perkembangan jiwa anak.	Peran lebih efektif di bidang :	Meningkatnya efektifitas peran Komite Sekolah dalam pencegahan narkoba bagi pelajar	-Terampil menolok narkoba.
	Adanya komunikasi, koordinasi, dan kesepakatan seluruh komponen pencegahan.	Adanya komunikasi, koordinasi, dan kesepakatan seluruh komponen pencegahan.	Kurikulum bahaya narkoba dikemas secara efektif dalam bentuk program prevention education.	- Bekejasama secara proporsional dengan pengelola sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan.	peningkatan kualitas pendidik.	Menjadi tempat pemecahan masalah siswa. Jumlah dan kualitas memadai.	Dukungan Pengawasan guna meningkatkan mutu pendidikan.	Komite Sekolah dalam pencegahan narkoba bagi pelajar	-Memiliki daya tahan kuat terhadap narkoba.
	Adanya penyusunan program pencegahan yang melibatkan seluruh institusi terkait.	Adanya penyusunan program pencegahan yang melibatkan seluruh institusi terkait.	dengan masalah tawuran antar pelajar, kejahatan narkoba maupun kejahatan lainnya untuk sebagai acuan dalam pembinaan perilaku pelajar dapat diimplementasikan lebih efektif.	- Melakukan pembinaan dan pengurusan kegiatan pendidikan luar sekolah, olah raga dan kesenian pelajar	nya pelatihan peningkatkan kualitas pendidik.	Menjadi motivator siswa.	Diharapkan dalam lembaga pendidikan guna mencegah narkoba bagi pelajar SLTA.	Adanya program-program yang diharapkan dalam mendukung peran lembaga pendidikan guna mencegah narkoba bagi pelajar.	-Adanya tata tertib yang baik.
	Terwujudnya peran BNN dalam mendukung sistem pencegahan sejak awal usia dini.	Terwujudnya peran BNN dalam mendukung sistem pencegahan sejak awal usia dini.	2. Setiap lembaga pendidikan menengah memiliki peran mengelola lembaga pendidikannya sejalan dengan kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah. Setiap Kepala Sekolah mampu mengelola secara efektif bidang kesiswaan, bidang kurikulum dan bidang ekstrakurikuler secara optimal. Diharapkan peran Kemendiknas dalam mendukung peran lembaga pendidikan dalam upaya pencegahan narkoba	- Terselenggaranya pelatihan bahaya narkoba guru-guru.	nya pelatihan peningkatkan kualitas pendidik.	Adanya program kayak dulu lagi pak dari kemeskes kerja sama dengan kemendiknas gitu terus ada program yang bruin ke sekolah.	Diharapkan dalam lembaga pendidikan guna mencegah narkoba bagi pelajar SLTA.	Adanya program-program yang diharapkan dalam mendukung peran lembaga pendidikan guna mencegah narkoba bagi pelajar.	-Adanya program yang baik antar teman dan dengan para guru.
	Bersinerginya lembaga pemerintah terkait.	Bersinerginya lembaga pemerintah terkait.	mempunyai peran mengelola lembaga pendidikannya sejalan dengan kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah. Setiap Kepala Sekolah mampu mengelola secara efektif bidang kesiswaan, bidang kurikulum dan bidang ekstrakurikuler secara optimal. Diharapkan peran Kemendiknas dalam mendukung peran lembaga pendidikan dalam upaya pencegahan narkoba	- Untuk pencegahan narkoba.	nya pelatihan peningkatkan kualitas pendidik.	Adanya program kayak dulu lagi pak dari kemeskes kerja sama dengan kemendiknas gitu terus ada program yang bruin ke sekolah.	Setiap sekolah mampu membuat lingkungan sekitarnya steril dari perbuatan kriminal dan penyimpangan baik yang berasal dari internal maupun eksternal.	Adanya program-program yang diharapkan dalam mendukung peran lembaga pendidikan guna mencegah narkoba bagi pelajar.	-Adanya program bahaya narkoba yang efektif.
	BNN lebih Meningkatkan kualitas dukungan baik materi maupun teknis yang efektif dalam pencegahan narkoba bagi pelajar SLTA. Dukungan tersebut dalam bentuk kebijakan Pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan kader anti narkoba di lingkungan	BNN lebih Meningkatkan kualitas dukungan baik materi maupun teknis yang efektif dalam pencegahan narkoba bagi pelajar SLTA. Dukungan tersebut dalam bentuk kebijakan Pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan kader anti narkoba di lingkungan	Adanya langkah-langkah edukatif	- Adanya program pencegahan narkoba.	nya pelatihan peningkatkan kualitas pendidik.	Mengadakan program kunjungan pelajar ke parti terapi rehabilitasi untuk melihat langsung dampak negatif penyalahgunaan narkoba oleh para	Setiap sekolah mampu membuat lingkungan sekitarnya steril dari perbuatan kriminal dan penyimpangan baik yang berasal dari internal maupun eksternal.	Adanya masukan dari Komite sekolah membantu memproteksi anak	-Adanya program dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi pelajar.
			Implementasi kegiatan ekstrakurikuler secara profesional dan pengawasan harus ketat. Sudin Dikmen Jakarta	- Adanya program prevention education.	nya pelatihan peningkatkan kualitas pendidik.	Mengadakan program kunjungan pelajar ke parti terapi rehabilitasi untuk melihat langsung dampak negatif penyalahgunaan narkoba oleh para	Masalah narkoba menjadi bagian penting yang harus diutamakan	Adanya masukan dari Komite sekolah membantu memproteksi anak	-Adanya Program yang dikemas secara menarik

<p>Sekolah. Salah satu sasaran bidang pemberdayaan masyarakat adalah pemberdayaan lingkungan pendidikan. BNN melakukan program penanganan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) sebagai lingkungan pendidikan formal, salah satu lingkungan yang strategis untuk melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba, lebih efektif dan baik dari sisi waktu, biaya dan tempat.</p> <p>7. Kebijakan pemberdayaan lingkungan sekolah sangat terkait dengan tugas BNN di bidang pencegahan penyalahgunaan narkoba.</p> <p>8. Lingkungan sekolah tingkat menengah (SLTA) diharapkan menurun tingkat kerawannya dampak dari implementasi pencegahan sejak usia dini tersebut.</p> <p>9. Program pemberdayaan lingkungan pendidikan</p>	<p>bagi pelajar SLTA semakin meningkat kualitasnya. Misalnya dengan adanya aturan khusus pencegahan penyalahgunaan narkoba berikut fasilitas dan dana pendukungnya.</p> <p>3. Meningkatkan kualitas komitmen seluruh institusi pemerintah terkait. Pelajar juga diberi pengetahuan tentang bahaya narkoba, penyakit AIDS. Dalam pencegahan tidak hanya dibebankan ke Kemendiknas, meski Kemendiknas sebagai yang dikedepankan di bidang peningkatan pendidikan, perlu kerja sama dengan BNN dengan kepatihan untuk memerangi narkoba. pemberian dukungan kepada lembaga pendidikan menengah (sekolah menengah).</p> <p>4. Terselenggaranya operasionalisasi dana BOS sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Daerah Siswa melaksanakan kegiatan yang bersifat membentengi diri dari bahaya narkoba dan kalau kepala sekolah masih membutuhkan dana tambahan maka dana</p>	<p>Barat.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Terselenggaranya pendidikan karakter. -Meningkatkan mutu, pelayanan, kesempatan, kebijakan tidak boleh ada siswa yang tidak mampu tidak dapat mengikuti sekolah lanjutan tingkat atas. -Terlaksananya Program kegiatan arahan untuk melakukan olah pikir, olah rasa, olah raga, dan olah hati. -Terlaksananya program Sudin Dikmen dalam bidang pembentukan mental kepribadian melalui *Program lomba MTQ pelajar SLTA. * Melakukan pembinaan kepramukaan tingkat pengak. *Menyelenggarakan latihan kepemimpinan 	<p>modulnya, dan metodenya yang telah ditetapkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tervujujnya mentalitas anak didik yang berkualitas unggul menolah narkoba. - Terselenggara Nya program <i>prevention education</i> dalam kurikulum, bahaya narkoba. - Tervujujnya modulnya, dan metodenya yang tepat. - Tercapainya hasil didik yang mampu menolah narkoba. 	<p>residen.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Kemendes dan BNN memberikan penyuluhan, seminar atau kegiatan sosialisasi kepada pelajar secara terprogram untuk seluruh Indonesia. -Adanya program dari kemendes kerja sama dengan kemendiknas tentang pencegahan narkoba dan melibatkan sekolah. 	<p>pencegahannya dengan melibatkan komponen pendidikan dan unsur terkait lainnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Sekolah sebagai Sistem yang tertutup tak ada yang boleh masuk di luar urusan pendidikan. Walau alumni harus kasih program ke sekolah bila ingin sosialisasi, kalau dari luar harus steril - sekolah sebagai Wiyata Mandala. -kepala sekolah sebagai leader berwenang dan berhak mengatur orang setidaknya 8 jam siswa aman di sekolah. 	<p>SLTA ini agar tidak menjadi penyalahguna narkoba.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Adanya insasukan yang diberikan kepada sekolah secara periodik yang bersifat membangun kualitas pendidikan. 	<p>untuk kalangan pelajar baik isi materi maupun tampilan.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Adanya program pencegahan diharapkan memperbaiki para pelajar untuk berkreatasi. -Perlu diwujudkan dalam program kreativitas seperti mengisi Majalah Dinding tentang informasi mengenai bahaya narkoba oleh para pelajar di bawah bimbingan dan arahan para guru yang berkompetensi di bidang pencegahan melalui media tersebut. -Adanya program kegiatan keagamaan misalnya ditekankan narkoba itu haram. -Adanya berbagai kegiatan sehingga para pelajar tidak
---	--	---	--	--	---	---	---

	<p>tidak lagi dilakukan secara sporadis, belum berkelanjutan, belum ada evaluasi yang terukur secara periodik dan masih project oriented belum sampai pada outcome oriented.</p>	<p>dibicarakan dengan orang tua siswa melalui Komite Sekolah dan atau Dewan Pendidikan.</p>	<p>OSIS.</p>					<p>sempat memikirkan narkoba.</p> <ul style="list-style-type: none"> --Adanya topik yang berganti-ganti dan ditampilkan di majalah dinding. --Adanya waktu orientasinya juga diberikan tentang bahaya narkoba. --Adanya kebijakan sekolah yang memprioritaskan kegiatan pencegahan narkoba melalui ekstra kurikuler. Aspirasi dari para pelajar perlu. -Terlaksananya pendidikan pencegahan narkoba oleh sesama pelajar yang terpilih menggunakan model <i>peer educator</i>
--	--	---	--------------	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<p>3.</p> <p>Upaya-upaya yang dilakukan dalam pencegahan bahaya narkoba bagi pelajar SLTA.</p> <p>Membuat dan mengimplementasikan kerjasama BNN dengan Kemendiknas tentang upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi pelajar SLTA.</p> <p>Melatih kader anti narkoba di sekolah menengah.</p> <p>Melakukan pemberdayaan masyarakat dari mencegah narkoba.</p> <p>Mendukung penerapan <i>prevention education</i>.</p> <p>BNN melakukan kerja sama dengan Kemendiknas secara jelas koordinasinya dan jelas fungsi-fungsinya.</p> <p>Memberikan penyuluhan kepada tenaga pendidik dan kependidikan.</p> <p>Menyediakan modul pencegahan narkoba bagi pelajar SLTA.</p> <p>Pemberian informasi (pengetahuan) yang cukup mengenai bahaya narkoba.</p>	<p>Menyenggarakan pertandingan olah raga dan perlombaan seni antar pelajar SLTA tingkat provinsi.</p> <p>Membangun program IT (<i>information technology</i>) untuk peningkatan pendidikan.</p> <p>Membuat MoU dengan institusi BNN dan instansi terkait untuk mencegah penyalahgunaan narkoba.</p> <p>Sudin Dikmen Jakarta Barat.</p> <p>1. Melakukan kerjasama dengan Polda Metro Jaya supaya tidak kena narkoba.</p> <p>2. Menjaga kebersihan supaya tidak terkontaminasi dengan narkoba tersebut.</p> <p>Berbagai program pencegahan mengacu kepada BNP dan BNN.</p> <p>3. Menerapkan manajemen berbasis sekolah mulai dari APBS (Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah) dari masing-masing sekolah ada usaha kesehatan sekolah yang bersih dari rokok kita</p>	<p>Membuat prosedur penanganan siswa penyalahgunaan narkoba.</p> <p>Menyediakan guru BK.</p> <p>Melakukan pembinaan intelektual dan akhlak.</p> <p>Membuat tata tertib sekolah.</p> <p>Membuat Sugas Narkoba.</p> <p>Seteriliasi sekolah dari peredaran gelap narkoba.</p> <p>Menyelenggarakan optimalisasi ekstra kurikulum.</p> <p>1. Melakukan pendidikan karakter.</p> <p>2. Mendesain kurikulum sedemikian rupa sehingga program-program pendidikan mampu membangun karakter siswa.</p> <p>3. Menanamkan kesadaran mengendalikan dan menahan diri, etika dan mentalitas.</p> <p>Kawasan sekolah bersih dari rokok kita</p>	<p>Membuat program pembinaan mental kepribadian siswa dalam bentuk:</p> <p>Kunjungan ke tempat rehabilitasi pelajar bermasalah narkoba.</p> <p>Meningkatkan kemampuan tenaga kependidikan melalui keterampilan pendampingan siswa bermasalah.</p> <p>Memahami permasalahan setiap siswanya.</p> <p>Membimbing para pelajar yang bermasalah agar tidak menjadi penyalahguna narkoba, bila terdapat pelajar penyalahgunaan narkoba merekomendasikan kepada kepala sekolah untuk</p>	<p>Membangun komitmen dan loyalitas serta kepedulian terhadap peningkatan pendidikan.</p> <p>Membangun kemitraan lembaga pendidikan dengan <i>stake holders</i> dalam meningkatkan mutu pendidikan.</p> <p>Menciptakan kondisi penyelenggaraan pendidikan bermutu, merata dan adil serta bebas dari penyalahgunaan narkoba.</p> <p>Menjadikan delapan jam memiliki nilai tambah mungkin ada satu jam tentang pemahaman bahaya narkoba.</p> <p>Dampaknya bisa lebih 24 jam.</p> <p>Dengan upaya-upaya seperti itu belum semuanya baru sedikit karena bapak yang neliti. Dimensi yang strategis, terutama bagi anak, institusi, dewasa,</p>	<p>Membangun optimalisasi peran orang tua dan masyarakat dalam pendidikan.</p> <p>Mengadakan sosialisasi kepada <i>stake holders</i> tentang program pendidikan yang sedang dikembangkan dan hambatan-hambatannya terutama ancaman bahaya narkoba.</p> <p>Melibatkan peran serta orang tua dalam mengawasi program sekolah.</p> <p>Upaya-upaya yang perlu dilakukan agar peran lembaga pendidikan efektif dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi pelajar SLTA.</p>	<p>Membina karya kreatifitas pelajar secara rutin tentang tulisan (puisi, artikel) bahaya narkoba dan dipublikasi di majalah dinding / majalah sekolah.</p> <p>Pemberlakuan <i>peer education</i> pelajar oleh sekolah.</p> <p>Menyelurkan bakat dan minat di bidang olah raga dan seni.</p> <p>Mengikuti latihan keterampilan menolak narkoba.</p> <p>Menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler.</p> <p>Pendekatan bila siswa disibukkan dengan kegiatan yang positif dan berkualitas maka mereka akan berpikir positif, sehingga tidak sempat lagi menyempang.</p> <p>Mengadakan tes urine. Program mengacu pada</p>			

<p>memberikan pendidikan hidup sehat, dan menciptakan situasi lingkungan pendidikan yang kondusif dan harmonis, yang diindikasikan perangat pendidikan (guru, karyawan, siswa) penuh kedisiplinan, kepedulian, kasih sayang, dan ketegasan.</p> <p>4 Melakukan <i>(social skill development)</i> pengembangan keterampilan sosial bagi siswa dan perangat pendidikan yang meliputi: Keterampilan menolak narkoba; Keterampilan berkomunikasi untuk hal-hal yang terkait dengan program; bimbingan dan pembelajaran agar tumbuh menjadi siswa berkepribadian luhur; Keterampilan mengatasi masalah; Keterampilan membuat keputusan yang terbaik bagi masa depan siswa yang bersangkutan; Keterampilan mengelola stress.</p> <p>5. Membentuk kader anti narkoba di</p>	<p>para guru sebagai pelatih di bidang pencegahan narkoba. Membangun modul anti narkoba, menyelenggarakan berbagai kegiatan yang cocok dengan usia pelajar SLTA.</p> <p>.Menciptakan lingkungan sekolah dan masyarakat yang bersih dari peredaran gelap narkoba.</p> <p>1. Komendiknas mengeluarkan kebijakan mengenai program penanganan kenakalan pelajar meliputi masalah tawuran antar pelajar, penyalahgunaan narkoba, dan tindak kejahatan lainnya.</p> <p>2. Kementerian Pendidikan Nasional mengadakan MoU dengan Badan tentang Pencegahan Bahaya Narkoba melalui Kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) program <i>Anti Drugs Campaign 2008 Goes to School</i>.</p> <p>4. Meningkatkan efektivitas Satgas UKS dan Satgas Anti Narkoba.</p> <p>Membangun model kurikulum yang terintegrasi dengan mata pelajaran Agama, IPA, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan yang</p>	<p>juga dilaksanakan secara nasional, kecamatan, provinsi, nasional untuk meningkatkan motivasi secara komprehensif.</p> <p>4. Membentuk satgas pencegahan narkoba di lingkungan pendidikan menengah.</p> <p>Selain itu perlu juga ditetapkan kebijakan pembentukan Satgas pencegahan penyalahgunaan narkoba yang berbasis sekolah mulai TK, SD, SMA sampai perguruan tinggi dilakukan secara kesinambungan.</p> <p>5. Mengadakan lomba kesehatan sekolah, guru-guru diberi pembimbingan kemitraan, juga diadakan lomba sekolah sehat.</p> <p>Kerjasama dengan BKKB dan BNN dalam pencegahan, di sekolah dengan model kurikulum, modul, metode, dan guru yang berkompetensi di bidang pendidikan pencegahan narkoba.</p> <p>6. Pelatihan guru-guru sebagai TOT pencegahan narkoba.</p> <p>7. Mengoperasionalkan Dana BOS untuk mendukung program UKS, pembinaan kesiswaan, dan manajemen sekolah.</p>	<p>juga punya apa namanya peer educator, tiap sekolah dipilih, ditraining untuk memberikan penyuluhan di antara siswa.</p> <p>-Melalui kegiatan ekstra kurikuler. Fungsi kegiatan ekstrakurikuler adalah untuk: .Pengembangan, kemampuan dan kreativitas peserta didik sesuai dengan potensi, bakat, dan minat mereka</p> <p>-Melakukan pendidikan karakter, kultur yang baik maka dengan mental kuat akan sangat membantu pencegahan.</p> <p>-Mendesain kurikulum sedemikian rupa sehingga program pendidikan mampu membangun karakter siswa.</p> <p>-Menanamkan kesadaran mengendalikan dan menahan diri, etika dan mentalitas.</p>	<p>mengembalikan pelajar tersebut kepada orang tuanya.</p> <p>b. Menyusun materi / kurikulum program khusus bersama dengan guru-guru yang dibuat sedemikian rupa dan menarik bukan hanya model ceramah. Seperti kunjungan jika mendampingi anak-anak untuk melihat tempat rehabilitasi. Para siswa langsung melihat contoh nyata penyalahgunaan narkoba ada yang terkena HIV Aids, ada alat tanya jawab, ada wawancara dengan penyalahguna.</p> <p>Membangun suasana yang harmonis serta kedekatan dengan para siswa guna mempermudah proses</p>	<p>anak, saya pernah ekstrim kalo udah kenal masukan kayak di Singapore ekstrim oleh pemerintah tapi yang belum kena populasinya 99% ke asal.</p> <p>-Mengoptimalkan Dewan Pendidikan melalui perannya sebagai pemberi pertimbangan (<i>advisory body</i>) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, mendukung (<i>supporting agency</i>) baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan, pengontrol (<i>controlling agency</i>) dalam rangka transparansi, akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan, mediator antara pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif) dengan</p>	<p>Kalau Komite Sekolah lebih pada action plan tak ada hierarki kalau Dewan Pendidikan ada dana APBD kalau Komite Sekolah murni swadaya stake holders.</p> <p>-Membantu Sekolah dalam memenuhi kebutuhan operasional pendidikan. Pihak sekolah untuk mengecek kebutuhan misal untuk sosialisasi bahaya narkoba dibuat RAPBS dan diteken Ka Sekolah dan Ketua Komite</p>	<p>prinsip pencegahan. Kayak kita sudah ngomong ke teman-teman sebagai peer educator, teman-teman tanda tangan di buku tentang apa yang udah kita omongin gitu. Kami sih masih baru juga jalannya.</p> <p>-Membentuk <i>peer educator</i> bagi pelajar yang memiliki kemampuan berelasi baik, berkarakter baik guna menjadi pendidik bahaya narkoba bagi teman-temannya. Bisa dilakukan melalui kegiatan ekstra, siswa bisa berpikir positif jadi siswa disibukkan dengan kegiatan-kegiatan itu. Saya pernah waktu itu mengadakan seminar tentang pergaulan bebas akan mudah</p>
--	--	---	---	--	--	---	--

<p>lingkungan pendidikan menengah dengan melibatkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dengan materi, metode, dan dukungan sarana yang tepat serta proporsional.</p>	<p>terukur dan terstruktur. Memberdayakan lembaga pendidikan juga memberdayakan lingkungan. Memberikan pelatihan para guru sebagai pelatih di bidang pencegahan narkoba. Pemberian pelatihan kepada para guru Bimbingan dan Konseling tentang wawasan yang cukup untuk mampu mendeteksi gejala-gejala apa sekolah-sekolah mendapatkan bantuan fasilitas-fasilitas untuk mencegah narkoba. seperti lomba cerdas cermat tentang bahaya narkoba. 10. Menciptakan lingkungan sekolah dan masyarakat yang bersih dari peredaran gelap narkoba.</p>	<p>pengecahan bahaya narkoba harus melekat dalam pembinaan kesiswaan. UPAYA SUDIN DIKEMEN 1. pembinaan pelajar melalui pendekatan olah pikir, olah rasa, olah raga, dan olah hati 2. Menyelenggarakan Program lomba MTQ pelajar SLTA Melakukan pembinaan kepramukaan tingkat pegagag dengan 3. Menyelenggarakan latihan kepemimpinan OSIS siswa 4. Menyelenggarakan kegiatan pelatihan jurnalistik, untuk</p>	<p>pembimbingan bisa para pelajar mengalami masalah. -Menyelenggarakan seminar tentang narkoba yang dikemas dalam materi masalah remaja. e-Merekomendasi pelajar yang berkualitas unggul kepada kepala sekolah untuk membentuk duta pelajar sebagai <i>peer educator</i> bagi temannya.</p>	<p>masyarakat.</p>	<p>menjadi pecandu narkoba. -BNN mengadakan seminar-seminar, lomba-lomba yang memperingati hari anti narkoba dunia.</p>
<p>Peran lembaga..., A. Kadarmanta, Pascasarjana UI, 2011</p>					



DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN TINGGI
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN TINGGI
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 520.1 /2007
TENTANG
PENATAAN WIYATA MANDALA DI SMA/SMK
DALAM LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN TINGGI
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; Menimbang :

- a. bahwa sekolah merupakan lingkungan atau kawasan tempat penyelenggaraan pendidikan (Wiyata Mandala), sehingga sekolah tidak diperbolehkan digunakan untuk tujuan-tujuan diluar tujuan pendidikan;
- b. bahwa Provinsi DKI Jakarta dengan kepadatan penduduknya, status yang disandangnya dan permasalahan yang cukup kompleks terdapat potensi terjadinya gejolak sosial sehingga akan menimbulkan terganggunya ketertiban dan keamanan sekolah;
- c. bahwa agar sekolah tetap dapat berfungsi sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan yang bebas dari pengaruh dan kondisi yang menjurus kearah terganggunya usaha-usaha dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan sekolah di SMA/SMK Provinsi DKI Jakarta, perlu melaksanakan penataan Wiyata Mandala dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Provinsi DKI Jakarta.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
5. Keputusan Gubernur Kepala daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1259 Tahun 1990 tentang penyempurnaan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1109 Tahun 1986 tentang Badan Pembina Ketahanan Sekolah DKI Jakarta.
6. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 21 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Provinsi DKI Jakarta;
7. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 95 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja SMK;
8. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 96 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja SMA;
9. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 59 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Komite Sekolah pada Sekolah di Provinsi DKI Jakarta;
10. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 4153 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Provinsi DKI Jakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Penataan Wiyata Mandala di SMA/SMK dalam Lingkungan Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEDUA : Penataan Wiyata Mandala di SMA/SMK sebagaimana tersebut pada diktum pertama, beserta lampirannya pada keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

KETIGA : Ruang lingkup penataan Wiyata Mandala sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini, untuk dijadikan acuan sebagai ketahanan sekolah bagi para penyelenggara satuan pendidikan SMA dan SMK di Provinsi DKI Jakarta.

KEEMPAT: Segala ketentuan tentang Wiyata Mandala yang ada sebelumnya, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Oktober 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN

TINGGI PROVINSI DKI JAKARTA

H. MARGANI M. MUSTAR

NIP. 470 026 943

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Bapeda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Bawasda Provinsi DKI Jakarta
6. Walikotamadya/Bupati Kab. Adm. di Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Suku Dinas Dikmenti Kotamadya Provinsi DKI Jakarta
8. Ketua Dewan Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
9. Para Ketua Dewan Pendidikan Kotamadya Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala SMA/SMK Negeri Provinsi DKI Jakarta
11. Para Ketua Komite Sekolah SMA/SMK Negeri Provinsi DKI Jakarta

Lampiran: Keputusan Kepala Dinas Dikmenti Provinsi DKI Jakarta

Nomor : 520.1/2007

Tanggal : 30 Oktober 2007

PENATAAN WIYATA MANDALA DI SMA/SMK
DALAM LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN TINGGI
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

A. LATAR BELAKANG

Salah satu tujuan negara republik Indonesia sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender.

Pembangunan pendidikan nasional didasarkan pada paradigma membangun manusia Indonesia seutuhnya, yang berfungsi sebagai subyek yang memiliki kapasitas untuk mengaktualisasikan potensi dan dimensi kemanusiaan secara optimal. Dimensi kemanusiaan itu mencakup tiga hal paling mendasar, yaitu (1) afektif yang tercermin pada kualitas keimanan, ketaqwaan, akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur serta kepribadian unggul, dan kompetensi estetik; (2) kognitif yang tercermin pada kapasitas pikir dan daya intelektualitas untuk menggali dan mengembangkan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi; dan (3) psikomotorik yang tercermin pada kemampuan mengembangkan keterampilan teknis, kecakapan praktis, dan kompetensi kinetis.

Selain itu, pembangunan pendidikan nasional juga diarahkan untuk membangun karakter dan wawasan kebangsaan bagi peserta didik, yang menjadi landasan penting bagi upaya memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Penyelenggaraan layanan pendidikan diarahkan selain untuk menumbuhkembangkan potensi dan bakat peserta didik juga dapat menjawab tantangan berupa pemberian kesempatan yang seluas- luasnya bagi masyarakat untuk mengikuti pendidikan yang setinggi-tingginya dalam suatu layanan pendidikan yang bermutu tinggi. Untuk itu pendidikan harus terus menerus melakukan adaptasi dan penyesuaian dengan gerak perkembangan ilmu pengetahuan modern dan inovasi teknologi maju, sehingga tetap relevan dan kontekstual dengan perubahan zaman.

Tugas pendidikan yaitu untuk menyiapkan peserta didik agar dapat mencapai peradaban yang maju melalui perwujudan suasana belajar yang kondusif, aktivitas pembelajaran yang menarik dan mencerdaskan, serta proses pendidikan yang kreatif dengan memperhatikan perubahan- perubahan sosial budaya yang bergerak cepat. Sekolah sebagai penyelenggara pendidikan merupakan tempat pendidik mengajar dan peserta didik belajar

berlaku suatu tata kehidupan yang mengatur tata hubungan peserta didik dan lingkungan belajarnya. Sebagai suatu masyarakat belajar, sekolah merupakan pusat nilai-nilai yang disepakati sebagai nilai yang terpuji, dikehendaki, berguna serta perlu dipelihara sebagai panutan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

1 Siswa SMA/SMK sebagai kelompok masyarakat usia muda memiliki idealisme tinggi dan semangat dinamis yang apabila tidak diarahkan dengan baik dapat menjurus ke hal-hal yang negatif. Pada kondisi tersebut siswa SMA/SMK dapat menjadi sasaran pemanfaatan dan sasaran pembinaan oleh unsur-unsur tertentu dalam rangka menciptakan situasi yang menguntungkan mereka, dengan demikian sekolah akan dihadapkan pada sejumlah ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar.

Gangguan yang terjadi dalam lingkungan sekolah dapat mempengaruhi ketenangan proses belajar mengajar, menurunkan citra peserta didik dan citra sekolah, sehingga diperlukan adanya penataan kembali wawasan Wiyata Mandala untuk adanya ketahanan sekolah dalam mewujudkan suasana belajar yang kondusif pada SMA/SMK di Provinsi DKI Jakarta.

B. PENGERTIAN

Yang dimaksud dalam pedoman ini dengan

1. Dinas adalah Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Suku Dinas adalah Suku Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Kotamadya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Kepala Suku Dinas adalah Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Kotamadya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekolah adalah Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan di lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah Menengah Atas atau Kepala Sekolah Menengah Kejuruan di lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Peserta Didik adalah peserta didik SMA/SMK yang melaksanakan proses pembelajaran dalam rangka mengembangkan diri melalui sekolah.

8. Wawasan Wiyata Mandala adalah wawasan mengenai sekolah sebagai lingkungan pendidikan.

9. Ketahanan Sekolah adalah upaya pencegahan, antisipasi, dan penanggulangan terhadap perbuatan negatif baik dari pihak dalam maupun pihak luar sekolah yang dapat mengakibatkan bahaya yang bersifat kriminalitas, narkoba, pornografi dan kekerasan di lingkungan sekolah, serta menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban, dan keamanan sekolah.

C. TUJUAN

Tujuan penataan Wiyata Mandala di SMA/SMK dalam lingkungan Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Provinsi DKI Jakarta :

1. Agar warga sekolah (kepala sekolah, pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik) dan stakeholders yang terkait dan bertanggungjawab pada bidang pendidikan dapat bersinergi dalam menyamakan cara pandang terhadap fungsi sekolah.
2. Menjadi acuan dalam pengaturan keamanan sekolah untuk menghindari adanya gangguan baik yang datang dari dalam maupun dari luar sekolah.

D. PRINSIP SEKOLAH

Sekolah sebagai Wiyata Mandala selain harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya, juga harus mencegah masuknya paham sikap dan perbuatan yang secara sadar ataupun tidak dapat menimbulkan pertentangan antara sesama karena perbedaan suku, agama, asal/usul/keturunan, tingkat sosial ekonomi serta perbedaan paham politik. Sekolah tidak boleh hidup menyendiri melepaskan diri dari tantangan sosial budaya dalam masyarakat tempat sekolah itu berada. Sekolah juga menjadi suri teladan bagi kehidupan masyarakat sekitarnya, serta mampu mencegah masuknya sikap dan perbuatan yang akan menimbulkan pertentangan. Untuk itu sekolah memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Sekolah sebagai wadah/lembaga yang memberikan bekal hidup. Dalam hal ini sekolah seharusnya bukan hanya sekedar lembaga yang mencetak para intelektual muda namun lebih dari itu sekolah harus menjadi rumah kedua yang memberikan pelayanan dan pengalaman tentang hidup, mulai dari berorganisasi, bermasyarakat (bersosialisasi), pendidikan lingkungan hidup (PLH) atau bahkan pengalaman hidup yang sesungguhnya.
2. Sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar dibawah bimbingan pendidik. Bimbingan lebih dari sekedar pengajaran. Dalam bimbingan peran pendidik berubah dari seorang pendidik menjadi seorang orangtua bahkan menjadi seorang kakak.

3. Sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil/merata bagi *stakeholdernya*.

Hal tersebut bisa berupa pemerataan kesempatan mendapatkan transfer of knowledge, maupun transfer of experience, dengan tanpa membedakan baik dari segi kemampuan ekonomi, kemampuan intelegensi, dan juga kemampuan fisik (gagasan sekolah inklusi).

4. Sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Prinsip ini sejalan dengan teori multiple intelligence (Howard Gardner) yang memandang bahwa kecerdasan intelektual bukanlah satu-satunya yang perlu diperhatikan oleh lembaga pendidikan, terutama sekolah.

Kemampuan bersosialisasi, kemampuan kinestik, kemampuan seni dan kemampuan-kemampuan lainnya juga perlu diperhatikan secara seimbang.

5. Sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar intelegensi. Peningkatan kemampuan intelektual, emosional maupun kemampuan-kemampuan lainnya mendapat perhatian yang seimbang.

6. Sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi, kemampuan bekejasama dalam kelompok, dan lain-lain.

7. Sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. Sikap sederhana, jujur, terbuka, penuh toleransi, rela berkomunikasi dan berinteraksi, ramah tamah dan bersahabat, cinta negara, cinta lingkungan, siap bantu membantu khususnya kepada yang kurang beruntung merupakan sikap dan watak yang perlu dibentuk di dalam lingkungan sekolah.

8. Sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. Di dalam dunia yang berubah begitu cepat, salah satu kompetensi dasar yang harus dimiliki tiap peserta didik adalah kompetensi dasar: belajar secara mandiri. Dengan proses pendewasaan yang diberikan di sekolah, pendidik tidak lagi perlu menjejali pemikiran peserta didik dengan perintah. Lebih dari itu peserta didik akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar ketika ia mencari dan mendapatkan apa yang ia butuhkan untuk hidupnya.

9. Sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar (*learning society*). Sekolah bukan hanya sebagai tempat pembelajaran bagi peserta didik, namun juga seharusnya sekolah mampu menjadi pusat pembelajaran bagi masyarakat di lingkungan sekitar.

E. PENGGUNAAN SEKOLAH

Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan yang diperuntukan sebagai tempat proses kegiatan belajar mengajar, tidak diperbolehkan dijadikan sebagai tempat :

1. Ajang promosi /penjualan produk-produk perniagaan yang tidak berhubungan dengan pendidikan.

2. Sekolah merupakan lingkungan bebas rokok bagi semua pihak.
3. Penyebaran aliran sesat atau penyebarluasan aliran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang.
4. Propaganda politik/kampanye.
5. Shooting film dan atau sinetron tanpa seijin Pemerintah Daerah.
6. Kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan, dan perselisihan, sehingga menjadikan suasana sekolah tidak kondusif.

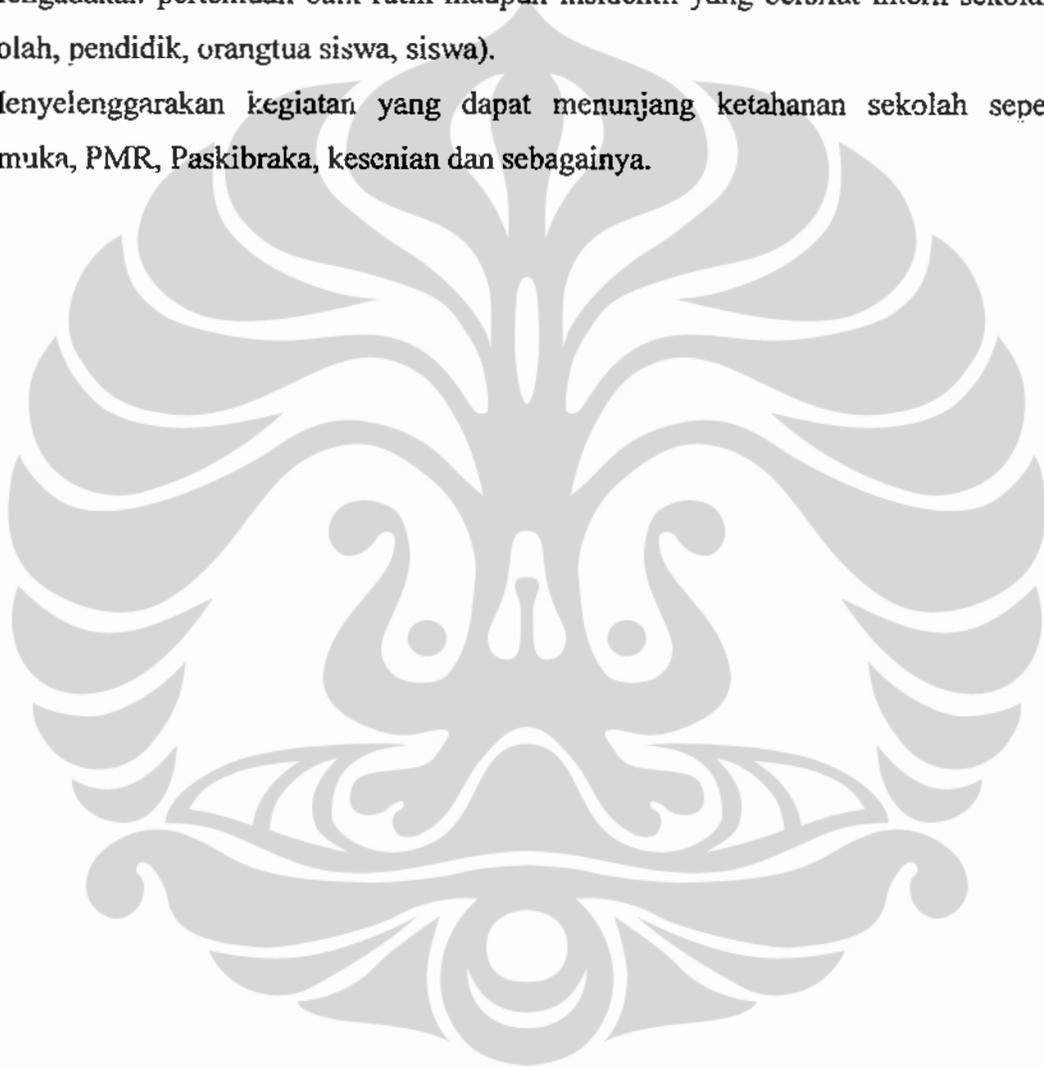
F. PENATAAN WIYATA MANDALA DALAM UPAYA KETAHANAN SEKOLAH

1. Ketahanan sekolah lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang bersifat preventif. Upaya represif dilakukan apabila upaya-upaya lain sekolah tidak memungkinkan.
2. Untuk menjadikan sekolah sesuai dengan tujuan dan fungsinya, perlu dilakukan penataan Wiyata Mandala di sekolah melalui langkah-langkah :
 - a. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi sesama warga sekolah untuk dapat mencegah sedini mungkin adanya kegiatan dan tindakan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar.
 - b. Melaksanakan tata tertib sekolah secara konsisten dan berkelanjutan.
 - c. Melakukan koordinasi dengan Komite sekolah dan pihak keamanan setempat untuk terselenggaranya ketahanan sekolah.
 - d. Mengadakan penyuluhan bagi orangtua dan siswa yang bermasalah
 - e. Mengadakan penyuluhan dan pembinaan kesadaran hukum bagi siswa.
 - f. Pembinaan dan pengembangan keimanan, ketaqwaan, etika bermoral Pancasila, kepribadian sopan santun dan berdisiplin.
 - g. Pengembangan logika para siswa, rajin belajar, gairah menulis, gemar membaca/ informasi/penemuan para ahli.
 - h. Mengikutsertakan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri.
 - i. Mengadakan karya wisata dalam rangka pengembangan iptek.

G. TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB KEPALA SEKOLAH DALAM HAL PELAKSANAAN WIYATA MANDALA

Kepala Sekolah sebagai pimpinan utama, bertugas dan bertanggung jawab memimpin penyelenggaraan belajar mengajar serta membina pendidik dan tenaga kependidikan serta membina hubungan kerja sama dan peran serta masyarakat. Kepala Sekolah dalam melaksanakan penataan Wiyata Mandala di sekolah dengan melakukan kegiatan-kegiatan :

1. Melaksanakan program-program yang telah disusun bersama Komite Sekolah.
2. Menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, Komite Sekolah, tokoh masyarakat serta pihak keamanan setempat.
3. Menertibkan lingkungan sekolah baik yang berbentuk perangkat keras (sarana prasarana) dan perangkat lunak (peraturan- peraturan, tata tertib, tata upacara dan lain lain).
4. Mengadakan pertemuan baik rutin maupun insidental yang bersifat intern sekolah (kepala sekolah, pendidik, orangtua siswa, siswa).
5. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang ketahanan sekolah seperti PKS, Pramuka, PMR, Paskibraka, kesenian dan sebagainya.



Lampiran 5. Model Distribusi Nilai-Nilai Utama ke Dalam Mata Pelajaran Dalam Pendidikan karakter

**Model Distribusi Nilai-Nilai Utama ke Dalam Mata Pelajaran¹
Dalam Pendidikan karakter**

Mata Pelajaran	Nilai Utama
1. Pendidikan Agama	Religius, jujur, santun, disiplin, bertanggung jawab, cinta ilmu, ingin tahu, percaya diri, menghargai keberagaman, patuh pada aturan social, bergaya hidup sehat, sadar akan hak dan kewajiban, kerja keras, peduli
2. PKn	Nasionalis, patuh pada aturan sosial, demokratis, jujur, menghargai keragaman, sadar akan hak dan kewajiban diri dan orang lain
3. Bahasa Indonesia	Berpikir logis, kritis, kreatif dan inovatif, percaya diri, bertanggung jawab, ingin tahu, santun, nasionalis
4. IPS	Nasionalis, menghargai keberagaman, Berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif, peduli social dan lingkungan, berjiwa wirausaha, jujur, kerja keras
5. IPA	ingin tahu, berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif, jujur, bergaya hidup sehat, percaya diri, menghargai keberagaman, disiplin, mandiri, bertanggung jawab, peduli lingkungan, cinta ilmu
6. Bahasa Inggris	Menghargai keberagaman, santun, percaya diri, mandiri, bekerjasama, patuh pada aturan sosial
7. Seni Budaya	Menghargai keberagaman, nasionalis, dan menghargai karya orang lain, ingin tahu, jujur, disiplin, demokratis
8. Penjasorkes	Bergaya hidup sehat, kerja keras, disiplin, jujur, percaya diri, mandiri, menghargai karya dan prestasi orang lain
9. TIK/Keterampilan	Berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif, mandiri, bertanggung jawab, dan menghargai karya orang lain

¹. <http://katresna72.wordpress.com/2010/11/04/panduan-pend-karakter-di-smp/>



UNIVERSITAS INDONESIA PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI PENGAJIAN KETAHANAN NASIONAL
KONSENTRASI KAJIAN STRATEJIK PENANGANAN NARKOBA
JL. SALEMBA RAYA 4 JAKARTA 10430

TELP. (021) 3910448, (021) 70717620, 3100059 PES - 18, FAX. (021) 3910448

Nomor : /H2.F13.KKN-PN/PDP.04.02/2011
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Wawancara

Jakarta, 13 Mei 2011

Kepada Yth, Dr. Hj. Istaryatiningtias, M.Si.,
Kabid Standarisasi Pendidikan Dan Pendidikan Tinggi.

di Jakarta

Dengan hormat,

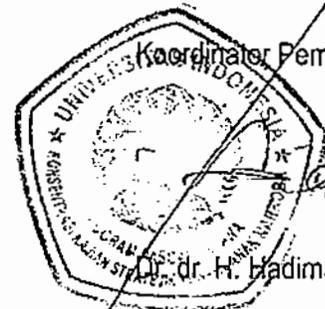
Berkenaan dengan Kegiatan Akademik Program Pascasarjana Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Peminatan Kajian Stratejik Penanganan Narkoba Universitas Indonesia bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional, mahasiswa kami bermaksud untuk memperoleh data dan wawancara tentang "Peran Lembaga Pendidikan Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pelajar SLTA Di Jakarta Barat".

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak agar dapat kiranya memberikan ijin kepada :

Nama : A. Kadamanta

NPM : 0906505376

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.



Koordinator Peminatan

Dr. dr. H. Hadiman, SH., MSc.





UNIVERSITAS INDONESIA PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI PENGKAJIAN KETAHANAN NASIONAL
KONSENTRASI KAJIAN STRATEJIK PENANGANAN NARKOBA

JL. SALEMBA RAYA 4 JAKARTA 10430

TELP. (021) 3910448, (021) 70717620, 3100059 PES - 18, FAX. (021) 3910448

Nomor : 566k/H2.F13.KKN-PN/PDP.04.02/2011
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Wawancara

Jakarta, 13 Mei 2011

Kepada Yth, Drs. Uju Juhiwa, M.Pd.
Kepala Sekolah SMK N 42 Jakarta Barat.

di Jakarta

Dengan hormat,

Berkenaan dengan Kegiatan Akademik Program Pascasarjana Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Peminatan Kajian Stratejik Penanganan Narkoba Universitas Indonesia bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional, mahasiswa kami bermaksud untuk memperoleh data dan wawancara tentang "Peran Lembaga Pendidikan Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pelajar SLTA Di Jakarta Barat".

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak agar dapat kiranya memberikan ijin kepada :

Nama : A. Kadamanta

NPM : 0906505376

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.



dr. H. Hadiman, SH., MSc.



UNIVERSITAS INDONESIA PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI PENGKAJIAN KETAHANAN NASIONAL
KONSENTRASI KAJIAN STRATEJIK PENANGANAN NARKOBA
JL. SALEMBA RAYA 4 JAKARTA 10430

TELP. (021) 3910448, (021) 70717620, 3100059 PES - 18, FAX. (021) 3910448

Nomor : 5661 /H2.F13.KKN-PN/PDP.04.02/2011
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Wawancara

Jakarta, 13 Mei 2011

Kepada Yth, Triyan Aji Saputra,
Siswa Kelas Xi Smk N 42 Jakarta Barat.

di Jakarta

Dengan hormat,

Berkenaan dengan Kegiatan Akademik Program Pascasarjana Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Peminatan Kajian Stratejik Penanganan Narkoba Universitas Indonesia bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional, mahasiswa kami bermaksud untuk memperoleh data dan wawancara tentang "Peran Lembaga Pendidikan Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pelajar SLTA Di Jakarta Barat".

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak agar dapat kiranya memberikan ijin kepada :

Nama : A. Kadarmanta

NPM : 0906505376

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.



Koordinator Peminatan

Dr. dr. H. Hadiman, SH., MSc.



UNIVERSITAS INDONESIA PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI PENGKAJIAN KETAHANAN NASIONAL
KONSENTRASI KAJIAN STRATEJIK PENANGANAN NARKOBA
JL. SALEMBA RAYA 4 JAKARTA 10430

TELP. (021) 3910448, (021) 70717620, 3100059 PES - 18, FAX. (021) 3910448

Nomor : 566/H2.F13.KKN-PN/PDP.04.02/2011
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Wawancara

Jakarta, 13 Mei 2011

Kepada Yth, Drs. Ratiyono M.M.Si.,
Kadisorda DKI Jakarta.

di Jakarta

Dengan hormat,

Berkenaan dengan Kegiatan Akademik Program Pascasarjana Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Peminatan Kajian Stratejik Penanganan Narkoba Universitas Indonesia bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional, mahasiswa kami bermaksud untuk memperoleh data dan wawancara tentang "Peran Lembaga Pendidikan Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pelajar SLTA Di Jakarta Barat".

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak agar dapat kiranya memberikan ijin kepada :

Nama : A. Kadarmanta

NPM : 0906505376

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.



Koordinator Peminatan

Drs. H. Hadiman, SH., MSc.



UNIVERSITAS INDONESIA PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI PENGKAJIAN KETAHANAN NASIONAL
KONSENTRASI KAJIAN STRATEGIK PENANGANAN NARKOBA
JL. SALEMBA RAYA 4 JAKARTA 10430

TELP. (021) 3910448, (021) 70717620, 3100059 PES - 18, FAX. (021) 3910448

Nomor : 566g/H2.F13.KKN-FN/PDP.04.02/2011
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Wawancara

Jakarta, 13 Mei 2011

Kepada Yth, Drs. Yusen Hardiman, M.Pd.,
Kasi SMA Sudin Dikmen Jakarta Barat.

di Jakarta

Dengan hormat,

Berkenaan dengan Kegiatan Akademik Program Pascasarjana Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Peminatan Kajian Strategik Penanganan Narkoba Universitas Indonesia bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional, mahasiswa kami bermaksud untuk memperoleh data dan wawancara tentang "Peran Lembaga Pendidikan Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pelajar SLTA Di Jakarta Barat".

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak agar dapat kiranya memberikan ijin kepada :

Nama : A. Kadarmanta

NPM : 0906505376

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.



Koordinator Peminatan

Dr. H. Hardiman, SH., MSc.



UNIVERSITAS INDONESIA PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI PENGKAJIAN KETAHANAN NASIONAL
KONSENTRASI KAJIAN STRATEGIK PENANGANAN NARKOBA
JL. SALEMBA RAYA 4 JAKARTA 10430

TELP. (021) 3910448, (021) 70717620, 3100059 PES - 18, FAX. (021) 3910448

Nomor : 5664/H2.F13.KKN-PN/PDP.04.02/2011
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Wawancara

Jakarta, 13 Mei 2011

Kepada Yth, Drs. Endang Hidayat Mpd.,
Kepala Sekolah SMA N 78 Jakarta Barat.

di Jakarta

Dengan hormat,

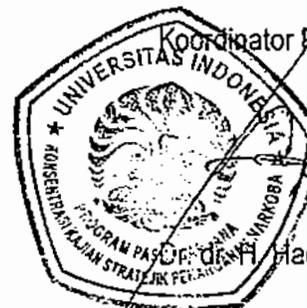
Berkenaan dengan Kegiatan Akademik Program Pascasarjana Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Peminatan Kajian Strategik Penanganan Narkoba Universitas Indonesia bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional, mahasiswa kami bermaksud untuk memperoleh data dan wawancara tentang "Peran Lembaga Pendidikan Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pelajar SLTA Di Jakarta Barat".

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak agar dapat kiranya memberikan ijin kepada :

Nama : A. Kadarman

NPM : 0906505376

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.



Koordinator Peminatan

dr. H. Hadiman, SH., MSc.



UNIVERSITAS INDONESIA PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI PENGKAJIAN KETAHANAN NASIONAL
KONSENTRASI KAJIAN STRATEGIK PENANGANAN NARKOBA
JL. SALEMBA RAYA 4 JAKARTA 10430

TELP. (021) 3910448, (021) 70717620, 3100059 PES - 18, FAX. (021) 3910448

Nomor : 566 e/1i2.F13.KKN-PN/PDP.04.02/2011
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Wawancara

Jakarta, 13 Mei 2011

Kepada Yth, **Mardiana,**
Siswa Kelas Xi – Ips B, SMA N 78.

di Jakarta

Dengan hormat,

Berkenaan dengan Kegiatan Akademik Program Pascasarjana Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Peminatan Kajian Strategik Penanganan Narkoba Universitas Indonesia bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional, mahasiswa kami bermaksud untuk memperoleh data dan wawancara tentang “Peran Lembaga Pendidikan Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pelajar SLTA Di Jakarta Barat”.

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak agar dapat kiranya memberikan ijin kepada :

Nama : A. Kadarmanta

NPM : 0906505376

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.



Koordinator Peminatan

Dr. H. Hadiman, SH., MSc.



UNIVERSITAS INDONESIA PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI PENGKAJIAN KETAHANAN NASIONAL
KONSENTRASI KAJIAN STRATEGIK PENANGANAN NARKOBA

JL. SALEMBA RAYA 4 JAKARTA 10430

TELP. (021) 3910448, (021) 70717620, 3100059 PES - 18, FAX. (021) 3910448

Nomor : 566d/H2.F13.KKN-PN/PDP.04.02/2011
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Wawancara

Jakarta, 13 Mei 2011

Kepada Yth, Dra. Rita Helena,
Guru BK SMA N 78 Jakarta Barat.

di Jakarta

Dengan hormat,

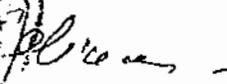
Berkean dengan Kegiatan Akademik Program Pascasarjana Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Peminatan Kajian Strategik Penanganan Narkoba Universitas Indonesia bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional, mahasiswa kami bermaksud untuk memperoleh data dan wawancara tentang "Peran Lembaga Pendidikan Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pelajar SLTA Di Jakarta Barat".

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak agar dapat kiranya memberikan ijin kepada :

Nama : A. Kadamanta

NPM : 0906505376

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Koordinator Peminatan

dr. H. Hadiman, SH., MSc.



UNIVERSITAS INDONESIA PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI PENGKAJIAN KETAHANAN NASIONAL
KONSENTRASI KAJIAN STRATEGIK PENANGANAN NARKOBA

JL. SALEMBA RAYA 4-JAKARTA 10430

TELP. (021) 3910448, (021) 70717620, 3100059 PES - 18, FAX. (021) 3910448

Nomor : 566 c /H2.F13.KKN-PN/PDP.04.02/2011
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Wawancara

Jakarta, 13 Mei 2011

Kepada Yth, David Yobel
Kelas X-9, Siswa SMAK I Perabur.

di Jakarta

Dengan hormat,

Berkenaan dengan Kegiatan Akademik Program Pascasarjana Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Peminatan Kajian Strategik Penanganan Narkoba Universitas Indonesia bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional, mahasiswa kami bermaksud untuk memperoleh data dan wawancara tentang "Peran Lembaga Pendidikan Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pelajar SLTA Di Jakarta Barat".

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak agar dapat kiranya memberikan ijin kepada :

Nama : A. Kadamanta

NPM : 0906505376

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.



Koordinator Peminatan

Dr. H. Hadiman, SH., MSc.



UNIVERSITAS INDONESIA PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI PENGKAJIAN KETAHANAN NASIONAL
KONSENTRASI KAJIAN STRATEGIK PENANGANAN NARKOBA

JL. SALEMBA RAYA 4 JAKARTA 10430

TELP. (021) 3910448, (021) 70717620, 3100059 PES - 18, FAX. (021) 3910448

Nomor : 566 b/H2.F13.KKN-PN/PDP.04.02/2011
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Wawancara

Jakarta, 13 Mei 2011

Kepada Yth, Satijan, M.Pd.,
Kepala SMAK I Penabur.

di Jakarta

Dengan hormat,

Berkenaan dengan Kegiatan Akademik Program Pascasarjana Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Peminatan Kajian Strategik Penanganan Narkoba Universitas Indonesia bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional, mahasiswa kami bermaksud untuk memperoleh data dan wawancara tentang "Peran Lembaga Pendidikan Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pelajar SLTA Di Jakarta Barat".

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak agar dapat kiranya memberikan ijin kepada :

Nama : A. Kadarmanita

NPM : 0906505376

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.



Koordinator Peminatan

Dr. dr. A. Hadiman, SH., MSc.



UNIVERSITAS INDONESIA PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI PENGKAJIAN KETAHANAN NASIONAL
KONSENTRASI KAJIAN STRATEGIK PENANGANAN NARKOBA

JL. SALEMBA RAYA 4 JAKARTA 10430

TELP. (021) 3910448, (021) 70717620, 3100059 PES - 18, FAX. (021) 3910448

Nomor : 566e /H2.F13.KKN-PN/PDP.04.02/2011
Lampiran :-
Perihal : Permohonan Ijin Wawancara

Jakarta, 13 Mei 2011

Kepada Yth, Novi Christina, S.Psi.,
Guru BK SMAK I Penabur

di Jakarta

Dengan hormat,

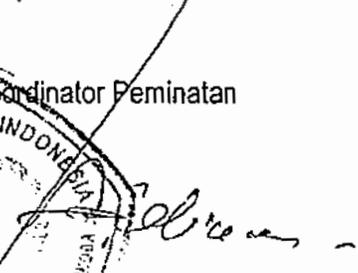
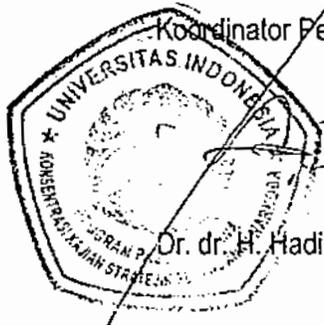
Berkenaan dengan Kegiatan Akademik Program Pascasarjana Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Peminatan Kajian Strategik Penanganan Narkoba Universitas Indonesia bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional, mahasiswa kami bermaksud untuk memperoleh data dan wawancara tentang "Peran Lembaga Pendidikan Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pelajar SLTA Di Jakarta Barat".

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak agar dapat kiranya memberikan ijin kepada :

Nama : A. Kadamanta

NPM : 0906505376

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Koordinator Peminatan

Dr. dr. H. Hadiman, SH., MSc.




UNIVERSITAS INDONESIA PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI PENGKAJIAN KETAHANAN NASIONAL
KONSENTRASI KAJIAN STRATEGIK PENANGANAN NARKOBA
JL. SALEMBA RAYA 4 JAKARTA 10430

TELP. (021) 3910448, (021) 70717620, 3100059 PES - 18, FAX. (021) 3910448

Nomor : /H2.F13.KKN-PN/PDP.04.02/2011
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Wawancara

Jakarta, 13 Mei 2011

Kepada Yth, Drs. H. Bambang Sutomo, MBA.,
Ketua Forum Komite Sekolah DKI Jakarta.

di Jakarta

Dengan hormat,

Berkenaan dengan Kegiatan Akademik Program Pascasarjana Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Peminatan Kajian Strategik Penanganan Narkoba Universitas Indonesia bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional, mahasiswa kami bermaksud untuk memperoleh data dan wawancara tentang "Peran Lembaga Pendidikan Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pelajar SLTA Di Jakarta Barat".

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak agar dapat kiranya memberikan ijin kepada :

Nama : A. Kadarmanita

NPM : 0906505376

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.



Koordinator Peminatan

Dr. dr. H. Hadiman, SH., MSc.



UNIVERSITAS INDONESIA PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI PENGKAJIAN KETAHANAN NASIONAL
KONSENTRASI KAJIAN STRATEJIK PENANGANAN NARKOBA

JL. SALEMBA RAYA 4 JAKARTA 10430

TELP. (021) 3910448, (021) 70717620, 3100059 PES - 18, FAX. (021) 3910448

Nomor : /H2.F13.KKN-PN/PDP.04.02/2011
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Wawancara

Jakarta, 13 Mei 2011

Kepada Yth, Dr. Margani M. Mustar,
Anggota Dewan Pendidikan DKI Jakarta.

di Jakarta

Dengan hormat,

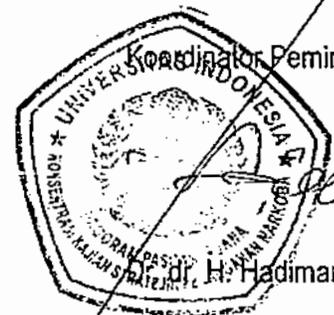
Berkenaan dengan Kegiatan Akademik Program Pascasarjana Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Peminatan Kajian Stratejik Penanganan Narkoba Universitas Indonesia bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional, mahasiswa kami bermaksud untuk memperoleh data dan wawancara tentang "Peran Lembaga Pendidikan Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pelajar SLTA Di Jakarta Barat".

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak agar dapat kiranya memberikan ijin kepada :

Nama : A. Kadamanta

NPM : 0906505376

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.



Koordinator Peminatan

dr. H. Hadiman, SH., MSc.



UNIVERSITAS INDONESIA PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI PENGKAJIAN KETAHANAN NASIONAL
KONSENTRASI KAJIAN STRATEJIK PENANGANAN NARKOBA
JL. SALEMBA RAYA 4 JAKARTA 10430

TELP. (021) 3910448, (021) 70717620, 3100059 PES - 18, FAX. (021) 3910448

Nomor : 564/H2.F13.KKN-PN/PDP.04.02/2011
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Jakarta, 13 Mei 2011

Kepada Yth,
Ibu Paulina G. Padmohoedoyo, MA.,Mpd
di Jakarta

Dengan hormat,

Berkenaan dengan Kegiatan Akademik Program Pascasarjana Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Peminatan Kajian Stratejik Penanganan Narkoba Universitas Indonesia bekerjasama dengan Badan Narkolika Nasional, mahasiswa kami bermaksud untuk memperoleh data dan wawancara tentang "Peran Lembaga Pendidikan Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pelajar SLTA Di Jakarta Barat".

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Ibu agar dapat kiranya memberikan ijin kepada :

Nama : A. Kadarmanta

NPM : 0906505376

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.



Koordinator Peminatan

Dr. H. Hadiman, SH., MSc.



UNIVERSITAS INDONESIA PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI PENGKAJIAN KETAHANAN NASIONAL
KONSENTRASI KAJIAN STRATEJIK PENANGANAN NARKOBA

JL. SALEMBA RAYA 4 JAKARTA 10430

TELP. (021) 3910448, (021) 70717620, 3100059 PES - 18, FAX. (021) 3910448

Nomor : 567/H2.F13.KKN-PN/PDP.04.02/2011
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Wawancara

Jakarta, 13 Mei 2011

Kepada Yth,
Dr. Edison Panjaitan
Pakar dari Kemendiknas
di Jakarta

Dengan hormat,

Berkenaan dengan Kegiatan Akademik Program Pascasarjana Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Peminatan Kajian Stratejik Penanganan Narkoba Universitas Indonesia bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional, mahasiswa kami bermaksud untuk memperoleh data dan wawancara tentang "Peran Lembaga Pendidikan Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pelajar SLTA Di Jakarta Barat".

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak agar dapat kiranya memberikan ijin kepada :

Nama : A. Kadarmanita

NPM : 0906505376

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.



Koordinator Peminatan

Dr. Dedy Madiman, SH., MSc.



UNIVERSITAS INDONESIA PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI PENGKAJIAN KETAHANAN NASIONAL
KONSENTRASI KAJIAN STRATEJIK PENANGANAN NARKOBA
JL. SALEMBA RAYA 4 JAKARTA 10430

TELP. (021) 3910448, (021) 70717620, 3100059 PES - 18, FAX. (021) 3910448

Nomor : 562/H2.F13.KKN-PN/PDP.04.02/2011
Lampiran : -
Perihal : Permohonan ijin Penelitian

Jakarta, 13 Mei 2011

Kepada Yth,
Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta
di Jakarta

Dengan hormat,

Berkenaan dengan Kegiatan Akademik Program Pascasarjana Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Peminatan Kajian Stratejik Penanganan Narkoba Universitas Indonesia bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional, mahasiswa kami bermaksud untuk memperoleh data dan wawancara tentang "Peran Lembaga Pendidikan Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pelajar SLTA Di Jakarta Barat".

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak agar dapat kiranya memberikan ijin kepada :

Nama : A. Kadarmanta
NPM : 0906505376

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.



Koordinator Peminatan

Hadiman, SH., MSc.

